



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 2025



KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2025



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 2025

Sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025

INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 2025

PENULIS

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

PENYUNTING

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

PEMBUAT KOVER

Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

PENERBIT

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
Jalan Permata No.1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur

TAHUN TERBIT

2025

KOTA TEMPAT TERBIT

Jakarta

SUMBER ILUSTRASI

canva.com

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

TIM PENYUSUN

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

Pelindung

Wihaji

Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Pengarah

Bonivasius Prasetya Ichtiarto

Penanggung Jawab

Martin Suanta

Reviewer

Faharuddin

Penyunting

Aas Tejasmara

Nina Herlina

Pengolah Data

Aas Tejasmara

Agus Supardi

Anistyas Hayanti

Muthiatun Nuriah

Nina Herlina

Pingkan Awalia

Puti Rani Aisyah



Penulis Naskah

*Aas Tejasmara
Afifah Puspita Damayanti
Agus Supardi
Aliya Faiqoh Zain
Anistyas Hayanti
Endah Larasati
Erita Agustin Hardiyanti
Maureen Angelica Leomongga
Meta Arfasari
Muthiatun Nuriah
Niken Arumsari
Nina Herlina
Nurina Indah Kemalasari
Pingkan Awalia
Puti Rani Aisyah
Putri Adelia Bungsu
Renatyas Fajar Christanto
Ria Rahayu
Titik Puspa Dewi
Yusna Afrilda*

Desainer Sampul

*Maureen Angelica Leomongga
Putri Adelia Bungsu*

Desainer Tata Letak

Vizcardine Audinovic

Pembimbing Teknis

Zainul Hidayat





SAMBUTAN

Bonivasius Prasetya Ichtarto
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Konsep pembangunan berwawasan kependudukan menekankan bahwa pembangunan harus menempatkan penduduk sebagai fokus utama (people – centered development). Dengan demikian, penduduk bukan hanya merupakan objek, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana dimensi kependudukan telah terintegrasi dalam pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Komponen dasar penyusunan IPBK berupa dimensi. Dimensi dimaksud terdiri atas Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan.

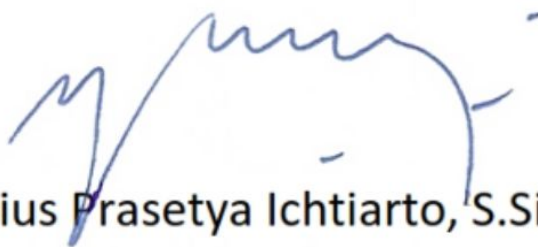
Pada tahun 2025 dilakukan reformulasi IPBK sekaitan dengan fungsi IPBK sebagai alat evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dalam hal ini, IPBK akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan melalui PJPK. PJPK sendiri merupakan dokumen yang disusun sebagai operasionalisasi implementasi jangka menengah (5 tahunan) dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan, yang menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang (20 tahunan) Indonesia. Kelima dimensi penyusun IPBK tidak diubah. Perubahan dilakukan terutama pada penyesuaian antara sebagian besar indikator IPBK dengan indikator – indikator PJPK.

Publikasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025 menyajikan hasil penghitungan IPBK dan status Pembangunan Berwawasan Kependudukan (status PBK) tahun 2025 pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Untuk itu publikasi ini menjadi bagian penting dari

upaya menggambarkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di seluruh Indonesia. Data IPBK dan status PBK dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis, pemantauan dan evaluasi, serta perumusan rekomendasi kebijakan dalam pembangunan kependudukan. Dengan demikian, data IPBK dapat menjadi bagian dari fondasi data strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia melalui pemanfaatan bonus demografi, penguatan kualitas keluarga, dan penyiapan masyarakat untuk menghadapi era penuaan penduduk dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Saya berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga di tingkat nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akademisi, dan mitra pembangunan, agar dapat menjadikan publikasi ini sebagai salah satu rujukan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan oleh lintas sektor yang sinergis. Mari bersama – sama kita bangun manusia

Jakarta, Desember 2025
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk



Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng

KATA PENGANTAR

Martin Suanta

Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk



Kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya-lah publikasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Publikasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman mengenai dinamika kependudukan. Selain itu, adanya publikasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025 ini akan dapat menjadi bentuk kontribusi untuk memastikan bahwa aspek kependudukan senantiasa menjadi arus utama dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

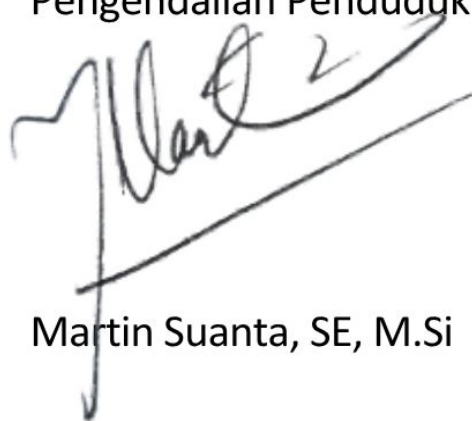
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan (PBK) sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia. Dengan kata lain, IPBK membantu menggambarkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. Publikasi ini menyajikan hasil penghitungan IPBK dan status PBK tahun 2025 pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Hasil penghitungan IPBK dan status PBK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk menyusun analisis kondisi PBK di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; melaksanakan pemantauan dan evaluasi PBK; dan/atau c. merumuskan rekomendasi kebijakan. Singkatnya, IPBK dapat digunakan dalam perumusan kebijakan serta strategi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, dengan penyelarasan indikator – indikator IPBK dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), IPBK juga diusulkan untuk dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Kerja sama antara tim penyusun, pakar, instansi mitra, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan IPBK tahun 2025, mulai dari perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data telah memungkinkan publikasi ini tersusun secara komprehensif.

Melalui konsep IPBK sebagai elaborasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka, peningkatan capaian IPBK diarahkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan manusia. Karena itu, besar harapan kami bahwa publikasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025 ini akan dapat memberikan manfaat nyata bagi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Semoga publikasi ini dapat menjadi rujukan strategis bagi penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang, sekaligus menjadi langkah penting menuju pembangunan yang semakin berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan potensi dan dinamika kependudukan Indonesia.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Pemaduan Kebijakan
Pengendalian Penduduk

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Suanta', is written over a horizontal line.

Martin Suanta, SE, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF



Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas manusia di Indonesia. Prinsip kebijakan population - responsive dan population - influencing yang terdapat dalam pembangunan berwawasan kependudukan menggambarkan tantangan dalam pembangunan kependudukan di Indonesia untuk dapat memberikan masukan yang tepat dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan di masa depan. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan suatu alat ukur untuk mengukur bagaimana perkembangan PBK, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seiring dengan perkembangan pembangunan kependudukan yang diimplimentasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029, maka IPBK mengalami transformasi agar dapat secara relevan mengukur proses pembangunan kependudukan sesuai dengan program pembangunan kependudukan yang ada.

Hasil penghitungan IPBK tahun 2025 tingkat nasional adalah 63,7 (skala 1-100). Dengan nilai IPBK tersebut, maka, status PBK Indonesia adalah Menengah Atas. Jika dibandingkan dengan target IPBK pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029, di mana untuk tahun 2025 target IPBK adalah 63,5, maka, pencapaian IPBK tahun 2025 sudah berhasil melampaui target dengan pencapaian sebesar 100,3 persen.

Jika dilihat menurut dimensi, capaian tertinggi terdapat dalam Dimensi Keberlanjutan (76,8), diikuti Dimensi Partisipasi (76,6), Dimensi Kesetaraan (67,3), Dimensi Holistik Integratif (53,0), dan Dimensi Inklusivitas (49,8). Data tersebut menunjukkan bahwa Dimensi Partisipasi dan Dimensi Keberlanjutan memiliki capaian yang sudah cukup tinggi. Sebaliknya, dimensi yang memiliki nilai paling rendah adalah Dimensi Inklusivitas dan Dimensi Holistik Integratif. Fakta ini menunjukkan bahwa

RINGKASAN EKSEKUTIF



arah pembangunan berwawasan kependudukan perlu diperkuat pada kedua dimensi. Sementara itu, dimensi-dimensi yang sudah memiliki capaian yang cukup tinggi harus dipertahankan.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa IPBK tahun 2025 memiliki korelasi yang kuat dan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 0,879. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan nilai IPBK, maka, nilai IPM akan cenderung mengalami peningkatan juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Disparitas nilai IPBK antarwilayah di Indonesia masih tergolong lebar. Pada tingkat provinsi, nilai IPBK berkisar antara yang terendah 35,9 di Provinsi Papua Tengah hingga yang tertinggi 77,0 di Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain itu, capaian separuh provinsi masih berada di bawah capaian nasional karena tercatat 22 dari 38 provinsi yang memiliki nilai IPBK di bawah nilai nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kesenjangan serupa juga terlihat. Kabupaten Badung di Provinsi Bali mencatat nilai IPBK tertinggi, yaitu 85,2, sedangkan nilai terendah terdapat di Kabupaten Mappi (Provinsi Papua Selatan) dan Kabupaten Dogiyai (Provinsi Papua Tengah), masing-masing dengan nilai 30,3. Besarnya disparitas ini menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk menurunkan disparitas tersebut sehingga kualitas pembangunan berwawasan kependudukan dapat meningkat secara lebih inklusif dan berkeadilan di masa mendatang. Setiap pemerintah daerah hendaknya dapat memanfaatkan hasil penghitungan IPBK untuk melakukan analisis agar dapat mengidentifikasi dimensi mana yang masih lemah, kemudian mengarahkan kebijakan pembangunan kependudukan untuk menguatkan sektor-sektor yang memiliki indikator-indikator penyusun dimensi yang masih lemah. Jika upaya ini dilaksanakan secara bersama-sama dan secara sinergis oleh para pemangku kepentingan, maka, kita dapat berharap bahwa di masa depan disparitas ini akan berkurang.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Rekomendasi utama untuk pembangunan berwawasan kependudukan adalah penguatan kebijakan yang berorientasi pada manusia (people-centered development) yang berbasis data yang faktual. Integrasi aspek kependudukan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan perlu diprioritaskan agar proses pembangunan yang dilaksanakan selaras dengan dinamika demografis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan pendidikan dan kesehatan, pengembangan pekerjaan berkualitas, serta perlindungan sosial yang kuat. Selain itu, karena IPBK diharapkan dapat dijadikan alat ukur pelaksanaan PJPk, maka, IPBK diharapkan dapat memandu pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, holistik integratif, inklusif, dan mengedepankan kesetaraan. Dengan demikian, pembangunan berwawasan kependudukan akan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk (manusia) karena “pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan” (BPS, 2015).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Dasar Hukum	5
BAB II INOVASI DALAM REFORMULASI INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN	9
2.1. Kerangka Konseptual	9
2.2. Dimensi.....	12
2.3 Alur Pembentukan IPBK Reformulasi.....	17
2.3.1 Mengapa Reformulasi IPBK Perlu Dilakukan?.....	17
2.3.2 Apa Saja yang Berubah?	21
2.3.3 Bagaimana Dampak Perubahan Tersebut?	26
2.4 Indikator	29
2.5 Pemanfaatan.....	48
BAB III METODE PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN	53
3.1. Definisi Operasional dan Arah Indikator	53
3.2. Standardisasi Nilai Indikator	56

3.3. Rumus Penghitungan.....	58
3.4. Sumber Data Indikator.....	62
3.5. Kendala dan Keterbatasan Data Indikator.....	64
3.6. Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan.....	65
BAB IV KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN INDONESIA/NASIONAL TAHUN 2025.....	69
4.1. Capaian IPBK dan Status PBK 2025	69
4.2. Capaian IPBK 2025 Menurut Dimensi	70
4.3. Capaian IPBK 2025 Jika Dibandingkan dengan Target Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2025-2029	72
4.4. Korelasi Capaian IPBK 2025 dengan IPM 2024	73
BAB V KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN PROVINSI TAHUN 2025.....	81
5.1. Distribusi Data Indikator IPBK Provinsi 2025	81
5.2. Capaian IPBK Provinsi 2025	83
5.3. Status PBK Provinsi 2025	84
5.4. Capaian IPBK Provinsi 2025 Menurut Dimensi	86
BAB VI KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025	95
6.1. Distribusi Data Indikator IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025	95
6.2 Status PBK Kabupaten/Kota 2025 Secara Nasional.....	97
6.3. Disparitas Capaian IPBK Kabupaten/Kota 2025 Secara Nasional	99
6.4 Disparitas Capaian IPBK 2025 Tingkat Kabupaten/Kota Menurut Provinsi.....	100
BAB VII PROFIL KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DI 38 PROVINSI TAHUN 2025	107
BAB VIII PENUTUP	149
8.1 Kesimpulan	149

8.2 Rekomendasi	152
DAFTAR PUSTAKA	157
Lampiran 1 Hasil Penghitungan dan Data Indikator IPBK Nasional/Indonesia Tahun 2025	163
Lampiran 2	165
Hasil Penghitungan Indeks Dimensi dan IPBK Provinsi Tahun 2025.....	165
Lampiran 3	167
Hasil Penghitungan dan Data Indikator IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025	167
Menurut Provinsi.....	167
Lampiran 4	264
Catatan Teknis: Langkah-langkah Penghitungan IPBK 2025.....	264
Lampiran 5	272
Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan..	272
Lampiran 6	275
Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025	275

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Pembangunan Berwawasan Kependudukan.....	9
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual Pembentukan IPBK Elaborasi Dari dan Bekontribusi Terhadap IPM	12
Gambar 2. 3 Kerangka Alur Pembentukan IPBK Hasil Pengembangan Tahun 2022	21
Gambar 2. 4 Kerangka Alur Pembentukan IPBK Reformulasi Tahun 2025	22
Gambar 4. 1 Capaian Indeks Dimensi IPBK Indonesia 2025.....	70
Gambar 4. 2 Korelasi IPBK 2024 dengan IPM 2023	76
Gambar 5. 1 Capaian IPBK Provinsi 2025.....	84
Gambar 5. 2 Status PBK 38 Provinsi di Indonesia, 2025	85
Gambar 5. 3 Nilai IPBK dan Status PBK Provinsi di Indonesia, 2025	85
Gambar 5. 4 Indeks Partisipasi Menurut Provinsi 2025	87
Gambar 5. 5 Indeks Keberlanjutan Menurut Provinsi 2025	88
Gambar 5. 6 Indeks Inklusivitas Menurut Provinsi 2025	89
Gambar 5. 7 Indeks Holistik Integratif Menurut Provinsi 2025.....	90
Gambar 5. 8 Indeks Kesetaraan Menurut Provinsi 2025	91
Gambar 6. 1 Status PBK Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	98
Gambar 6. 2 Disparitas Nilai IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025 Menurut Provinsi.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan indikator lama dan indikator reformulasi	22
Tabel 2. 2 Perbandingan IPBK sebelum dan sesudah reformulasi,2025.....	28
Tabel 2. 3 Perbandingan IPBK sebelum dan sesudah reformulasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah	28
Tabel 3. 1 Dimensi, Indikator, Definisi Operasional, dan Arah Indikator dalam Penyusunan IPBK 2025	53
Tabel 3. 2 Nilai Minimal dan Maksimal yang Digunakan dalam Standardisasi Nilai Indikator IPBK 2025	57
Tabel 3. 3 Sumber Data Indikator IPBK 2025	63
Tabel 3. 4 Klasifikasi Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan	65
Tabel 4. 1 Target Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029 dan Capaian IPBK tahun 2025.....	72
Tabel 4. 2 Capaian IPM Indonesia Tahun 2021-2025	74
Tabel 4. 3 Data IPBK 2024 dan IPM 2025 Menurut Provinsi.....	75
Tabel 5. 1 Distribusi Data Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Provinsi Tahun 2025	81
Tabel 6. 1 Distribusi Data Indikator IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	95
Tabel 6. 2 Disparitas Capaian IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	99
Tabel 6. 3 Nilai IPBK Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah Menurut Provinsi 2025...	100



BAB I

PENDAHULUAN

**“Pembangunan
berkelanjutan lahir
dari kebijakan
berwawasan
kependudukan.”**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan mendefinisikan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagai indeks komposit yang merepresentasikan dimensi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia. IPBK telah dikembangkan oleh BKKBN sejak tahun 2011, dibentuk dari lima dimensi dengan 33 indikator. Kelima dimensi tersebut terdiri atas Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Pemihakan, Dimensi Integrasi, dan Dimensi Kesenjangan.

Untuk menjaga kesinambungan IPBK dan menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan kependudukan global, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pengembangan kerangka konseptual dan metodologi IPBK. Kerangka konseptual IPBK dielaborasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memiliki keterkaitan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan akan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Lima dimensi pembentuk IPBK dipertahankan, namun, dua di antaranya diubah sehingga menjadi Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan (Alimoeso, 2022, dalam BKKBN, 2024). Sementara itu, hasil pengembangan metodologi mengubah jumlah indikator, standarisasi nilai indikator, serta rumus penghitungan indeks komposit dimensi dan indeks komposit IPBK. Jumlah indikator dari sebelumnya 33 indikator berkurang menjadi 20 indikator.

Saat ini, situasi kependudukan di Indonesia telah memasuki fase yang semakin dinamis, ditandai oleh perubahan struktur umur penduduk, peningkatan umur harapan hidup (UHH), pergeseran pola fertilitas, dan tuntutan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk memastikan bahwa pembangunan kependudukan yang dilaksanakan sejalan dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) (dalam proses revisi menjadi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045) sebagai arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 sebagai penjabaran dan operasionalisasi implementasi DBPK jangka menengah, dibutuhkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja antartingkatan wilayah dan lintas sektor.

Seiring dengan adanya kebutuhan akan alat evaluasi pelaksanaan PJPK, maka, pada tahun 2025 ini IPBK telah direformulasi. Reformulasi IPBK yang dilakukan terutama untuk memastikan agar indikator-indikator yang digunakan mampu menggambarkan secara selaras dan tepat antara pelaksanaan PJPK dan tingkat keberhasilan dalam mengintegrasikan kependudukan ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Indikator-indikator penyusun IPBK disusun kembali agar selaras dengan indikator-indikator PJPK. Sejalan dengan itu, dilakukan penyesuaian nilai minimal dan nilai maksimal untuk digunakan dalam standardisasi nilai indikator. Sementara itu, kelima dimensi pembentuk IPBK dipertahankan. Hasil reformulasi IPBK tersusun dari 5 dimensi dengan 17 indikator.

Hasil penghitungan IPBK dinyatakan tanpa satuan dalam skala 0-100. Nilai IPBK bermakna positif, berarti semakin tinggi nilai IPBK, semakin baik kondisi pembangunan berwawasan kependudukan. Status PBK diklasifikasikan ke dalam 5 status berdasarkan capaian nilai IPBK mulai dari status tertinggi hingga terendah yang terdiri atas Sangat Tinggi (rentang nilai IPBK>80), Tinggi (69-80), Menengah Atas (60-68), Menengah Bawah (50-59), dan Rendah (<50).

Kedudukan IPBK semakin penting karena IPBK merupakan salah satu dari 3 Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025–2029. Artinya, IPBK menjadi tolok ukur langsung keberhasilan Kemendukbangga/BKKBN dalam mengawal kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga secara nasional. Dengan demikian, diharapkan IPBK 2025 dapat menjadi motor akselerasi pelaksanaan PJPB dan memperkuat komitmen pembangunan berwawasan kependudukan menuju Indonesia yang lebih partisipatif, berkelanjutan, holistik integratif, inklusif, dan mengedepankan kesetaraan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Publikasi IPBK 2025 disusun sebagai publikasi kegiatan statistik Kompilasi Data Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan tahun 2025 yang telah dilakukan. Publikasi IPBK 2025 bertujuan untuk menyajikan data indikator dan hasil penghitungan IPBK, serta status PBK tahun 2025 di tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Selain itu, publikasi IPBK 2025 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan strategis bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, dan publik.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi IPBK 2025 membahas kerangka konseptual dan metode penghitungan IPBK, analisis deskriptif kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, serta profil pembangunan berwawasan kependudukan di 38 provinsi.

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- b. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- c. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
- g. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan; dan
- j. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025.

BAB II
INOVASI DALAM
REFORMULASI IPBK

**“Penduduk
adalah aset
bukan angka”**



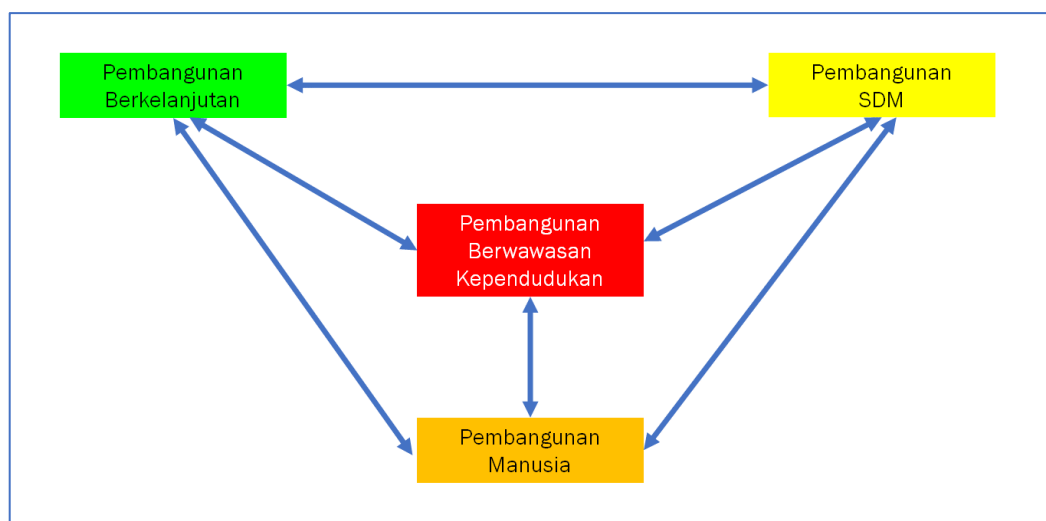
BAB II

INOVASI DALAM REFORMULASI INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

2.1. Kerangka Konseptual

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pembangunan berwawasan kependudukan merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Amanat tersebut menekankan pentingnya penduduk sebagai pusat dari pembangunan dan memastikan kebijakan kependudukan terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) yang dikembangkan BKKBN sejak tahun 2011 didasari oleh tiga konsep pembangunan, yaitu pembangunan berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan manusia. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah ini, keempat konsep tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan terpadu. PBK berada di tengah proses pembangunan dan juga menjadi salah satu syarat untuk mencapai pembangunan manusia.



GAMBAR 2. 1 KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Sumber: Sukamdi, et al., 2014

Selanjutnya, dikembangkan alat ukur PBK berdasarkan kerangka konseptual di atas dengan nama Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). IPBK ini memiliki 5 (lima) dimensi sebagai komponen penyusunnya. Adapun kelima dimensi dimaksud meliputi:

1. Dimensi Partisipasi, yang mencerminkan prinsip penduduk sebagai pelaku pembangunan
2. Dimensi Keberlanjutan, yang berasal dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan
3. Dimensi Pemihakan, yang merupakan interpretasi dari prinsip bahwa penduduk adalah objek/sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan tiga elemen dasar, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
4. Dimensi Integrasi, yang merefleksikan prinsip bahwa data kependudukan merupakan fondasi penting dalam perencanaan kependudukan dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan secara keseluruhan
5. Dimensi Kesetaraan, yang mencerminkan prinsip bahwa pembangunan kependudukan harus menekankan kesetaraan dalam hal kepentingan antara laki-laki dan perempuan.

Karena dikembangkan dalam era Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), tentu saja kerangka konseptual IPBK tersebut mempertimbangkan aspek – aspek pencapaian MDGs. Namun, dalam 1 (satu) dasawarsa sejak IPBK pertama kali dikembangkan, telah terjadi perubahan lingkungan strategis, termasuk agenda pembangunan di tingkat global dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mulai diterapkan sejak tahun 2015. Maka dari itu, sangat penting untuk memperkuat kerangka konseptual IPBK agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

PBK merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan penduduk bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dan pusat perencanaan, pelaksana, sekaligus penerima manfaat pembangunan. Konsep

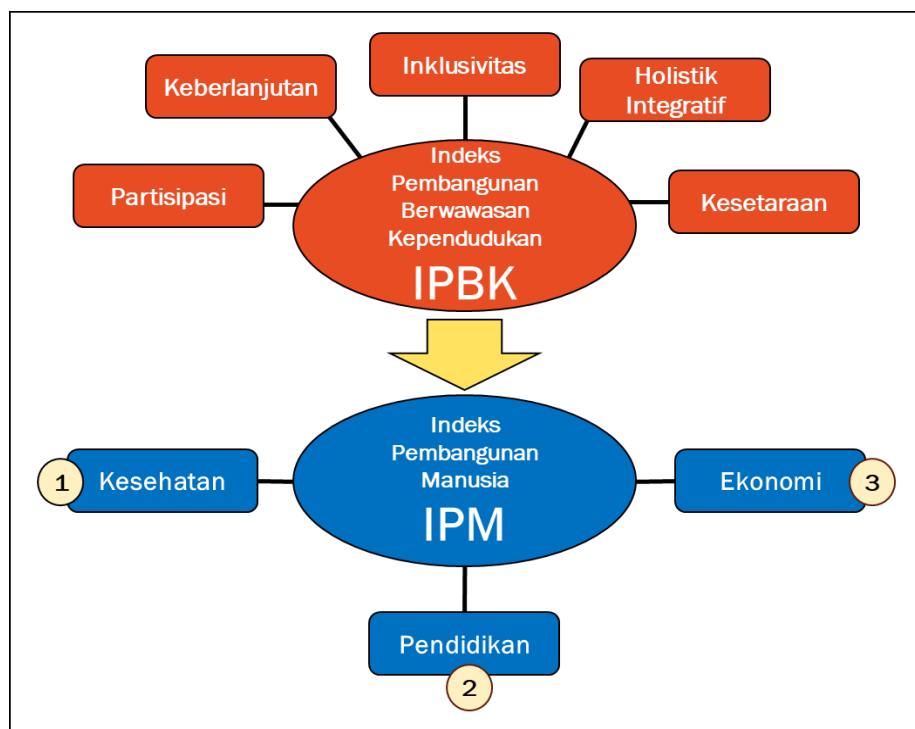
ini berpijak pada prinsip *people – centered development*, di mana penduduk menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, baik terkait jumlah, struktur, persebaran, kualitas, maupun dinamika perilaku sosialnya.

PBK merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas manusia di Indonesia. Upaya dan semangat dalam mewujudkan PBK perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota karena memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan saat ini. Prinsip *population – responsive* dan *population – influencing* yang terdapat dalam PBK mampu menggambarkan tantangan dalam pembangunan kependudukan di Indonesia sekaligus memberikan masukan yang tepat dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan di masa depan.

Kemudian pada tahun 2022 IPBK dikembangkan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di setiap wilayah di Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. IPBK menjadi indeks komposit yang merepresentasikan dimensi PBK sebagai alat ukur dalam memahami kondisi PBK di Indonesia. Karena itu, IPBK diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta pengendalian penduduk antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah dimensi penyusun IPBK dipertahankan tetap lima dimensi. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kelanjutan IPBK dan menyesuaikannya dengan perkembangan pembangunan kependudukan di Indonesia. Namun, dua di antara 5 (lima) dimensi, yakni Dimensi Pemihakan dan Dimensi Integrasi, diubah karena dinilai sudah tidak sesuai. Dengan demikian, kelima dimensi penyusun IPBK menjadi Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan (Sudibyo, 2022; BKKBN, 2022a).

Kerangka konseptual IPBK yang telah dikembangkan ini merupakan hasil elaborasi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Dalam konsep pembangunan manusia, ada tiga aspek utama yang ditekankan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu, dimensi dan indikator IPBK seyogianya mencerminkan proses pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kerangka konseptual pembentukan IPBK yang merupakan elaborasi dari IPM dan berkontribusi terhadap peningkatan IPM diilustrasikan dalam Gambar 2.2 di bawah ini.



GAMBAR 2.2 KERANGKA KONSEPTUAL PEMBENTUKAN IPBK ELABORASI DARI DAN BERKONTRIBUSI TERHADAP IPM

Sumber: Alimoeso, 2022; BKKBN, 2022a

2.2. Dimensi

Kelima dimensi dalam indeks IPBK memiliki peran yang sama pentingnya. Karena itu, dimensi – dimensi pembentuk IPBK harus tumbuh bersama, tidak boleh ada dimensi yang tertinggal atau tidak diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Tanpa partisipasi yang maksimal, pembangunan yang berwawasan kependudukan tidak akan berjalan baik atau

berkelanjutan. Selain itu, jika pembangunan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat, hanya sebagian kecil orang yang memiliki modal besar yang akan mendapat manfaat, sementara masyarakat miskin hanya menjadi penonton. Dalam situasi seperti ini, keberlanjutan juga sulit tercapai. Berikut penjelasan masing – masing dimensi penyusun IPBK.

A. Dimensi Partisipasi

Dimensi Partisipasi merupakan aspek pembangunan berwawasan kependudukan yang menitikberatkan pada partisipasi dan pelibatan penduduk dalam proses pembangunan sehingga penduduk menjadi subjek (pelaku) pembangunan sekaligus sebagai objek (sasaran) pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting. Penduduk bukan hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam prosesnya. Semangat gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia selaras dengan prinsip partisipasi ini. Partisipasi ini juga menunjukkan upaya yang kuat untuk melibatkan penduduk dalam pembangunan. Jika pembangunan tidak didukung oleh partisipasi masyarakat, hasilnya akan berupa ketidakpastian.

Partisipasi masyarakat harus sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini mencakup berbagai aspek seperti pengendalian penduduk dan pengelolaan kependudukan, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan produktivitas melalui penyediaan peluang kerja yang layak. Seluruh aspek ini sesuai dengan SDGs yang merupakan agenda pembangunan global.

B. Dimensi Keberlanjutan

Dimensi Keberlanjutan merupakan aspek pembangunan berwawasan kependudukan yang disarikan dari konsep dasar pembangunan berkelanjutan untuk menitikberatkan pentingnya memperhatikan penduduk dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan kekayaan alam terkait erat dengan pembangunan. Namun, pemanfaatan yang tidak terkendali dapat menyebabkan hilangnya sumber daya dan merusak lingkungan. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan jangka panjang harus menjadi tujuan utama dari pembangunan dan hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pembangunan harus memperhatikan peran penduduk sebagai pelaku pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk diharapkan mampu menjaga pembangunan yang dilakukan sekarang agar dapat berlanjut di masa depan. Namun, jumlah penduduk dapat berdampak positif maupun negatif terhadap proses – proses pembangunan yang dilakukan, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, pengelolaan pertumbuhan atau penurunan penduduk harus dilakukan dengan tepat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan unsur tempat hunian dan sanitasi, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Hunian dan sanitasi berperan dalam menentukan derajat kesehatan penduduk. Ke depan, telah diproyeksikan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan akan semakin besar, baik dalam jumlah maupun proporsinya, sementara wilayah perkotaan juga semakin luas. Untuk itu, perlu upaya menyediakan hunian yang layak dengan sanitasi yang layak pula bagi penduduk.

C. Dimensi Inklusivitas

Dimensi Inklusivitas merupakan aspek pembangunan berwawasan kependudukan yang menegaskan keberpihakan pemerintah kepada kelompok miskin dan rentan dalam pembangunan berupa perlindungan dan kesempatan agar dapat mencapai kesejahteraan.

Dimensi Inklusivitas adalah salah satu aspek pembangunan yang memfokuskan pada memberikan perlindungan dan memenuhi hak secara merata kepada semua orang, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini sejalan dengan prinsip dari SDGs, yaitu "Jangan Tinggalkan Siapa Pun" atau *Leave No One Behind* (LNOB). Manfaat pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua orang, terutama kelompok marjinal, dengan mengentaskan kemiskinan, mengakhiri diskriminasi, dan mengurangi ketidaksetaraan untuk memastikan tidak ada seorang atau kelompok pun yang dikecualikan dari kemajuan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan, upaya menciptakan inklusivitas mencakup pemberian layanan, perlindungan, dan kesempatan kepada penduduk miskin dan kelompok penduduk rentan, yang mencakup perempuan, penduduk pribumi, penyandang disabilitas, dan penduduk lanjut usia (lansia).

Makna inklusif adalah melibatkan semua orang, tanpa meninggalkan siapa pun, baik individu maupun kelompok. Dengan kata lain, sesuatu dikatakan inklusif jika tidak mengecualikan seseorang, sebagian, atau sekelompok orang. Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai perbedaan seperti agama, ras, suku, dan budaya, diperlukan kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut tidak hanya mencakup agama, ras, suku, dan budaya, tetapi juga mencakup semua orang, baik yang tidak memiliki disabilitas maupun penyandang disabilitas.

Pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan

fasilitas agar semua penduduk dapat memenuhi kebutuhannya, menjalankan kewajibannya, serta mendapatkan haknya. Secara umum, upaya menyediakan layanan dan fasilitas untuk seluruh warga masyarakat dapat dilakukan. Namun, dalam upaya tersebut perlu diperhatikan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda meskipun berada dalam lingkungan yang sama. Hal ini karena setiap individu unik dan berbeda. Dengan demikian, setiap orang dalam masyarakat membutuhkan cara dan layanan khusus yang sesuai dengan keunikan serta kebutuhan khususnya.

D. Dimensi Holistik Integratif

Dimensi Holistik Integratif merupakan aspek pembangunan berwawasan kependudukan yang menunjukkan cakupan menyeluruh dan terpadu berbagai unsur pembangunan dengan kelompok penduduk yang menjadi sasaran pembangunan.

Dimensi Holistik Integratif merupakan pengembangan dari Dimensi Integrasi dalam konsep IPBK sebelumnya, di mana integrasi hanya diterjemahkan sebagai penerapan proyeksi kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Pengembangan dimaksud merupakan pemaknaan sebagai keterpaduan daur hidup manusia mulai dari lahir, menjadi remaja, hingga dewasa dalam aspek Kesehatan, pendidikan, dan pembangunan keluarga.

E. Dimensi Kesenjangan

Dimensi Kesenjangan merupakan aspek pembangunan berwawasan kependudukan yang menekankan bahwa proses pembangunan harus dilaksanakan dengan mengusung prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh penduduk.

Kesenjangan berarti keadaan atau kedudukan yang sama. Kesenjangan yang diinginkan untuk diwujudkan dalam pembangunan berwawasan kependudukan bukan semata – mata kesetaraan gender, namun, juga

dalam hal akses informasi dan tingkat kesejahteraan. Prinsip keadilan dan tidak membedakan – bedakan juga harus diperhatikan. Hak asasi manusia harus menjadi dasar dalam proses pembangunan.

Peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja merupakan salah satu indikator kemajuan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif. Sementara itu, akses informasi merupakan hak dasar yang menunjang keberdayaan individu dalam pendidikan, politik, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Meningkatnya akses informasi berarti semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kapasitas yang mendorong partisipasi penduduk dan pengambilan keputusan yang lebih setara.

Kesetaraan dalam tingkat kesejahteraan yang diinginkan menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di antara anggota masyarakat. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan adanya perbedaan akses pendidikan, pekerjaan layak, perumahan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi kelompok tertentu. Tantangan ini harus diatasi agar kesetaraan atau pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

2.3 Alur Pembentukan IPBK Reformulasi

2.3.1 Mengapa Reformulasi IPBK Perlu Dilakukan?

IPBK merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mengukur sejauh mana pembangunan nasional dan daerah telah menempatkan penduduk sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. IPBK berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur statistik, tetapi juga sebagai alat evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kuantitas, kualitas, dan distribusi penduduk. Dalam konteks perubahan arah kebijakan pembangunan kependudukan nasional, reformulasi IPBK menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keselarasan antara indikator pembangunan berwawasan kependudukan dengan kebijakan baru yang kini beralih dari *Grand Design*

Pembangunan Kependudukan (GDPK) menuju Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yang pelaksanaannya dijabarkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Arah kebijakan dalam GDPK berfokus pada lima pilar utama pembangunan kependudukan yang terdiri atas pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan yang berkualitas, memiliki pertumbuhan yang seimbang dan persebaran yang merata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, GDPK berperan sebagai kerangka dasar pengelolaan isu – isu demografi dan kependudukan secara menyeluruh.

Namun, seiring dengan dinamika Pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global, arah kebijakan pembangunan kependudukan mengalami transformasi substansial. DBPK, yang disusun sebagai kerangka kebijakan jangka panjang selama dua puluh tahun, hadir untuk memperkuat dimensi strategis pembangunan kependudukan dengan menekankan integrasi lintas sektor, keberlanjutan, serta pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan. Jika GDPK lebih berorientasi pada pengendalian demografi, maka, DBPK menempatkan pembangunan kependudukan sebagai *arus utama pembangunan manusia (people – centered development)*, di mana setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan dampak dan relevansinya terhadap kondisi dan dinamika penduduk.

Selanjutnya, pelaksanaan arah kebijakan yang tertuang dalam DBPK diimplementasikan melalui PJPK. PJPK merupakan kebijakan pembangunan kependudukan lima tahunan yang menjadi jembatan antara kebijakan strategis jangka panjang dalam DBPK dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Melalui PJPK, kebijakan

kependudukan diterjemahkan ke dalam indikator, target, dan strategi operasional yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Di sinilah IPBK memainkan peran penting dengan menjadi alat evaluasi utama pelaksanaan PJPk sekaligus memastikan bahwa implementasi kebijakan di lapangan tetap sejalan dengan visi pembangunan kependudukan jangka panjang yang ditetapkan dalam DBPK.

Urgensi reformulasi IPBK terletak pada perlunya penyelarasan indikator pengukuran dengan perubahan arah kebijakan tersebut. Indikator – indikator IPBK sebelumnya masih berakar pada paradigma GDPK, yang cenderung berfokus pada pengendalian demografi. Dalam kerangka DBPK dan PJPk, indikator IPBK harus diperbarui agar dapat menggambarkan pembangunan kependudukan yang lebih luas dan multidimensi, mencakup partisipasi masyarakat, keberlanjutan sosial dan ekonomi, inklusivitas kebijakan, keterpaduan antarprogram, serta kesetaraan akses dan hasil pembangunan. Dengan kata lain, IPBK reformulasi 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan pembangunan berwawasan kependudukan di setiap wilayah. Dengan demikian, IPBK hasil reformulasi 2025 memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai alat ukur capaian pembangunan berwawasan kependudukan; dan kedua, sebagai alat kendali kebijakan dalam evaluasi pelaksanaan PJPk.

Penyelarasan indikator IPBK dilakukan dengan mengaitkan kelima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik – integratif, dan kesetaraan, dengan indikator – indikator PJPk yang dinilai relevan. Dimensi Partisipasi menekankan pada partisipasi penduduk dalam pembangunan berupa kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional, pelaporan dan pencatatan kelahiran anak bawah lima tahun (balita), serta banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja. Sementara itu, Dimensi Keberlanjutan memastikan keberlanjutan pembangunan melalui tingkat kelahiran, serta hunian dan sanitasi yang layak bagi penduduk. Kemudian, Dimensi Inklusivitas mengingatkan agar tidak meninggalkan siapa pun dalam pembangunan, terutama kelompok penduduk

yang rentan dan termarginalisasi meliputi penduduk miskin, penyandang disabilitas, dan penduduk lanjut usia (lansia), serta menjamin pemenuhan hak penduduk akan kesehatan reproduksi dan pendidikan. Selanjutnya, Dimensi Holistik – Integratif mengukur keterpaduan akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak balita, penurunan tingkat kelahiran remaja, dan pendidikan tinggi. Pada akhirnya, Dimensi Kesetaraan mendorong terwujudnya keseimbangan dan kedudukan yang sama dalam hal partisipasi di dunia kerja bagi perempuan, akses terhadap informasi, dan tingkat kesejahteraan penduduk.

Selain penyelarasan indikator – indikator sebagai komponen penyusun IPBK, reformulasi IPBK juga mencakup penyesuaian dalam hal relevansi indikator dengan dimensi, serta nilai minimal dan nilai maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator. Penyesuaian ini penting untuk menjamin keterbandingan capaian IPBK antarwilayah dan antarwaktu.

Reformulasi IPBK membawa implikasi yang strategis. Pertama, penyelarasan indikator IPBK dengan indikator PJPk akan memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan di seluruh tingkatan pemerintahan. Kedua, IPBK hasil reformulasi akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan pembangunan kependudukan karena hasil pengukuran IPBK dapat langsung digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PJPk dan keterpaduannya dengan sasaran DBPK. Ketiga, reformulasi IPBK memperkuat sinergi antarindikator pembangunan nasional karena sebagian indikator IPBK juga berkontribusi terhadap pencapaian IPM melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta SDGs.

Melalui reformulasi ini, IPBK tidak hanya diperbaharui secara teknis, tetapi juga diperkuat secara konseptual untuk menjadi instrumen pengukuran yang relevan dengan arah pembangunan kependudukan masa depan. IPBK yang selaras dengan kebijakan DBPK dan PJPk akan memastikan bahwa pembangunan kependudukan di Indonesia berjalan secara partisipatif,

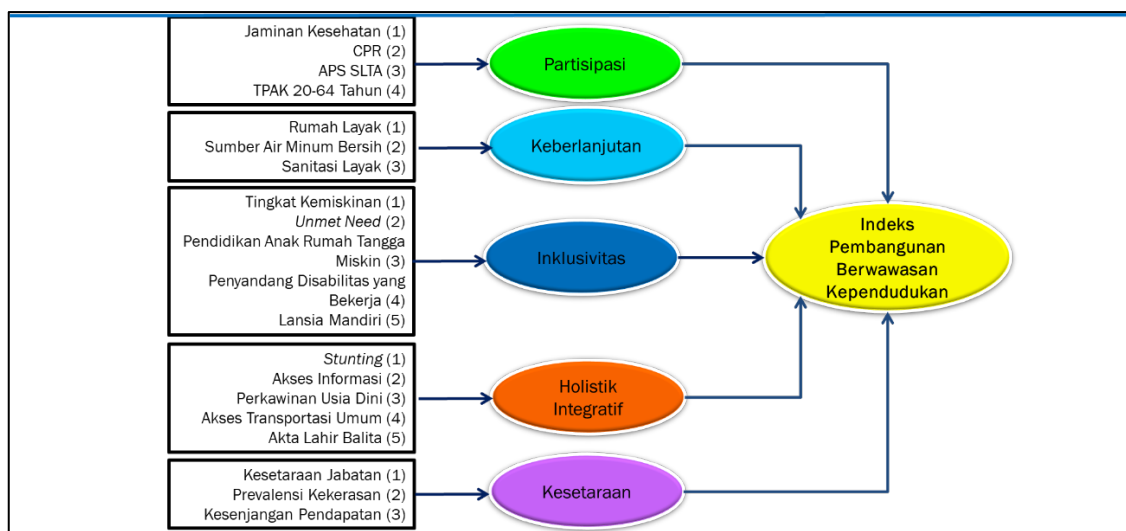
berkelanjutan, inklusif, holistik integratif, dan berkeadilan sosial, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berorientasi pada manusia dan kesejahteraan penduduk.

Ke depan reformulasi IPBK perlu ditindaklanjuti. Pertama, penguatan sistem data indikator IPBK dan PJPk agar tersedia secara terintegrasi dan berkesinambungan lintas sektor. Kedua, peningkatan kapasitas daerah dalam pemanfaatan hasil IPBK untuk perencanaan pembangunan daerah berbasis data. Ketiga, diseminasi/sosialisasi dan publikasi hasil penghitungan IPBK reformulasi agar dapat digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2.3.2 Apa Saja yang Berubah?

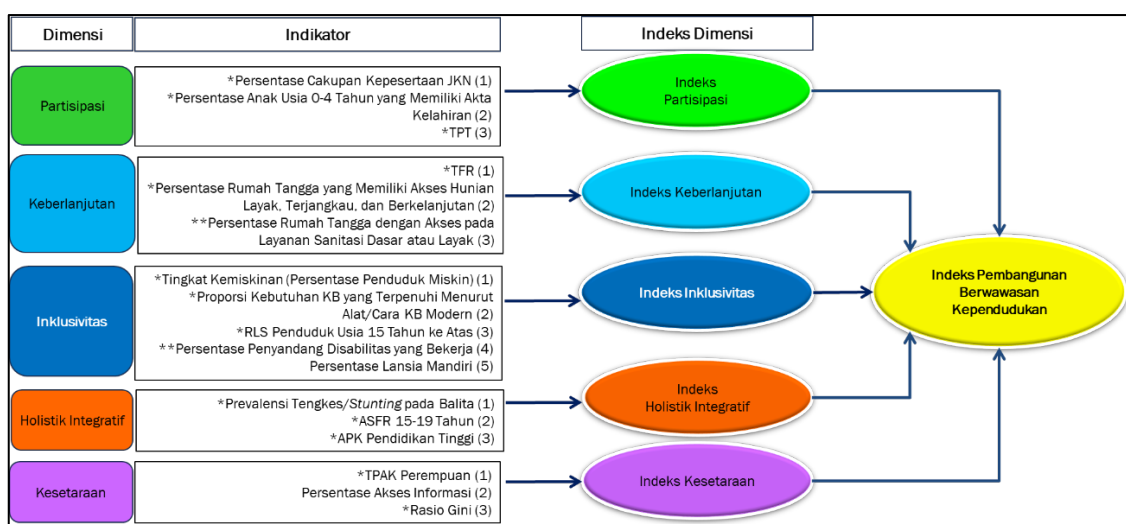
Reformulasi yang dilakukan atas IPBK difokuskan pada penyelarasan antara indikator – indikator sebagai komponen penyusun IPBK dan indikator – indikator dalam dokumen PJPk. Penyelarasan indikator – indikator IPBK ini diikuti dengan penyesuaian dalam hal relevansi indikator dengan dimensi, serta nilai minimal dan nilai maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator.

Perubahan yang terjadi setelah dilakukan penyelarasan antara indikator – indikator IPBK dan PJPk dapat ditunjukkan melalui kerangka alur pembentukan IPBK hasil pengembangan tahun 2022 dan reformulasi tahun 2025. Perubahan dimaksud dapat dicermati sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 di bawah ini.



GAMBAR 2. 3 KERANGKA ALUR PEMBENTUKAN IPBK HASIL PENGEMBANGAN TAHUN 2022

Sumber: BKKBN, 2022b; BKKBN 2023; Kemendukbangga/BKKBN 2024



GAMBAR 2. 4 KERANGKA ALUR PEMBENTUKAN IPBK REFORMULASI TAHUN 2025

Sumber: diilustrasikan dari Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

IPBK hasil pengembangan tahun 2022 terdiri atas 5 (lima) dimensi dengan 20 indikator. Setelah dilakukan penyelarasan indikator – indikator IPBK dengan PJKP, maka, IPBK reformulasi tetap tersusun dari 5 (lima) dimensi yang sama, namun, dengan jumlah indikator yang lebih sedikit, yakni 17 indikator. Perbandingan antara 20 indikator penyusun IPBK dengan 17 indikator

penyusun IPBK Reformulasi selengkapny dapat dicermati pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2. 1 PERBANDINGAN INDIKATOR IPBK DENGAN IPBK REFORMULASI

Indikator IPBK		Dimensi	Indikator IPBK Reformulasi	
1	Jaminan Kesehatan	1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)		2	Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA		3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 20-64 Tahun			
1	Rumah Layak	2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
2	Sumber Air Minum Bersih		2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
3	Sanitasi Layak		3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak
1	Tingkat Kemiskinan	3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
2	<i>Unmet Need</i>		2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern
3	Pendidikan Anak Rumah Tangga Miskin		3	Rata – rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas
4	Penyandang Disabilitas yang Bekerja		4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja
5	Lansia Mandiri		5	Persentase Lansia Mandiri
1	<i>Stunting</i>		1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita

Indikator IPBK		Dimensi	Indikator IPBK Reformulasi	
2	Akses Informasi	4. Dimensi Holistik Integratif	2	<i>Age – Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun
3	Perkawinan Usia Dini		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
4	Akses Transportasi Umum			
5	Akta Lahir Balita			
1	Kesetaraan Jabatan	5. Dimensi Kesetaraan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2	Prevalensi Kekerasan		2	Persentase Akses Informasi
3	Kesenjangan Pendapatan		3	Rasio Gini

Sumber: Indikator – indikator IPBK dari BKKBN, 2022b; BKKBN 2023; Kemendukbangwa/BKKBN 2024; indikator – indikator IPBK Reformulasi dari Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan IPBK

Reformulasi IPBK yang dilakukan dengan menyelaraskan antara indikator – indikator IPBK dan 30 indikator PJPk menghasilkan 17 indikator. Sebanyak 13 indikator di antaranya merupakan indikator yang terdapat dalam PJPk. Indikator – indikator yang dipilih dianggap merupakan indikator yang lebih umum karena telah digunakan oleh kementerian/lembaga lintas sektor sehingga telah dikenal. Selain itu, ketersediaan data indikator – indikator tersebut dinilai lebih terjamin sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data indikator. Sementara itu, dari 20 indikator yang sebelumnya digunakan dalam menyusun IPBK, terdapat 9 (sembilan) indikator yang tetap digunakan karena dianggap tetap relevan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai pusat pembangunan.

Penyelarasan indikator – indikator IPBK ini diikuti dengan penyesuaian dalam hal relevansi indikator dengan dimensi. Karena itu, terlihat bahwa ada indikator yang sama, namun mengalami perubahan dimensi yang dibentuknya akibat pertimbangan relevansi substansi terhadap dimensi. Hal ini terjadi pada indikator Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, yang pada IPBK sebelumnya menggunakan nama indikator Akta Lahir Balita.

Pada IPBK, indikator Akta Lahir Balita adalah salah 1 (satu) indikator penyusun Dimensi Holistik Integratif karena mengukur pemberian layanan yang menysasar balita, yang merupakan bagian dari rangkaian daur hidup seorang manusia. Sementara itu, pada IPBK Reformulasi, indikator Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dijadikan sebagai ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam upaya mendapatkan pemenuhan identitas hukum berupa dokumen pencatatan kelahiran.

Sementara itu, terdapat indikator IPBK yang tetap digunakan dalam penyusunan IPBK Reformulasi, tetapi tidak mengalami perubahan dimensi yang dibentuknya. Hal ini terjadi pada indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja dan Persentase Lansia Mandiri. Pada saat menjadi indikator penyusun IPBK dengan nama Penyandang Disabilitas yang Bekerja dan Lansia Mandiri, kedua indikator merupakan komponen penyusun Dimensi Inklusivitas. Setelah IPBK direformulasi, indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja dan Persentase Lansia Mandiri tetap menjadi komponen penyusun Dimensi Inklusivitas karena merupakan ukuran tingkat pelibatan kelompok rentan, dalam hal ini penyandang disabilitas dan lansia, dalam proses pembangunan menuju pembangunan berwawasan kependudukan.

Selain perubahan indikator, reformulasi IPBK juga mengakibatkan adanya perubahan nilai minimal dan maksimal yang digunakan untuk melakukan standardisasi nilai indikator. Hal ini terjadi terutama untuk indikator – indikator penyusun IPBK yang merupakan indikator – indikator PJPK, namun bukan merupakan indikator – indikator yang sebelumnya digunakan dalam IPBK. Penentuan nilai minimal dan nilai maksimal masing – masing indikator dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti hak penduduk sebagai individu, ketersediaan layanan dan infrastruktur, serta target capaian di masa datang. Daftar nilai minimal dan nilai maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator selengkapnya dapat dilihat pada Bab III.

Reformulasi IPBK tidak dilakukan terhadap komponen penyusun IPBK yang lainnya, yakni dimensi. Dimensi – dimensi penyusun IPBK dipertahankan, baik dalam hal jumlah, nama, maupun definisi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Dimensi penyusun IPBK berjumlah 5 (lima), terdiri atas Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Perubahan juga tidak dilakukan terhadap metode penghitungan IPBK yang telah digunakan sejak pengembangan IPBK tahun 2022, baik dalam hal rumus standardisasi nilai indikator, rumus penghitungan indeks komposit masing – masing dimensi, maupun rumus penghitungan indeks komposit IPBK.

Hasil reformulasi IPBK di atas telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Keputusan Menteri ini menetapkan mengenai penyusunan IPBK, yang terdiri atas 1) Komponen Penyusun IPBK, yakni 5 (lima) dimensi dan 17 indikator, beserta definisi operasional mereka; 2) Tata Cara Penyusunan IPBK, yang di antaranya memuat daftar nilai minimal dan nilai maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator; dan 3) Klasifikasi Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Keputusan Menteri ini juga menetapkan bahwa hasil penghitungan IPBK dan status PBK dituangkan dalam Berita Acara dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan PJP. Metadata Peraturan Keputusan Menteri dimaksud dapat dilihat dalam Lampiran 5 publikasi ini sedangkan naskah Keputusan Menteri selengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://jdih.kemendukbangga.go.id/detail-peraturan/970>

2.3.3 Bagaimana Dampak Perubahan Tersebut?

Reformulasi yang dilakukan pada IPBK berupa perubahan sebagian besar indikator penyusun yang diikuti dengan penyesuaian dalam standardisasi nilai indikator. Perubahan tersebut menyebabkan hasil penghitungan IPBK 2025

membawa implikasi atau dampak perubahan, baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penghitungan IPBK 2025 dilakukan dalam 2 (dua) versi, yakni 1) IPBK sebagaimana hasil pengembangan konsep dan metode yang dilakukan pada tahun 2022, selanjutnya disebut IPBK, dan 2) IPBK hasil reformulasi tahun 2025 dalam rangka menyiapkan IPBK agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan PJP, selanjutnya disebut IPBK Reformulasi dalam konteks perubahan atau jika dibandingkan dengan IPBK hasil pengembangan tahun 2022.

Pada tingkat nasional, dampak perubahan dampak perubahan yang dibawa oleh IPBK reformulasi terutama terjadi dalam hal capaian nilai IPBK. Hal ini terindikasi dikarenakan oleh adanya perubahan indikator, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, yang mana merupakan indikator yang lebih umum digunakan (BPS), pada setiap dimensi. Selain itu, perubahan nilai minimal dan maksimal yang digunakan dalam standardisasi nilai indikator akibat menyesuaikan dengan perubahan indikator juga turut andil. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini, nilai IPBK 2025 Indonesia adalah 64,3 sedangkan nilai IPBK 2025 reformulasi lebih rendah 0,6 poin dari IPBK, yakni 63,7. Namun, perubahan capaian nilai IPBK Indonesia ini tidak membawa perubahan dalam status PBK Indonesia karena masih termasuk ke dalam status PBK Menengah Atas.

TABEL 2. 2 PERBANDINGAN IPBK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMULASI, 2025

IPBK 2025	Indonesia	IPBK 2025 Reformulasi
64,3	Nilai IPBK	63,7
Menengah Atas	Status PBK	Menengah Atas

Sumber: diolah dari hasil penghitungan IPBK 2025

Sementara itu, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdapat 3 (tiga) dampak yang dapat terjadi akibat reformulasi IPBK. Pertama, perubahan capaian nilai IPBK. Secara umum, jika dibandingkan, nilai IPBK hasil reformulasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih rendah daripada nilai IPBK. Kedua, perubahan peringkat. Perubahan capaian nilai IPBK dapat mengubah

peringkat suatu provinsi atau kabupaten/kota jika dibandingkan dengan wilayah lain. Peringkat yang ditempati suatu provinsi atau kabupaten/kota ketika mengacu ke hasil penghitungan IPBK dapat berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah saat merujuk ke hasil penghitungan IPBK reformulasi. Ketiga, perubahan status PBK. Perubahan capaian nilai IPBK dapat mengubah status PBK, khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan status PBK dimaksud, misalnya, dapat terjadi dari semula mencapai status PBK tertentu saat mengacu ke hasil penghitungan IPBK menjadi status PBK yang lebih rendah ketika merujuk ke hasil penghitungan IPBK reformulasi. Dampak perubahan capaian nilai IPBK, peringkat, dan status PBK ini pada akhirnya dapat mengakibatkan perubahan dalam distribusi atau sebaran pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil penghitungan IPBK 2025 reformulasi memperlihatkan bahwa terdapat 4 (empat) provinsi yang perlu disorot secara khusus (*highlight*) untuk menunjukkan ketiga dampak perubahan yang dibawa oleh IPBK reformulasi yang dialami. Keempat provinsi dimaksud meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Dampak perubahan nilai IPBK, peringkat, dan status PBK pada keempat provinsi tersebut dapat dicermati lebih jauh melalui Tabel 2.3 di bawah ini.

TABEL 2. 3 PERBANDINGAN IPBK SEBELUM DAN SESUDAH REFORMULASI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN UTARA, DAN SULAWESI TENGAH, 2025

IPBK 2025	Provinsi	IPBK 2025 Reformulasi
Kepulauan Bangka Belitung		
68,6	Nilai IPBK	58,2
7	Peringkat ke-	23
Menengah Atas	Status PBK	Menengah Bawah
Kalimantan Tengah		
66,7	Nilai IPBK	55,9
15	Peringkat ke-	28
Menengah Atas	Status PBK	Menengah Bawah
Kalimantan Utara		
66,2	Nilai IPBK	64,5
18	Peringkat ke-	10

IPBK 2025	Provinsi	IPBK 2025 Reformulasi
Menengah Atas	Status PBK	Menengah Atas
Sulawesi Tengah		
67,6	Nilai IPBK	63,2
12	Peringkat ke-	16
Menengah Atas	Status PBK	Menengah Atas

Sumber: diolah dari hasil penghitungan IPBK 2025

Dalam hal dampak perubahan capaian nilai IPBK, maka, nilai IPBK 2025 reformulasi keempat provinsi di atas lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPBK. Meskipun nilai IPBK 2025 reformulasi lebih rendah daripada nilai IPBK, peringkat Provinsi Kalimantan Utara justru meningkat. Adapun ketiga provinsi lainnya mengalami penurunan peringkat. Dalam hal dampak perubahan status PBK, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah mengalami penurunan status PBK dari Menengah Atas menjadi Menengah Bawah. Sementara itu, meskipun mengalami penurunan nilai IPBK, kedua provinsi lainnya dapat mempertahankan status PBK Menengah Atas.

2.4 Indikator

Berikut ini adalah uraian mengenai 17 indikator penyusun IPBK Reformulasi menurut dimensi.

Dimensi Partisipasi

Dimensi Partisipasi tersusun dari 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan semata-mata untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Keikutsertaan ini mencerminkan kesadaran warga negara dalam mendukung sistem yang adil dan merata. Keterlibatan masyarakat berkaitan dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam sistem perlindungan sosial (Setiandari et al., 2025). Partisipasi ini bukan hanya tanggung jawab

individu, melainkan juga bentuk kolaborasi antarsektor. Keberhasilan program jaminan kesehatan sangat ditentukan oleh keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta (Mcpake & Hanson, 2016).

Program JKN memiliki dasar hukum kuat yang mewajibkan seluruh penduduk untuk menjadi peserta. Pemerintah dan pemberi kerja bertanggung jawab mendaftarkan masyarakat secara bertahap, mencakup berbagai kelompok seperti pekerja formal, informal, hingga masyarakat rentan. Kepesertaan ini bersifat wajib dan dirancang untuk mencapai cakupan nasional penuh dalam jangka panjang. Program ini juga memastikan bahwa anggota keluarga peserta memperoleh perlindungan yang setara, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme iuran yang berlaku.

Pelaksanaan JKN dikelola oleh lembaga khusus, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dibentuk untuk menjamin keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional secara profesional dan akuntabel. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dengan menanggung iuran bagi kelompok rentan, menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian dari sistem nasional yang adil dan inklusif. JKN berperan dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem ini karena setiap individu tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai kontributor bagi kesejahteraan bersama. Dengan memperluas cakupan kepesertaan dan memperkuat kesadaran kolektif, JKN mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif, berdaya, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan.

2. Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar yang dimiliki setiap anak sejak lahir. Akta Kelahiran menjadi dokumen identitas hukum pertama

yang menandai pengakuan sah negara terhadap keberadaan seorang anak. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai kunci untuk mengakses berbagai hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kepemilikan Akta Kelahiran menjadi langkah awal bagi anak untuk diakui sebagai bagian dari sistem hukum dan sosial suatu negara yang memungkinkan anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik sejak dini (Becedas et al., 2022). Selain itu, pencatatan kelahiran merupakan salah 1 (satu) bentuk upaya pemenuhan penyediaan identitas hukum bagi semua sebagaimana dinyatakan dalam SDG 16 Target 9 "*by 2030 provide legal identity for all, including birth registration.*"

Pencatatan kelahiran juga membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang inklusif karena setiap individu tercatat dan diperhitungkan sejak awal kehidupannya. Sistem administrasi kependudukan yang kuat berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan memperkuat fondasi kebangsaan. Pencatatan kelahiran bukan hanya sekadar urusan administratif, tetapi juga bagian dari upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan setiap warga negara memiliki identitas yang sah. Melalui pencatatan sipil, negara dapat menjamin keadilan identitas dan memastikan setiap anak dapat terlibat dalam kehidupan sosial dengan layak dan bermartabat.

Kepemilikan Akta Kelahiran sejak dini bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya warga negara yang diakui dan dihargai. Dengan memastikan setiap anak tercatat secara resmi, negara memperoleh data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Identitas hukum ini tidak hanya menjamin hak individu, tetapi juga memperkuat keterlibatan warga dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Semakin awal seorang anak diakui keberadaannya oleh negara, semakin besar peluangnya untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan nasional yang berbasis data, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh penduduk.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan keterlibatan penduduk dalam aktivitas produktif serta kualitas pembangunan sumber daya manusia. TPT tidak hanya dipandang sebagai ukuran ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan efektivitas pembangunan sosial dan partisipasi masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan belum berjalan secara optimal (Khudhair & Latif, 2025). Jika penduduk memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja yang relevan, dan layanan kesehatan yang memadai, maka, peluang penduduk untuk berkontribusi dalam pembangunan akan semakin terbuka. Dengan kata lain, semakin besar ruang partisipasi masyarakat dalam ketenagakerjaan, semakin kuat pula ketahanan pembangunan nasional (Sadchykova & Kolotylo, 2025).

Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak pekerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan ketenagakerjaan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih efektif dan produktif. Upaya ini dirancang untuk menanggapi dinamika pertumbuhan penduduk usia kerja serta memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha. Dengan demikian, kelompok usia produktif dapat berpartisipasi optimal dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam arah pembangunan jangka panjang nasional, pembangunan difokuskan pada penurunan TPT secara bertahap, penguatan perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Penurunan tingkat pengangguran dianggap sebagai hasil dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses terhadap pelatihan kerja, dan

penerapan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. RPJMN menjadikan TPT sebagai salah satu indikator utama. Penurunan angka TPT menjadi prioritas dalam upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan kerja yang adil dan inklusif. Kebijakan ini juga sejalan dengan SDG, khususnya dalam hal pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka tidak hanya mencerminkan kondisi ketenagakerjaan, tetapi juga menggambarkan keberhasilan pembangunan dalam melibatkan masyarakat secara aktif.

Dimensi Keberlanjutan

Dimensi Keberlanjutan memiliki 3 (tiga) indikator yang meliputi Total Fertility Rate, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak.

1. *Total Fertility Rate (TFR)*

Pengelolaan TFR menjadi elemen strategis untuk menjaga keseimbangan antara jumlah, struktur, dan kualitas penduduk. Karena itu, TFR perlu berada pada tingkat yang mendukung pertumbuhan penduduk seimbang. TFR yang terlalu tinggi meningkatkan beban ketergantungan usia muda sementara TFR yang terlalu rendah menurunkan proporsi angkatan kerja dan mempercepat proporsi penduduk lansia. Keseimbangan TFR menciptakan struktur penduduk yang ideal. Hal ini berarti TFR menjadi indikator penting dalam menciptakan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menuju pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Perubahan angka fertilitas berpengaruh signifikan terhadap sistem sosial, ekonomi, dan keseimbangan lingkungan. Maka dari itu, pertumbuhan atau penurunan penduduk perlu dikelola dengan hati-hati agar keberlanjutan pembangunan tetap terjaga (Baum et al., 2025).

Kebijakan kependudukan harus berpijak pada keterpaduan antara aspek demografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengendalian pertumbuhan penduduk tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi kebijakan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola perubahan perilaku reproduksi dan pola hidup. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu dalam memahami dampak demografis terhadap pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai keselarasan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan, sekaligus memperkuat kapasitas manusia sebagai aset pembangunan. Pemerintah berperan dalam mengatur dinamika penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengelolaan mobilitas penduduk. Efektivitas kebijakan ini memerlukan partisipasi masyarakat yang sadar akan pentingnya keseimbangan demografis sebagai dasar keberlanjutan sosial dan ekonomi. Program Keluarga Berencana (KB) menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keseimbangan tersebut melalui pendekatan partisipatif. Program ini mendorong pasangan suami istri mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentang usia menikah, jumlah dan jarak kelahiran anak, serta perencanaan kehamilan yang sesuai dengan hak reproduksi.

2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara. Tempat tinggal yang memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan seperti bangunan yang kuat, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat (Ahmadi et al., 2025). Aspek keterjangkauan dan daya tahan lingkungan juga perlu diperhatikan agar semua kalangan bisa hidup di lingkungan yang aman dan sehat dalam jangka panjang. Setiap warga

negara berhak menempati hunian yang layak, sehat, dan tertata dengan baik.

Peningkatan kualitas hunian di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tempat tinggal yang layak, sehat, dan terjangkau. Kawasan perkotaan menghadapi dinamika perubahan yang cepat akibat pertumbuhan penduduk, yang sering kali tidak diiringi dengan perencanaan ruang dan infrastruktur yang memadai.

Kebijakan pembangunan perlu menekankan pentingnya perluasan akses hunian dari tingkat desa. Pembangunan hunian tidak hanya dipandang sebagai penyediaan tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyediaan hunian sebaiknya diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kuantitas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan menempatkan penduduk sebagai pusat dari setiap proses pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam merencanakan, menjaga, dan memanfaatkan lingkungan tempat tinggalnya menjadi kunci dalam menciptakan permukiman yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun di masa depan.

3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak

Akses terhadap sanitasi dasar yang layak sangat penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan bermartabat. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses layak apabila menggunakan fasilitas sanitasi pribadi, tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain, dan dilengkapi sistem pembuangan limbah yang aman serta dikelola dengan baik (WHO & UNICEF, 2021). Ketersediaan fasilitas sanitasi seperti ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Sanitasi yang dikelola dengan baik dapat mencegah penyebaran penyakit yang menjadi penyebab utama kematian anak di negara berkembang (Bartram

& Cairncross, 2014). Sementara itu, tidak tersedianya fasilitas pribadi dapat menurunkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Penggunaan fasilitas bersama atau terbuka tidak memenuhi standar sanitasi yang layak dan dapat memperlebar ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Satterthwaite, 2016).

Pemerintah menempatkan peningkatan akses terhadap sanitasi sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional, termasuk dalam SDG 2030. Salah 1 (satu) sasaran utama dalam RPJPN 2025–2045 adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Seiring dengan pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi umum yang terus berkembang, layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan listrik juga terus diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang masih belum terlayani secara optimal. Penyediaan layanan tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan aspek sosial dan lingkungan yang mendukung kehidupan sehat dan sejahtera.

Pembangunan yang memperluas jangkauan layanan sanitasi secara merata mencerminkan perhatian terhadap keberagaman kondisi dan kebutuhan penduduk. Pendekatan ini memperkuat keadilan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Kebijakan dan program pembangunan menyatu dengan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika penduduk, hasilnya akan lebih berkelanjutan dan menjawab kebutuhan generasi kini maupun mendatang.

Dimensi Inklusivitas

Dimensi Inklusivitas disusun dari 5 (lima) indikator. Kelima indikator tersebut terdiri atas Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Keluarga

Berencana Modern, Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja, dan Persentase Lansia Mandiri.

1. Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial. Kondisi ini paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan penduduk di wilayah terpencil. Penanganan kemiskinan memerlukan kebijakan yang tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan (Rahayu & Widyastuti, 2020).

Kebijakan – kebijakan pembangunan telah diarahkan untuk menjangkau seluruh wilayah dan kelompok penduduk dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan karakteristik sosial masing-masing daerah. Dengan memperhatikan persebaran penduduk, struktur umur, dan kebutuhan kelompok rentan, kebijakan menjadi lebih adaptif dan relevan. Pembangunan yang berorientasi pada penduduk sebagai pusat kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Setiap penduduk, tanpa memandang latar belakang sosial, wilayah tempat tinggal, atau kondisi fisik dan ekonomi, berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam menikmati hasil pembangunan. Upaya pengentasan kemiskinan harus diposisikan sebagai inti dari kebijakan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan benar – benar dapat mencerminkan keadilan sosial, keberlanjutan, dan ketahanan bangsa.

2. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern

Indikator kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB modern mencerminkan sejauh mana pasangan usia subur (PUS) yang ingin menjarangkan kelahiran dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana sistem layanan kesehatan mampu memenuhi hak individu dalam mengakses pilihan kontrasepsi yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan. Wilayah dengan dukungan sumber daya kesehatan yang cukup memiliki tingkat pemakaian kontrasepsi modern yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KB sangat berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali (Ariyanti et al., 2017). Peningkatan penggunaan kontrasepsi modern sejalan dengan kebijakan pembangunan yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk membuat keputusan kesehatan reproduksi secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penggunaan indikator ini tidak hanya relevan dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam hal menciptakan tatanan sosial yang lebih seimbang (Kantorová et al., 2020).

Komitmen pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan KB modern tecermin dalam berbagai kebijakan yang menegaskan pentingnya penyediaan layanan kontrasepsi yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan KB modern melalui berbagai program yang terencana dan berbasis data tidak hanya mendukung peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan yang memperhatikan dinamika kependudukan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diarahkan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terlewatkan dalam akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang layak dan bermartabat.

3. Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Indikator ini menggambarkan sejauh mana warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan formal sebagai hak dasar. Peningkatan lama sekolah tidak hanya dipandang sebagai upaya memperluas akses pendidikan, tetapi juga sebagai wujud perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi sesuai dengan semangat pemerataan kesempatan belajar sepanjang hayat.

Peningkatan lama sekolah berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Barro & Lee, 1996). Peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan karakter menjadi pilar utama menuju “Indonesia Emas 2045.” Hal ini menegaskan pentingnya membangun manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan memperpanjang lama sekolah penduduk usia produktif, Indonesia dapat memperkuat fondasi modal manusia.

Penguatan akses dan mutu pendidikan menjadi strategi utama dalam memperkecil kesenjangan antardaerah dan antarkelompok sosial. Kebijakan berbasis data pendidikan yang akurat diperlukan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah tertinggal (Friedman, et al., 2018). Pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan lama sekolah menjadikan pendidikan sarana strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

4. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja

Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja yang setara dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas dan menyediakan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar dapat bekerja secara optimal. Dengan adanya aturan ini, hak penyandang disabilitas untuk bekerja tidak lagi dianggap sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai bagian dari hak dasar setiap warga negara.

Komitmen negara dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif juga diperkuat melalui berbagai kebijakan yang mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih terbuka dan adil, termasuk bagi penyandang disabilitas. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa diskriminasi. Penyesuaian lingkungan kerja yang sesuai dapat membantu penyandang disabilitas bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap produktivitas dan kemajuan masyarakat (Wickenden et al., 2022).

Komitmen untuk mewujudkan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas juga tecermin dalam arah pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Pemerintah menempatkan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang layak bagi seluruh warga. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan bagi semua warganya untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa. Ketika setiap warga negara diberi ruang untuk berperan sesuai potensinya, pembangunan akan berjalan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan semangat

pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan utama kemajuan bangsa.

5. Persentase Lansia Mandiri

Lansia yang mandiri tidak hanya ditandai oleh kemampuan fisik dan mental yang baik, tetapi juga oleh peran aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Lansia berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, memelihara kemandirian, dan tetap berperan dalam masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Karena itu, menjadi penting bahwa kebijakan publik untuk mendukung partisipasi aktif lansia dan mendorong lansia untuk tetap berdaya dirumuskan dengan didasari oleh penerapan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu rasa aman (*sense of security*), rasa memiliki (*sense of belonging*), dan rasa berharga (*feeling of worthiness*) (Chan & Liang, 2013). Kebijakan ini menekankan pentingnya lingkungan sosial yang mendukung lansia untuk tetap aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, berbagai upaya pemberdayaan lansia juga dilakukan melalui pembukaan akses terhadap kesempatan kerja yang lebih luas dan adaptif bagi semua kelompok usia. Hal ini menegaskan pentingnya menciptakan iklim ekonomi dan sosial yang memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berkontribusi sesuai kemampuan.

Kemandirian lansia memperkuat arah pembangunan yang berorientasi pada penduduk. Lansia yang sehat, aktif, dan produktif tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan sosial dan kemajuan ekonomi. Upaya mewujudkan kemandirian lansia perlu dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang yang memperkuat fondasi kesejahteraan nasional. Dukungan lintas sektor akan menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka terus berperan aktif dan bermakna. Kemandirian mereka mencerminkan keberhasilan pembangunan yang memberdayakan seluruh kelompok usia, menjadikan lansia bukan sebagai beban, melainkan sebagai aset

berharga dalam mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan dan sejahtera.

Dimensi Holistik Integratif

Dimensi Holistik Integratif tersusun oleh 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut adalah Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita, *Age – Specific Fertility Rate* 15 – 19 Tahun, dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi.

1. Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita

Stunting pada anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia merupakan masalah gizi kronis yang berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan pembangunan nasional. Anak yang mengalami *stunting* tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisiknya, tetapi juga penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas di masa depan. Faktor penyebab *stunting* sangat beragam, di antaranya adalah rendahnya asupan energi dan multivitamin yang diperlukan (Nugraheni, 2020). Selain faktor gizi, lingkungan yang tidak sehat, perilaku hidup bersih yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak turut memperbesar risiko terjadinya *stunting* (Sinatrya & Muniroh, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan cerminan dari tantangan pembangunan manusia yang bersifat multidimensi.

Dalam arah kebijakan pembangunan nasional, penurunan *stunting* menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraan keluarga. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada intervensi gizi, tetapi juga melibatkan berbagai sektor secara terpadu seperti pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan. Program pencegahan dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, edukasi gizi, serta penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat. Pendekatan ini

menekankan bahwa keberhasilan menurunkan angka *stunting* bergantung pada sinergi antarsektor pembangunan yang saling mendukung.

Setiap kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup penduduk sejak usia dini karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, upaya penurunan *stunting* menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Dengan menempatkan keseimbangan antara jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk sebagai dasar kebijakan, pembangunan nasional akan lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing tinggi.

2. ***Age – Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 Tahun***

Indikator *Age – Specific Fertility Rate (ASFR) 15 – 19 Tahun* berfungsi sebagai ukuran penting dalam menilai kondisi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial perempuan muda. Di Indonesia, meskipun angka ASFR kelompok usia ini menunjukkan tren penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, nilainya masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Tingginya fertilitas remaja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status perkawinan, tingkat pendidikan, perilaku seksual, dan akses terhadap layanan kontrasepsi (Kurniatin et al., 2022). Karena itu, pengendalian ASFR 15 – 19 Tahun memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara faktor kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku remaja perempuan.

Dalam konteks pembangunan, pengendalian fertilitas remaja merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup penduduk. Kebijakan yang memberikan akses luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi menjadi langkah strategis untuk membantu remaja menunda usia perkawinan dan kehamilan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi

untuk menekan angka kelahiran remaja, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas generasi muda agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ASFR 15 – 19 Tahun tidak hanya merepresentasikan angka statistik, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi suatu negara, termasuk sejauh mana pembangunan berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan remaja perempuan. Upaya pengendaliannya perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga keluarga dan masyarakat, guna membentuk generasi muda yang lebih sehat, berdaya, dan produktif (Spoorenberg et al., 2024).

Lebih jauh, kebijakan pembangunan nasional menempatkan pengendalian kelahiran sebagai elemen penting dalam meningkatkan kualitas penduduk dan memperkuat ketahanan keluarga. Fokus utamanya adalah menciptakan kesempatan bagi remaja untuk mencapai kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum berkeluarga, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Pengelolaan fertilitas remaja dengan cara ini tidak hanya menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia 15 – 19 tahun, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Perluasan akses pendidikan, bertambahnya jumlah perguruan tinggi, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta adanya program beasiswa dan pendidikan jarak jauh telah membuka peluang belajar yang lebih luas bagi masyarakat. Sistem pendidikan tinggi kini semakin inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern yang dinamis (Winarto et al., 2024). Pendidikan tinggi kini dipandang tidak hanya sebagai sarana akademik, tetapi juga

sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan partisipasi mendorong keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai sosial yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global. Sinergi antara sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya berperan penting dalam memastikan bahwa kemajuan pendidikan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan memperluas partisipasi pendidikan tinggi menjadi cerminan keberhasilan dalam membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan tinggi berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang produktif.

Peningkatan APK Pendidikan Tinggi menjadi prioritas strategis menuju terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas perguruan tinggi, pengembangan pendidikan vokasi, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses belajar di seluruh Indonesia. Peningkatan APK Pendidikan Tinggi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengetahuan dan karakter bangsa. Hal ini menjadi bagian penting dari strategi besar menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing pada tahun 2045.

Dimensi Kesetaraan

Dimensi Kesetaraan memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Persentase Akses Informasi, dan Rasio Gini.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja mencerminkan kemajuan sosial dan kualitas pembangunan suatu negara. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa kesempatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan telah terbuka secara merata bagi

seluruh penduduk. Perempuan yang bekerja tidak hanya membantu perekonomian keluarga, tetapi juga memperkuat produktivitas dan daya saing masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja berjalan seiring dengan kemajuan pendidikan dan perubahan sosial. Perempuan kini berperan aktif di berbagai sektor, mencerminkan semakin terbukanya masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan publik (Utomo, 2018). Ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan kerja bukan hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong produktivitas nasional dan memperkuat fondasi ekonomi (Pimkina & de La Flor, 2020).

Partisipasi perempuan yang semakin luas mencerminkan arah pembangunan yang berimbang dan berfokus pada peningkatan kualitas manusia. Ketika seluruh potensi penduduk dapat diberdayakan secara optimal, pembangunan akan berlangsung lebih dinamis dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan didukung oleh berbagai kebijakan nasional yang menegaskan kesetaraan kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Regulasi ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan, sementara kebijakan pembangunan mendorong pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan keluarga. Upaya tersebut menunjukkan arah pembangunan nasional yang menempatkan perempuan sebagai bagian dalam penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Persentase Akses Informasi

Akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara agar setiap warga, tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, atau lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi. Informasi adalah

sumber daya publik yang harus diakses secara adil, karena ketimpangan akses akan melahirkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa. Akses informasi yang merata juga menjadi kesempatan bagi penduduk untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik bagi kehidupannya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan berkontribusi terhadap kemajuan sosial-ekonomi. Akses informasi berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat kualitas penduduk, menurunkan kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kesejahteraan manusia (Mathiesen, 2008).

Ketika akses terhadap informasi diberikan secara merata dan berkualitas, masyarakat menjadi lebih berdaya, sadar haknya, dan mampu meningkatkan taraf hidup. Hal ini memperkuat daya saing manusia Indonesia sekaligus mendorong pembangunan yang seimbang. Pengaturan di bidang telekomunikasi dan informasi digital memperkuat prinsip pemerataan akses bagi seluruh penduduk. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya penyediaan layanan komunikasi yang terjangkau, sekaligus peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan informasi secara produktif dan bertanggung jawab. Dengan menjamin akses yang setara dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, pembangunan informasi menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

3. Rasio Gini

Nilai Rasio Gini yang tinggi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, sementara kelompok lain tertinggal. Sebaliknya, Rasio Gini yang rendah menandakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh penduduk. Rasio Gini juga mencerminkan perbedaan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang sering kali

menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan ekonomi (Chen et al., 2024).

Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Rasio Gini tidak hanya menilai sejauh mana hasil pembangunan terbagi, tetapi juga menjadi cerminan keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Menjaga Rasio Gini pada tingkat ideal merupakan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Dengan menempatkan penduduk sebagai pusat pembangunan, kebijakan ekonomi dapat diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

2.5 Pemanfaatan

Hasil penghitungan IPBK dan status pembangunan berwawasan kependudukan (status PBK) didorong untuk dimanfaatkan oleh para pihak pemangku kepentingan di seluruh tingkatan wilayah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024, hasil penghitungan IPBK dan status PBK dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk menyusun analisis kondisi PBK di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; melaksanakan pemantauan dan evaluasi PBK; dan/atau merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan yang tepat. Dengan demikian, IPBK dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan memotret kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah masing-masing, mengidentifikasi sasaran pembangunan yang perlu diintervensi, dan mendorong upaya peningkatan pembangunan berwawasan kependudukan melalui perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, inklusif, holistik, integratif, dan setara.

Lebih lanjut, IPBK dapat dimanfaatkan sebagai langkah strategis dalam intervensi pembangunan kualitas manusia. Ini dimungkinkan karena kerangka konseptual IPBK merupakan elaborasi dari IPM sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki indikator-indikator yang lebih detail untuk diimplementasikan dalam rangka peningkatan IPM. Dengan kata lain, IPBK memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia karena “pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan” (BPS, 2015).

Hasil penghitungan IPBK juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Dalam hal ini, IPBK dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen operasional pembangunan kependudukan di pusat dan daerah. Hasil evaluasi tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan penentuan intervensi yang tepat melalui pengintegrasian kependudukan ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan.

BAB III
METODE
PENGHITUNGAN IPBK

**“Penduduk sehat
Bangsa kuat”**



BAB III

METODE PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

3.1. Definisi Operasional dan Arah Indikator

Masing – masing dari tujuh belas indikator yang digunakan pada penghitungan IPBK tahun 2025 memiliki definisi operasional dan arah. Definisi operasional masing-masing indikator dalam penyusunan IPBK 2025 berikut arahnya tersebut disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

TABEL 3. 1 DIMENSI, INDIKATOR, DEFINISI OPERASIONAL, DAN ARAH INDIKATOR DALAM PENYUSUNAN IPBK 2025

Dimensi	Indikator			
		Nama	Definisi Operasional	Arah
1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Bagian dari seluruh populasi penduduk yang memiliki jaminan sosial di bidang kesehatan; 2. Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan	(+)
	2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Bagian dari penduduk usia 0-4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(+)
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Bagian dari penduduk dalam angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja	(-)
2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya	(-)
	2	Persentase Rumah Tangga yang	Bagian dari populasi rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal	(+)

Dimensi	Indikator			
	Nama		Definisi Operasional	Arah
		Memiliki Akses terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	yang layak yang dicirikan dengan pemenuhan kriteria ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum, dan memiliki akses sanitasi layak	
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar atau Layak	Bagian dari populasi rumah tangga yang bisa mendapatkan fasilitas sanitasi dasar yang layak (yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain)	(+)
3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan	(+)
	2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Bagian dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern	(+)
	3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Rata-rata lamanya masa yang dilalui oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal	(+)
	4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	Penyandang disabilitas berusia 15-64 tahun yang bekerja; penyandang disabilitas yang dimaksud adalah mengalami kesulitan/gangguan penglihatan, kesulitan/gangguan pendengaran, kesulitan/gangguan berjalan atau naik tangga, kesulitan/gangguan menggunakan/menggerakkan tangan/jari, kesulitan/gangguan dalam berbicara	(+)

Dimensi	Indikator		
	Nama	Definisi Operasional	Arah
		dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain dan kesulitan/gangguan lainnya	
	5	Persentase Lansia Mandiri	Bagian dari populasi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja, sehat, dan memiliki kondisi fisik normal (+)
4. Dimensi Holistik Integratif	1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	Bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan Z-Score < -2 SD (WHO, 2005) (-)
	2	<i>Age – Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15—49 tahun) dengan kelompok umur tertentu (15-19 tahun) pada setiap 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut (-)
	3	Angka Partispasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Angka yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia 19-23 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi (+)
5. Dimensi Kesenjangan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Perbandingan jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) (+)
	2	Persentase Akses Informasi	Bagian dari populasi penduduk 15 – 64 tahun yang pernah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir dan penggunaan internetnya untuk mendapat informasi/berita, informasi dalam proses pembelajaran, menerima/mengirim <i>e-mail</i> , media/jejaring sosial (<i>Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram, X</i> , dll.) dan mendapatkan informasi mengenai barang/jasa (+)

Dimensi	Indikator		
	Nama	Definisi Operasional	Arah
	3 Rasio Gini	indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh	(-)

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

3.2. Standardisasi Nilai Indikator

Standardisasi nilai indikator adalah konversi nilai faktual terhadap kemungkinan batas minimal dan maksimal yang bisa dicapai suatu wilayah atau daerah. Standardisasi nilai indikator IPBK sangat penting karena IPBK menjadi alat untuk memantau perkembangan kondisi pembangunan kependudukan setiap tahun, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Standardisasi merupakan tahapan yang sangat penting karena indikator pembentuk indeks sangat bervariasi, baik dari aspek sebaran (*range*), satuan dan skala, jenis data, maupun arahnya. Tujuan standardisasi ini tiada lain untuk mengontrol setiap indikator agar memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam pembentukan indeks.

Dalam melakukan standardisasi nilai indikator, digunakan nilai minimal dan nilai maksimal. Penentuan nilai minimal dan nilai maksimal dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Hak-hak individu sebagai manusia yang akan terlibat dalam pembangunan;
2. Kemampuan pemerintah dalam penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur;
3. Target capaian pemerintah dalam jangka panjang.

Nilai minimal dan maksimal yang telah ditentukan untuk digunakan dalam standardisasi nilai indikator IPBK 2025 disajikan pada Tabel 3.2. di bawah ini.

TABEL 3. 2 NILAI MINIMAL DAN MAKSIMAL YANG DIGUNAKAN DALAM STANDARDISASI NILAI INDIKATOR
IPBK 2025

Nama Dimensi/Indikator		Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Arah Indikator
D1	DIMENSI PARTISIPASI			
X1.a	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	20	100	Positif
X1.b	Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	25	100	Positif
X1.c	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	0,5	15	Negatif
D2	DIMENSI KEBERLANJUTAN			
X2.a	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,1	5	Negatif
X2.b	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	30	95	Positif
X2.c	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	30	100	Positif
D3	DIMENSI INKLUSIVITAS			
X3.a	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	1	25	Negatif
X3.b	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	10	97,5	Positif
X3.c	Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	5	16	Positif
X3.d	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	10	75	Positif
X3.e	Persentase Lansia Mandiri	15	67	Positif
D4	DIMENSI HOLISTIK INTEGRATIF			
X4.a	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	1	40	Negatif
X4.b	<i>Age – Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	10	40	Negatif
X4.c	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	10	75	Positif
D5	DIMENSI KESETARAAN			

Nama Dimensi/Indikator		Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Arah Indikator
X5.a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	25	80	Positif
X5.b	Persentase Akses Informasi	20	95	Positif
X5.c	Rasio Gini	0,2	0,75	Negatif

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Selanjutnya, standarisasi nilai indikator dilakukan dengan menggunakan nilai minimal dan nilai maksimal setiap indikator sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 di atas dalam rumus atau persamaan. Ada 2 (dua) rumus atau persamaan yang dapat digunakan menyesuaikan dengan arah masing – masing indikator, apakah positif atau negatif.

1.	Indikator yang bersifat atau memiliki arah positif	$X_i^{std} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} * 100$
2.	Indikator yang bersifat atau memiliki arah negatif	$X_i^{std} = \frac{X_{max} - X_i}{X_{max} - X_{min}} * 100$

di mana:

- X_i^{std} : nilai indikator ke-i yang sudah distandardisasi
 X_i : nilai capaian indikator ke-i secara aktual
 X_{min} : nilai minimal indikator ke-i
 X_{max} : nilai maksimal indikator ke-i

3.3. Rumus Penghitungan

Setelah nilai indikator distandardisasi, maka, tahap selanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai indeks komposit dimensi. Penghitungan indeks masing – masing dimensi IPBK menggunakan rata – rata aritmetik. Berikut ini diuraikan rumus penghitungan masing-masing indeks dimensi penyusun IPBK.

1. Indeks Partisipasi

Indeks ini merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator penyusun Dimensi Partisipasi, yaitu Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

$$D1 = X_{1a}^{std} + X_{1b}^{std} + X_{1c}^{std} / 3$$

di mana:

- X_{1a}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- X_{1b}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran
- X_{1c}^{std} : nilai standardisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2. Indeks Keberlanjutan

Indeks ini merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator yang menyusun Dimensi Keberlanjutan, yaitu *Total Fertility Rate* (TFR), Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, Berkelanjutan, dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak.

$$D2 = X_{2a}^{std} + X_{2b}^{std} + X_{2c}^{std} / 3$$

di mana:

- X_{2a}^{std} : nilai standardisasi indikator *Total Fertility Rate* (TFR)
- X_{2b}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
- X_{2c}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

3. Indeks Inklusivitas

Indeks ini merupakan komposit dari 5 (lima) indikator penyusun Dimensi Inklusivitas, yaitu Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern, Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja, dan Persentase Lansia Mandiri.

$$D3 = X_{3a}^{std} + X_{3b}^{std} + X_{3c}^{std} + X_{3d}^{std} + X_{3e}^{std} / 5$$

di mana:

- X_{3a}^{std} : nilai standardisasi indikator Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)
- X_{3b}^{std} : nilai standardisasi indikator Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern
- X_{3c}^{std} : nilai standardisasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
- X_{3d}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja
- X_{3e}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Lansia Mandiri

4. Indeks Holistik Integratif

Indeks ini merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator yang menyusun Dimensi Holistik Integratif, yaitu Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita, *Age – Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi.

$$D4 = X_{4a}^{std} + X_{4b}^{std} + X_{4c}^{std} / 3$$

di mana:

X_{4a}^{std} : nilai standardisasi indikator Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita

X_{4b}^{std} : nilai standardisasi indikator *Age – Specific Fertility Rate* (ASFR) 15 – 19 Tahun

X_{4c}^{std} : nilai standardisasi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi

5. Indeks Kesetaraan

Indeks ini merupakan komposit dari 3 (tiga) indikator penyusun Dimensi Kesetaraan, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, Persentase Akses Informasi, dan Rasio Gini.

$$D5 = X_{5a}^{std} + X_{5b}^{std} + X_{5c}^{std} / 3$$

di mana:

X_{5a}^{std} : nilai standardisasi indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

X_{5b}^{std} : nilai standardisasi indikator Persentase Akses Informasi

X_{5c}^{std} : nilai standardisasi indikator Rasio Gini

IPBK merupakan indeks komposit dari lima indeks dimensi yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Kelima dimensi dalam indeks IPBK memiliki peran yang sama pentingnya karena secara filosofis indeks memang tersusun melalui dimensi atau pilar pembentuknya. Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata – rata geometrik karena sensitif terhadap nilai ekstrem bawah dan *robust* terhadap nilai ekstrem atas. Jika dibandingkan dengan rata

- rata aritmatika, metode ini lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh nilai ekstrem (*outlier*) atau data yang miring (*skewed*). Penggunaan rata – rata geometrik ini mensyaratkan bahwa kelima dimensi pembentuk IPBK harus tumbuh bersama karena tidak boleh ada dimensi yang tertinggal atau tidak diperhatikan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Rumus yang digunakan dalam penghitungan indeks komposit IPBK dapat dicermati di bawah ini.

$$IPBK = \sqrt[5]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5}$$

atau

$$IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{(1/5)}$$

di mana:

D1 : Nilai Indeks Komposit Dimensi Partisipasi

D2 : Nilai Indeks Komposit Dimensi Keberlanjutan

D3 : Nilai Indeks Komposit Dimensi Inklusivitas

D4 : Nilai Indeks Komposit Dimensi Holistik Integratif

D5 : Nilai Indeks Komposit Dimensi Kesenjangan

Nilai indeks komposit IPBK menggunakan skala 0 – 100. Untuk kebutuhan penghitungan IPBK, maka, nilai indeks komposit masing – masing dimensi penyusun IPBK pun menggunakan skala 0 – 100.

3.4. Sumber Data Indikator

Data yang digunakan dalam penghitungan IPBK tahun 2025 merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data sekunder untuk mendapatkan data indikator IPBK 2025 terbesar adalah Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 Maret (KOR) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024 Agustus. Selain BPS, data

sekunder untuk penghitungan IPBK 2025 diperoleh dari kementerian/lembaga produsen data sekunder yang meliputi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 (PK24), Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAC) Semester II 2024. Sumber data setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IPBK 2025 selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

TABEL 3. 3 SUMBER DATA INDIKATOR IPBK 2025

Dimensi	Indikator		Sumber Data
1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Susenas 2024 Maret (KOR)
	2	Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	SIAC Semester II 2024
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Sakernas 2024 Agustus
2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Pemutakhiran PK 2024
	2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Susenas 2024 Maret (KOR)
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	Susenas 2024 Maret (KOR)
3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	Susenas 2024 Maret (KOR)
	2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Pemutakhiran PK 2024
	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	Susenas 2024 Maret (KOR)
	4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	Sakernas Agustus 2024
	5	Persentase Lansia Mandiri	Susenas KOR Maret 2023
4. Dimensi Holistik Integratif	1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	SSGI 2024
	2	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	Pemutakhiran PK 2024
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	Susenas 2024 Maret (KOR)
	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Sakernas Agustus 2024

Dimensi	Indikator		Sumber Data
5. Dimensi Kesenjangan	2	Persentase Akses Informasi	Susenas 2024 Maret (KOR)
	3	Rasio Gini	Susenas 2024 Maret (KOR)

Sumber: Pengumpulan data indikator IPBK 2025

3.5. Kendala dan Keterbatasan Data Indikator

Pada awalnya, penyusunan IPBK 2025 diharapkan dapat menggunakan data-data tahun berjalan (data tahun publikasi 2025). Namun, hingga bulan November 2025, data yang terkumpul baru untuk 7 (tujuh) dari 17 indikator IPBK, dan data itu pun tersedia hanya pada level nasional dan provinsi. Karena itu, akhirnya diputuskan menggunakan data tahun 2024 untuk ketujuh belas indikator IPBK 2025.

Pada proses pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan kendala berupa keterbatasan data. Terdapat 1 (satu) indikator, yakni Persentase Lansia Mandiri, yang terkendala ketersediaan data. Persentase Lansia Mandiri adalah salah 1 (satu) indikator yang datanya didapatkan dari hasil pengolahan data mentah hasil Susenas 2024 Maret (KOR). Namun, ternyata variabel – variabel pembentuk indikator Persentase Lansia Mandiri tidak didiseminasikan oleh BPS dengan alasan validitas data. Akibatnya, data indikator Persentase Lansia Mandiri tidak dapat dihitung. Karena itu, akhirnya data indikator Persentase Lansia Mandiri menggunakan data yang digunakan dalam penyusunan IPBK 2024, yang diolah dari data mentah hasil Susenas 2023 Maret (KOR).

Kemudian, kelengkapan data indikator untuk penghitungan IPBK tingkat nasional dan tingkat provinsi tercukupi dengan baik, tetapi terjadi kendala ketersediaan data indikator untuk penghitungan IPBK tingkat kabupaten/kota. Terdapat 52 data indikator pada 49 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi dengan data nol/kosong/*missing* karena tidak tersedia dari hasil pengolahan data Susenas 2024 Maret (KOR) dan Pemutakhiran PK 2024.

Untuk mengatasi kendala data indikator IPBK kabupaten/kota yang nol/kosong/*missing* tersebut, digunakan 2 (dua) cara, yakni 1) menggunakan data capaian provinsi dan 2) menggunakan rata – rata proporsi capaian kabupaten/kota dengan capaian provinsinya.

3.6. Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Status pembangunan berwawasan kependudukan (status PBK) di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota ditentukan untuk mendorong para pemangku kepentingan berupaya meningkatkan pembangunan berwawasan kependudukan di masa mendatang. Status PBK ditentukan dengan menerapkan pendekatan rata – rata dan standar deviasi setiap dimensi pembentuk IPBK. Status PBK berdasarkan capaian nilai IPBK diklasifikasi ke dalam 5 (lima) status. Tabel 3.4 di bawah ini menyajikan klasifikasi status PBK (dalam nama, petunjuk angka, dan petunjuk warna), berikut definisi operasional dan rentang nilai IPBK.

TABEL 3. 4 KLASIFIKASI STATUS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Klasifikasi			Definisi Operasional	Rentang Nilai IPBK
Status PBK	Petunjuk			
	Angka	Warna		
Sangat Tinggi	5	Biru 	Merupakan wilayah yang mempunyai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan dengan gabungan aspek partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan yang sudah sangat baik.	>80
Tinggi	4	Hijau 	Merupakan wilayah yang mempunyai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan dengan gabungan aspek partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan yang sudah baik.	69 - 80

Klasifikasi			Definisi Operasional	Rentang Nilai IPBK
Status PBK	Petunjuk			
	Angka	Warna		
Menengah Atas	3	Kuning 	Merupakan wilayah yang mempunyai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan dengan gabungan aspek partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan yang sudah cukup baik.	60 - 68
Menengah Bawah	2	Jingga 	Merupakan wilayah yang mempunyai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan dengan gabungan aspek partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan yang masih terbatas.	50 -59
Rendah	1	Merah 	Merupakan wilayah yang mempunyai kondisi pembangunan berwawasan kependudukan dengan gabungan aspek partisipasi, keberlanjutan, inklusivitas, holistik integratif, dan kesetaraan yang masih sangat terbatas.	<50

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

BAB IV
KONDISI PBK TAHUN 2025

**“Kualitas
penduduk hari ini,
cermin masa
depan negeri”**



BAB IV

KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN INDONESIA/NASIONAL TAHUN 2025

4.1. Capaian IPBK dan Status PBK 2025

Hasil penghitungan IPBK dan penentuan status PBK tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025. Hasil penghitungan IPBK dan status PBK tahun 2025 dimaksud meliputi tingkat nasional, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota. Lampiran 6 memuat metadata peraturan Keputusan Menteri ini, yang naskah selengkapnya dapat diakses melalui tautan <https://jdih.kemendukbangga.go.id/detail-peraturan/979>

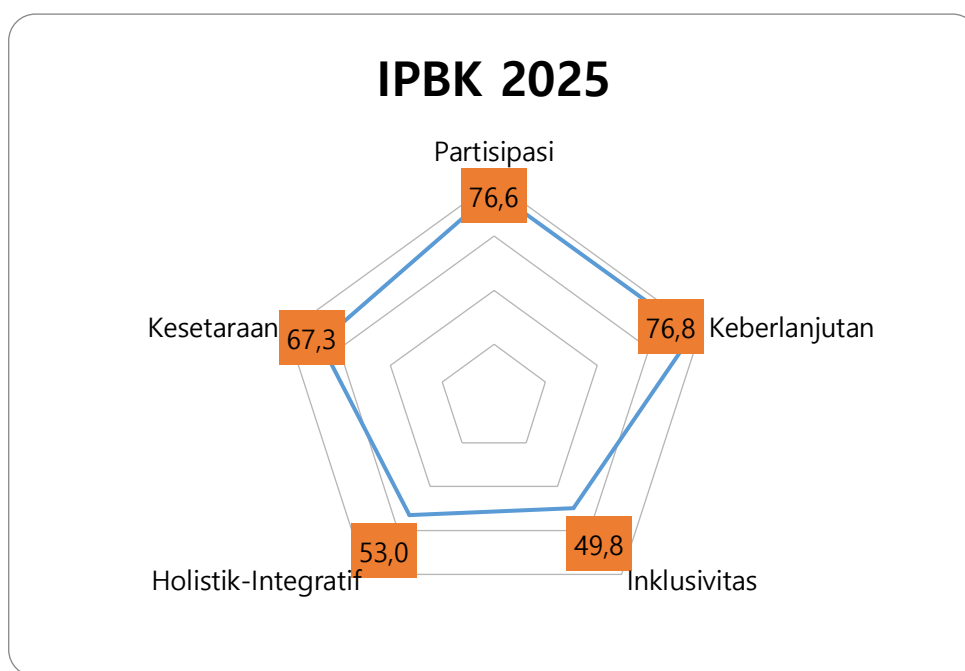
Nilai indeks 5 (lima) dimensi penyusun maupun nilai indeks komposit IPBK menggunakan skala 0 – 100. Kelima dimensi dimaksud meliputi Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Nilai IPBK bermakna positif. Artinya, nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik, dan begitu pula sebaliknya.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian IPBK pada tahun 2025 sebesar 63,7. Dengan nilai IPBK ini, maka, status PBK Indonesia pada tahun 2025 adalah Menengah Atas. IPBK dihitung dengan menggunakan metode dan data sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III. IPBK nasional

dihitung berdasarkan capaian 17 indikator pada tingkat nasional dan bukan merupakan rata – rata dari nilai IPBK seluruh provinsi.

4.2. Capaian IPBK 2025 Menurut Dimensi

Sebagaimana telah disebutkan, IPBK merupakan indeks komposit yang tersusun dari 5 (lima) dimensi yang mewakili pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Kesenjangan, dan Dimensi Holistik Integratif. Penghitungan indeks komposit masing – masing dimensi menggunakan rata-rata aritmetik. Capaian IPBK menurut dimensi disajikan pada Gambar 4.1 di bawah ini.



GAMBAR 4. 1 CAPAIAN INDEKS DIMENSI IPBK INDONESIA 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK 2025

Nilai indeks dimensi yang paling tinggi adalah Dimensi Keberlanjutan sebesar 76,8, disusul Dimensi Partisipasi sebesar 76,6. Sementara dimensi dengan nilai indeks terendah adalah Dimensi Inklusivitas sebesar 49,8. Tingginya nilai indeks Dimensi Keberlanjutan mengindikasikan bahwa IPBK mampu

memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Nilai indeks Dimensi Partisipasi yang juga tinggi menunjukkan bahwa peran dan keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan relatif sudah bagus.

Nilai Indeks Dimensi Kesenjangan sebesar 67,3 sudah cukup bagus. Namun, masih terdapat hambatan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dalam hal tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang belum setinggi yang diharapkan dan ketimpangan pendapatan yang masih terlalu lebar.

Nilai Indeks Holistik Integratif sebesar 53,0 termasuk rendah. Kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan karena dimensi ini mencerminkan capaian proses pembangunan dalam mendukung kualitas kehidupan penduduk secara keseluruhan dan terpadu. *Stunting* di antara anak bawah lima tahun (balita) dan angka kelahiran pada usia remaja masih tinggi. Sementara partisipasi pendidikan tinggi masih rendah.

Dimensi dengan nilai indeks terendah adalah Dimensi Inklusivitas (49,8). Angka ini mengindikasikan bahwa capaian proses pembangunan dalam mewujudkan inklusivitas masih di bawah harapan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih lemahnya perencanaan proses pembangunan yang inklusif, khususnya yang melibatkan kelompok penduduk rentan seperti penduduk miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia). Selain itu, capaian di bidang pendidikan, dalam hal ini rata – rata lama sekolah di antara penduduk kelompok umur 15 tahun ke atas dan penduduk usia 19 – 23 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi, juga masih rendah.

4.3. Capaian IPBK 2025 Jika Dibandingkan dengan Target Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu Indikator Tujuan dalam Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025 – 2029, target IPBK telah ditetapkan dan capaiannya diukur setiap tahun. Target nilai IPBK setiap tahunnya dalam periode tahun 2025 – 2029 ditetapkan dengan tren meningkat hingga akhir jangka menengah, yaitu tahun 2029, sebesar 69,8. Target nilai IPBK pada Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025 – 2029 serta capaian tahun 2025 terhadap target tahun berjalan dan capaian tahun 2025 terhadap akhir periode Renstra tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

TABEL 4. 1 TARGET RENSTRA KEMENDUKBANGGA/BKKBN 2025-2029 DAN CAPAIAN IPBK TAHUN 2025

	<i>Baseline</i> (Tahun 2024)	Target, Realisasi dan Capaian IPBK				
		Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Target	61,8	63,5	65,2	66,8	68,4	69,8
Realisasi Nilai IPBK (skala 0-100)		63,7				
Capaian terhadap target tahun berjalan (%)		100,3				
Capaian terhadap target akhir periode Renstra tahun 2025-2029 (%)		91,3				

Sumber: Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025 – 2029; hasil penghitungan IPBK 2025

Dengan capaian IPBK tahun 2025 sebesar 63,5, maka, persentase capaian kinerja IPBK terhadap target pada tahun berjalan adalah sebesar 100,3 persen. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra

Kemendubangga/BKKBN Tahun 2025 – 2029, yakni tahun 2029, sebesar 69,8, maka, persentase capaian kinerja IPBK adalah sebesar 91,3 persen. Diharapkan pada tahun 2026 hingga tahun 2029 capaian kinerja IPBK akan terus meningkat agar target pada akhir periode Renstra Kemendubangga/BKKBN Tahun 2025 – 2029 dapat tercapai.

4.4. Korelasi Capaian IPBK 2025 dengan IPM 2024

Selanjutnya, untuk menguji kekuatan dan kepekaan IPBK, dilakukan analisis korelasi antara IPBK dan IPM. Secara statistik, hubungan di antara kedua indeks ini dapat digambarkan melalui korelasi antara capaian IPBK dan IPM. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, kerangka konseptual IPBK dielaborasi dari IPM. Dengan demikian, indikator – indikator IPBK diharapkan akan dapat diimplementasikan secara lebih detail dan riil dalam rangka upaya peningkatan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu wilayah (UNDP, 2023b). IPM didasarkan pada tiga dimensi utama kualitas hidup, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. IPM menggambarkan capaian pembangunan yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia karena “pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan” (BPS, 2015).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (BPS, 2015). IPM telah ditetapkan sebagai salah satu indikator penting dalam proses pembangunan karena IPM dapat menentukan peringkat atau level

pembangunan suatu wilayah (BPS, 2015). Dengan kata lain, proses pembangunan di suatu wilayah dianggap berhasil dan membanggakan jika didukung dengan kenaikan nilai maupun peringkat IPM. Karena itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan pemerintah pusat secara nasional dapat terpacu untuk terus meningkatkan capaian IPM. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2 di bawah ini, capaian IPM Indonesia terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. IPM Indonesia mengalami kenaikan 0,88 poin dari 75,02 pada tahun 2024 menjadi 75,90 pada tahun 2025.

TABEL 4. 2 CAPAIAN IPM INDONESIA TAHUN 2021 – 2025

IPM, Dimensi Penyusun, dan Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
IPM	skala 0 - 100	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90
<i>Umur Panjang dan Hidup Sehat</i>						
-Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47
<i>Pengetahuan</i>						
-Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,54	8,69	8,77	13,21	9,07
-Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,08	13,1	13,15	8,85	13,30
<i>Standar Hidup Layak</i>						
-Pengeluaran Rill Per Kapita (yang disesuaikan)	ribu rupiah	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber: BPS, 2024; BPS, 2025

Secara statistik, hubungan antara IPBK dan IPM dapat digambarkan melalui korelasi antara capaian IPBK dan IPM. Analisis korelasi dilakukan antara IPBK 2025 dan IPM 2024 karena sama – sama menggunakan data tahun 2024. Nilai IPBK 2025 dan IPM 2024 secara nasional dan menurut provinsi selengkapnya disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

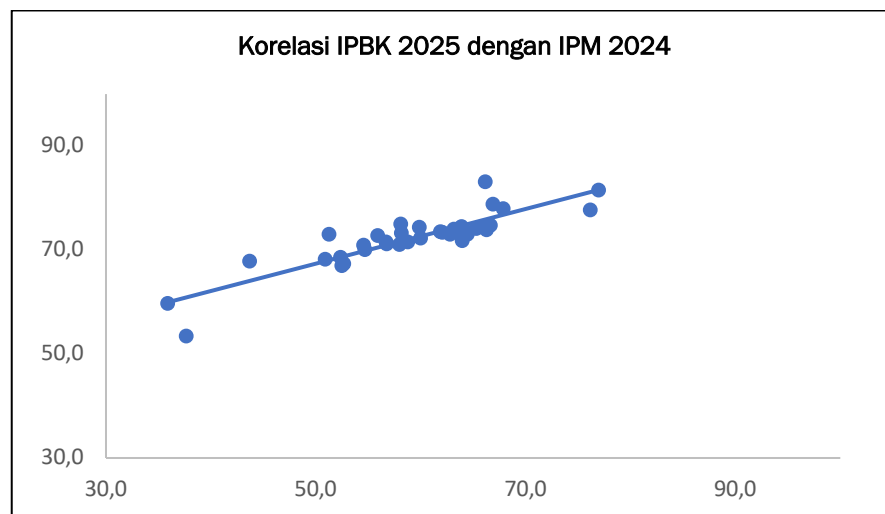
TABEL 4. 3 DATA IPBK 2025 DAN IPM 2024 MENURUT PROVINSI

ID	Provinsi	IPBK 2025	IPM 2024
11	Aceh	63,8	75,36
12	Sumatera Utara	64,1	75,76
13	Sumatera Barat	65,9	76,43
14	Riau	66,7	75,67
15	Jambi	63,7	74,36
16	Sumatera Selatan	60,0	73,84
17	Bengkulu	62,1	74,91
18	Lampung	64,0	73,13
19	Kepulauan Bangka Belitung	58,2	74,55
21	Kepulauan Riau	67,9	79,89
31	DKI Jakarta	66,2	84,15
32	Jawa Barat	59,9	74,92
33	Jawa Tengah	66,3	73,87
34	DI Yogyakarta	77,0	81,62
35	Jawa Timur	65,3	75,35
36	Banten	63,9	76,35
51	Bali	76,2	78,63
52	Nusa Tenggara Barat	54,6	73,10
53	Nusa Tenggara Timur	52,7	69,14
61	Kalimantan Barat	54,7	71,19
62	Kalimantan Tengah	55,9	74,28
63	Kalimantan Selatan	62,8	75,19
64	Kalimantan Timur	66,9	78,79
65	Kalimantan Utara	64,5	73,41
71	Sulawesi Utara	58,1	75,68
72	Sulawesi Tengah	56,7	72,24
73	Sulawesi Selatan	63,2	75,18
74	Sulawesi Tenggara	61,9	73,62
75	Gorontalo	56,8	72,01
76	Sulawesi Barat	50,9	70,46
81	Maluku	58,8	73,40
82	Maluku Utara	58,0	71,84
91	Papua	51,3	73,83
92	Papua Barat	52,5	67,69
93	Papua Selatan	43,7	68,86
94	Papua Tengah	35,9	60,25
95	Papua Pegunungan	37,7	54,43

ID	Provinsi	IPBK 2025	IPM 2024
96	Papua Barat Daya	52,4	69,65
	INDONESIA	63,7	75,02

Sumber: Hasil penghitungan IPBK 2025; BPS, 2025; BPS, 2024

Selanjutnya, gambaran korelasi antara IPBK 2025 dan IPM 2024 selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 4.2 di bawah ini. Hasil analisis korelasi antara IPBK 2025 dan IPM 2024 menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,87. Artinya, kedua indeks memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Pada diagram pencar tampak jelas bahwa hubungan antara IPBK dan IPM memang positif sehingga ada kemungkinan besar bahwa peningkatan IPBK akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kenaikan dalam capaian IPBK, maka, IPM juga akan cenderung mengalami peningkatan.



GAMBAR 4. 2 KORELASI IPBK 2025 DENGAN IPM 2024

Sumber: Hasil analisis korelasi IPBK 2025 dengan IPM 2024

Bukti keterkaitan antara IPBK dan IPM secara statistik ini sangat penting, terutama untuk memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan IPM. Indikator – indikator penyusun IPM merupakan *outcome*, sementara indikator – indikator penyusun IPBK lebih menekankan pada proses dan *output*

pembangunan. Proses dan *output* dalam pembangunan yang baik diperkirakan akan dapat menghasilkan *outcome* yang baik pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karena IPBK memiliki korelasi positif yang tinggi dengan IPM, maka, IPBK dapat dijadikan sebagai alat ungkit capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, IPBK menjadi langkah strategis dalam intervensi pembangunan kualitas manusia.

BAB V
KONDISI PBK
PROVINSI TAHUN 2025

**“Jumlah adalah
angka,
kesejahteraan adalah
makna.”**



BAB V

KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN PROVINSI TAHUN 2025

5.1. Distribusi Data Indikator IPBK Provinsi 2025

Penghitungan IPBK provinsi tahun 2025 merupakan hasil pengolahan data dari 17 indikator penyusun IPBK pada tingkat provinsi dengan sumber data sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab III. Data ketujuh belas indikator IPBK tahun 2025 tersedia di seluruh 38 provinsi dengan cakupan data sebesar 100 persen. Distribusi data ketujuh belas indikator IPBK provinsi tahun 2025 dengan nilai terendah (min = minimal), nilai tertinggi (max = maksimum), nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (median), dan nilai standar deviasi (std.dev. = *standard deviation*) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

TABEL 5. 1 DISTRIBUSI DATA INDIKATOR IPBK PROVINSI TAHUN 2025

Dimensi	Indikator	Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
1. Dimensi Partisipasi	1 Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	38	38	100	58,06	97,28	76,86	75,50	9,89
	2 Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	38	38	100	41,84	99,97	92,98	97,41	11,30
	3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	38	38	100	1,32	6,75	4,39	4,19	1,41

Dimensi	Indikator		Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	38	38	100	1,82	2,71	2,29	2,26	0,25
	2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	38	38	100	4,44	86,68	61,75	65,32	16,18
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	38	38	100	12,61	96,83	81,21	83,36	15,07
3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	38	38	100	4,00	32,97	11,09	10,13	6,75
	2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	38	38	100	47,00	91,76	77,08	82,79	13,94
	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	38	38	100	5,10	11,49	9,29	9,34	1,15
	4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	38	38	100	11,86	81,30	29,09	27,13	11,56

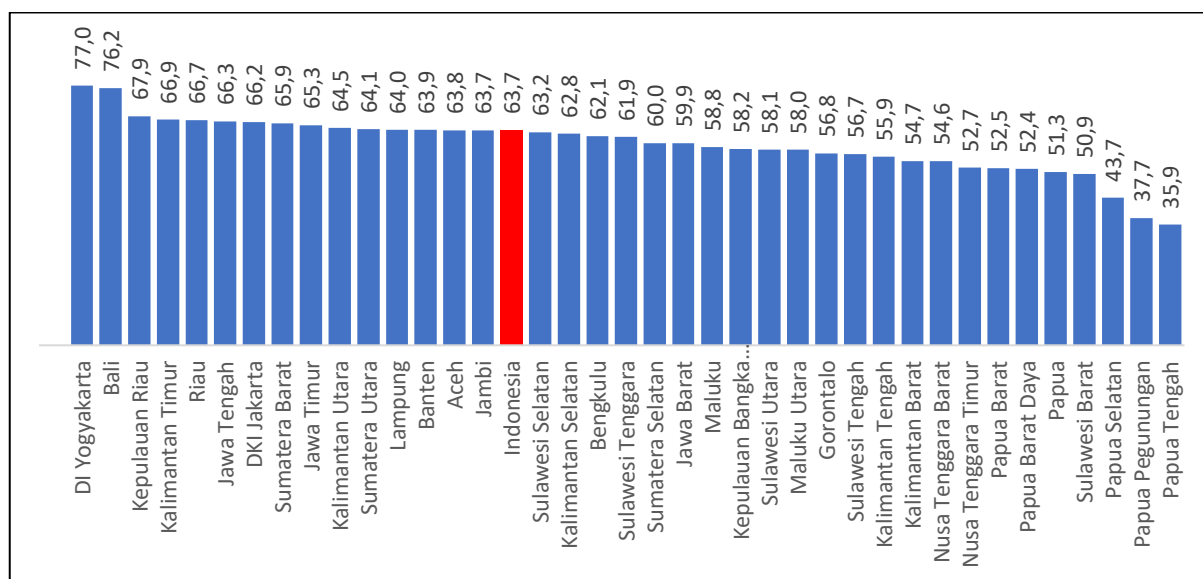
Dimensi	Indikator		Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
	5	Persentase Lansia Mandiri	38	38	100	21,33	67,74	34,56	33,92	7,53
4. Dimensi Holistik Integratif	1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	38	38	100	8,70	40,00	22,93	22,55	6,65
	2	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	38	38	100	7,80	47,00	26,69	26,15	11,57
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	38	38	100	41,84	99,97	92,98	97,41	11,30
5. Dimensi Kesetaraan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	38	38	100	47,05	85,71	56,81	55,41	7,58
	2	Persentase Akses Informasi	38	38	100	7,64	93,35	73,16	76,15	15,55
	3	Rasio Gini	38	38	100	0,24	0,44	0,34	0,34	0,05

Sumber: Hasil pengolahan data indikator IPBK provinsi 2025

5.2. Capaian IPBK Provinsi 2025

Capaian IPBK 2025 tingkat provinsi sangat bervariasi. Gambar 5.1 di bawah ini menampilkan gambaran capaian IPBK di tingkat provinsi pada tahun 2025. Provinsi dengan capaian tertinggi (77) adalah Provinsi DI Yogyakarta sedangkan capaian IPBK terendah terdapat di Provinsi Papua Tengah dengan nilai IPBK sebesar 35,9. Artinya, terdapat disparitas senilai 41,1 poin dari capaian IPBK tertinggi dan terendah. Sebanyak lima belas provinsi mencapai nilai IPBK yang sama atau lebih besar dari capaian nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa pembangunan kependudukan telah dilakukan di seluruh wilayah, namun, masih menyisakan tantangan kesenjangan antarprovinsi.

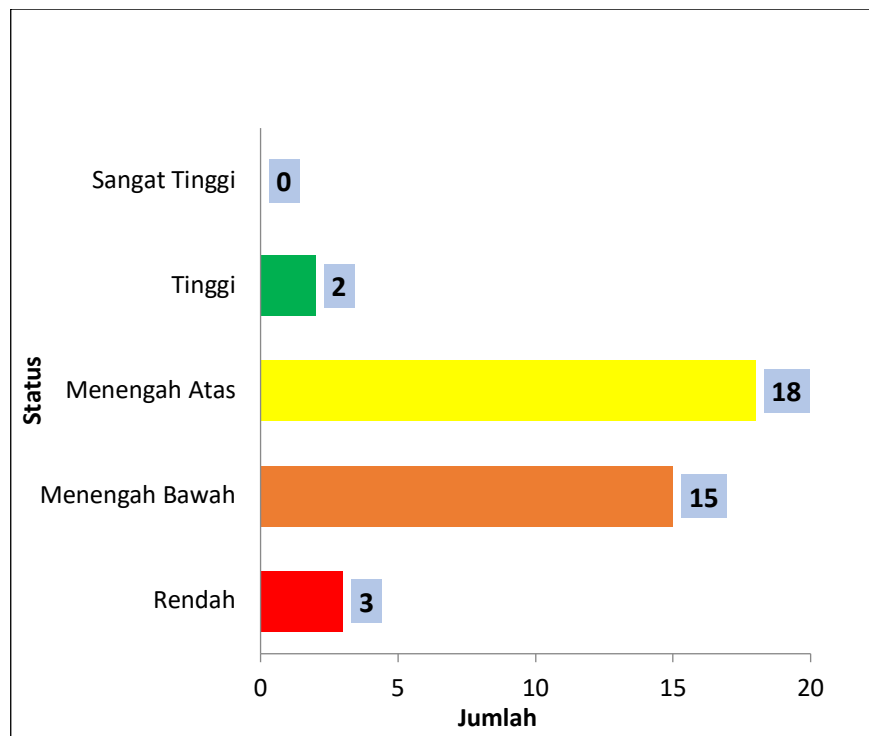


GAMBAR 5. 1 CAPAIAN IPBK PROVINSI 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK 2025

5.3. Status PBK Provinsi 2025

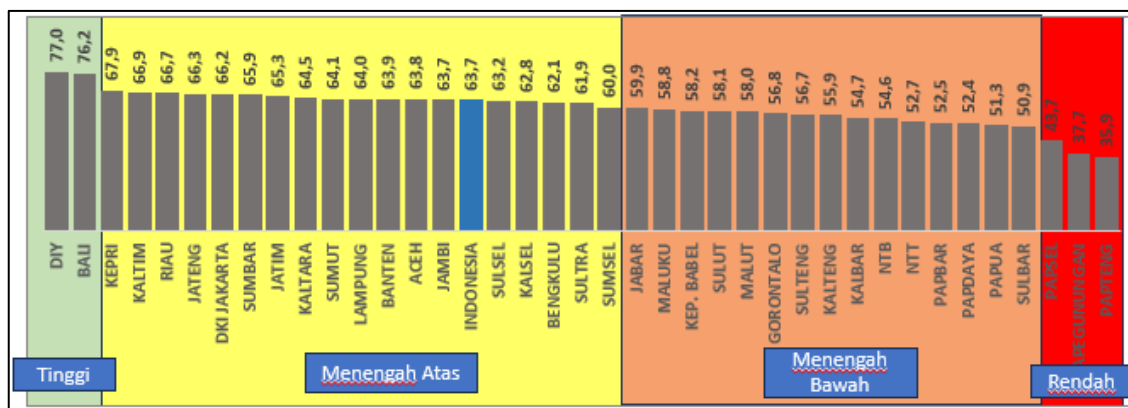
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab III, Status PBK ditentukan berdasarkan capaian nilai IPBK yang diklasifikasi ke dalam 5 (lima) status. Berdasarkan hasil penghitungan IPBK provinsi tahun 2025, tampak bahwa hampir separuh provinsi di Indonesia berada pada Status PBK Menengah Atas dengan jumlah 18 provinsi. Sementara itu, lima belas provinsi masih berada pada Status PBK Menengah Bawah. Terdapat 3 (tiga) provinsi lainnya tergolong dalam status PBK Rendah. Tahun 2025, hanya 2 (dua) provinsi yang berhasil mencapai Status PBK Tinggi. Sebaran Status PBK pada 38 provinsi pada tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.



GAMBAR 5. 2 STATUS PBK 38 PROVINSI DI INDONESIA, 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Status PBK masing – masing provinsi secara lebih rinci ditampilkan pada Gambar 5.3. Di antara 38 provinsi, hanya Provinsi DI Yogyakarta dan Bali yang telah berhasil mencapai Status PBK Tinggi. Di sisi lain, masih terdapat 3 (tiga) provinsi yang berada pada Status PBK Rendah, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang masih nyata antarwilayah di Indonesia.



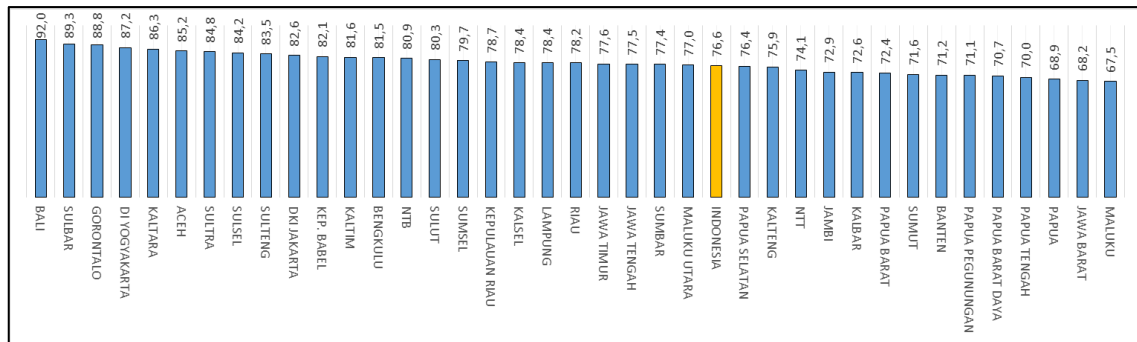
GAMBAR 5. 3 NILAI IPBK DAN STATUS PBK PROVINSI DI INDONESIA, 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

5.4. Capaian IPBK Provinsi 2025 Menurut Dimensi

IPBK merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 5 (lima) dimensi yang mewakili pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Karena itu, nilai IPBK provinsi pada tahun 2025 dapat ditinjau menurut nilai indeks kelima dimensi pembentuk IPBK. Kelima indeks dimensi dimaksud meliputi Indeks Partisipasi, Indeks Keberlanjutan, Indeks Pemihakan, Indeks Holistik Integratif, dan Indeks Kesenjangan. Distribusi nilai masing – masing indeks dimensi pada 38 provinsi dapat dibandingkan dengan nilai indeks dimensi yang bersangkutan pada tingkat nasional sebagai barometer.

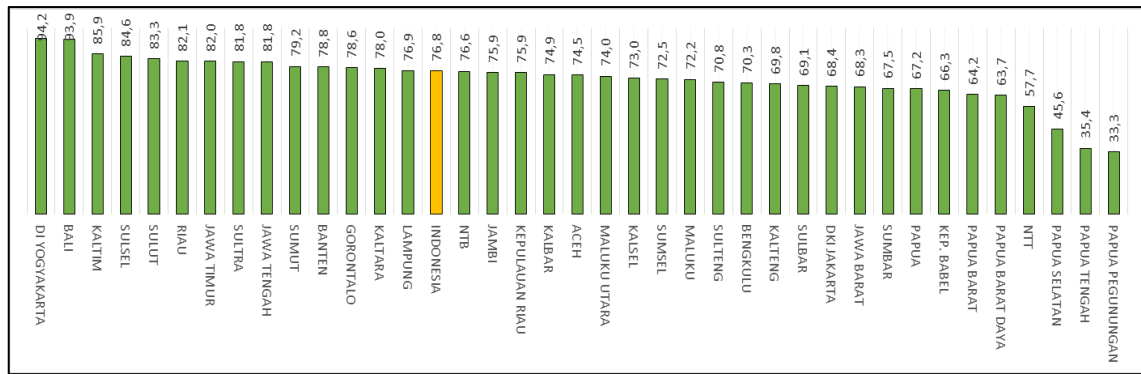
Secara umum, nilai Indeks Partisipasi IPBK provinsi sudah baik karena lebih dari separuh provinsi memiliki nilai Indeks Partisipasi di atas nasional. Selain itu, seluruh provinsi kecuali Provinsi Papua, Jawa Barat, dan Maluku telah mencapai nilai Indeks Partisipasi di atas 70,0. Walaupun demikian, nilai Indeks Partisipasi terendah di Provinsi Maluku pun sudah di atas 60,0, yakni 67,5. Sementara itu, nilai Indeks Partisipasi tertinggi dicapai Provinsi Bali dengan nilai 92,0. Nilai Indeks Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan pilar fundamental pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Karena Dimensi Partisipasi mencerminkan peran aktif penduduk dalam sistem perlindungan sosial, kepemilikan identitas hukum, dan aktivitas ekonomi produktif, maka upaya peningkatannya harus dilakukan melalui sinergi kebijakan lintas sektor. Distribusi nilai Indeks Partisipasi provinsi tahun 2025 selengkapnya jika dibandingkan dengan nilai Indeks Partisipasi Indonesia/nasional (76,6) disajikan dalam Gambar 5.4 di bawah ini.



GAMBAR 5. 4 INDEKS PARTISIPASI MENURUT PROVINSI 2025

Sumber: Hasil perhitungan IPBK tahun 2025

Sementara itu, capaian nilai Indeks Keberlanjutan provinsi pada tahun 2025 cukup baik. Sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 5.5 di bawah ini, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Keberlanjutan Indonesia/nasional sebesar 76,8, sebanyak 14 provinsi telah mencapai nilai Indeks Keberlanjutan di atas nilai nasional. Provinsi DI Yogyakarta meraih nilai Indeks Keberlanjutan tertinggi dengan nilai 94,2 sedangkan nilai terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan (33,3) sehingga terdapat disparitas yang sangat lebar (60,8 poin). Namun, masih terdapat 3 (tiga) provinsi, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan dengan nilai Indeks Keberlanjutan yang jauh di bawah 50. Merujuk kepada pengertian Dimensi Keberlanjutan yang disarikan dari prinsip pembangunan berkelanjutan, masih adanya provinsi yang mempunyai nilai Indeks Keberlanjutan rendah menunjukkan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan di provinsi tersebut belum menjamin keberlanjutan dalam hal lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara makro, nilai Indeks Keberlanjutan yang rendah berarti provinsi tersebut belum mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk, kondisi hunian, dan sanitasi dasar.

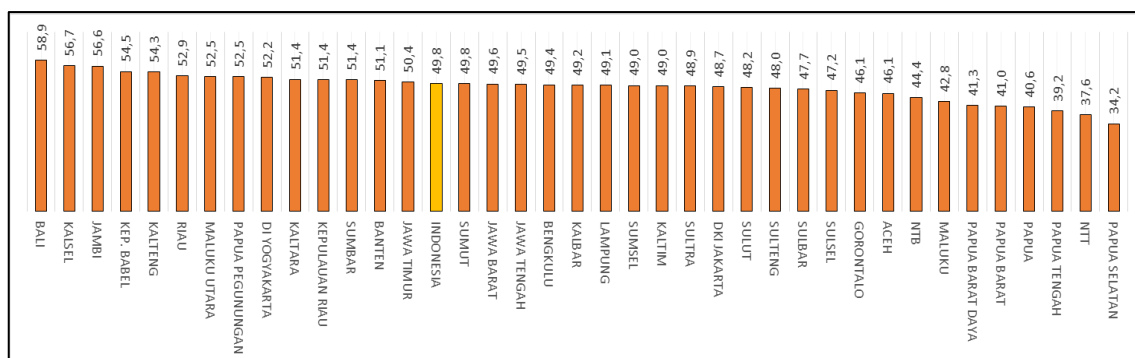


GAMBAR 5. 5 INDEKS KEBERLANJUTAN MENURUT PROVINSI 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Di tingkat nasional, Dimensi Inklusivitas menjadi dimensi penyusun IPBK 2025 dengan nilai indeks terendah. Di tingkat provinsi, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Inklusivitas Indonesia/nasional sebesar 49,8, masih terdapat 24 provinsi dengan nilai Indeks Inklusivitas di bawah nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 5.6 di bawah ini. Nilai Indeks Inklusivitas tertinggi dicapai Provinsi Bali dengan nilai 58,9 sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Papua Selatan dengan nilai 34,2.

Dimensi Inklusivitas menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap segenap kalangan masyarakat dalam pembangunan. Namun, nilai Indeks Inklusivitas yang rendah mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan (miskin, disabilitas, lansia, dan perempuan usia subur). Untuk itu, peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan perlindungan dan kesempatan, khususnya kepada kelompok penduduk rentan yang meliputi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lansia perlu dioptimalisasi.

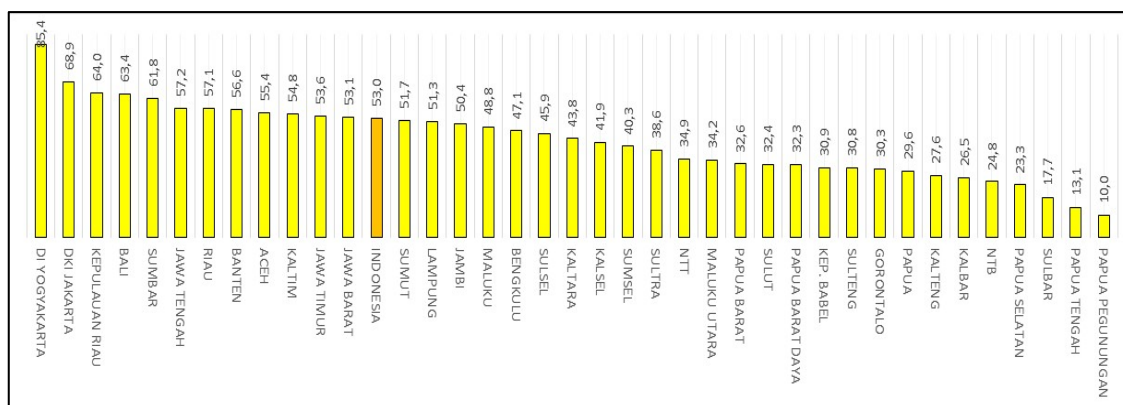


GAMBAR 5. 6 INDEKS INKLUSIVITAS MENURUT PROVINSI 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Selanjutnya, capaian nilai Indeks Holistik Integratif provinsi tahun 2025 juga belum sesuai dengan harapan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Holistik Integratif nasional (53,0) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 5.7 di bawah ini, terdapat 26 provinsi dengan nilai di bawah nasional. Terdapat disparitas yang sangat lebar (75,4 poin) antara nilai Indeks Holistik Integratif tertinggi (85,4), yang diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai terendah di Provinsi Papua Pegunungan, yang hanya sebesar 10,00.

Dimensi Holistik Integratif merupakan bagian penting dari kerangka pembentukan IPBK karena menilai keterpaduan aspek kesehatan, pendidikan, dan reproduksi remaja dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nilai Dimensi Holistik Integratif yang rendah menunjukkan bahwa daerah belum berhasil mewujudkan pembangunan manusia yang utuh dan berkesinambungan. Artinya, siklus kehidupan keluarga antara kecukupan gizi, kesehatan reproduksi, dan pendidikan tinggi masih terputus sehingga risiko kemiskinan struktural yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM penduduk muda masih tinggi.

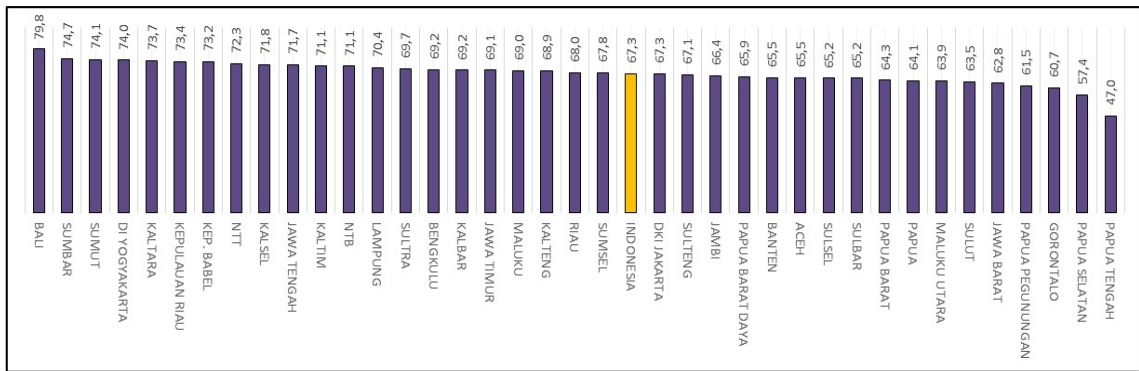


GAMBAR 5. 7 INDEKS HOLISTIK INTEGRATIF MENURUT PROVINSI 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Dimensi Kesetaraan mengukur sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki, sejauh mana penduduk terpapar informasi secara digital, dan semua kelompok masyarakat memiliki akses dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Fokus utamanya adalah kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi, kesetaraan dalam akses informasi dan literasi digital, serta pemerataan kesejahteraan antarkelompok penduduk.

Gambar 5.8 di bawah ini memperlihatkan distribusi nilai Indeks Kesetaraan provinsi tahun 2025 jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kesetaraan Indonesia/nasional sebesar 64,3. Nilai Indeks Kesetaraan IPBK provinsi tertinggi terdapat di Provinsi Bali dengan nilai 79,8 sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Papua Tengah dengan nilai 47,0. Adanya disparitas sebesar 32,8 poin menunjukkan perbedaan yang cukup besar terkait upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mewujudkan kesetaraan di antara berbagai kelompok masyarakat dalam pembangunan. Jika suatu provinsi memiliki nilai Indeks Kesetaraan rendah, hal ini dimaknai sebagai pembangunan ekonomi dan sosial belum memberikan kesempatan dan manfaat yang seimbang antara laki – laki dan perempuan, serta antarkelompok penduduk.



GAMBAR 5. 8 INDEKS KESETARAAN MENURUT PROVINSI 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

BAB VI
KONDISI PBK
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

**“IPBK :
dari data ke kebijakan,
dari kebijakan ke
kesejahteraan.”**



BAB VI

KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

6.1. Distribusi Data Indikator IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa data ketujuhbelas indikator IPBK tahun 2025 tersedia di seluruh 514 kabupaten/kota, yang berarti cakupan sebesar 100 persen. Distribusi data 17 indikator IPBK kabupaten/kota tahun 2025 dengan nilai terendah (*min=minimum*), nilai tertinggi (*max=maximum*), nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), dan nilai standar deviasi (*std dev=standard deviation*) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

TABEL 6. 1 DISTRIBUSI DATA INDIKATOR IPBK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Dimensi	Indikator		Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	514	514	100	22,75	100,00	76,61	78,77	15,34
	2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	514	514	100	26,88	100,00	93,80	98,87	12,52
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	514	514	100	0,07	11,44	4,13	3,84	1,94
2, Dimensi Keberlan	5	Total Fertility Rate (TFR)	514	514	100	1,45	3,93	2,30	2,23	0,36

Dimensi	Indikator		Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
jutan	6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	514	514	100	0,25	95,28	62,48	66,43	19,86
	7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	514	514	100	2,08	99,68	80,44	85,55	17,52
3, Dimensi Inklusivitas	8	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	514	514	100	2,23	41,42	11,17	9,32	7,07
	9	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	514	514	100	0,51	100,00	79,58	83,87	16,72
	10	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	514	514	100	2,11	12,88	9,10	8,97	1,43
	11	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	514	514	100	1,85	100,00	27,55	25,39	15,90
	12	Persentase Lansia Mandiri	514	514	100	14,40	74,90	42,82	43,40	8,66

Dimensi	Indikator		Jumlah Data	Data Valid	Cakupan Data (%)	Min	Maks	Mean	Median	Standard Deviation
4, Dimensi Holistik Integratif	13	Prevalensi Tengkes/Stunting pada Balita	514	514	100	5,20	56,80	22,71	22,05	8,14
	14	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	514	514	100	2,90	78,10	25,27	22,95	13,86
	15	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	514	514	100	1,63	98,91	29,06	26,15	14,10
	16	Prevalensi Tengkes/Stunting pada Balita	514	514	100	5,20	56,80	22,71	22,05	8,14
	17	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	514	514	100	2,90	78,10	25,27	22,95	13,86
5. Dimensi Kesenjangan	18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	514	514	100	30,82	95,08	58,11	56,84	10,34
	19	Persentase Akses Informasi	514	514	100	0,07	96,68	72,59	74,47	15,85
	20	Rasio Gini	514	514	100	0,16	0,51	0,31	0,30	0,06

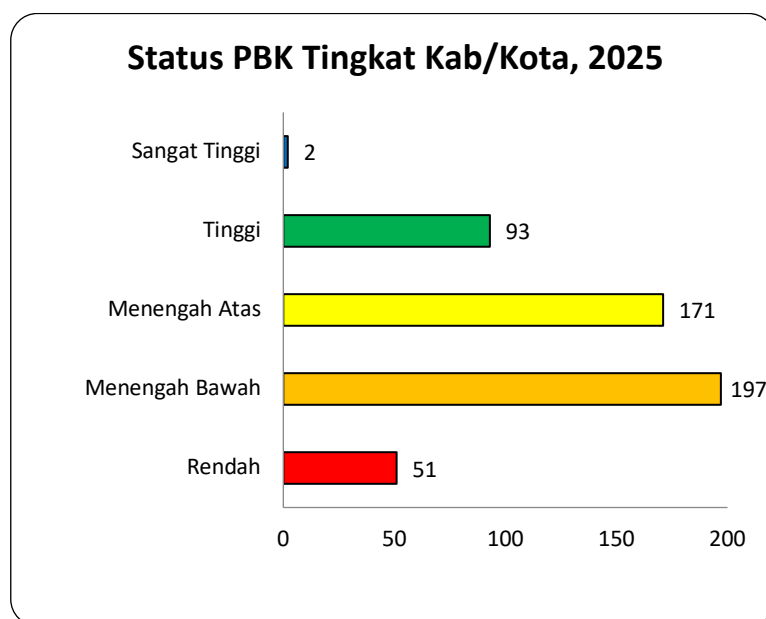
Sumber: Hasil pengolahan data indikator IPBK kabupaten/kota 2025

6.2 Status PBK Kabupaten/Kota 2025 Secara Nasional

Penghitungan IPBK pada tingkat kabupaten/kota tahun 2025 dilaksanakan untuk seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang terbagi atas 416 kabupaten dan 98 kota. Hasil penghitungan IPBK tahun 2025 pada tingkat

kabupaten/kota, yang disajikan secara lengkap menurut provinsi, dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, status Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) kabupaten/kota tahun 2025 terbagi ke dalam lima kategori sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6.1 di bawah ini. Patut dicermati bahwa Status PBK dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak adalah Menengah Bawah (197 kabupaten/kota), diikuti Menengah Atas (171 kabupaten/kota), Tinggi (93 kabupaten/kota), Rendah (51 kabupaten/kota), dan Sangat Tinggi (2 kabupaten/kota). Kedua kabupaten/kota yang berhasil mencapai status PBK Sangat Tinggi pada tahun 2025 adalah Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, keduanya terletak di Provinsi Bali. Status PBK Sangat Tinggi di kedua kabupaten ini dapat menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut telah relatif baik dalam mengintegrasikan variabel – variabel kependudukan ke dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.



GAMBAR 6. 1 STATUS PBK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

6.3. Disparitas Capaian IPBK Kabupaten/Kota 2025 Secara Nasional

Disparitas dimaknai sebagai perbedaan atau variasi capaian antarwilayah yang diukur berdasarkan selisih antara nilai capaian tertinggi dan terendah dalam satu lingkup penghitungan. Dalam konteks ini, disparitas nilai IPBK kabupaten/kota menggambarkan kesenjangan capaian pembangunan berwawasan kependudukan antara kabupaten/kota dengan nilai IPBK tertinggi dan terendah.

Pada tahun 2025, nilai IPBK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan nilai 85,2. Sementara itu, nilai IPBK terendah terdapat pada Kabupaten Mappi (Provinsi Papua Selatan) dan Dogiyai (Provinsi Papua Tengah) dengan nilai 30,3. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2, disparitas nilai IPBK antara kabupaten/kota dengan capaian tertinggi dan terendah mencapai 54,9 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat lebar dalam pembangunan berwawasan kependudukan pada tingkat kabupaten/kota sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah untuk mempersempit kesenjangan tersebut. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi disparitas tersebut adalah penguatan kapasitas perencanaan daerah, peningkatan kualitas layanan Bangga Kencana, pemerataan intervensi program pada wilayah prioritas, optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

TABEL 6. 2 DISPARITAS CAPAIAN IPBK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Tertinggi		Terendah		Disparitas
Kabupaten Badung (Provinsi Bali)	85,2	Kabupaten Mappi (Provinsi Papua Selatan) dan Dogiyai (Provinsi Papua Tengah)	30,3	54,9

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

6.4 Disparitas Capaian IPBK 2025 Tingkat Kabupaten/Kota Menurut Provinsi

Hasil penghitungan IPBK tahun 2025 pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi di seluruh provinsi di Indonesia. Besaran selisih antara nilai IPBK tertinggi dan terendah pada tingkat kabupaten/kota di setiap provinsi bervariasi sesuai dengan capaian tertinggi dan terendah yang dicapai masing-masing provinsi. Nilai tertinggi dan terendah IPBK kabupaten/kota menurut provinsi secara lengkap disajikan pada Tabel 6.3 di bawah ini.

TABEL 6. 3 NILAI IPBK KABUPATEN/KOTA TERTINGGI DAN TERENDAH MENURUT PROVINSI, 2025

Kode Provinsi	Provinsi	Tertinggi			Terendah		
		Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK	Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK
11	Aceh	1171	Kota Banda Aceh	75,7	1110	Kab. Aceh Singkil	54,2
12	Sumatera Utara	1216	Kab. Humbang Hasundutan	74,6	1213	Kab. Mandailing Natal	47,8
13	Sumatera Barat	1372	Kota Solok	74,9	1309	Kab. Kepulauan Mentawai	51,9
14	Riau	1471	Kota Pekanbaru	76,9	1404	Kab. Indragiri Hilir	54,0
15	Jambi	1571	Kota Jambi	73,9	1507	Kab. Tanjung Jabung Timur	55,7
16	Sumatera Selatan	1671	Kota Palembang	68,9	1611	Kab. Empat Lawang	43,6
17	Bengkulu	1771	Kota Bengkulu	72,5	1707	Kab. Lebong	50,9
18	Lampung	1872	Kota Metro	76,6	1803	Kab. Lampung Utara	56,5
19	Kepulauan Bangka Belitung	1971	Kota Pangkal Pinang	67,8	1903	Kab. Bangka Selatan	51,9
21	Kepulauan Riau	2171	Kota Batam	69,5	2104	Kab. Lingga	53,6
31	DKI Jakarta	3174	Kota Adm. Jakarta Selatan	69,2	3172	Kota Adm. Jakarta Utara	63,0
32	Jawa Barat	3275	Kota Bekasi	71,0	3205	Kab. Garut	49,8
33	Jawa Tengah	3373	Kota Salatiga	77,5	3304	Kab. Banjarnegara	50,5
34	DI Yogyakarta	3471	Kota Yogyakarta	78,2	3403	Kab. Gunung Kidul	71,2
35	Jawa Timur	3576	Kota Mojokerto	76,1	3526	Kab. Bangkalan	47,1

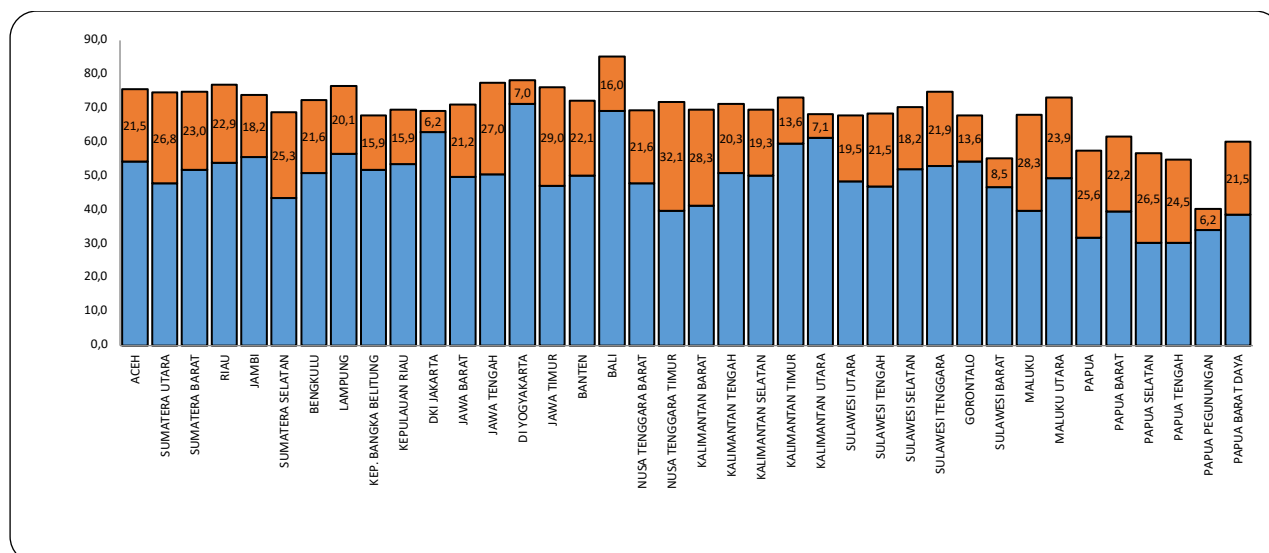
Kode Provinsi	Provinsi	Tertinggi			Terendah		
		Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK	Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK
36	Banten	3674	Kota Tangerang Selatan	72,3	3602	Kab. Lebak	50,2
51	Bali	5103	Kab. Badung	85,2	5107	Kab. Karang Asem	69,2
52	Nusa Tenggara Barat	5271	Kota Mataram	69,4	5208	Kab. Lombok Utara	47,8
53	Nusa Tenggara Timur	5371	Kota Kupang	71,9	5318	Kab. Sumba Barat Daya	39,8
61	Kalimantan Barat	6171	Kota Pontianak	69,6	6110	Kab. Melawi	41,3
62	Kalimantan Tengah	6271	Kota Palangkaraya	71,2	6211	Kab. Pulang Pisau	50,9
63	Kalimantan Selatan	6311	Kab. Balangan	69,5	6302	Kab. Kota Baru	50,2
64	Kalimantan Timur	6472	Kota Samarinda	73,1	6411	Kab. Mahakan Hulu	59,5
65	Kalimantan Utara	6504	Kab. Tana Tidung	68,3	6501	Kab. Bulungan	61,2
71	Sulawesi Utara	7173	Kota Tomohon	67,9	7108	Kab. Bolaang Mongondow Utara	48,4
72	Sulawesi Tengah	7271	Kota Palu	68,5	7205	Kab. Buol	47,0
73	Sulawesi Selatan	7373	Kota Palopo	70,3	7304	Kab. Jeneponto	52,1
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	74,8	7413	Kab. Muna Barat	52,9
75	Gorontalo	7571	Kota Gorontalo	67,9	7501	Kab. Gorontalo	54,3
76	Sulawesi Barat	7604	Kab. Polewali Mandar	55,2	7601	Kab. Pasang Kayu	46,7
81	Maluku	8171	Kota Ambon	68,1	8107	Kab. Kepulauan Aru	39,8
82	Maluku Utara	8271	Kota Ternate	73,2	8208	Kab. Pulau Taliabu	49,3
91	Papua	9171	Kota Jayapura	57,5	9120	Kab. Memberamo Raya	31,9
92	Papua Barat	9202	Kab. Manokwari	61,7	9207	Kab. Teluk Wondama	39,5
93	Papua Selatan	9301	Kab. Merauke	56,8	9303	Kab. Mappi	30,3
94	Papua Tengah	9404	Kab. Mimika	54,8	9406	Kab. Dogiyai	30,3
95	Papua Pegunungan	9503	Kab. Yahukimo	40,3	9502	Kab. Pegunungan Bintang	34,1

Kode Provinsi	Provinsi	Tertinggi			Terendah		
		Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK	Kode Kab/Kota	Kabupaten/kota	IPBK
96	Papua Barat Daya	9671	Kota Sorong	60,2	9603	Kab. Raja Ampat	38,7

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Kesenjangan antardaerah kabupaten/kota pada tahun 2025 juga tecermin dari adanya kabupaten/kota dengan nilai IPBK terendah di suatu provinsi yang justru memiliki capaian lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPBK tertinggi kabupaten/kota di provinsi lainnya. Sebagai contoh, Kabupaten Karangasem yang memiliki nilai IPBK 69,2 merupakan kabupaten/kota dengan nilai terendah di Provinsi Bali. Namun, nilai tersebut masih lebih tinggi dari nilai IPBK tertinggi yang dicapai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Polewali Mandar, nilai 55,2), Provinsi Papua (Kota Jayapura, nilai 57,5), Provinsi Papua Barat (Kab. Manokwari, nilai 61,7), Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Mimika, nilai 54,8), Provinsi Papua Pegunungan (Kabupaten Yahukimo, nilai 40,3) dan Provinsi Papua Barat Daya (Kota Sorong, nilai 60,2).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2025 disparitas capaian IPBK tingkat kabupaten/kota secara nasional mencapai 54,9. Namun, apabila dilihat pada tingkat provinsi, disparitas nilai IPBK kabupaten/kota relatif lebih rendah dibandingkan disparitas nasional. Provinsi DKI Jakarta dan Papua Pegunungan memiliki disparitas terendah, yaitu sebesar 6,2, sedangkan disparitas tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 32,1. Disparitas nilai IPBK tingkat kabupaten/kota menurut provinsi secara lebih rinci disajikan pada Gambar 6.2 di bawah ini.



GAMBAR 6. 2 DISPARITAS NILAI IPBK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 MENURUT PROVINSI

Sumber: Hasil penghitungan IPBK tahun 2025

Pada umumnya, provinsi dengan disparitas nilai IPBK yang rendah merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang relatif sedikit. Dengan jumlah kabupaten/kota yang tidak banyak dan wilayah yang cenderung berdekatan dengan pusat pemerintahan provinsi, keterjangkauan pembangunan menjadi lebih baik sehingga pelaksanaan program serta capaian pembangunan berwawasan kependudukan cenderung lebih merata dibandingkan dengan provinsi yang memiliki disparitas lebih tinggi.

Disparitas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.2 di atas menunjukkan adanya perbedaan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama. Semakin rendah nilai disparitas, semakin kecil perbedaan capaian antardaerah. Sebaliknya, semakin tinggi nilai disparitas, semakin besar jarak capaian yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu provinsi belum berlangsung secara merata. Karena itu, diperlukan upaya khusus untuk memajukan proses pembangunan di dalam satu provinsi agar lebih merata.

BAB VII
PROFIL KONDISI PBK
DI 38 PROVINSI TAHUN 2025

**“Dalam setiap
populasi,
tersimpan
potensi”**



BAB VII

PROFIL KONDISI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DI 38 PROVINSI TAHUN 2025

Bab ini menyajikan profil pembangunan berwawasan kependudukan di 38 provinsi pada tahun 2025. Profil pembangunan berwawasan kependudukan dimaksud disusun dari capaian nilai IPBK, status PBK, dan capaian 5 (lima) dimensi penyusun IPBK tingkat provinsi, serta sebaran status PBK menurut kabupaten/kota pada setiap provinsi.

Profil pembangunan berwawasan kependudukan setiap provinsi menjadi potret hasil dari proses pembangunan yang telah dilakukan, termasuk yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen operasional pembangunan kependudukan di pusat dan daerah. Karena itu, adanya profil ini akan dapat mempermudah upaya peningkatan pembangunan berwawasan kependudukan yang perlu dilakukan pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Grafik radar menyajikan perbandingan antara capaian kelima dimensi pembentuk IPBK di masing-masing provinsi dengan di tingkat nasional. Dengan demikian, potret kondisi pembangunan berwawasan kependudukan menurut dimensi di setiap provinsi dapat dibandingkan dengan kondisi di tingkat nasional. Hal ini penting guna mengevaluasi apakah terdapat disparitas atau kesenjangan antara kondisi di sebuah provinsi dan di tingkat nasional, yang merupakan tolok ukur pembangunan nasional.

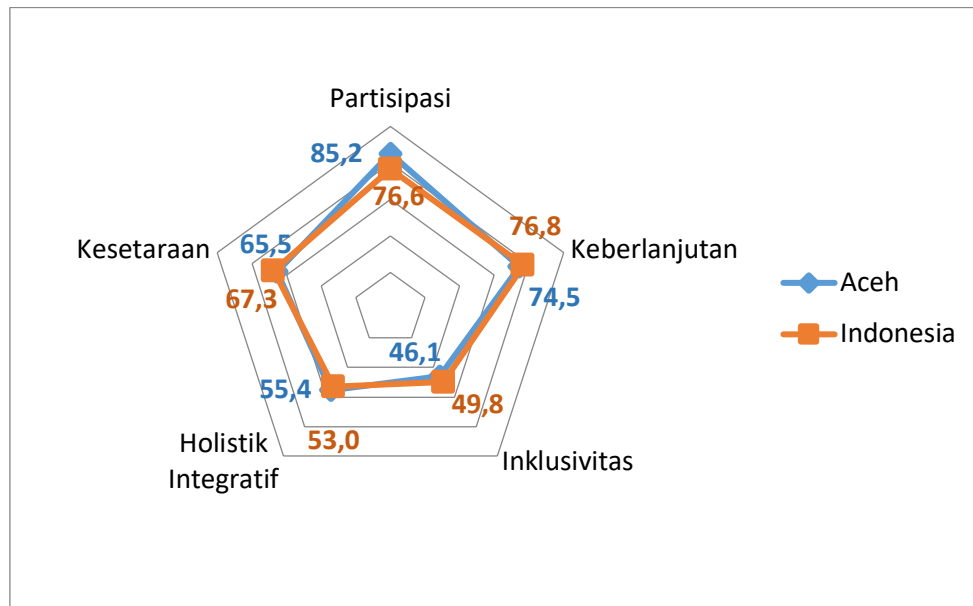
Sementara itu, profil pembangunan berwawasan kependudukan yang diciptakan dari sebaran status PBK menurut kabupaten/kota di sebuah provinsi memberikan gambaran disparitas kondisi antarwilayah di dalam provinsi tersebut. Karena itu, profil tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan penentuan intervensi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan melalui pengintegrasian kependudukan ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Provinsi Aceh

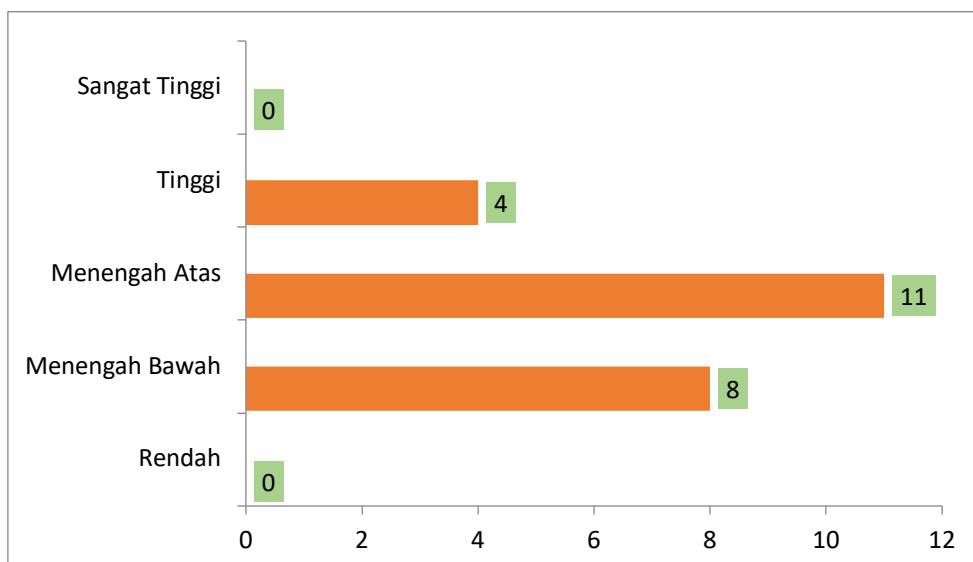
Capaian IPBK : 63.8

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Aceh, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Aceh, 2025

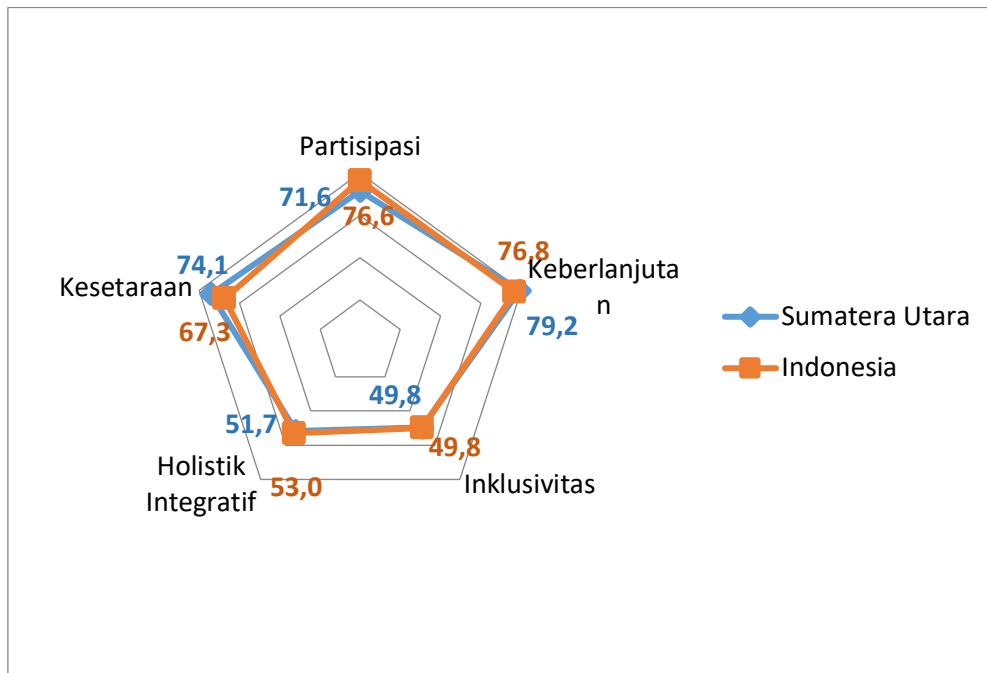


Provinsi Sumatera Utara

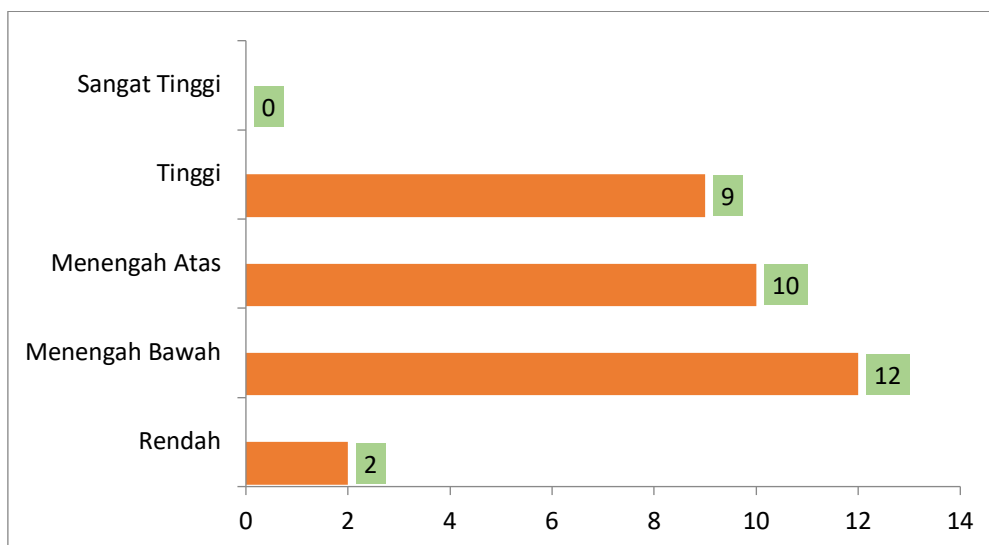
Capaian IPBK : 64,1

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sumatera Utara, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sumatera Utara, 2025

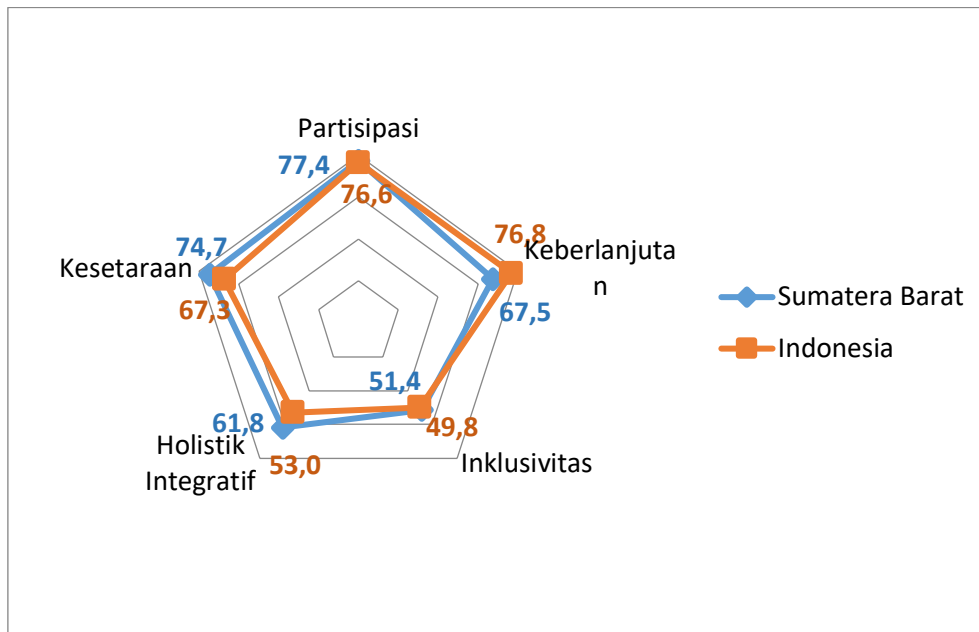


Provinsi Sumatera Barat

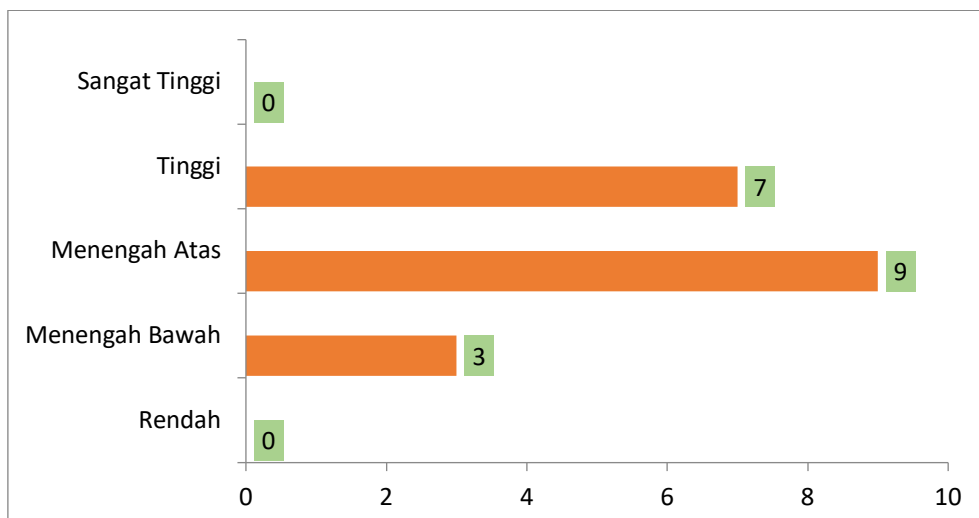
Capaian IPBK : 65,9

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sumatera Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sumatera Barat, 2025

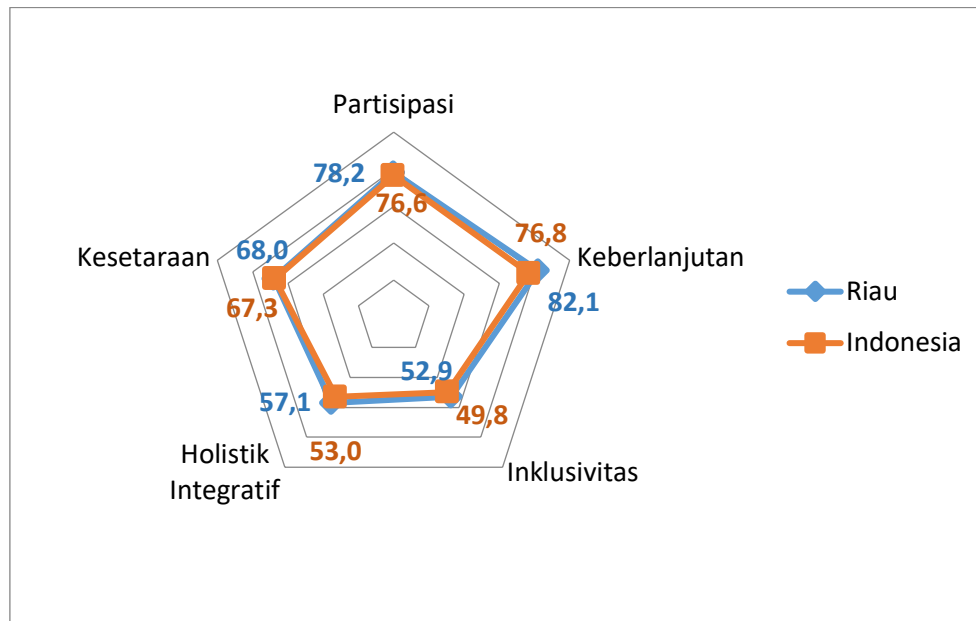


Provinsi Riau

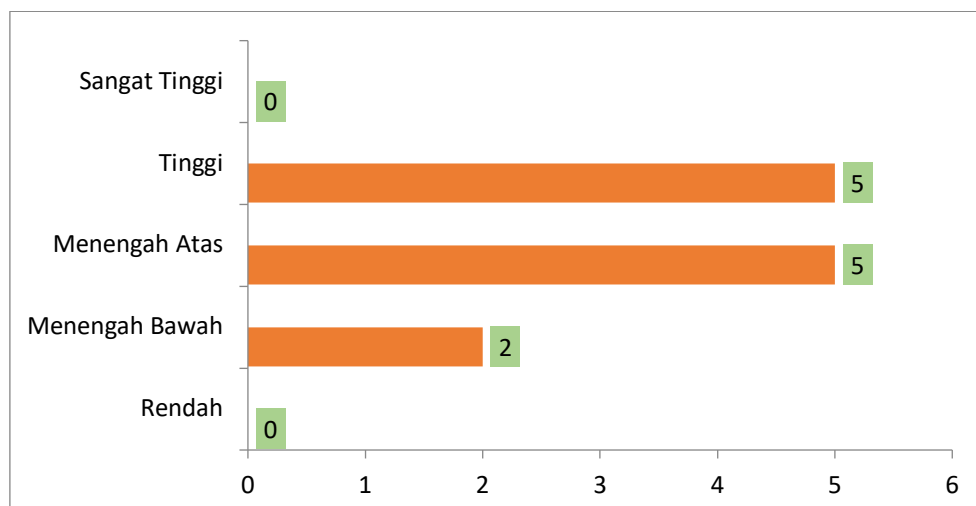
Capaian IPBK : 66,7

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Riau, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Riau, 2025

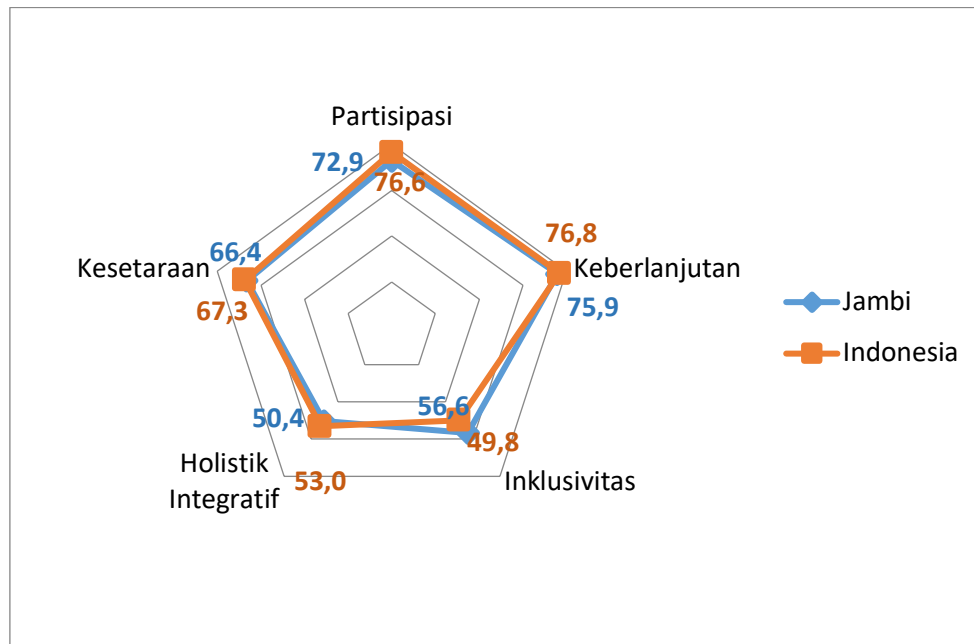


Provinsi Jambi

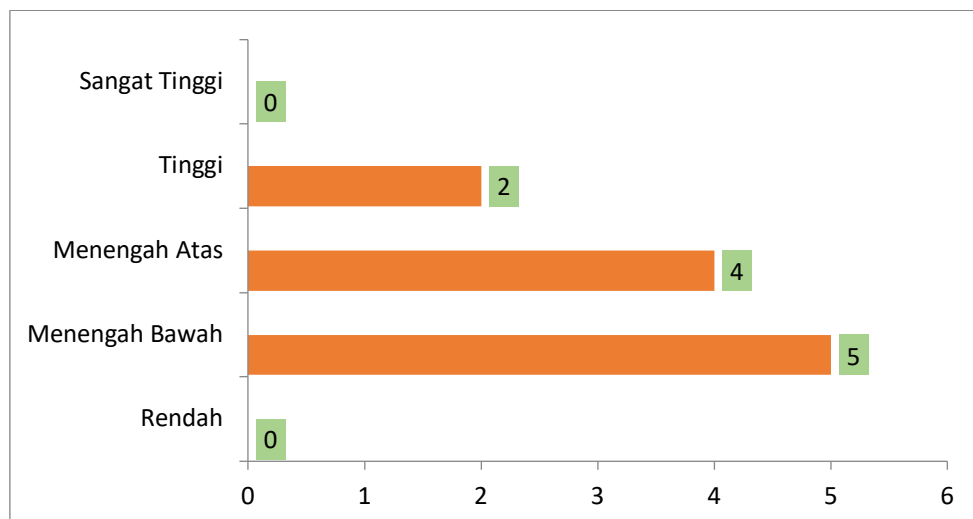
Capaian IPBK : 63,7

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Jambi, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Jambi, 2025

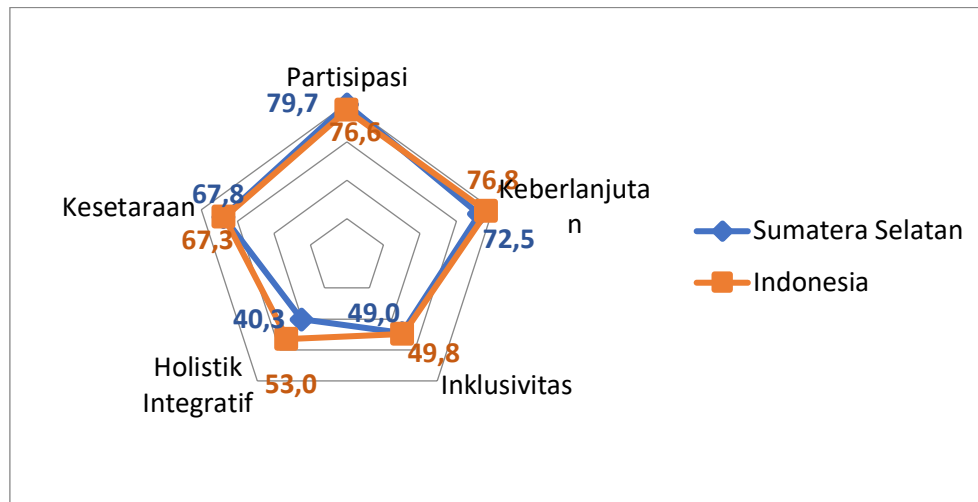


Provinsi Sumatera Selatan

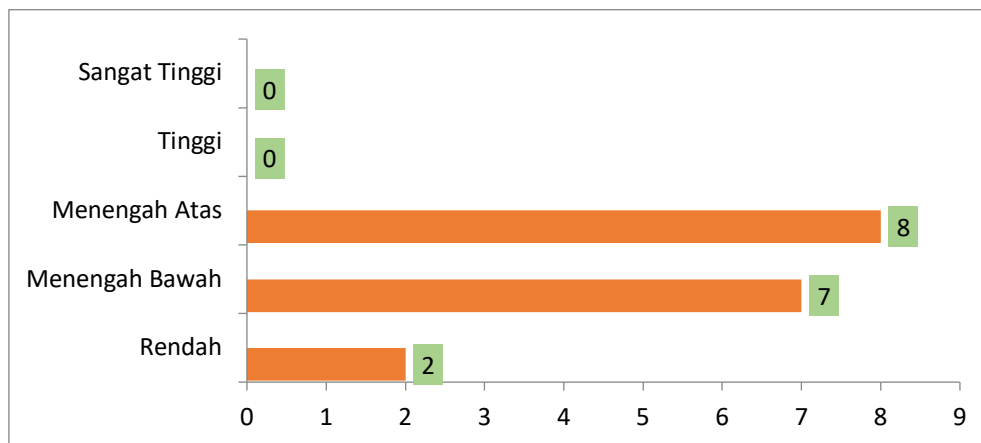
Capaian IPBK : 60,0

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sumatera Selatan, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sumatera Selatan, 2025

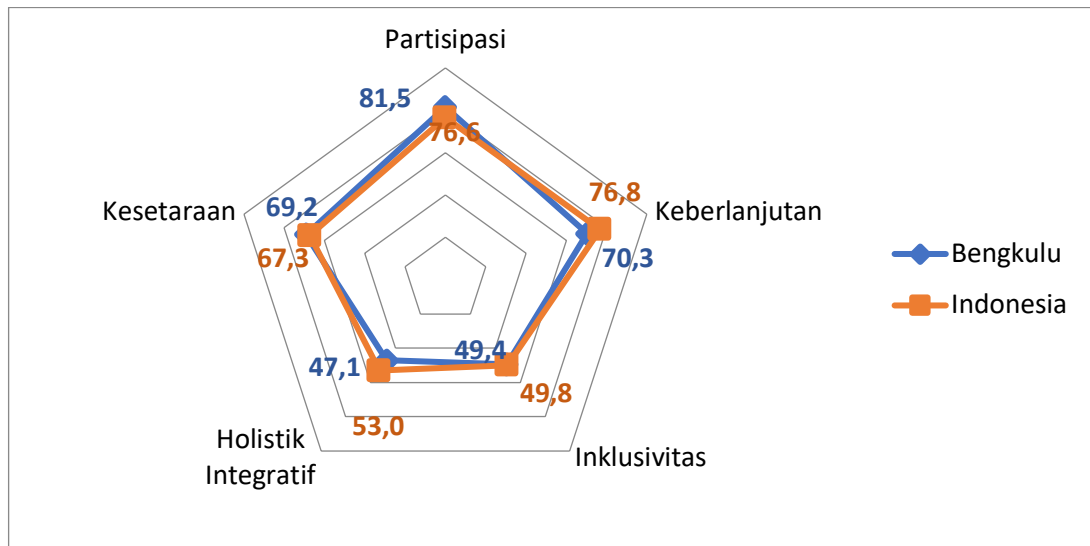


Provinsi Bengkulu

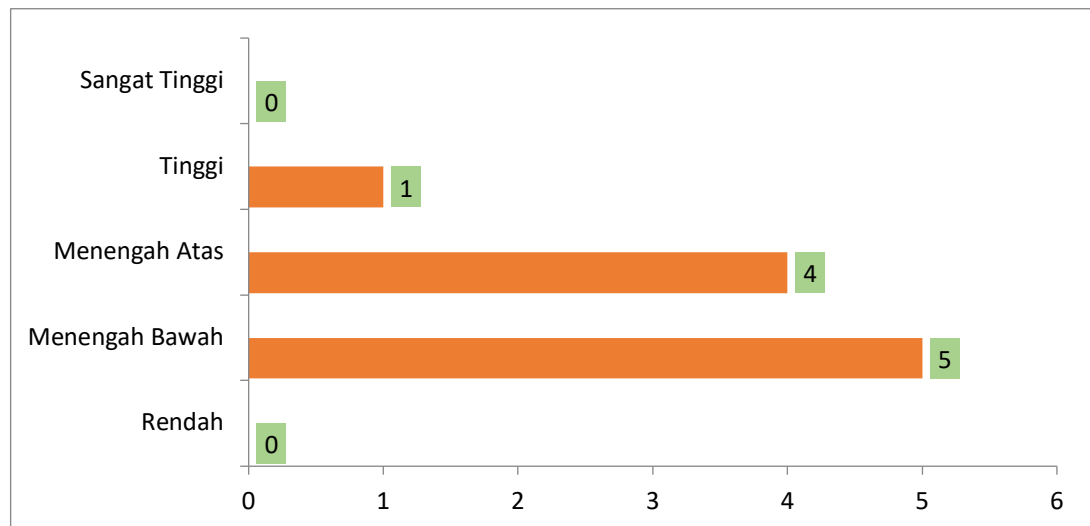
Capaian IPBK : 62,1

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Bengkulu, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Bengkulu, 2025

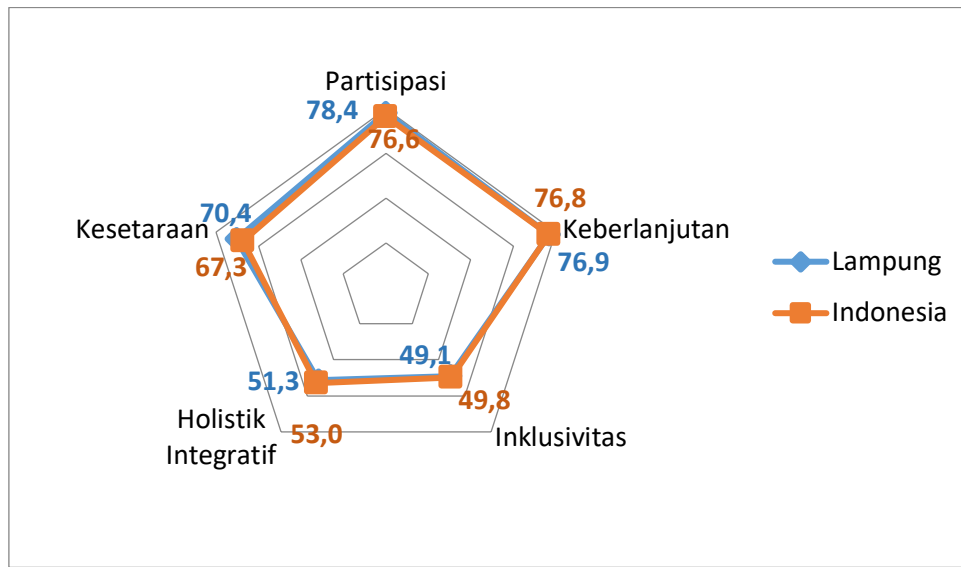


Provinsi Lampung

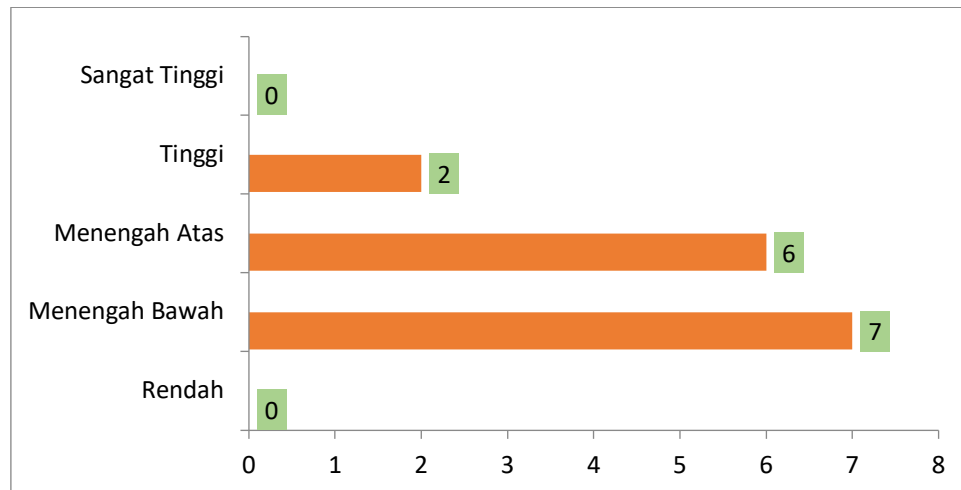
Capaian IPBK : 64,0

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Lampung, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Lampung, 2025

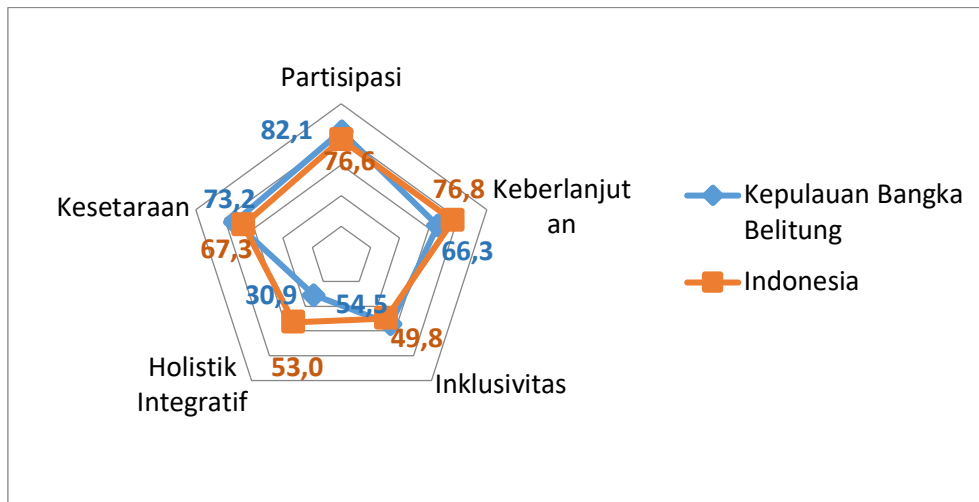


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

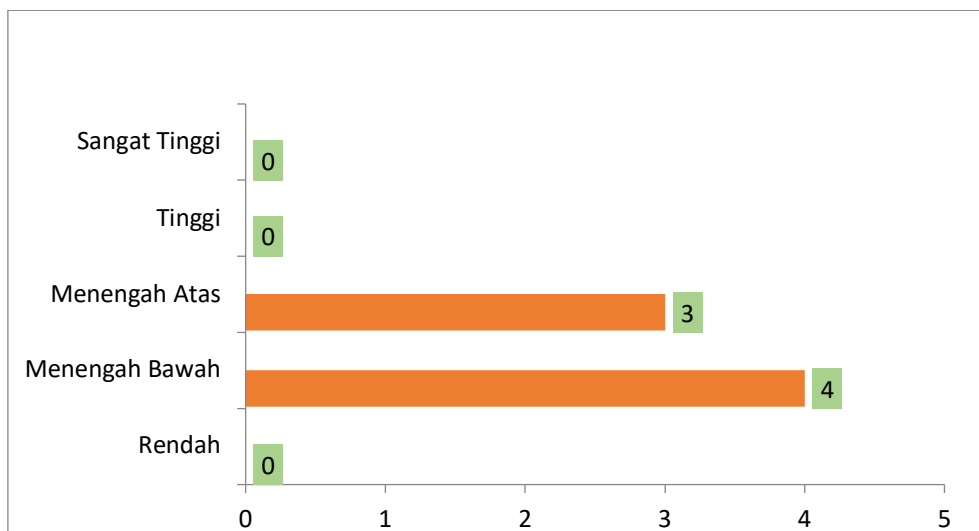
Capaian IPBK : 58,2

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Bangka Belitung, 2025

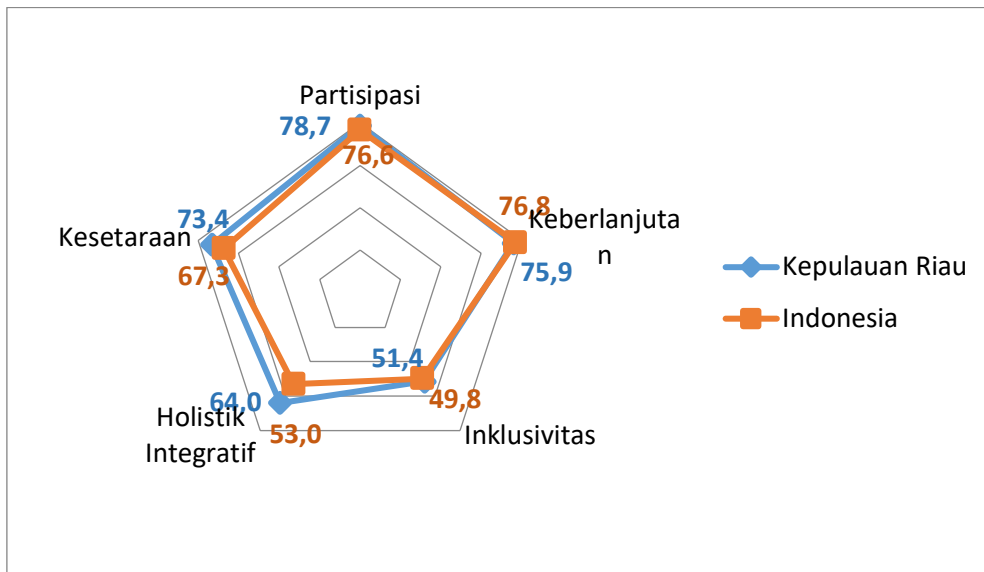


Provinsi Kepulauan Riau

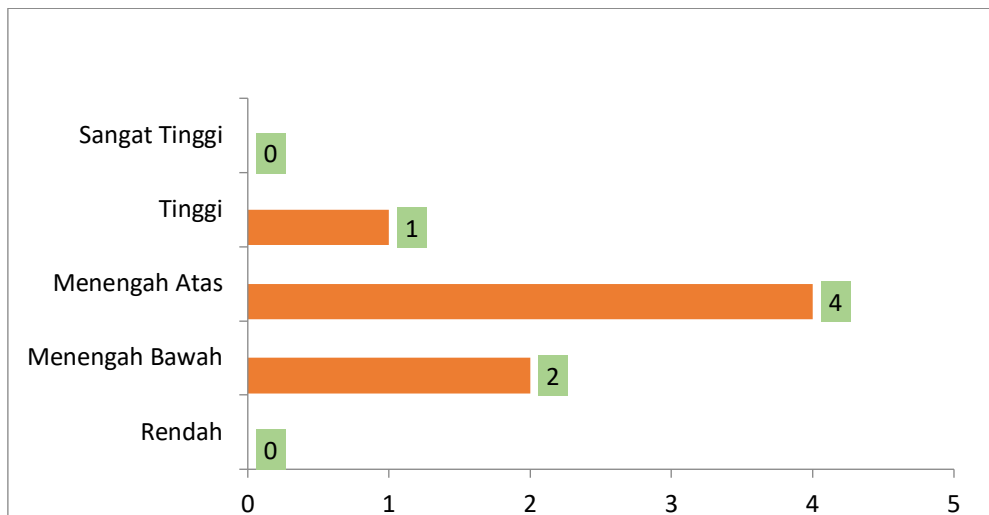
Capaian IPBK : 67,9

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kepulauan Riau, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kepulauan Riau, 2025

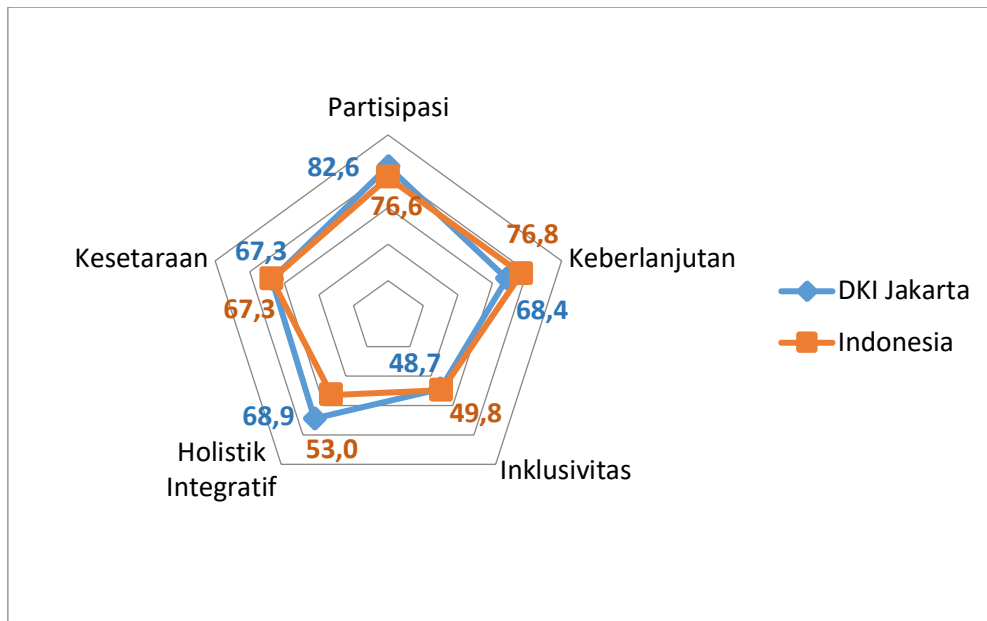


Provinsi DKI Jakarta

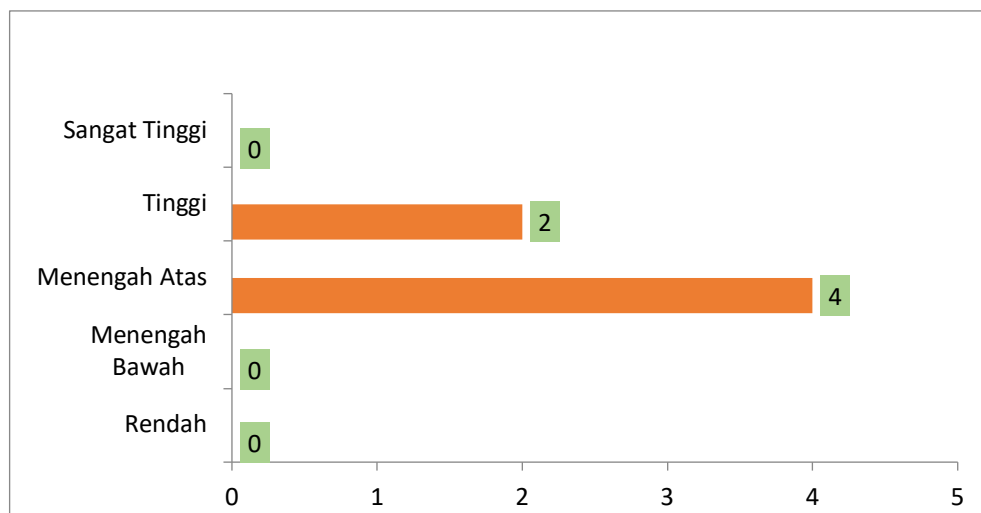
Capaian IPBK : 66,2

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi DKI Jakarta, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi DKI Jakarta, 2025

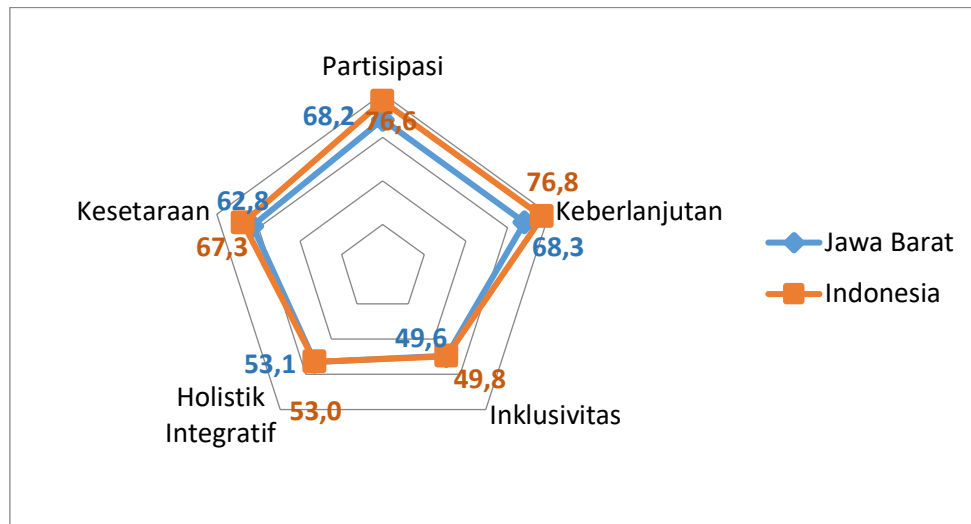


Provinsi Jawa Barat

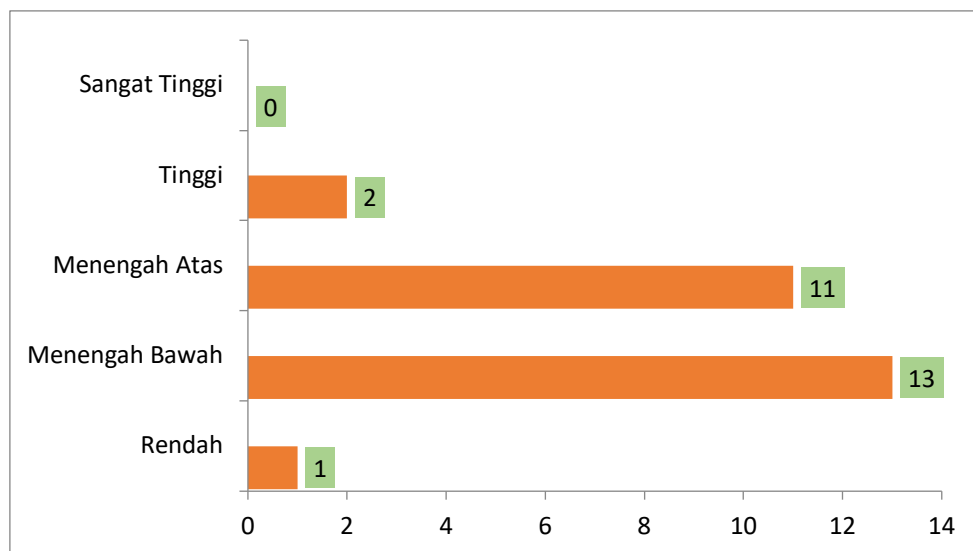
Capaian IPBK : 59,9

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Jawa Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Jawa Barat, 2025

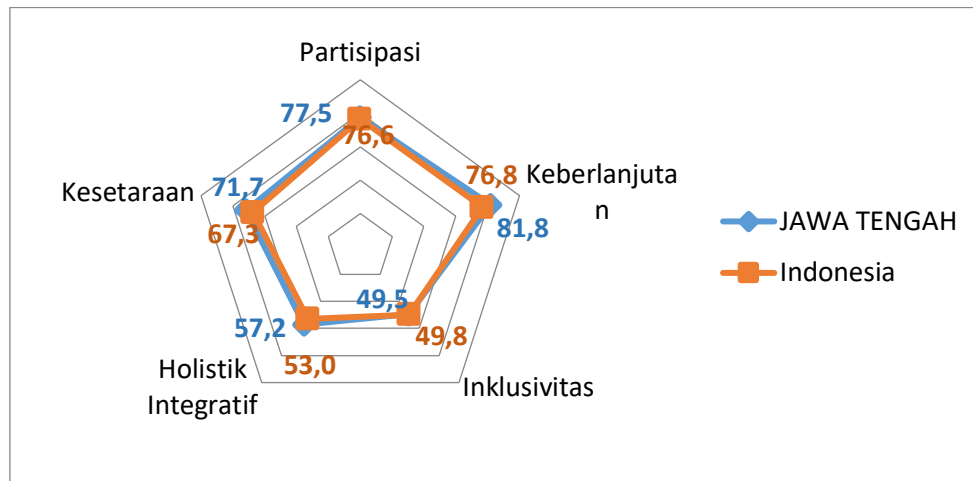


Provinsi Jawa Tengah

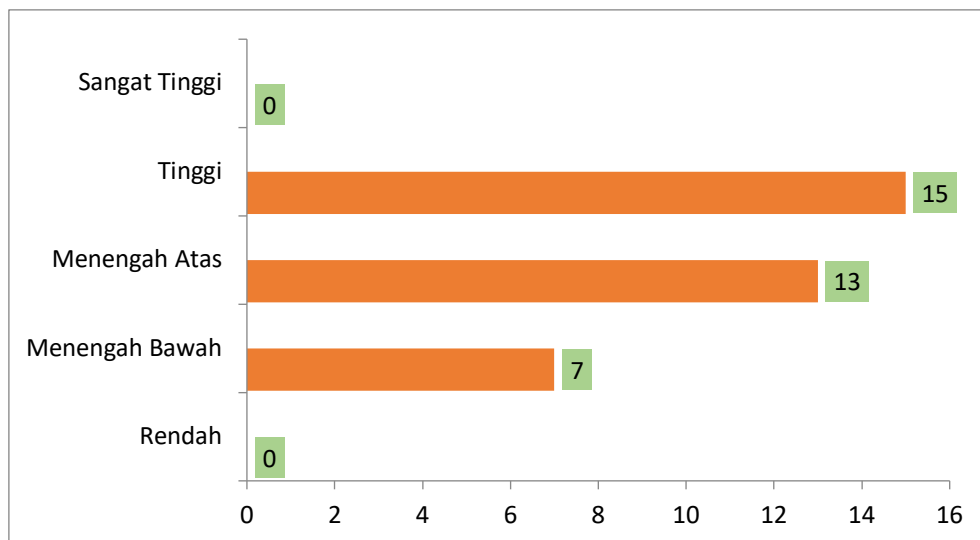
Capaian IPBK : 66,3

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Jawa Tengah, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Jawa Tengah, 2025

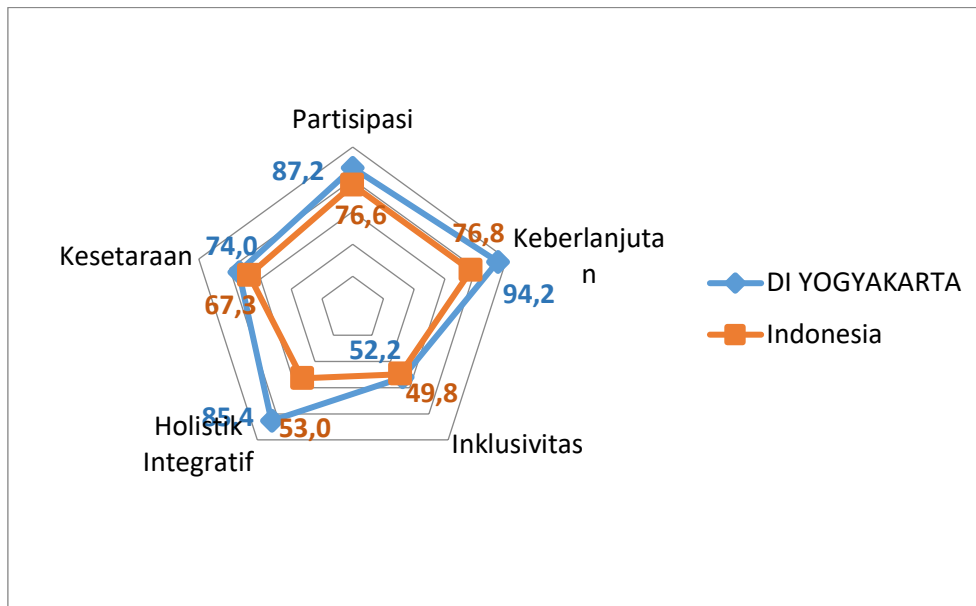


Provinsi DI Yogyakarta

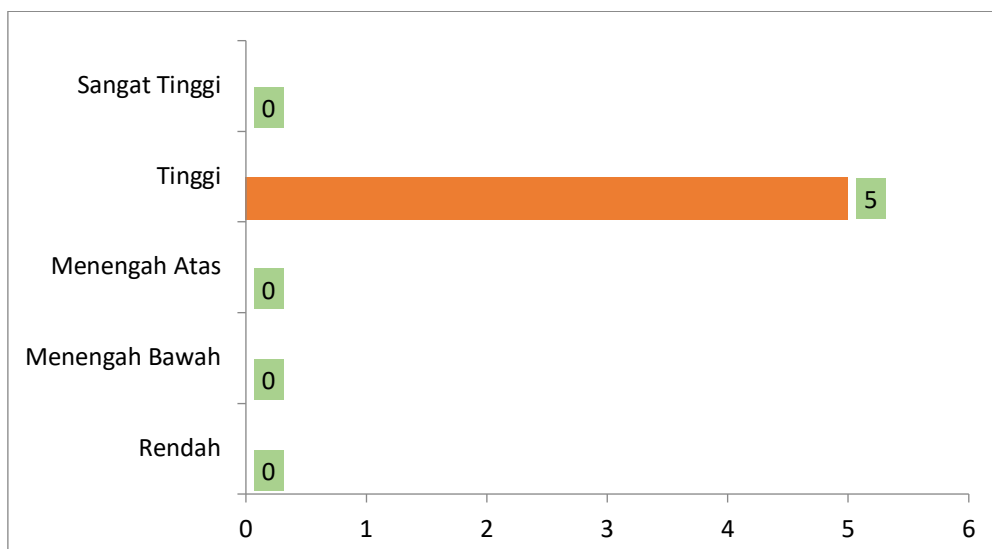
Capaian IPBK : 77,0

Status PBK : Tinggi

Indeks Dimensi IPBK Provinsi DI Yogyakarta, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi DI Yogyakarta, 2025

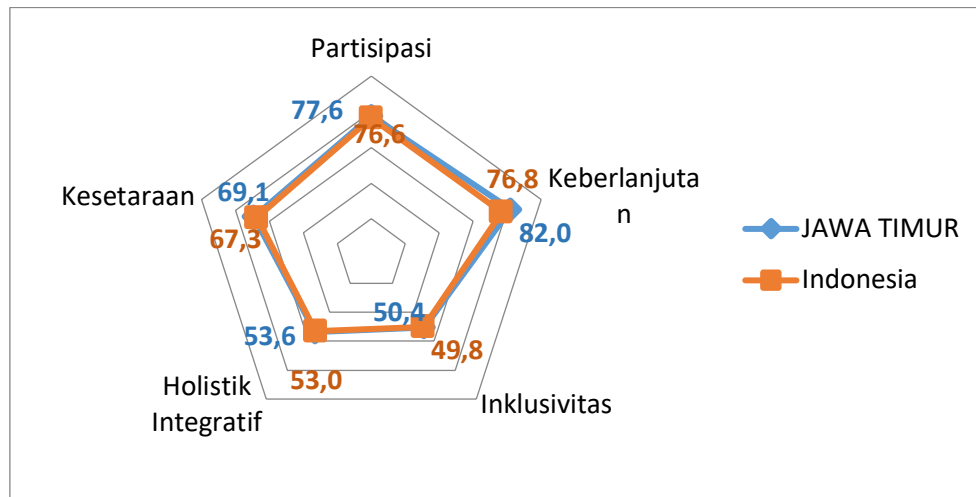


Provinsi Jawa Timur

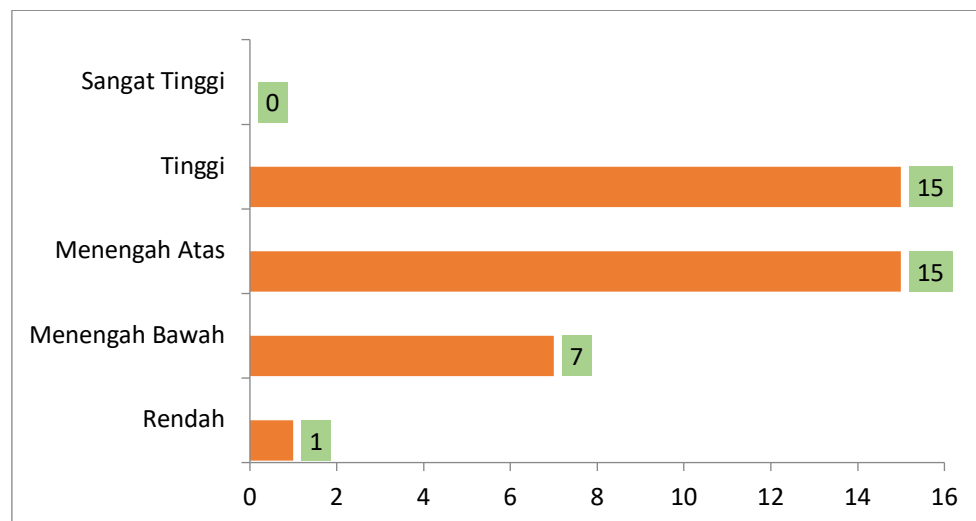
Capaian IPBK : 65,3

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Jawa Timur, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Jawa Timur, 2025

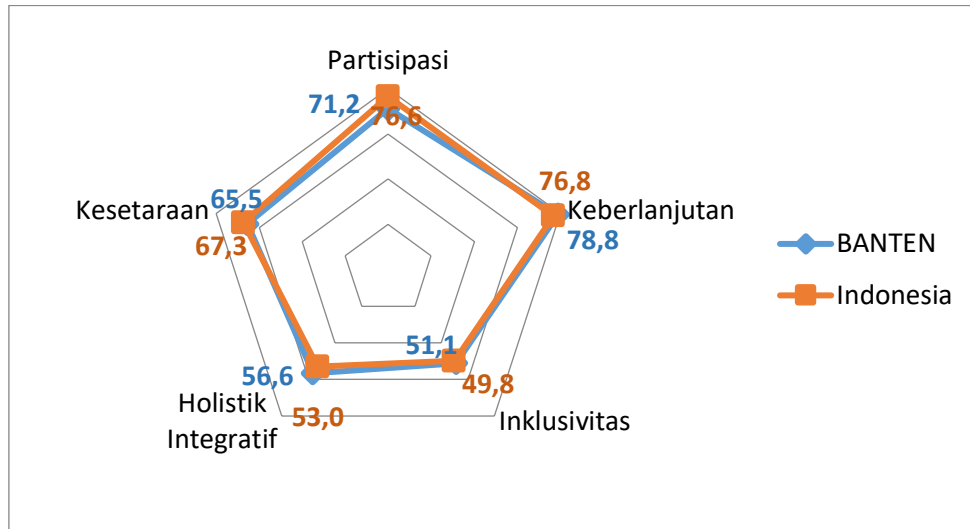


Provinsi Banten

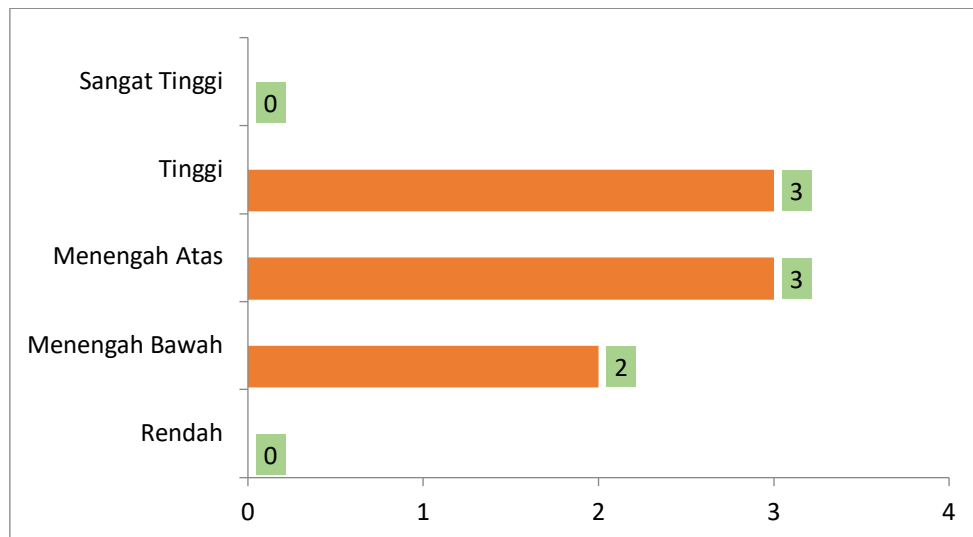
Capaian IPBK : 63,9

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Banten, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Banten, 2025

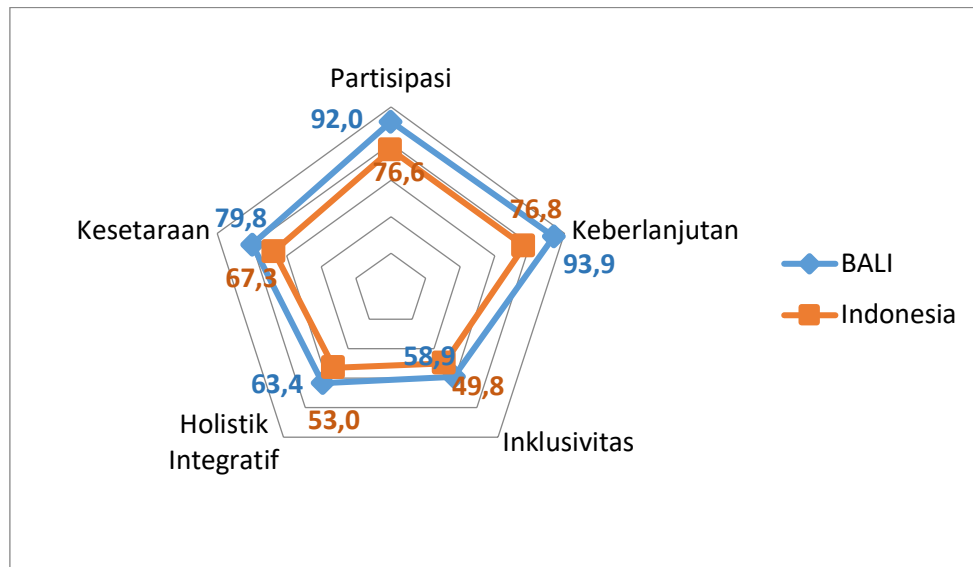


Provinsi Bali

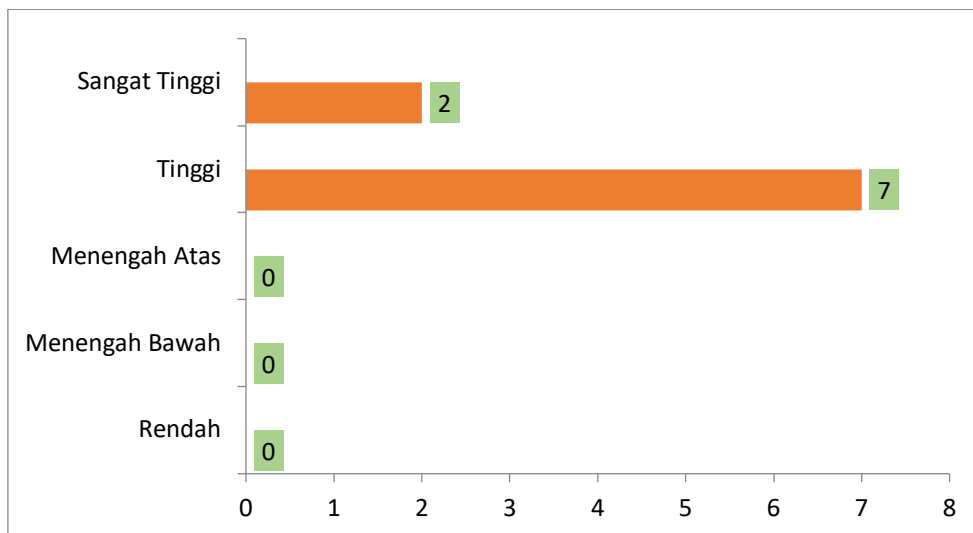
Capaian IPBK : 76,2

Status PBK : Tinggi

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Bali, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Bali, 2025

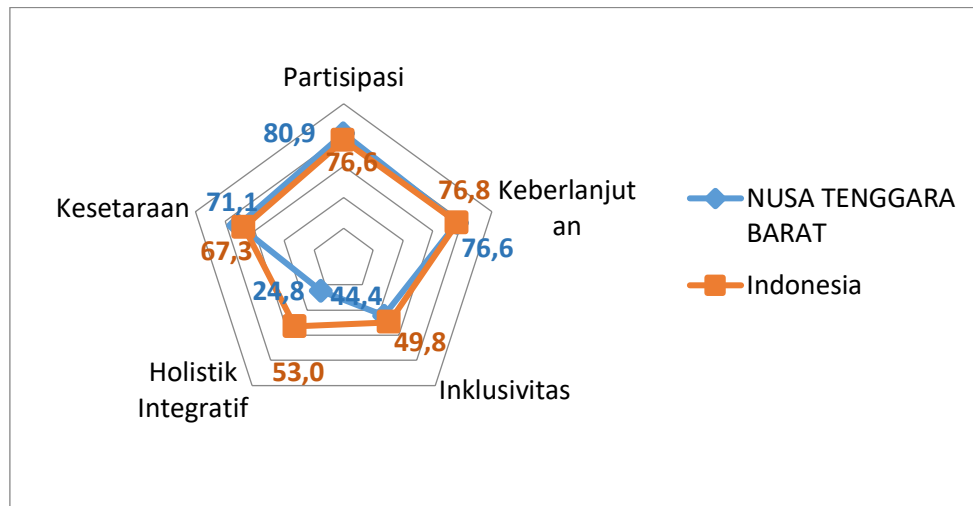


Provinsi Nusa Tenggara Barat

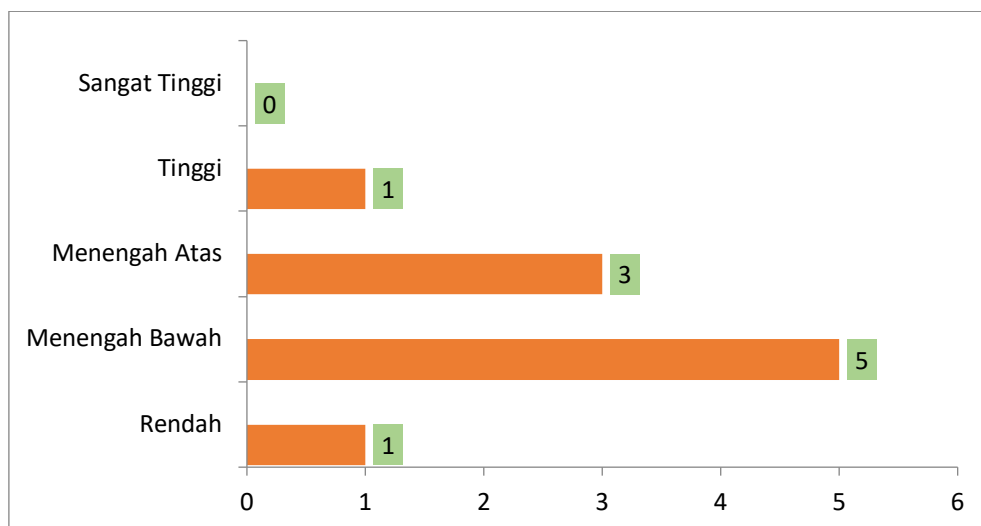
Capaian IPBK : 54,6

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025

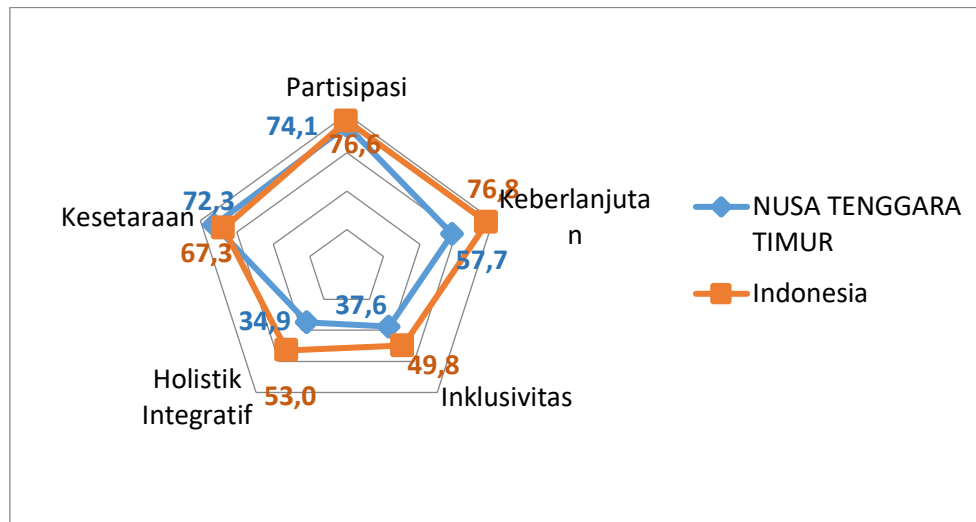


Provinsi Nusa Tenggara Timur

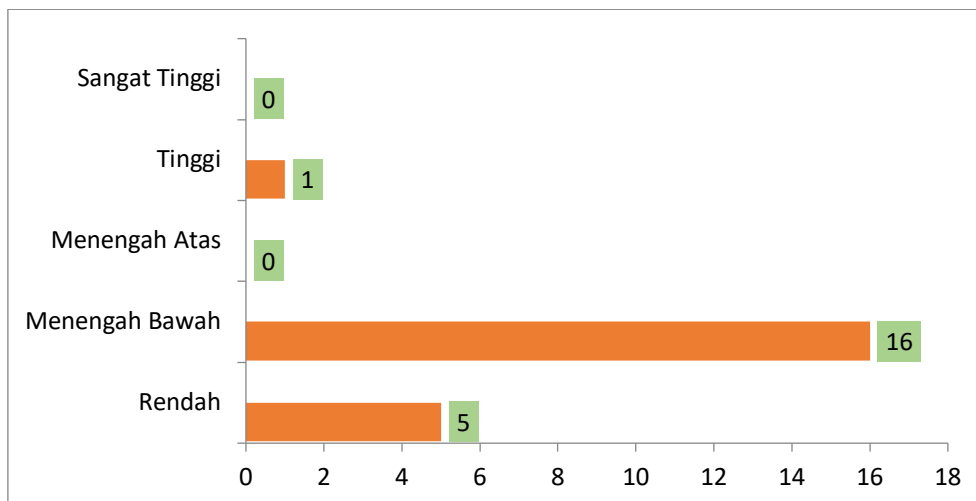
Capaian IPBK : 52,7

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025

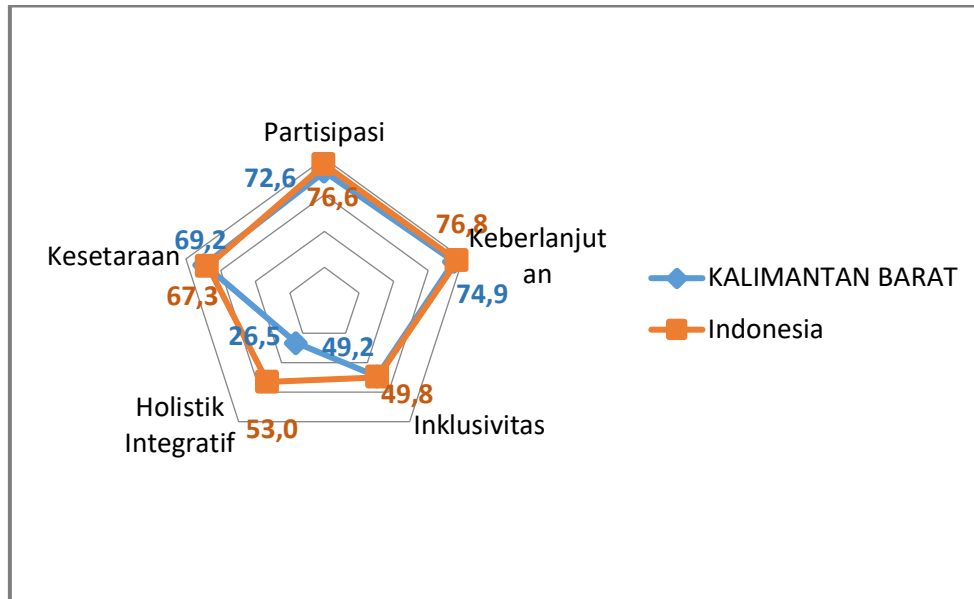


Provinsi Kalimantan Barat

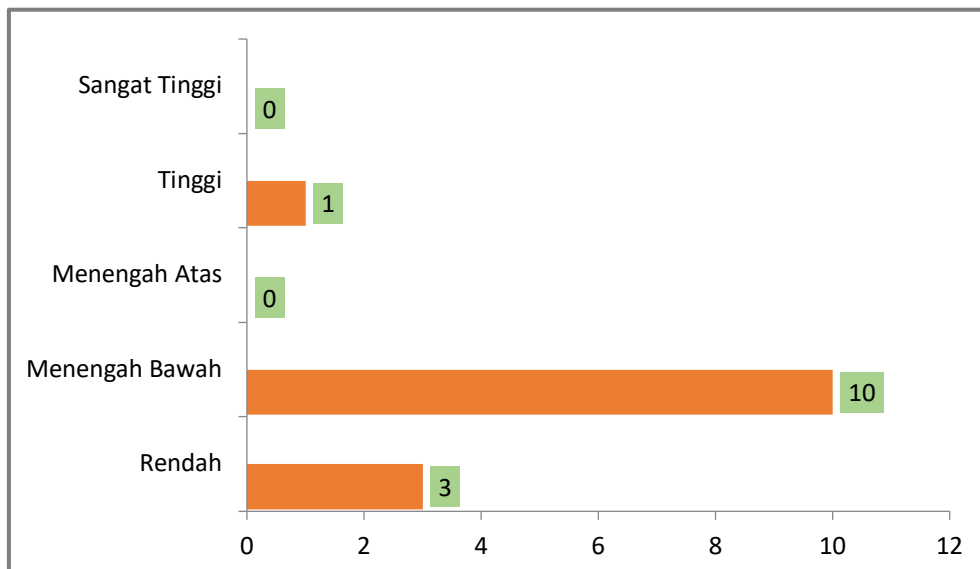
Nilai IPBK : 54,7

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kalimantan Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kalimantan Barat, 2025

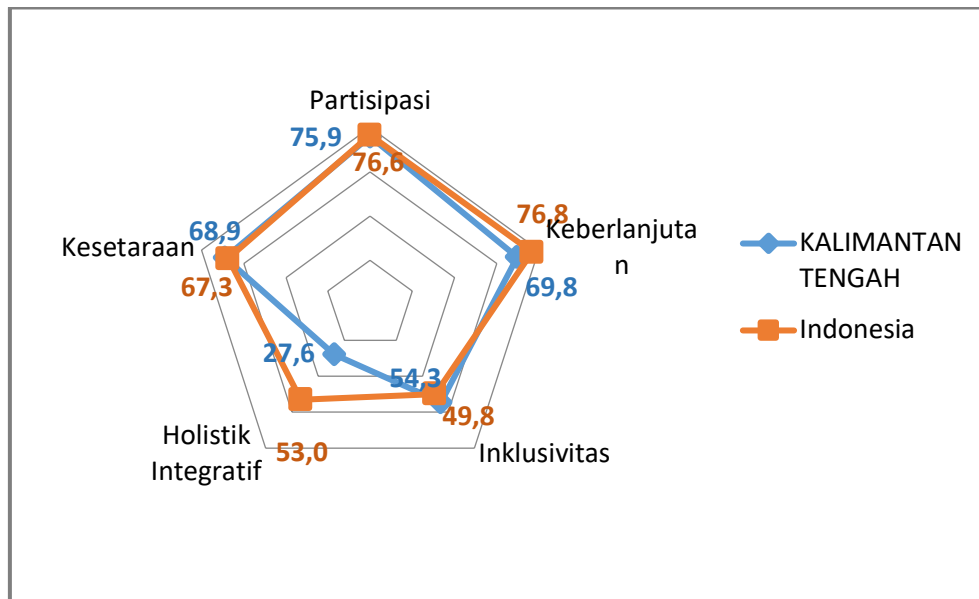


Provinsi Kalimantan Tengah

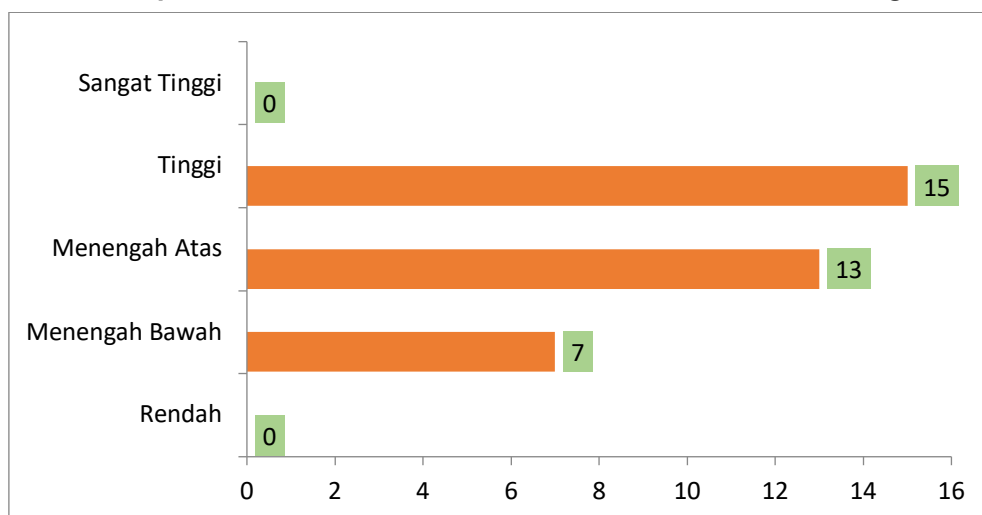
Nilai IPBK : 55,9

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kalimantan Tengah, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

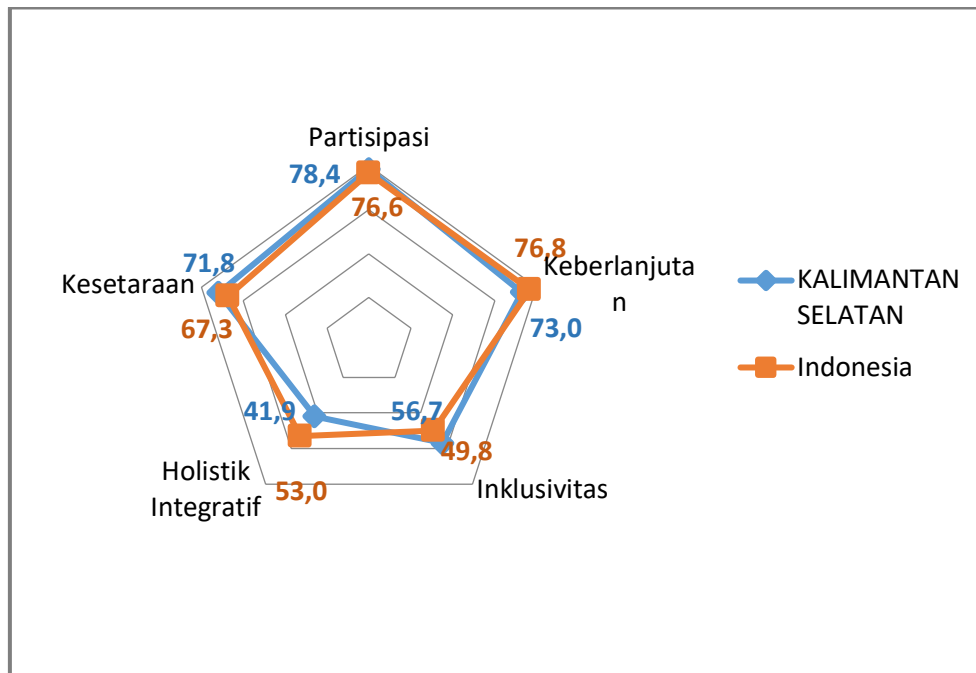


Provinsi Kalimantan Selatan

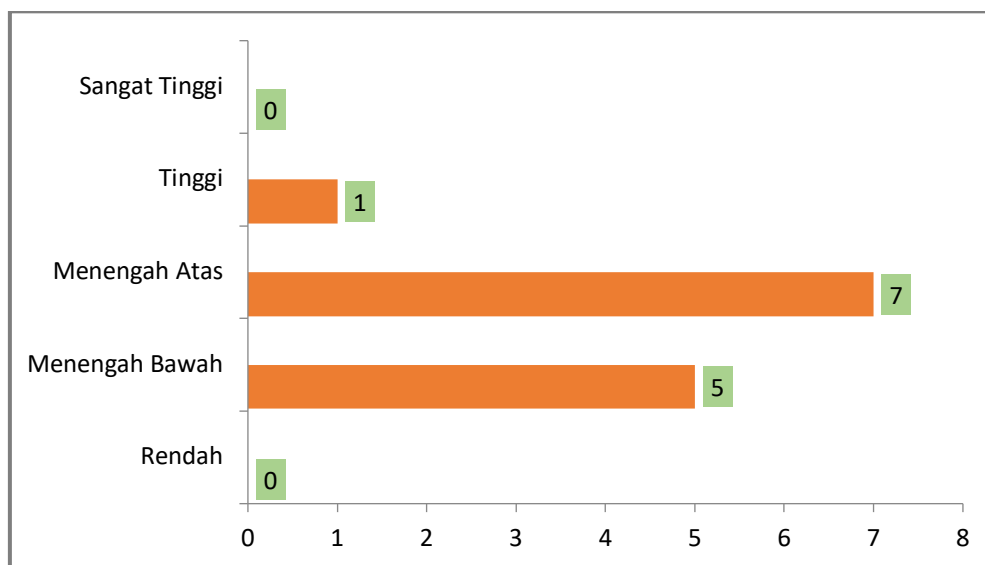
Nilai IPBK : 62,8

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

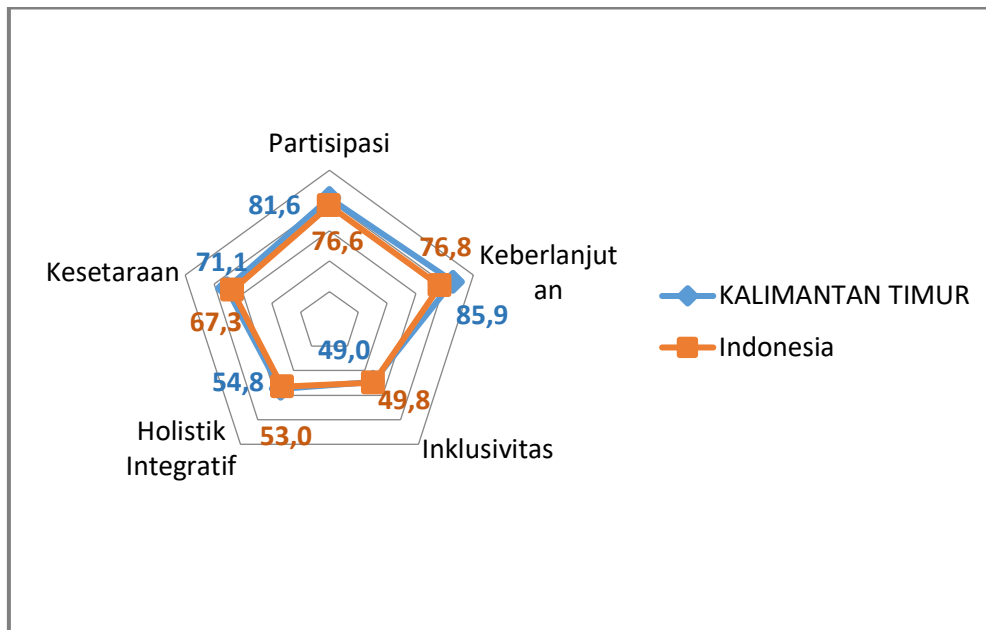


Provinsi Kalimantan Timur

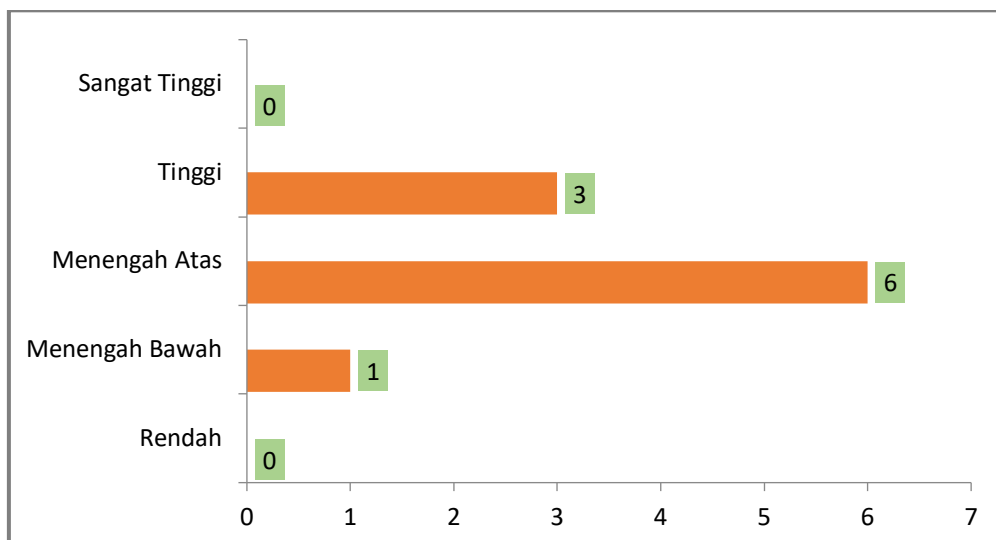
Nilai IPBK : 66,9

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kalimantan Timur, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kalimantan Timur, 2025

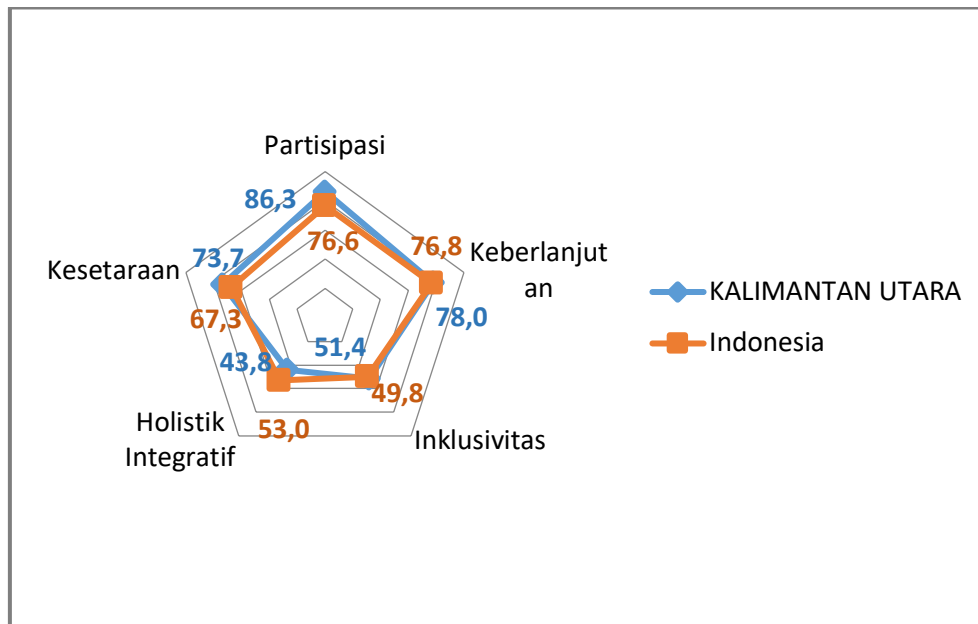


Provinsi Kalimantan Utara

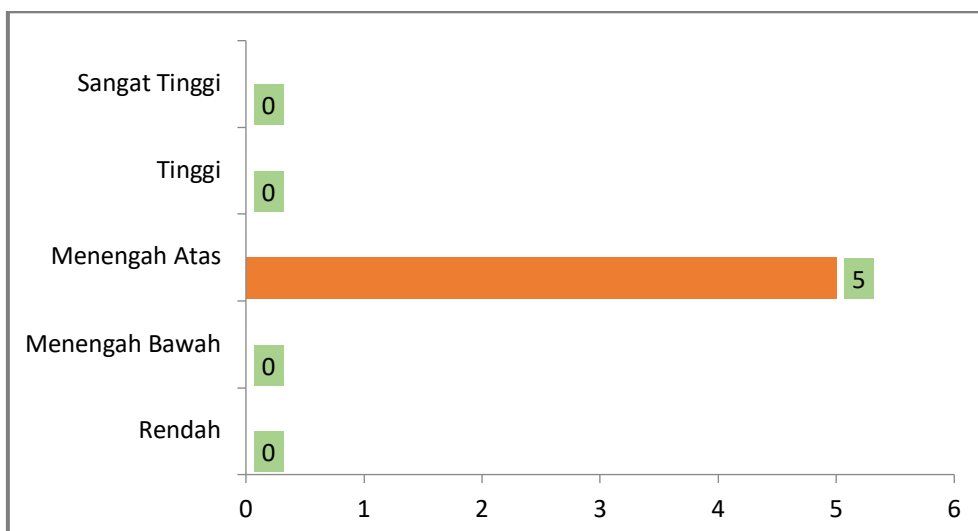
Nilai IPBK : 64,5

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Kalimantan Utara, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Kalimantan Utara, 2025

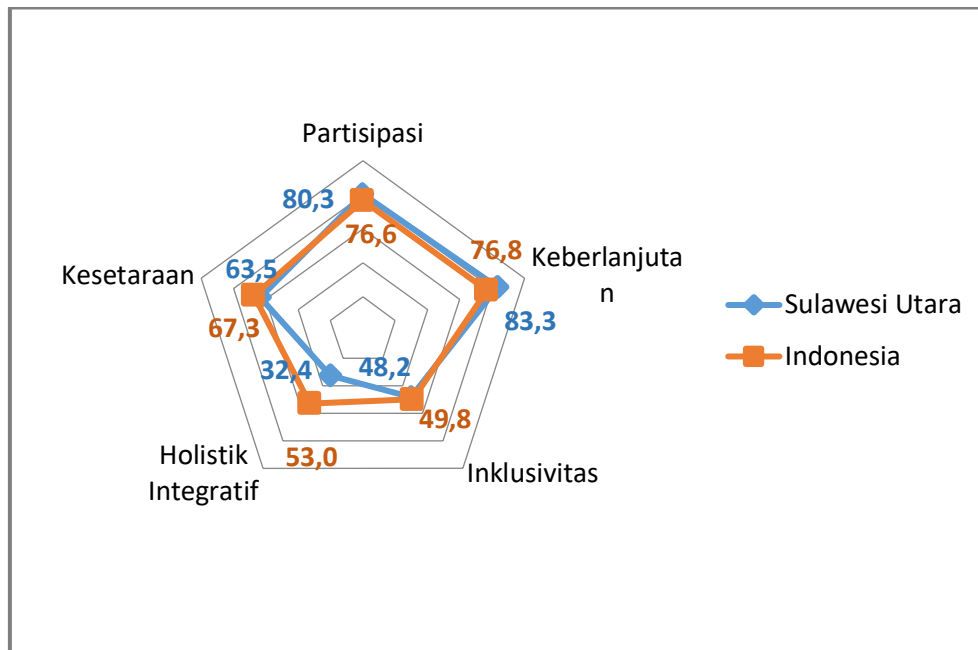


Provinsi Sulawesi Utara

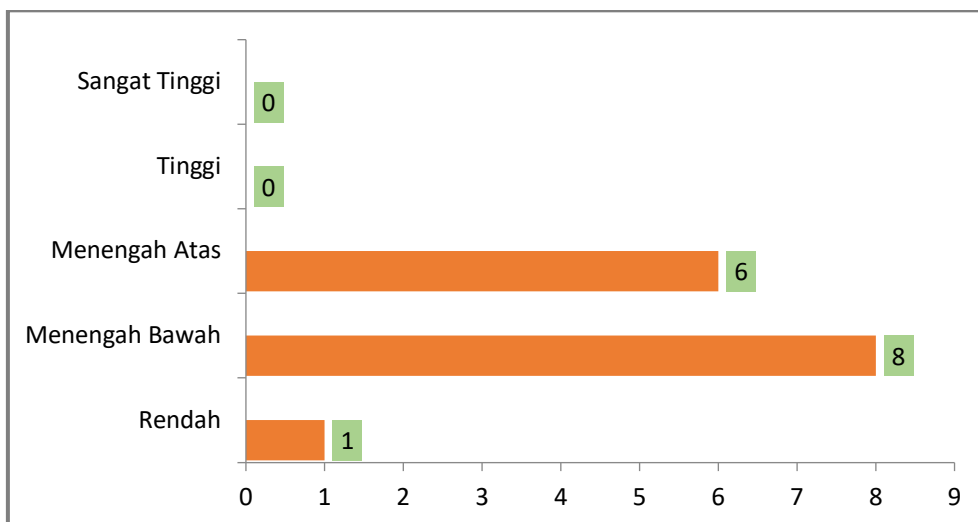
Nilai IPBK : 58,1

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sulawesi Utara, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sulawesi Utara, 2025

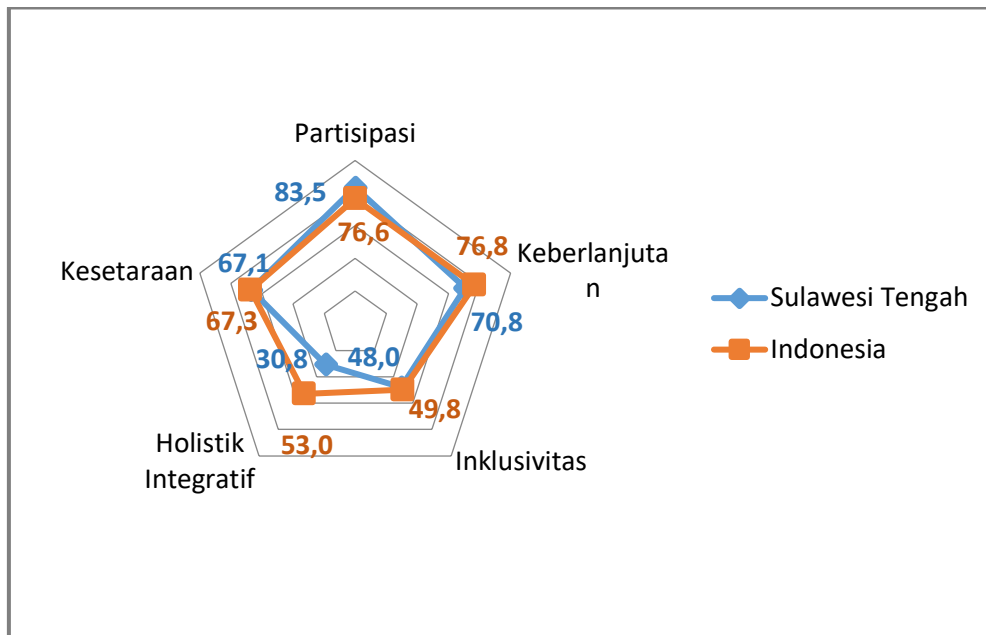


Provinsi Sulawesi Tengah

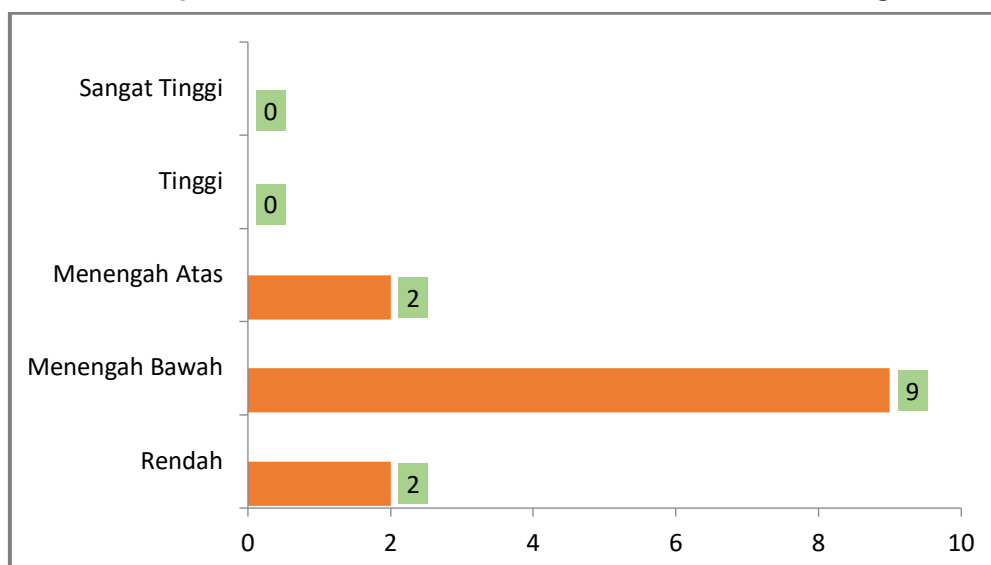
Nilai IPBK : 56,7

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sulawesi Tengah, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

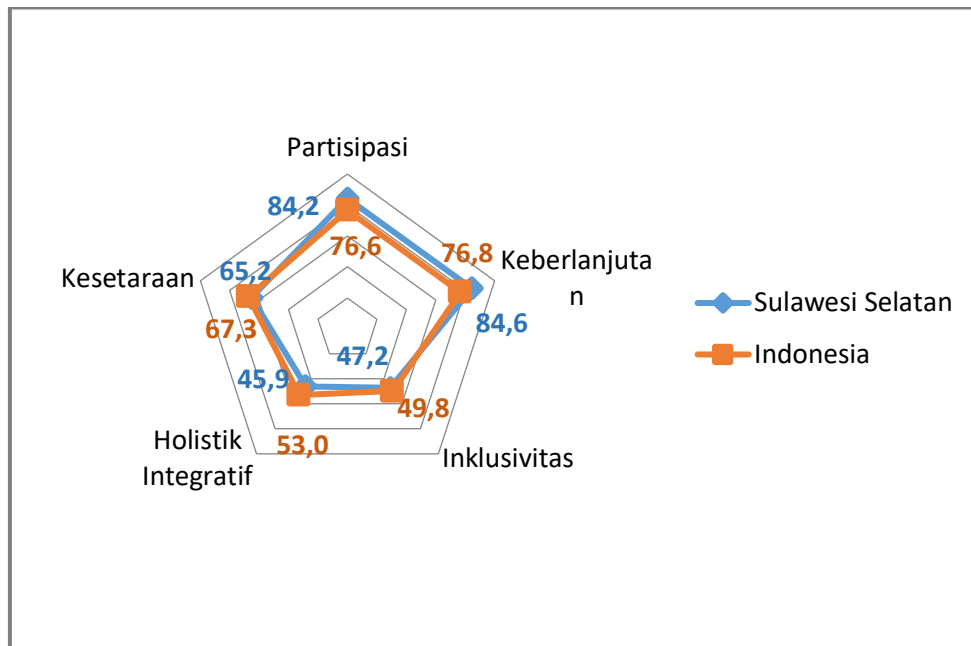


Provinsi Sulawesi Selatan

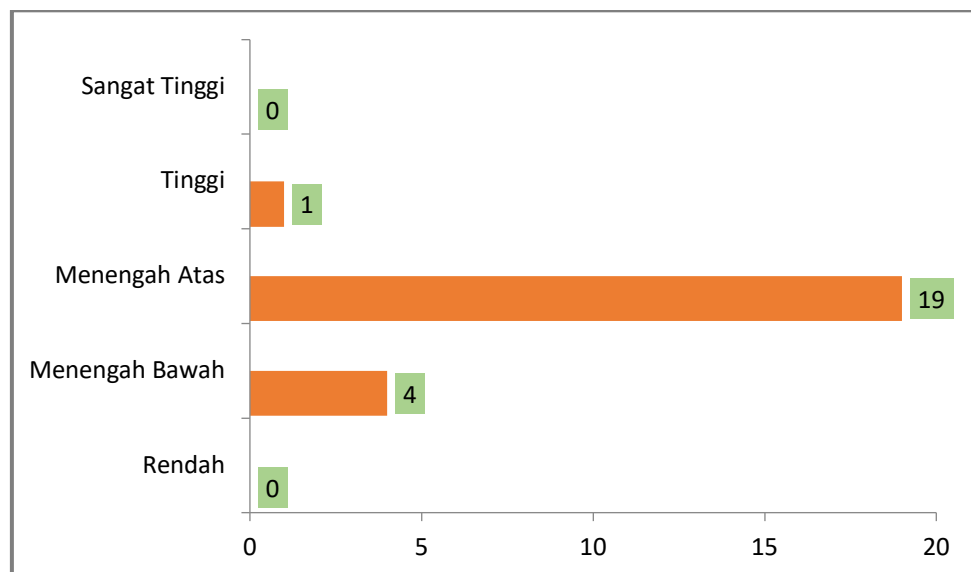
Nilai IPBK : 63,2

Status PBK : Menengah Atas

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sulawesi Selatan, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

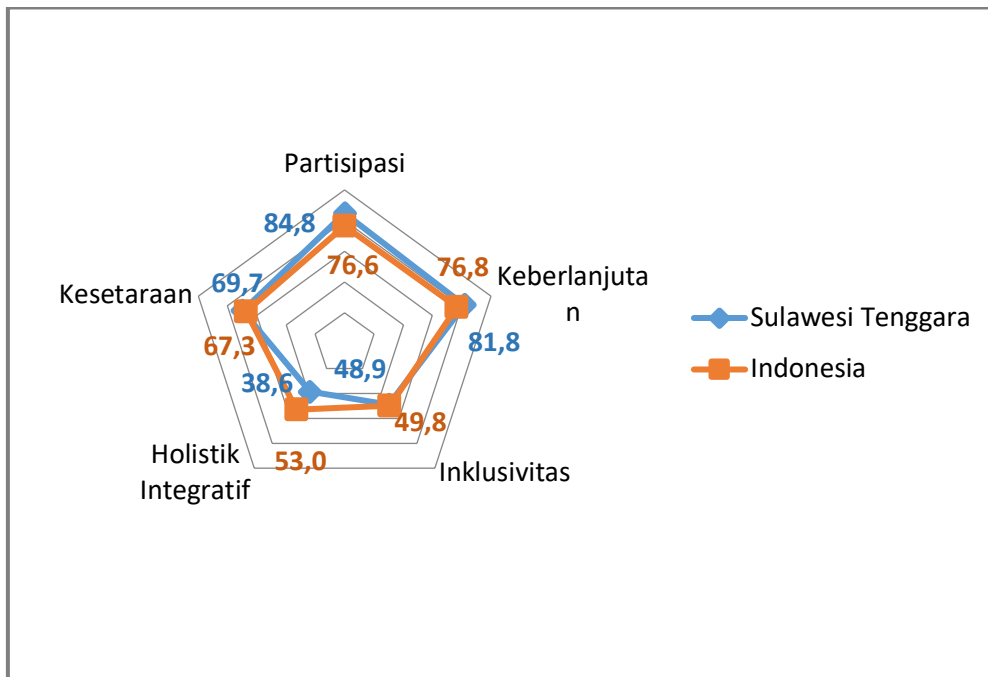


Provinsi Sulawesi Tenggara

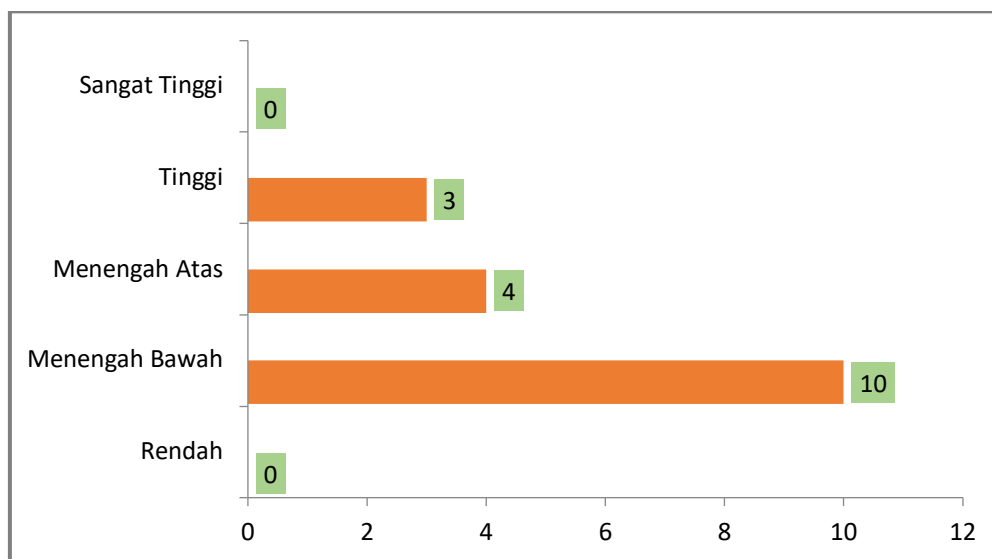
Nilai IPBK : 61,9

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025

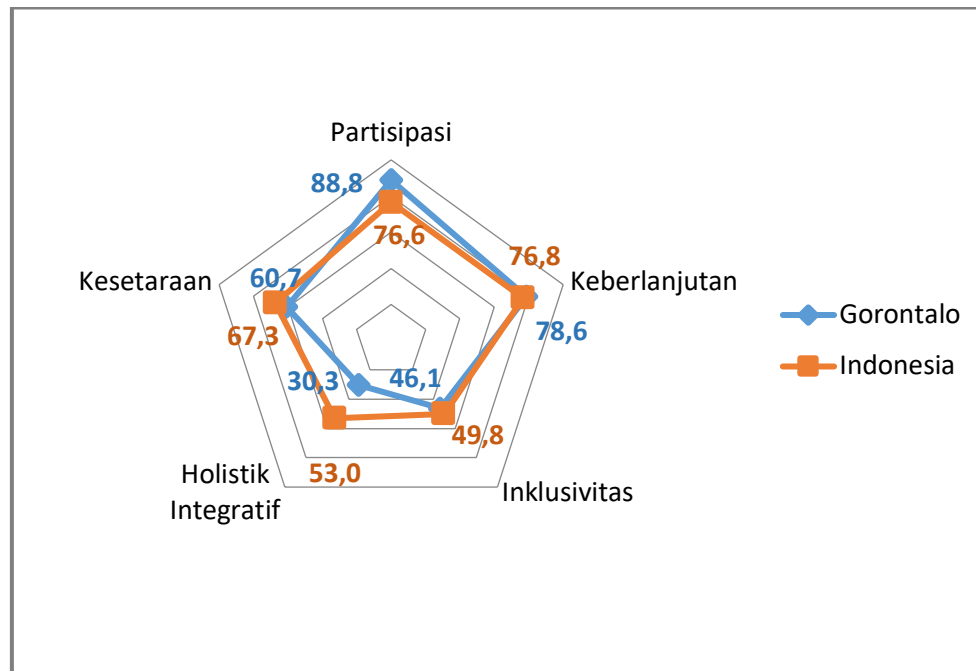


Provinsi Gorontalo

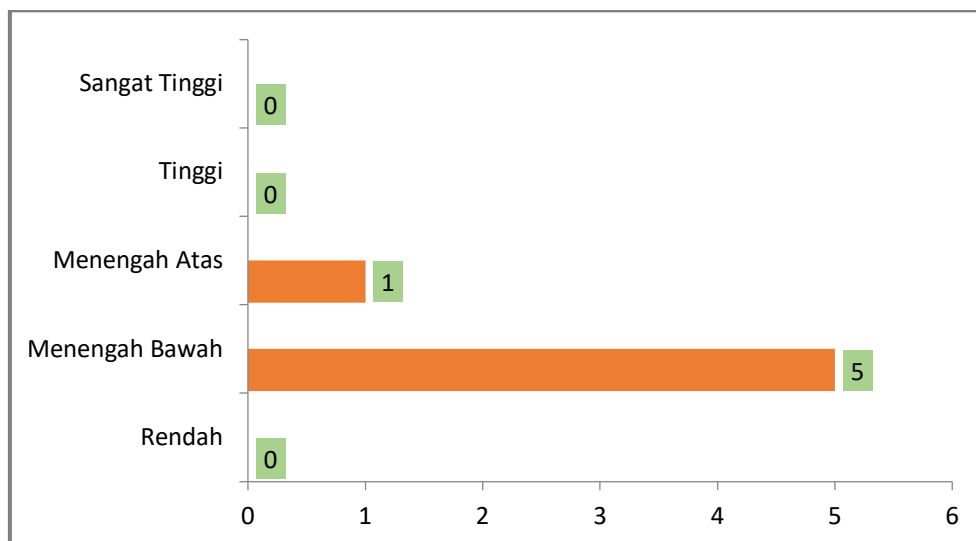
Nilai IPBK : 56,8

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Gorontalo, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Gorontalo, 2025

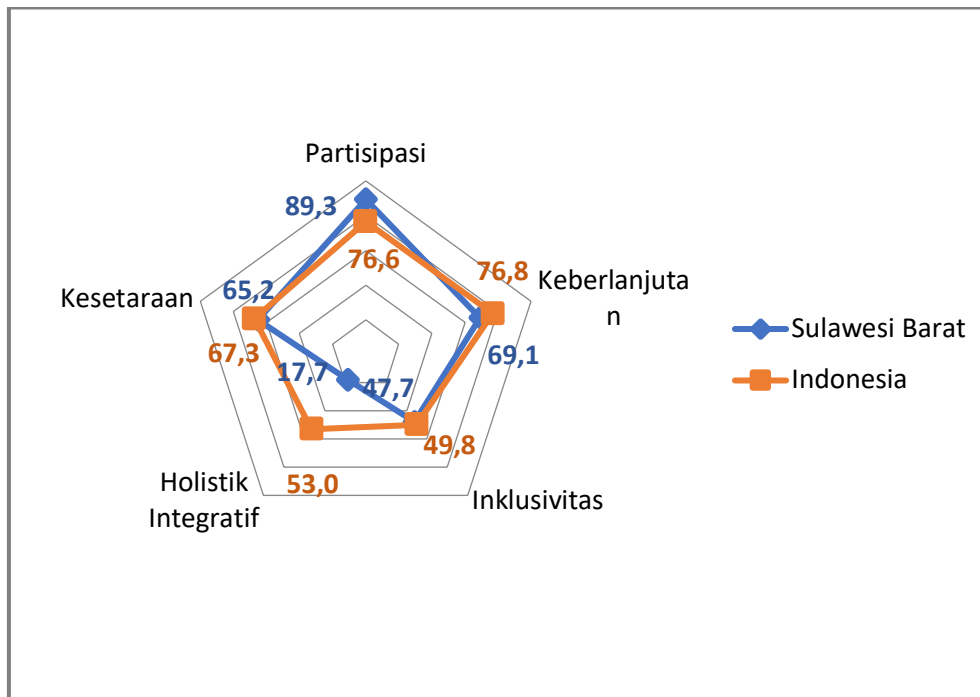


Provinsi Sulawesi Barat

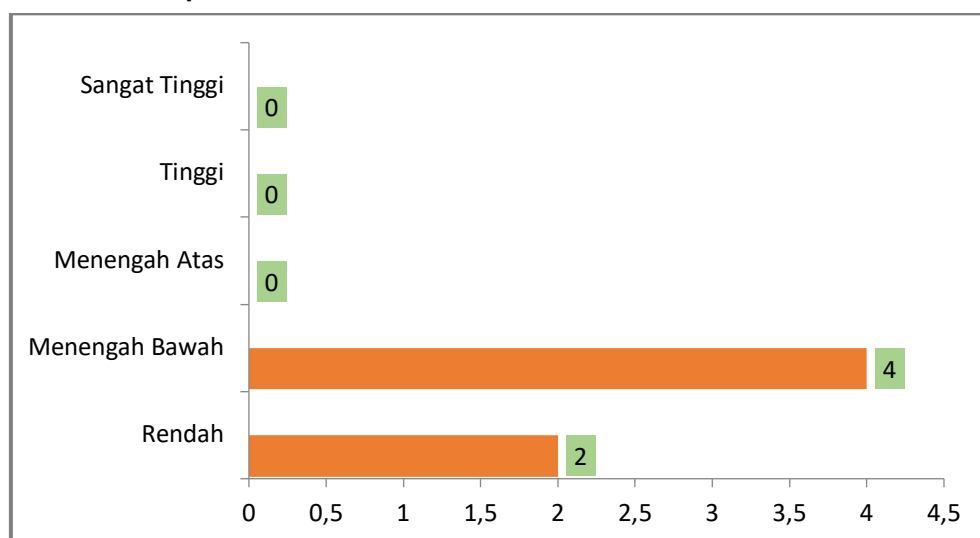
Nilai IPBK : 50,9

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Sulawesi Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Sulawesi Barat, 2025

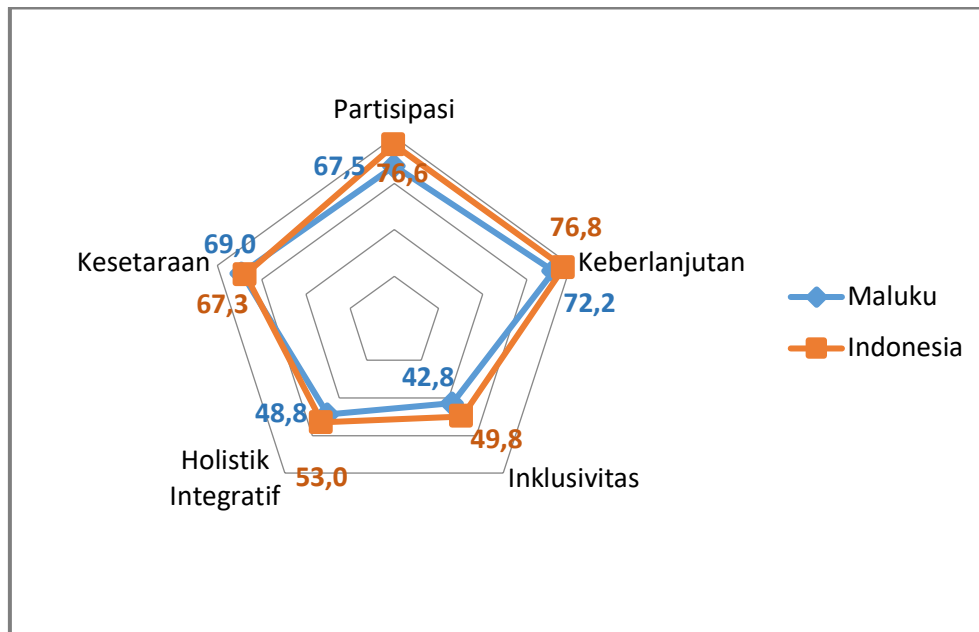


Provinsi Maluku

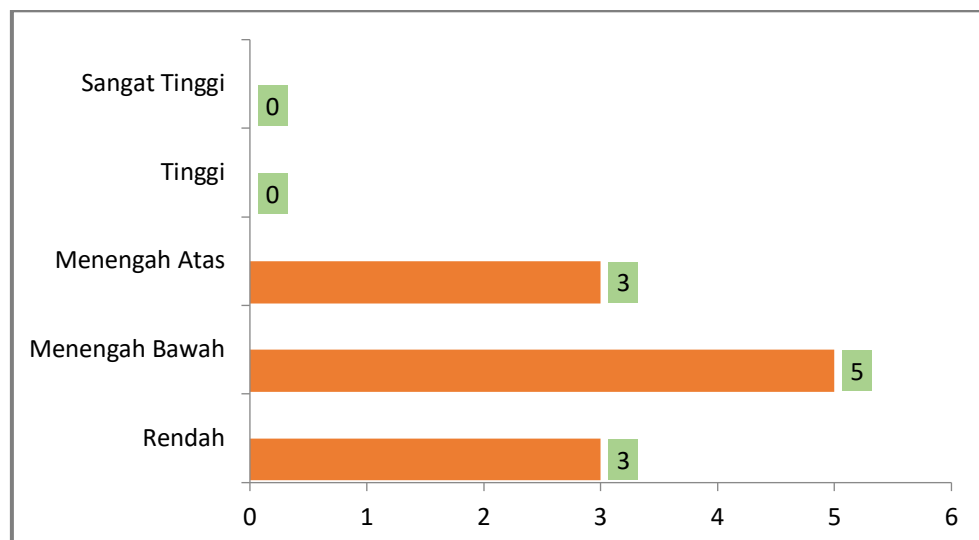
Nilai IPBK : 58,8

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Maluku, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Maluku, 2025

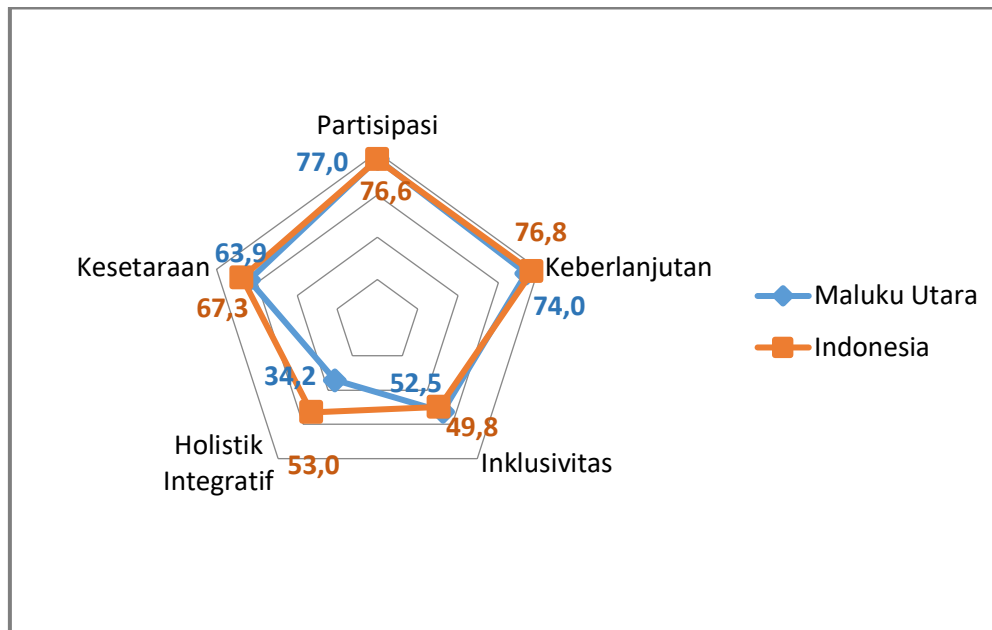


Provinsi Maluku Utara

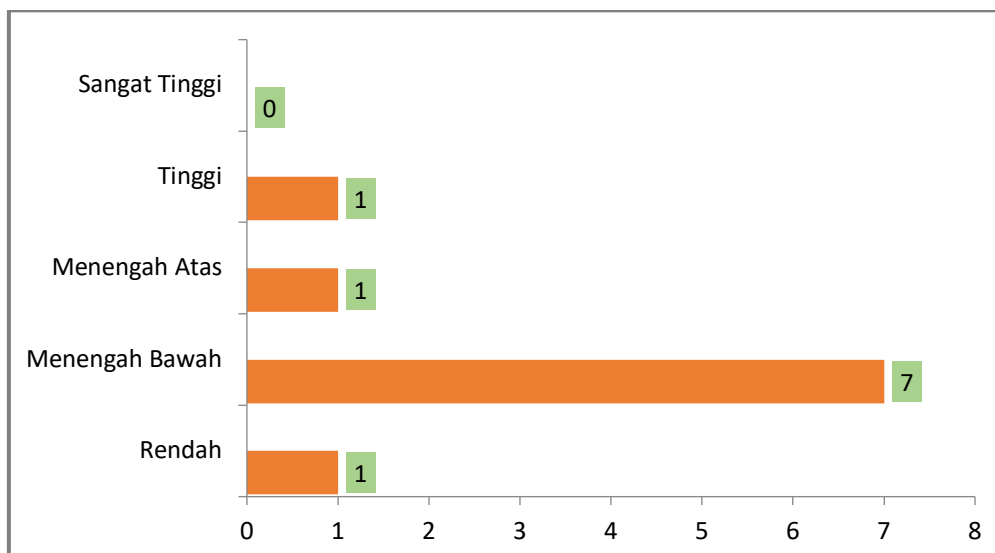
Nilai IPBK : 58,0

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Maluku Utara, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Maluku Utara, 2025

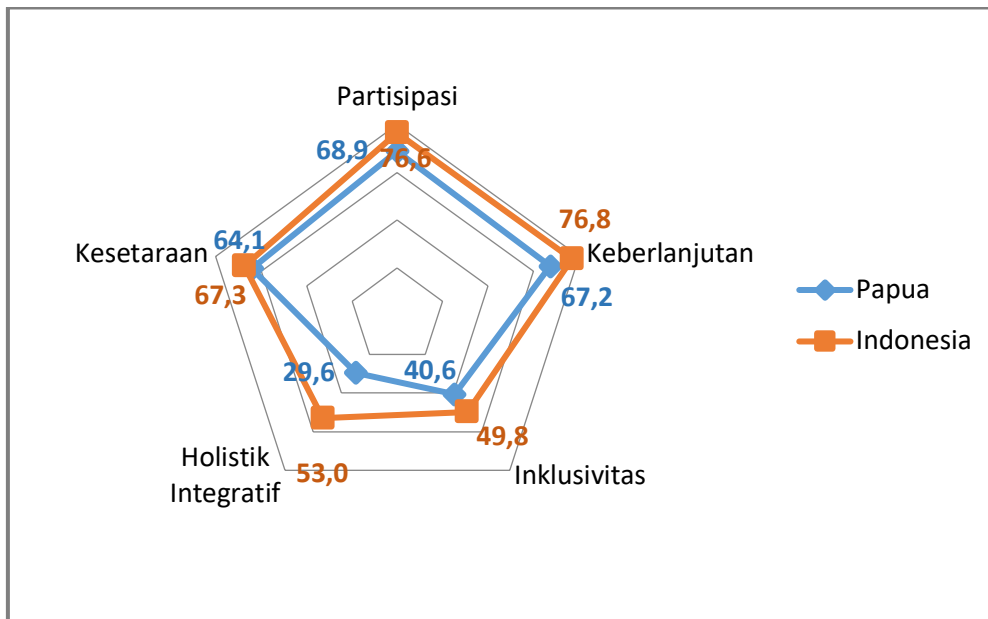


Provinsi Papua

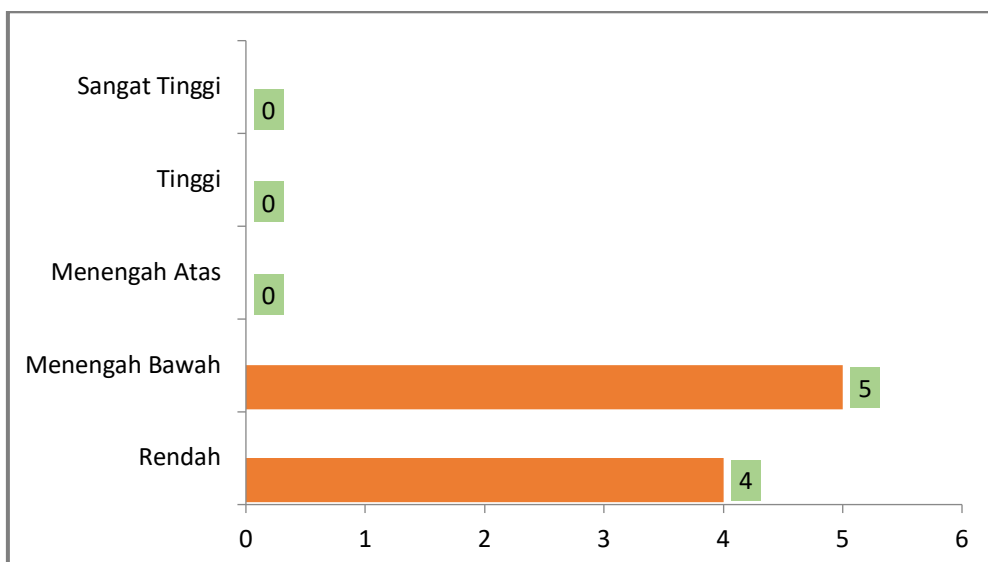
Nilai IPBK : 51,3

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua, 2025

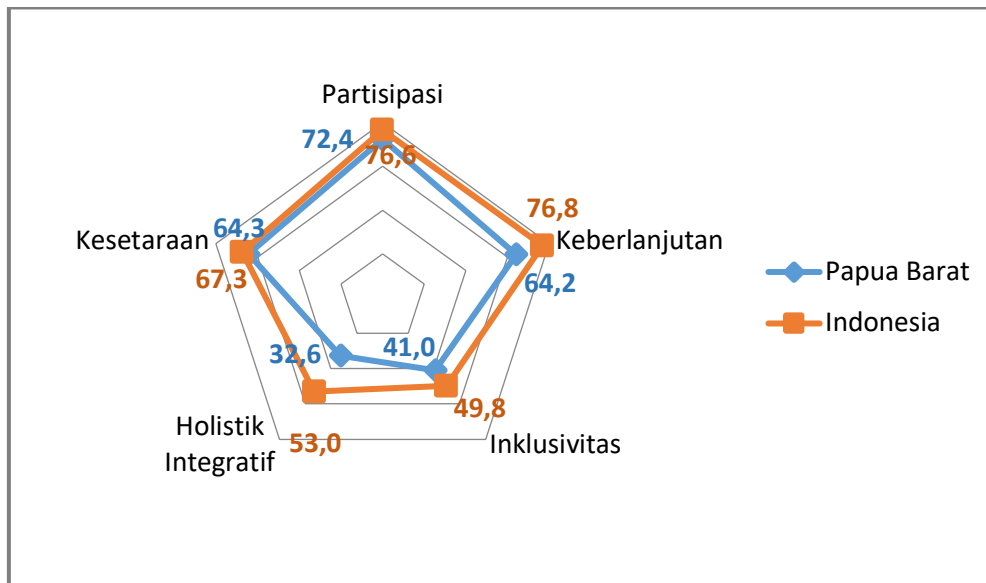


Provinsi Papua Barat

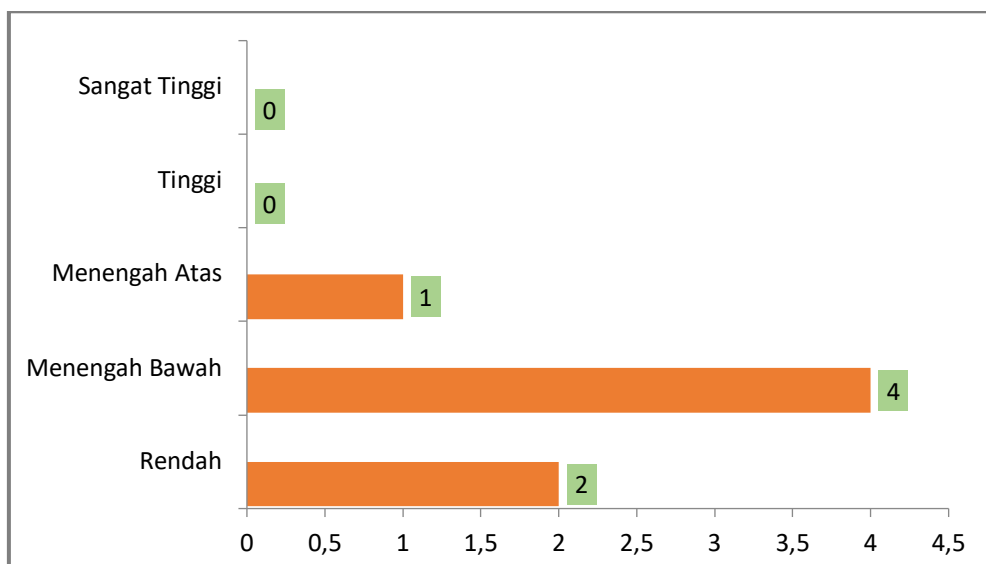
Nilai IPBK : 52,5

Status PBK : Menengah Bawah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua Barat, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua Barat, 2025

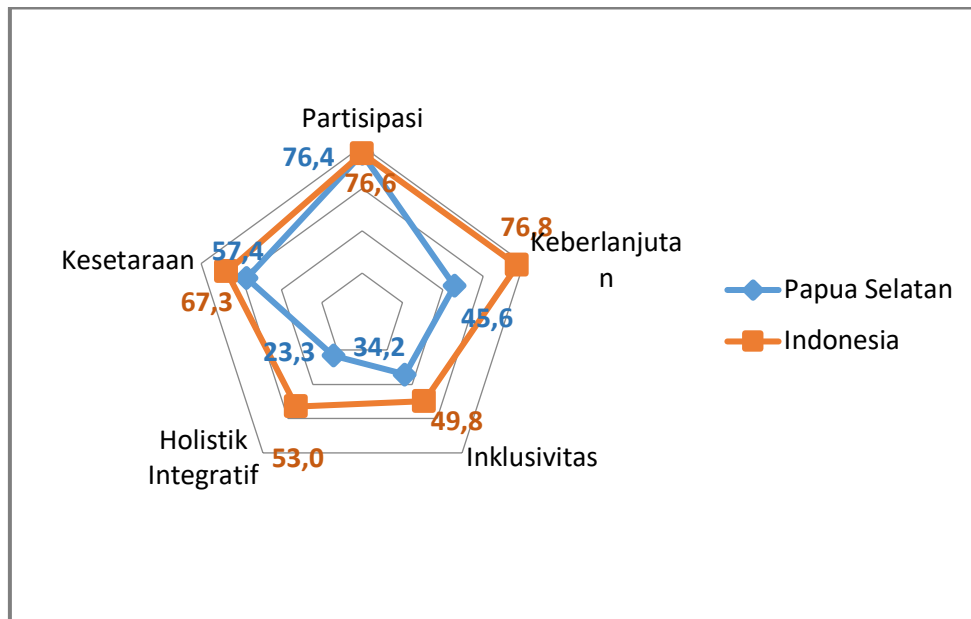


Provinsi Papua Selatan

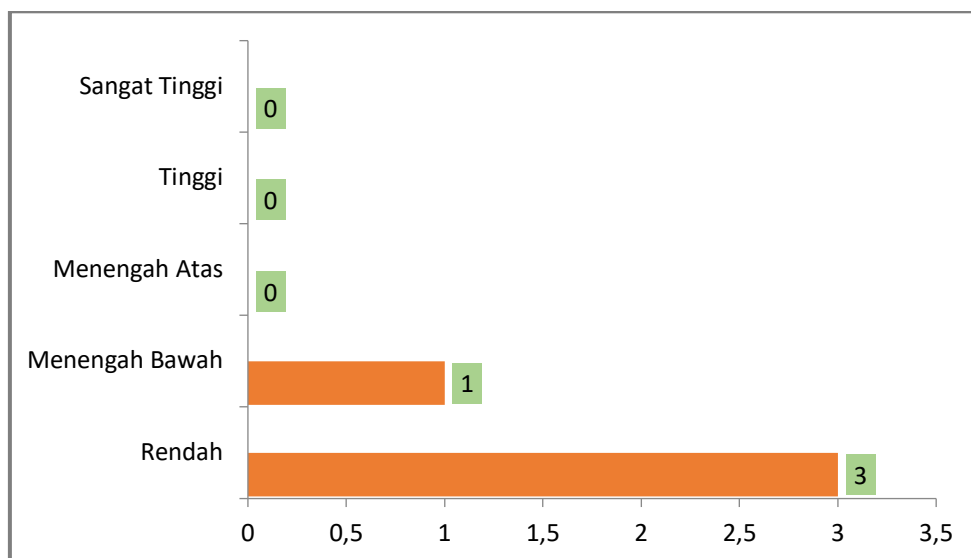
Nilai IPBK : 43,7

Status PBK : Rendah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua Selatan, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua Selatan, 2025

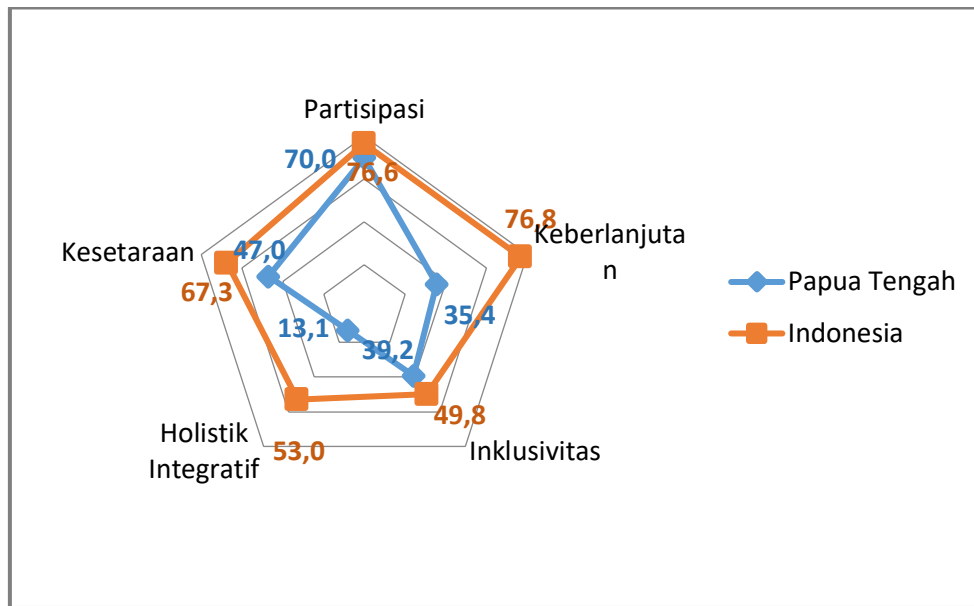


Provinsi Papua Tengah

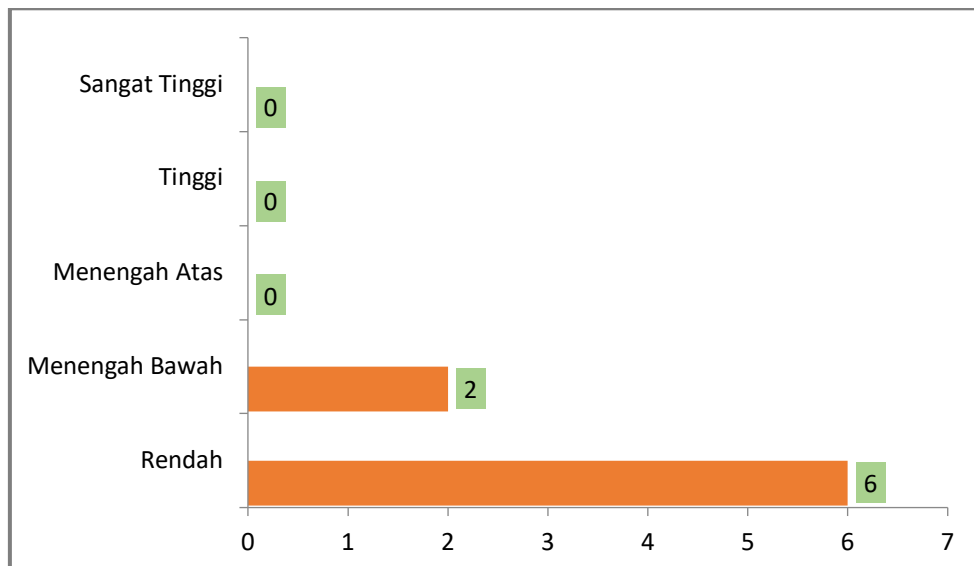
Nilai IPBK : 35,9

Status PBK : Rendah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua Tengah, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua Tengah, 2025

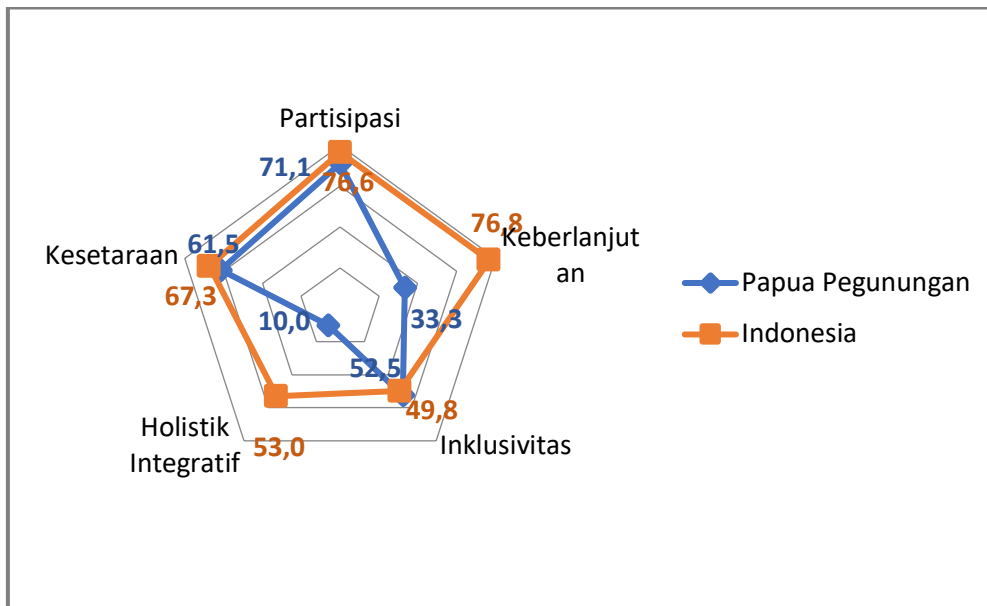


Provinsi Papua Pegunungan

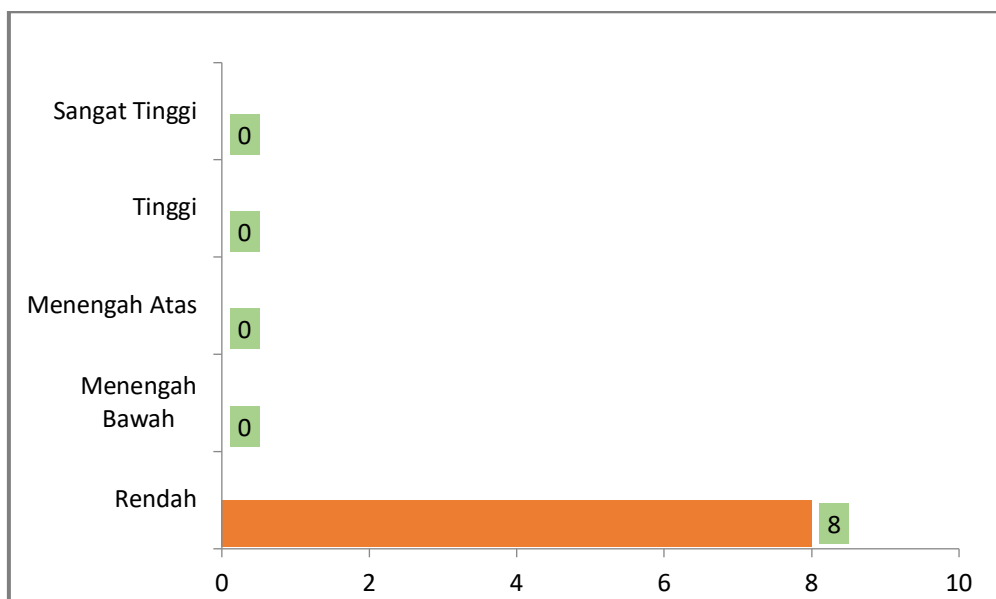
Nilai IPBK : 37,7

Status PBK : Rendah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua Pegunungan, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua Pegunungan, 2025

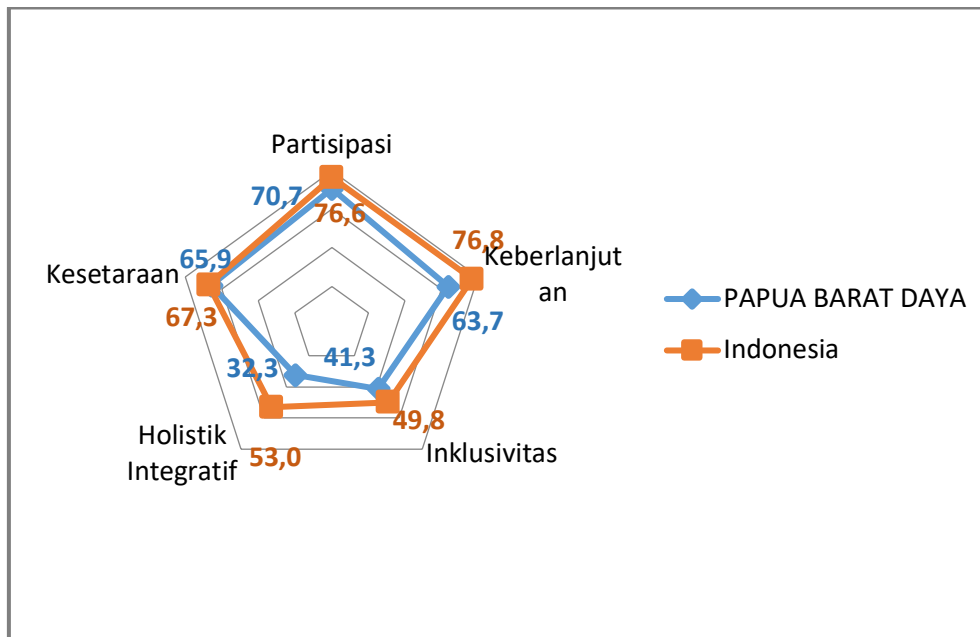


Provinsi Papua Barat Daya

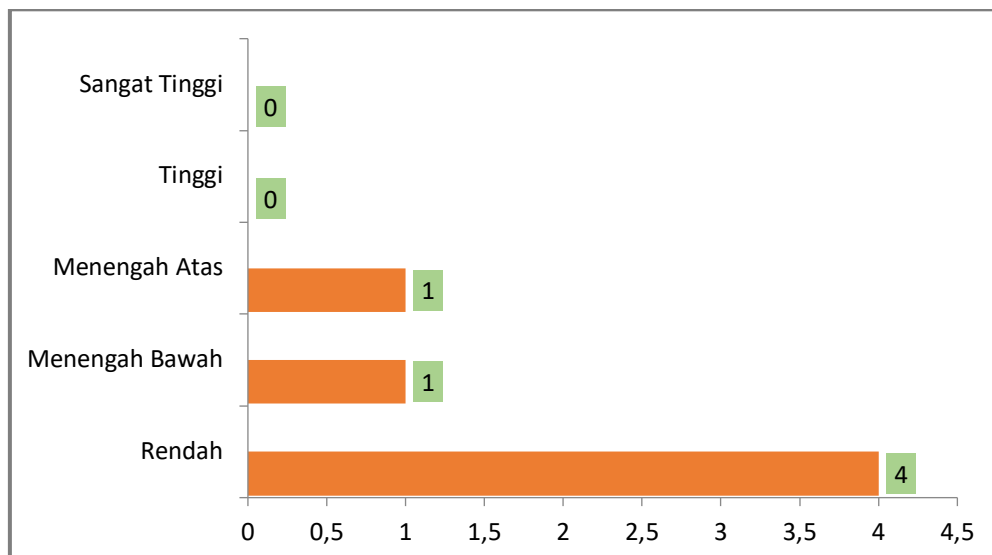
Nilai IPBK : 52,4

Status PBK : Rendah

Indeks Dimensi IPBK Provinsi Papua Barat Daya, 2025



Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Status PBK, Provinsi Papua Barat Daya, 2025





BAB VIII

PENUTUP

**“Pembangunan
sejati menyentuh
kehidupan bukan
sekedar statistik”**



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) di Indonesia. Dalam perkembangannya, IPBK dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). PJPK merupakan operasionalisasi penjabaran pelaksanaan dari dokumen Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK), yang semula dikenal dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Pada tahun 2025 dilakukan reformulasi IPBK untuk memastikan adanya keselarasan antara komponen penyusun, dalam hal ini indikator – indikator, IPBK dengan PJPK. Perubahan mendasar terlihat dari indikator – indikator IPBK, yang semula cenderung berfokus pada pengendalian demografi, kini menjadi lebih luas dan multidimensi. Selain itu, terdapat juga penyesuaian dalam standarisasi nilai indikator berupa penentuan nilai minimal dan nilai maksimal indikator – indikator IPBK yang telah diselaraskan dengan indikator – indikator PJPK.

IPBK yang telah direformulasi tetap memiliki 5 dimensi yang sama, yaitu Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesenjangan. Namun, IPBK hasil reformulasi kini disusun dari semula 20 indikator menjadi 17 indikator. Dimensi Inklusivitas memiliki indikator terbanyak, yakni 5 indikator, sedangkan keempat dimensi lainnya disusun dari masing – masing 3 indikator. Pada Dimensi Partisipasi, terdapat 3 indikator, yaitu Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), Persentase Anak Usia 0 – 4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dimensi Berkelanjutan disusun dari 3 indikator, yaitu *Total Fertility Rate* (TFR), Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak. Dimensi Inklusivitas memiliki indikator terbanyak, yakni 5 indikator, yang meliputi Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin), Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern, Rata – rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja, dan Persentase Lansia Mandiri. Dimensi Holistik Integratif terbentuk dari 3 indikator, yaitu Prevalensi Tengkes/*Stunting* pada Balita, *Age – Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun. Dimensi Kesenjangan mempunyai 3 indikator yang mencakup Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, Persentase Akses Informasi, dan Rasio Gini.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa capaian IPBK nasional pada tahun 2025 sebesar 63,7 (skala 0 – 100). Capaian nilai IPBK ini menempatkan status PBK nasional pada status PBK Menengah Atas (rentang 60 – 68). Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 pada dokumen Rencana Strategis Kemendukbangwa/BKKBN Tahun 2025 – 2029 yang sebesar 63,5, maka, persentase capaian IPBK adalah 100,3 persen.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, terdapat disparitas capaian IPBK yang masih lebar. Nilai IPBK tertinggi pada tingkat provinsi dicapai Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 77,0 sedangkan nilai IPBK terendah ada di Provinsi Papua Tengah dengan nilai 35,9 sehingga terdapat selisih capaian sebesar 41,1 poin. Selain itu, sebanyak 22 provinsi masih mencapai nilai IPBK di bawah capaian nasional. Pada tingkat kabupaten/kota,

nilai IPBK tertinggi diraih Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan nilai 85,2 sedangkan nilai terendah tercatat di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah dengan nilai masing-masing sebesar 30,3. Hal ini berarti ada selisih capaian nilai IPBK sebesar 54,9.

Adanya disparitas capaian IPBK antarwilayah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan kependudukan belum memperhatikan keselarasan dimensi – dimensi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dari hasil penghitungan IPBK tahun 2025 terlihat bahwa capaian Dimensi Partisipasi dan Dimensi Keberlanjutan sudah sangat baik. Sementara itu, Dimensi Inklusivitas dan Dimensi Holistik Integratif masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di berbagai tingkatan wilayah.

Secara umum, Dimensi Partisipasi dan Dimensi Berkelanjutan menunjukkan dukungan positif terhadap capaian IPBK, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Di tingkat nasional, Dimensi Keberlanjutan mempunyai nilai yang paling tinggi (76,8), yang menunjukkan bahwa IPBK mampu memberikan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Sementara itu, Dimensi Partisipasi juga memberikan dukungan positif terhadap capaian IPBK dengan nilai 76,6, yang berarti penduduk sudah terlibat dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Namun demikian, terdapat beberapa provinsi yang masih membutuhkan penguatan, khususnya provinsi – provinsi di Pulau Papua.

Capaian Dimensi Inklusivitas tahun 2025 sebesar 49,8 menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kesempatan kepada kelompok miskin dan rentan untuk mendapatkan kesejahteraan masih perlu ditingkatkan. Demikian pula dengan capaian Dimensi Holistik Integratif yang sebesar 53,0 menunjukkan bahwa proses pembangunan dalam

mendukung kualitas kehidupan penduduk belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, dengan capaian sebesar 67,3 pada Dimensi Kesenjangan, dapat diindikasikan bahwa prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi telah cukup baik dilaksanakan dalam pembangunan, namun masih harus terus melakukan penguatan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan capaian, disparitas capaian, dan pola sebaran pembentukan nilai indeks dimensi IPBK yang beragam, maka, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan.

1. Penguatan Dimensi Inklusivitas sebagai Prioritas Utama

Capaian Dimensi Inklusivitas yang masih rendah (49,8) menunjukkan perlunya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kelompok miskin dan rentan. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu:

- a. Memperluas cakupan dan kualitas program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dan siklus hidup.
- b. Meningkatkan akses kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, keluarga miskin) terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan.
- c. Mengintegrasikan indikator – indikator dalam Dimensi Inklusivitas IPBK ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar intervensi lebih terarah dan berkelanjutan.
- d. Merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan tidak meninggalkan kelompok tertentu (*living no one behind*).

2. Penguatan Dimensi Holistik Integratif melalui Integrasi Layanan & Lintas Sektor

Masih rendahnya capaian Dimensi Holistik Integratif (53,0) menunjukkan perlunya penguatan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas siklus hidup. Karena itu:

- a. Pemerintah Daerah perlu mendorong pengembangan layanan terpadu berbasis wilayah dan berbasis data IPBK, termasuk integrasi dalam program kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan pembangunan remaja secara terpadu, khususnya dalam penurunan *stunting*, pencegahan kelahiran remaja, dan peningkatan akses pendidikan tinggi.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data terintegrasi perlu diperluas untuk mendukung pelayanan yang lebih responsif dan berkesinambungan.

3. Penguatan Dimensi Kesenjangan dengan Fokus pada Kesenjangan Gender

Meskipun capaian Dimensi Kesenjangan tergolong cukup baik (67,3), penguatan masih diperlukan, terutama dalam mendorong kesetaraan gender. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, memperluas akses perempuan terhadap informasi dan peluang ekonomi, serta memperkuat kebijakan penurunan ketimpangan pendapatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.

4. Pengurangan Disparitas Antarwilayah melalui Pendekatan Afirmatif

Lebarnya kesenjangan capaian IPBK antarprovinsi dan antarkabupaten/kota memerlukan kebijakan afirmatif yang lebih kuat, antara lain:

- a. Penyesuaian strategi pembangunan kependudukan dengan karakteristik wilayah dan kapasitas daerah.
- b. Penguatan dukungan fiskal, teknis, dan pendampingan kelembagaan bagi daerah dengan nilai IPBK rendah.
- c. Pemanfaatan IPBK sebagai dasar penentuan prioritas intervensi pembangunan kependudukan di daerah tertinggal.

5. Pemeliharaan dan Replikasi Praktik Baik pada Dimensi Partisipasi dan Dimensi Keberlanjutan

Capaian yang tinggi pada Dimensi Partisipasi dan Dimensi Keberlanjutan (di atas 76) perlu dipertahankan dan direplikasi dengan:

- a. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan praktik baik dari daerah - daerah dengan capaian IPBK tinggi seperti Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Badung.
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lokal dalam pembangunan kependudukan.
- c. Memastikan keberlanjutan pembangunan melalui penguatan kebijakan hunian layak, sanitasi, pengelolaan fertilitas, dan perlindungan lingkungan.

6. Optimalisasi IPBK sebagai Instrumen Evaluasi PJPK dan Perencanaan Pembangunan

Seiring dengan reformulasi IPBK yang semakin selaras dengan PJPK, maka:

- a. IPBK perlu dimanfaatkan secara konsisten sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan kependudukan serta dasar perumusan kebijakan dan program di seluruh tingkatan pemerintahan.
- b. Peningkatan kapasitas daerah dalam pemahaman, penghitungan, dan pemanfaatan IPBK perlu terus dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., Nurjading, R., & Sari, N. (2025). Evaluasi program sistem pengolahan tinja komunal untuk peningkatan kualitas sanitasi wilayah pesisir di Kota Batam. *Jurnal Sanitasi, Kesehatan Lingkungan*, 14(2).
- Ariyanti, L., Dasuki, D., & Wilopo, S.A. (2017). Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan dan Unmet Need KB di Tingkat Provinsi. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(2), 95–100.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2023*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022a). *Menatap Masa Depan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan: Naskah Akademik Pengembangan Kerangka Konseptual IPBK*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022b). *Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan: Pedoman Teknis Penghitungan IPBK Baru*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025. *Berita Resmi Statistik*, No. 104/11/Th. XXVIII, 5 November 2025.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024. *Berita Resmi Statistik*, No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru*.
- Barro, R., & Lee, J. (1996). International Measures of Schooling Years and Schooling Quality. *The American Economic Review*, 86, 218-223.
- Bartram, J., & Cairncross, S. (2014). Hygiene, sanitation, and water: Forgotten foundations of health. *PLoS Med*, 11(3), e1000367.
- Baum, C. F., Scicchitano, S., Zaiceva, A., & Zimmermann, K. F. (2025). *Population change: effects on the environment, society, and economy*.
- Becedas, R. R., Fruchtmann, C. S., Dincu, I., & Savigny, D. De. (2022). *Addressing the*

Evidence Gap in the Economic and Social Benefits of Civil Registration and Vital Statistics Systems: A Systematic Review. 43(July).
<https://doi.org/10.3389/phrs.2022.1604560>

Chan, C., & Liang, J. (2012). Active Aging: Policy Framework and Applications to Promote Older Adult Participation in Hong Kong. *Ageing International*, 38, 28 - 42. <https://doi.org/10.1007/s12126-012-9166-z>.

Chen, J., Dai, D., Pu, M., Hou, W., & Feng, Q. (2010). The trend of the Gini coefficient of China. *Development Economics: Regional & Country Studies eJournal*.

Kantorová, V., Wheldon, M.C., Ueffing, P., & Dasgupta, A.N.Z. (2020). Estimates of contraception prevalence and unmet need among women of reproductive age: Global, regional and national trends from 1990 to 2019. *BMJ Global Health*, 5(12), e003962.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2025). Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025

- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2024). *Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2024*.
- Kurniatin, L., Marsita, E., Irawaty, D., & Elfiyan, I. (2022). Prediction Model of Related Factors with Youth Fertility in Kalimantan. *Jurnal Info Kesehatan*. <https://doi.org/10.31965/infokes.vol20.iss1.631>.
- Kussudyarsana, A. & Hakim, L. (2018). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Mathiesen, K. (2008). Access to Information as a Human Right. Jurisprudence & Legal Philosophy. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1264666>.
- Mcpake, B., & Hanson, K. (2016). Series UHC : markets , profit , and the public good for managing the public – private mix to achieve universal health coverage. *The Lancet*, 6736(16), 1–9. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00344-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00344-5)
- Nugraheni, A., Nugraheni, S., & Lisnawati, N. (2020). Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Mineral dengan Kejadian Balita Stunting di Indonesia: Kajian Pustaka. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.5.322-330>.
- Pimkina, S., & De La Flor, L. (2020). *Promoting Female Labor Force Participation*. <https://doi.org/10.1596/34953>.
- Rahayu, S. & Widyastuti, S. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sadchykova, I., & Kolotylo, L. (2025). Financial security of banking institutions in Ukraine in the conditions of macroeconomic instability. POLSSIA Economic Bulletin. Retrieved from <https://elibrary.ru/item.asp?id=82255008>
- Satterthwaite, D. (2016). Missing the Millennium Development Goal targets for water and sanitation in urban areas. *Environment and Urbanization*, 28(1), 99–118.
- Setiandari, E., Octaviana, L., Irianty, H., & Handayani, W. D. (2025). Analisis Hubungan Pengetahuan, Penghasilan, dan Dukungan dengan Kepesertaan

- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2, 34–39.
- Sinatrya, A., & Muniroh, L. (2019). Hubungan Faktor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) dengan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Kotakulon, Kabupaten Bondowoso. *Amerta Nutrition*. <https://doi.org/10.20473/amnt.v3i3.2019.164-170>.
- Spoorenberg, T., Carlsen, E., Flatø, M., Stonawski, M., & Skirbekk, V. (2024). The Global Adolescent Fertility Decline is Counteracted by Increasing Teen Births in Sub-Saharan Africa. *Studies in family planning*. <https://doi.org/10.1111/sifp.12273>.
- Sudibyo, A. (2022). Tanggapan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Materi yang dipresentasikan pada Pembahasan Naskah Akademik Pengembangan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Jakarta, 24 Oktober 2022.
- Sukamdi et al. (2014). *Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*.
- UNICEF & WHO. (2021). *Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020*. Five years into the SDGs.
- Utomo, A. (2018). Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia. *Jurnal Perempuan*. <https://doi.org/10.34309/jp.v23i4.274>.
- Wickenden, M.; Mader, P.; Thompson, S. and Shaw, J. (2022). Mainstreaming Disability Inclusive Employment in International Development. *Journal of International Development* 34.5: 933-41, DOI: 10.1002/jid.3679
- Winarto, A., Suryana, T., & Rahmawati, D. (2020). The development of higher education in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3273–3277. Retrieved from <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/The-Development-Of-Higher-Education-In-Indonesia.pdf>



LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Penghitungan dan Data Indikator IPBK Nasional/Indonesia Tahun 2025

Nilai Indeks Dimensi, IPBK, dan Status PBK Nasional/Indonesia, 2025

	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
	Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
Indonesia	76,6	76,8	49,8	53,0	67,3	63,7	3

Data Indikator IPBK Nasional/Indonesia Tahun 2025

Dimensi	Indikator		Data
1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	72,97
	2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	95,43
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91
2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,11
	2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	65,25
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	83,60
3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	9,03
	2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	83,90
	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	9,22

	4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	24,43
	5	Persentase Lansia Mandiri	34,55
4. Dimensi Holistik Integratif	1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	19,80
	2	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	18,00
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	32,00
5. Dimensi Kesenjangan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	56,42
	2	Persentase Akses Informasi	78,06
	3	Rasio Gini	0,379

CATATAN:

1. Data indikator dalam bilangan desimal 2 angka di belakang koma kecuali Rasio Gini (3 angka di belakang koma)
2. Seluruh indikator menggunakan satuan % kecuali TFR, ASFR 15-19 Tahun, dan Rasio Gini

Lampiran 2

Hasil Penghitungan Indeks Dimensi dan IPBK Provinsi

Tahun 2025

No.	ID	Provinsi	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
			Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
1.	11	Aceh	85,2	74,5	46,1	55,4	65,5	63,8	3
2.	12	Sumatera	71,6	79,2	49,8	51,7	74,1	64,1	3
3.	13	Sumatera	77,4	67,5	51,4	61,8	74,7	65,9	3
4.	14	Riau	78,2	82,1	52,9	57,1	68,0	66,7	3
5.	15	Jambi	72,9	75,9	56,6	50,4	66,4	63,7	3
6.	16	Sumatera	79,7	72,5	49,0	40,3	67,8	60,0	3
7.	17	Bengkulu	81,5	70,3	49,4	47,1	69,2	62,1	3
8.	18	Lampung	78,4	76,9	49,1	51,3	70,4	64,0	3
9.	19	Kepulauan Bangka Belitung	82,1	66,3	54,5	30,9	73,2	58,2	2
10.	21	Kepulauan Riau	78,7	75,9	51,4	64,0	73,4	67,9	3
11.	31	DKI Jakarta	82,6	68,4	48,7	68,9	67,3	66,2	3
12.	32	Jawa Barat	68,2	68,3	49,6	53,1	62,8	59,9	2
13.	33	Jawa Tengah	77,5	81,8	49,5	57,2	71,7	66,3	3
14.	34	DI Yogyakarta	87,2	94,2	52,2	85,4	74,0	77,0	4
15.	35	Jawa Timur	77,6	82,0	50,4	53,6	69,1	65,3	3
16.	36	Banten	71,2	78,8	51,1	56,6	65,5	63,9	3
17.	51	Bali	92,0	93,9	58,9	63,4	79,8	76,2	4
18.	52	Nusa Tenggara Barat	80,9	76,6	44,4	24,8	71,1	54,6	2
19.	53	Nusa Tenggara Timur	74,1	57,7	37,6	34,9	72,3	52,7	2
20.	61	Kalimantan Barat	72,6	74,9	49,2	26,5	69,2	54,7	2

No.	ID	Provinsi	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
			Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
21.	62	Kalimantan Tengah	75,9	69,8	54,3	27,6	68,9	55,9	2
22.	63	Kalimantan Selatan	78,4	73,0	56,7	41,9	71,8	62,8	3
23.	64	Kalimantan Timur	81,6	85,9	49,0	54,8	71,1	66,9	3
24.	65	Kalimantan Utara	86,3	78,0	51,4	43,8	73,7	64,5	3
25.	71	Sulawesi Utara	80,3	83,3	48,2	32,4	63,5	58,1	2
26.	72	Sulawesi Tengah	83,5	70,8	48,0	30,8	67,1	56,7	2
27.	73	Sulawesi Selatan	84,2	84,6	47,2	45,9	65,2	63,2	3
28.	74	Sulawesi Tenggara	84,8	81,8	48,9	38,6	69,7	61,9	3
29.	75	Gorontalo	88,8	78,6	46,1	30,3	60,7	56,8	2
30.	76	Sulawesi Barat	89,3	69,1	47,7	17,7	65,2	50,9	2
31.	81	Maluku	67,5	72,2	42,8	48,8	69,0	58,8	2
32.	82	Maluku Utara	77,0	74,0	52,5	34,2	63,9	58,0	2
33.	91	Papua	68,9	67,2	40,6	29,6	64,1	51,3	2
34.	92	Papua Barat	72,4	64,2	41,0	32,6	64,3	52,5	2
35.	93	Papua Selatan	76,4	45,6	34,2	23,3	57,4	43,7	1
36.	94	Papua Tengah	70,0	35,4	39,2	13,1	47,0	35,9	1
37.	95	Papua Pegunungan	71,1	33,3	52,5	10,0	61,5	37,7	1
38.	96	Papua Barat Daya	70,7	63,7	41,3	32,3	65,9	52,4	2

Lampiran 3

Hasil Penghitungan dan Data Indikator IPBK Kabupaten/Kota Tahun 2025

Menurut Provinsi

Provinsi Aceh

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	11		Prov. Aceh	85,2	74,5	46,1	55,4	65,5	63,8	3
1	11	1101	Kab. Aceh Selatan	87,8	72,2	43,9	52,8	59,5	61,4	3
2	11	1102	Kab. Aceh Tenggara	85,7	57,0	40,4	37,7	71,6	55,6	2
3	11	1103	Kab. Aceh Timur	82,8	63,6	51,4	42,1	62,5	59,0	2
4	11	1104	Kab. Aceh Tengah	90,4	77,7	48,4	48,2	80,7	66,7	3
5	11	1105	Kab. Aceh Barat	86,8	89,4	45,1	66,4	68,0	69,1	4
6	11	1106	Kab. Aceh Besar	81,6	85,1	43,0	54,8	68,6	64,6	3
7	11	1107	Kab. Pidie	86,9	60,1	39,0	53,1	62,5	58,3	2
8	11	1108	Kab. Aceh Utara	81,4	74,8	45,3	59,4	62,7	63,4	3
9	11	1109	Kab. Simeulue	83,5	64,6	43,1	58,3	71,6	62,7	3
10	11	1110	Kab. Aceh Singkil	80,3	48,0	39,0	50,1	62,3	54,2	2
11	11	1111	Kab. Bireuen	87,1	80,0	50,4	59,5	68,8	67,8	3
12	11	1112	Kab. Aceh Barat Daya	90,6	67,1	41,1	43,9	59,8	58,0	2
13	11	1113	Kab. Gayo Lues	84,4	41,1	42,3	41,5	79,9	54,6	2
14	11	1114	Kab. Aceh Jaya	94,1	72,1	56,0	54,9	74,3	68,9	3
15	11	1115	Kab. Nagan Raya	82,5	83,1	46,6	32,1	68,0	58,7	2
16	11	1116	Kab. Aceh Tamiang	83,1	77,3	46,2	57,1	69,8	65,2	3
17	11	1117	Kab. Bener Meriah	94,6	75,9	56,1	35,9	88,9	66,3	3

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
18	11	1118	Kab. Pidie Jaya	90,7	76,2	39,8	50,2	61,4	61,1	3
19	11	1171	Kota Banda Aceh	82,1	99,7	51,3	80,6	73,4	75,7	4
20	11	1172	Kota Sabang	93,9	84,9	51,7	69,5	74,6	73,4	4
21	11	1173	Kota Lhokseumawe	78,5	88,2	44,6	69,7	69,2	68,3	3
22	11	1174	Kota Langsa	83,1	89,6	50,8	79,6	67,1	72,6	4
23	11	1175	Kota Subulussalam	86,2	42,5	54,8	52,8	69,5	59,3	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RIS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	11		Prov. Aceh	97,19	96,38	5,75	2,32	67,76	81,10	14,23	83,51	9,95	28,40	29,62	28,60	13,90	42,48	49,62	71,56	0,294
1	11	1101	Kab. Aceh Selatan	95,15	98,09	4,56	2,26	64,77	77,96	12,02	84,16	8,75	24,53	27,46	34,20	7,20	38,38	42,68	64,85	0,274
2	11	1102	Kab. Aceh Tenggara	94,48	95,19	4,79	2,51	53,70	64,01	11,99	80,03	10,11	15,82	20,88	30,90	31,30	49,53	56,27	67,90	0,233
3	11	1103	Kab. Aceh Timur	99,25	99,54	7,75	2,28	52,62	73,59	13,26	84,94	9,03	49,69	27,82	36,70	11,70	24,36	38,86	69,51	0,221
4	11	1104	Kab. Aceh Tengah	98,21	99,15	4,21	2,43	71,58	86,34	14,27	87,28	10,18	17,34	41,24	31,40	21,20	49,00	67,40	76,60	0,258
5	11	1105	Kab. Aceh Barat	97,99	98,56	5,58	2,18	84,38	91,09	17,60	87,77	10,24	30,59	28,70	25,60	9,00	50,43	47,15	74,44	0,250
6	11	1106	Kab. Aceh Besar	97,85	99,00	7,93	2,19	77,01	90,30	13,21	73,69	10,55	18,48	30,37	32,30	7,20	39,07	51,59	71,57	0,262
7	11	1107	Kab. Pidie	97,46	99,94	5,74	2,27	54,60	63,88	18,59	84,89	9,30	29,41	22,25	32,60	10,20	36,60	45,64	58,63	0,209
8	11	1108	Kab. Aceh Utara	97,58	93,47	6,88	2,27	67,61	80,63	16,11	87,40	9,62	14,48	40,43	19,20	11,70	29,86	42,04	71,90	0,267
9	11	1109	Kab. Simeulue	96,92	91,68	5,50	2,67	60,51	76,51	17,69	83,78	10,11	38,71	18,87	25,50	17,80	51,43	58,02	69,03	0,259
10	11	1110	Kab. Aceh Singkil	88,37	97,23	6,44	2,85	44,61	63,22	19,06	77,98	8,84	27,58	30,85	34,20	8,90	33,02	39,11	74,18	0,260
11	11	1111	Kab. Bireuen	98,12	90,44	3,93	2,38	73,08	88,26	12,10	77,60	9,89	41,18	29,83	27,10	8,30	39,48	54,36	67,63	0,258
12	11	1112	Kab. Aceh Barat Daya	98,17	97,77	3,83	2,30	63,69	69,39	15,32	90,48	9,11	16,90	28,11	36,20	5,20	24,20	37,63	65,73	0,226
13	11	1113	Kab. Gayo Lues	98,33	76,29	2,40	2,53	34,01	49,79	18,30	94,65	8,85	21,50	32,87	20,60	44,20	52,02	71,43	67,08	0,241
14	11	1114	Kab. Aceh Jaya	98,59	99,63	2,75	2,63	68,94	82,31	12,25	91,05	9,30	44,56	36,91	31,00	9,50	36,97	58,01	74,60	0,254
15	11	1115	Kab. Nagan Raya	99,41	85,51	5,22	2,20	76,01	87,32	16,94	86,79	9,79	25,14	38,24	35,50	21,40	24,70	43,00	73,50	0,159

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15 + Tahun RLS	Penyandang Disabilitas yang	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun ASFR	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
16	11	1116	Kab. Aceh Tamiang	95,16	99,86	6,95	2,33	68,88	85,93	12,17	82,20	9,70	25,63	29,65	27,40	18,90	54,53	53,99	70,22	0,256
17	11	1117	Kab. Bener Meriah	96,87	99,56	2,20	2,48	67,53	88,05	18,18	99,59	10,05	51,16	37,25	32,80	21,70	28,27	78,39	76,36	0,230
18	11	1118	Kab. Pidie Jaya	97,92	98,17	3,82	2,35	72,08	80,82	18,28	78,95	9,53	31,07	24,66	31,60	8,20	28,89	43,90	59,32	0,214
19	11	1171	Kota Banda Aceh	96,49	99,52	7,55	2,02	95,14	99,39	6,95	77,95	12,88	24,39	17,62	23,70	5,50	96,44	53,01	90,82	0,339
20	11	1172	Kota Sabang	99,41	99,47	2,95	2,33	74,57	95,90	14,58	76,57	11,26	38,46	34,87	23,40	5,20	52,89	54,71	85,25	0,295
21	11	1173	Kota Lhokseumawe	95,62	96,92	8,47	2,28	81,78	93,71	10,44	74,72	11,39	17,42	24,89	20,80	8,50	49,00	50,25	83,59	0,326
22	11	1174	Kota Langsa	98,25	98,91	7,34	2,17	81,59	94,30	10,33	86,02	11,24	24,76	28,81	15,60	8,60	59,46	45,38	82,54	0,305
23	11	1175	Kota Subulussalam	95,35	97,11	5,12	2,90	29,93	61,57	16,38	72,70	9,08	69,44	34,63	27,50	18,50	45,53	50,87	76,45	0,276

Provinsi Sumatera Utara

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	12		Prov. Sumatera Utara	71,6	79,2	49,8	51,7	74,1	64,1	3
1	12	1201	Kab. Tapanuli Tengah	77,1	48,3	48,7	44,0	84,5	58,3	2
2	12	1202	Kab. Tapanuli Utara	77,2	75,4	51,0	48,7	92,2	66,9	3
3	12	1203	Kab. Tapanuli Selatan	77,3	43,5	55,2	59,3	83,4	62,0	3
4	12	1204	Kab. Nias	83,7	29,9	30,2	43,9	83,5	48,8	1
5	12	1205	Kab. Langkat	67,9	62,0	45,6	43,1	75,7	57,4	2
6	12	1206	Kab. Karo	82,9	84,8	54,1	40,4	91,7	67,6	3
7	12	1207	Kab. Deli Serdang	57,4	92,2	53,7	52,2	71,7	63,9	3
8	12	1208	Kab. Simalungun	70,4	92,2	47,7	50,9	79,8	66,1	3
9	12	1209	Kab. Asahan	67,5	89,3	45,3	49,2	70,4	62,4	3
10	12	1210	Kab. Labuhan Batu	67,1	81,2	49,5	39,5	70,2	59,5	2
11	12	1211	Kab. Dairi	83,6	83,0	52,4	49,7	95,7	70,4	4
12	12	1212	Kab. Toba	88,0	88,1	58,1	49,2	84,2	71,5	4
13	12	1213	Kab. Mandailing Natal	64,4	32,5	50,3	35,8	66,3	47,8	1
14	12	1214	Kab. Nias Selatan	60,6	58,1	40,9	32,2	73,0	50,8	2
15	12	1215	Kab. Pakpak Bharat	95,4	57,4	67,9	49,4	90,0	69,8	4
16	12	1216	Kab. Humbang Hasundutan	83,4	87,0	58,6	60,3	90,2	74,6	4
17	12	1217	Kab. Samosir	93,1	78,3	54,7	46,4	95,3	70,7	4
18	12	1218	Kab. Serdang Bedagai	70,4	85,9	46,2	36,4	69,7	58,9	2
19	12	1219	Kab. Batu Bara	69,0	87,7	47,0	48,6	71,6	63,0	3

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	12	1220	Kab. Padang Lawas Utara	67,6	62,2	54,3	24,4	78,3	53,4	2
21	12	1221	Kab. Padang Lawas	66,5	59,8	59,8	36,2	84,9	59,3	2
22	12	1222	Kab. Labuhan Batu Selatan	75,7	68,8	48,2	44,0	78,4	61,3	3
23	12	1223	Kab. Labuhan Batu Utara	72,8	79,5	56,6	56,4	67,7	66,0	3
24	12	1224	Kab. Nias Utara	84,5	33,9	41,9	49,6	81,2	54,5	2
25	12	1225	Kab. Nias Barat	93,1	29,8	41,3	34,7	84,7	50,8	2
26	12	1271	Kota Medan	74,7	90,0	49,8	70,3	70,0	69,7	4
27	12	1272	Kota Pematang Siantar	70,8	91,7	53,0	77,8	80,7	73,6	4
28	12	1273	Kota Sibolga	83,3	39,5	46,7	57,7	79,7	58,9	2
29	12	1274	Kota Tanjung Balai	83,8	83,6	50,2	60,6	73,3	69,0	4
30	12	1275	Kota Binjai	77,2	95,6	57,4	62,2	68,9	71,1	4
31	12	1276	Kota Tebing Tinggi	85,3	94,8	49,0	55,6	68,4	68,5	3
32	12	1277	Kota Padangsidimpuan	67,7	42,0	47,5	54,6	76,9	56,3	2
33	12	1278	Kota Gunungsitoli	89,7	45,1	36,6	65,0	74,9	59,1	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	12		Prov. Sumatera Utara	65,75	94,49	5,60	2,36	73,47	85,73	7,99	73,79	10,18	23,05	34,69	22,00	17,30	31,63	58,54	79,26	0,297
1	12	1201	Kab. Tapanuli Tengah	85,42	98,18	7,45	2,73	43,11	62,60	11,80	60,90	9,38	44,72	34,34	32,30	14,70	28,09	66,75	82,83	0,234
2	12	1202	Kab. Tapanuli Utara	55,06	94,62	1,21	2,83	72,89	89,78	8,21	64,51	10,45	15,94	47,95	32,50	5,00	27,53	81,48	83,22	0,242
3	12	1203	Kab. Tapanuli Selatan	66,01	95,96	3,41	2,71	39,03	56,26	6,92	75,91	9,91	16,54	51,80	6,60	20,70	28,13	69,01	73,49	0,206
4	12	1204	Kab. Nias	70,32	99,36	2,10	2,98	11,85	28,10	14,89	49,12	7,98	6,09	28,96	26,10	17,80	24,37	82,52	64,22	0,247
5	12	1205	Kab. Langkat	64,30	90,16	6,08	2,38	10,03	89,95	9,04	79,48	9,01	23,79	27,60	16,00	29,30	30,86	61,74	73,36	0,260
6	12	1206	Kab. Karo	70,15	99,37	2,40	2,19	77,15	89,50	7,37	67,09	10,24	17,39	52,78	17,60	25,60	20,24	78,82	79,83	0,214
7	12	1207	Kab. Deli Serdang	53,71	86,50	8,02	2,20	84,00	97,88	3,44	77,40	10,51	25,87	29,10	19,60	18,00	30,06	49,47	81,44	0,262
8	12	1208	Kab. Simalungun	57,75	97,20	5,17	2,34	90,10	94,74	7,72	74,25	9,91	13,07	34,93	26,00	15,20	32,13	62,63	81,12	0,257
9	12	1209	Kab. Asahan	55,82	96,35	5,94	2,37	85,13	94,74	8,12	70,23	9,30	18,49	33,26	13,90	20,60	20,40	50,98	74,51	0,248
10	12	1210	Kab. Labuhan Batu	60,35	90,99	5,90	2,33	74,06	88,70	7,84	76,18	9,81	22,33	34,54	25,30	23,00	25,61	47,66	79,15	0,251
11	12	1211	Kab. Dairi	67,60	98,38	1,43	3,01	84,88	97,18	7,10	69,99	9,95	24,51	41,89	29,00	7,90	23,52	79,86	87,47	0,215
12	12	1212	Kab. Toba	75,70	98,89	1,09	2,54	85,61	95,84	8,07	56,72	10,66	29,97	58,79	27,10	4,40	19,43	77,05	83,74	0,348
13	12	1213	Kab. Mandailing Natal	54,77	97,01	7,22	2,88	33,22	40,14	8,69	64,60	9,65	24,07	44,73	22,20	25,00	17,70	51,63	64,71	0,250
14	12	1214	Kab. Nias Selatan	45,70	75,45	3,03	2,97	91,24	15,33	16,32	60,49	7,65	37,93	37,75	37,60	23,80	31,10	73,44	49,64	0,248
15	12	1215	Kab. Pakpak Bharat	91,74	99,81	0,97	3,00	47,89	82,96	6,87	64,00	9,96	66,22	51,63	27,50	9,50	20,51	80,89	81,11	0,262

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																	
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan			
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi
16	12	1216	Kab. Humbang Hasundutan	72,44	90,72	0,92	2,98	91,24	97,92	8,44	66,84	10,40	24,50	60,45	18,30	6,60	26,50	84,60	86,71	0,302	
17	12	1217	Kab. Samosir	85,59	99,91	0,89	2,78	71,95	95,68	11,63	74,58	9,81	46,18	38,10	28,60	6,90	14,43	80,73	89,62	0,238	
18	12	1218	Kab. Serdang Bedagai	58,87	94,65	4,88	2,41	79,33	94,74	6,97	73,50	9,62	18,17	29,94	19,00	27,90	19,86	51,50	71,46	0,242	
19	12	1219	Kab. Batu Bara	60,72	94,29	5,75	2,44	84,91	93,27	10,94	68,20	9,02	42,67	26,97	23,00	15,90	24,18	54,60	73,50	0,258	
20	12	1220	Kab. Padang Lawas Utara	48,58	93,27	3,99	2,82	59,87	75,80	8,97	73,26	10,20	28,14	44,76	30,00	28,70	14,78	63,72	71,38	0,223	
21	12	1221	Kab. Padang Lawas	56,44	91,25	5,47	3,02	61,64	73,63	7,87	65,52	10,01	52,25	42,80	25,20	28,50	31,10	65,86	83,59	0,224	
22	12	1222	Kab. Labuhan Batu Selatan	64,44	92,90	3,24	2,67	64,67	80,93	7,73	62,35	9,59	25,18	37,82	22,00	20,00	22,45	55,86	80,92	0,212	
23	12	1223	Kab. Labuhan Batu Utara	58,93	98,60	4,60	2,56	77,35	87,15	8,98	85,37	9,66	41,85	35,14	17,50	17,70	34,10	43,87	76,95	0,239	
24	12	1224	Kab. Nias Utara	75,71	99,94	2,82	3,07	31,87	47,50	21,50	71,14	8,25	60,00	24,55	25,80	14,40	27,57	73,37	66,44	0,234	
25	12	1225	Kab. Nias Barat	88,79	97,50	1,00	3,30	31,06	44,59	22,68	90,86	8,37	31,59	35,94	34,40	19,10	23,09	78,02	65,92	0,219	
26	12	1271	Kota Medan	83,19	98,22	8,13	1,87	81,96	92,98	7,94	77,15	11,71	11,14	30,65	15,40	12,00	45,39	52,15	86,78	0,356	
27	12	1272	Kota Pematang Siantar	77,33	94,33	8,00	2,07	86,21	91,99	7,20	76,96	11,75	26,78	29,02	12,20	8,00	50,46	60,73	91,03	0,297	
28	12	1273	Kota Sibolga	93,16	99,99	6,52	2,14	28,60	36,90	11,39	75,76	10,44	37,36	19,87	18,10	11,70	24,65	61,10	90,42	0,313	
29	12	1274	Kota Tanjung Balai	81,03	99,90	4,08	2,25	69,34	96,82	11,97	80,31	9,91	37,36	30,41	5,60	17,10	21,13	54,55	74,49	0,236	
30	12	1275	Kota Binjai	73,35	99,13	5,44	2,04	89,83	96,23	4,75	86,10	11,25	37,36	23,83	25,60	13,30	49,40	49,12	82,49	0,312	
31	12	1276	Kota Tebing Tinggi	97,67	98,51	6,18	2,12	88,11	96,88	8,79	86,27	10,91	18,54	27,11	17,60	15,00	26,90	51,30	81,50	0,335	

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun ASFR	APK PT 19-23 Tahun	Pemukim TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
32	12	1277	Kota Padang Sidempuan	59,55	99,70	7,17	2,40	29,58	48,42	6,23	75,46	11,16	9,92	24,68	30,30	15,60	47,39	56,85	87,60	0,296
33	12	1278	Kota Gunungsitoli	90,70	99,95	3,30	2,58	40,04	55,54	14,72	80,34	9,37	13,36	20,13	17,40	8,80	34,00	61,45	74,37	0,277

Provinsi Sumatera Barat

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	13		Prov. Sumatera Barat	77,4	67,5	51,4	61,8	74,7	65,9	3
1	13	1301	Kab. Pesisir Selatan	88,4	73,1	55,7	52,3	70,0	66,7	3
2	13	1302	Kab. Solok	69,1	65,5	48,5	55,3	80,1	62,7	3
3	13	1303	Kab. Sijunjung	73,2	62,6	51,4	39,1	73,1	58,3	2
4	13	1304	Kab. Tanah Datar	77,3	63,6	51,1	69,5	77,2	67,0	3
5	13	1305	Kab. Padang Pariaman	69,9	60,8	44,2	61,0	74,8	61,2	3
6	13	1306	Kab. Agam	78,9	70,2	42,8	55,9	79,1	63,7	3
7	13	1307	Kab. Lima Puluh Kota	75,7	56,5	52,6	47,3	79,6	61,0	3
8	13	1308	Kab. Pasaman	88,3	45,1	50,6	53,7	77,2	60,9	3
9	13	1309	Kab. Kepulauan Mentawai	75,9	55,3	58,9	19,2	79,3	51,9	2
10	13	1310	Kab. Dharmasraya	72,3	59,4	62,8	47,8	79,3	63,4	3
11	13	1311	Kab. Solok Selatan	83,8	48,7	54,6	40,0	76,4	58,4	2
12	13	1312	Kab. Pasaman Barat	80,7	66,3	50,1	51,4	69,5	62,5	3
13	13	1371	Kota Padang	69,5	77,4	51,5	79,5	74,2	69,6	4
14	13	1372	Kota Solok	91,3	88,3	56,7	61,6	84,0	74,9	4
15	13	1373	Kota Sawah Lunto	82,4	83,4	52,7	61,1	77,3	70,3	4
16	13	1374	Kota Padang Panjang	87,8	76,5	56,0	69,3	80,9	73,3	4
17	13	1375	Kota Bukittinggi	81,4	84,2	53,7	73,5	80,7	73,8	4
18	13	1376	Kota Payakumbuh	82,0	84,6	54,8	66,5	78,4	72,3	4
19	13	1377	Kota Pariaman	84,3	81,8	53,0	75,1	76,1	73,1	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	13		Prov. Sumatera Barat	75,76	99,03	5,75	2,34	62,29	72,82	5,97	77,08	9,72	24,26	33,76	24,90	11,40	43,29	57,75	79,72	0,283
1	13	1301	Kab. Pesisir Selatan	98,30	99,00	5,06	2,48	70,64	78,93	7,49	83,88	9,22	41,51	32,75	26,50	10,40	25,38	48,31	73,95	0,224
2	13	1302	Kab. Solok	50,41	99,85	4,91	2,32	52,29	78,93	7,31	77,94	8,40	23,23	35,63	29,50	11,40	38,29	66,93	73,70	0,241
3	13	1303	Kab. Sijunjung	59,25	99,77	4,73	2,46	53,74	74,53	5,78	81,18	8,95	32,16	28,37	28,20	19,10	21,32	57,26	70,77	0,239
4	13	1304	Kab. Tanah Datar	72,69	99,39	5,30	2,29	60,71	65,02	4,28	79,04	9,56	18,37	33,73	26,90	8,90	58,65	58,91	80,22	0,258
5	13	1305	Kab. Padang Pariaman	61,65	99,75	6,59	2,40	59,03	63,73	6,27	63,62	8,81	16,75	34,07	26,60	6,50	41,57	57,53	76,33	0,253
6	13	1306	Kab. Agam	72,80	99,92	4,73	2,44	65,82	77,00	6,83	58,42	9,41	17,11	31,69	27,00	5,20	32,43	57,84	84,97	0,249
7	13	1307	Kab. Lima Puluh Kota	64,37	95,23	3,68	2,36	49,20	64,31	6,92	80,57	8,58	24,67	41,98	26,60	15,30	26,30	64,30	73,14	0,220
8	13	1308	Kab. Pasaman	98,27	99,89	5,25	2,46	43,04	49,35	6,74	75,42	8,57	20,73	42,74	29,10	12,20	36,35	58,83	74,88	0,217
9	13	1309	Kab. Kepulauan Mentawai	60,62	87,55	1,44	2,68	43,49	75,64	13,89	78,76	8,64	52,23	52,19	26,20	44,50	17,90	80,01	57,64	0,267
10	13	1310	Kab. Dharmasraya	65,34	98,71	6,02	2,27	59,84	56,71	5,32	82,33	9,30	49,12	40,98	20,50	17,20	21,22	58,76	81,95	0,233
11	13	1311	Kab. Solok Selatan	71,08	99,93	2,30	2,45	42,97	56,71	6,56	86,84	9,20	31,09	34,64	21,50	25,80	26,31	65,91	76,49	0,313
12	13	1312	Kab. Pasaman Barat	86,18	99,70	6,34	2,39	60,35	73,49	7,00	72,98	9,58	9,68	42,05	26,60	15,60	35,10	49,48	73,36	0,240
13	13	1371	Kota Padang	79,57	99,08	9,88	2,20	73,36	78,22	4,06	79,46	11,48	22,61	21,64	20,60	5,90	67,78	54,25	88,99	0,324
14	13	1372	Kota Solok	96,58	99,78	3,62	2,32	84,38	92,19	3,07	91,99	11,17	8,58	31,72	18,60	9,60	29,40	62,54	89,69	0,251
15	13	1373	Kota Sawah Lunto	85,96	99,77	5,55	2,37	76,72	91,24	2,33	81,99	10,55	13,76	28,71	20,00	14,60	40,83	63,35	80,08	0,299

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
16	13	1374	Kota Padang Panjang	95,35	99,91	4,94	2,41	75,16	79,57	5,31	80,92	11,79	22,16	33,98	19,00	6,20	45,13	56,34	93,24	0,266
17	13	1375	Kota Bukittinggi	79,74	99,03	4,72	2,29	78,66	89,07	4,08	82,42	11,43	16,13	30,58	16,80	5,20	49,62	57,48	92,13	0,272
18	13	1376	Kota Payakumbuh	81,20	99,74	4,87	2,32	81,04	87,93	5,19	84,48	10,71	13,91	38,09	16,40	8,50	35,34	60,51	88,37	0,313
19	13	1377	Kota Pariaman	89,25	99,60	5,32	2,34	77,99	85,99	4,26	81,87	11,10	22,64	26,28	15,70	2,90	51,03	59,20	80,62	0,281

Provinsi Riau

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	14		Prov. Riau	78,2	82,1	52,9	57,1	68,0	66,7	3
1	14	1401	Kab. Kampar	83,6	85,2	55,2	59,3	69,0	69,4	4
2	14	1402	Kab. Indragiri Hulu	81,1	77,4	56,7	36,9	65,2	61,2	3
3	14	1403	Kab. Bengkalis	79,6	85,1	55,5	65,8	68,4	70,1	4
4	14	1404	Kab. Indragiri Hilir	69,2	59,0	48,9	36,4	63,1	54,0	2
5	14	1405	Kab. Pelalawan	80,2	78,4	52,2	51,4	70,0	65,2	3
6	14	1406	Kab. Rokan Hulu	75,0	87,7	58,1	50,2	68,5	66,6	3
7	14	1407	Kab. Rokan Hilir	69,0	72,8	51,8	48,7	67,4	61,1	3
8	14	1408	Kab. Siak	75,9	84,9	57,5	60,0	72,5	69,4	4
9	14	1409	Kab. Kuantan Singingi	81,8	81,5	56,2	46,8	67,1	65,2	3
10	14	1410	Kab. Kepulauan Meranti	83,9	59,3	33,4	52,6	70,0	57,2	2
11	14	1471	Kota Pekanbaru	82,2	96,1	54,5	84,2	74,4	76,9	4
12	14	1472	Kota Dumai	82,8	94,5	58,4	65,7	66,2	72,4	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	14		Prov. Riau	68,38	97,25	3,70	2,19	74,80	86,32	6,67	86,03	9,69	27,97	30,98	20,10	15,40	34,86	47,05	82,45	0,307
1	14	1401	Kab. Kampar	79,63	98,55	3,67	2,21	79,82	87,82	6,92	82,92	9,82	31,95	35,75	16,20	14,50	30,73	43,57	82,27	0,254
2	14	1402	Kab. Indragiri Hulu	67,98	98,09	2,55	2,20	66,06	86,09	6,02	86,12	8,74	35,33	38,22	20,00	26,70	19,80	44,48	78,00	0,295
3	14	1403	Kab. Bengkalis	83,72	97,32	5,88	2,50	81,76	92,63	6,36	96,46	9,74	23,16	34,62	12,50	14,90	38,10	44,56	82,93	0,279
4	14	1404	Kab. Indragiri Hilir	52,62	82,08	1,86	2,20	53,58	60,86	5,66	86,33	7,84	24,76	29,74	25,00	24,10	21,62	49,29	68,10	0,305
5	14	1405	Kab. Pelalawan	63,70	97,89	2,13	2,16	67,59	85,70	8,49	98,66	9,45	17,30	36,11	16,80	15,90	19,27	44,74	86,55	0,280
6	14	1406	Kab. Rokan Hulu	52,53	99,79	2,73	2,20	81,89	90,64	9,62	84,00	9,28	53,85	33,39	21,40	16,10	25,01	47,03	79,01	0,272
7	14	1407	Kab. Rokan Hilir	51,95	94,98	4,31	2,30	64,38	80,76	7,01	81,35	8,93	40,01	25,70	24,50	16,30	27,83	44,31	80,14	0,272
8	14	1408	Kab. Siak	64,68	99,69	4,53	2,18	73,63	93,32	5,08	80,69	10,09	36,49	34,17	16,20	10,50	23,45	46,91	87,91	0,271
9	14	1409	Kab. Kuantan Singingi	68,98	98,35	2,48	2,18	72,84	86,86	7,89	96,24	9,49	33,94	32,37	23,10	17,60	24,57	45,37	76,58	0,262
10	14	1410	Kab. Kepulauan Meranti	84,32	99,12	4,51	2,22	54,28	61,31	23,15	88,14	8,57	18,50	26,66	18,00	13,30	18,08	52,09	75,21	0,270
11	14	1471	Kota Pekanbaru	80,26	99,89	4,63	2,08	90,70	96,46	3,15	82,97	11,73	26,53	20,93	14,50	7,40	66,60	53,92	93,69	0,353
12	14	1472	Kota Dumai	82,53	99,15	4,66	2,07	86,16	97,98	3,14	89,32	10,44	23,18	36,09	16,90	10,90	36,63	44,80	84,31	0,328

Provinsi Jambi

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	15		Prov. Jambi	72,9	75,9	56,6	50,4	66,4	63,7	3
1	15	1501	Kab. Kerinci	72,7	60,9	67,9	40,2	75,5	62,0	3
2	15	1502	Kab. Merangin	72,0	67,6	56,5	41,6	75,6	61,3	3
3	15	1503	Kab. Sarolangun	73,3	70,0	48,5	38,8	65,5	57,6	2
4	15	1504	Kab. Batang Hari	82,8	77,9	54,4	38,1	57,9	59,9	2
5	15	1505	Kab. Muaro Jambi	66,3	75,7	58,8	54,5	68,9	64,4	3
6	15	1506	Kab. Tanjung Jabung Barat	69,7	75,0	54,8	53,9	64,3	63,0	3
7	15	1507	Kab. Tanjung Jabung Timur	73,6	68,3	49,8	36,2	59,3	55,7	2
8	15	1508	Kab. Bungo	70,0	79,8	58,4	25,7	67,9	56,4	2
9	15	1509	Kab. Tebo	73,5	75,1	55,8	28,5	68,9	57,1	2
10	15	1571	Kota Jambi	75,8	94,5	52,6	85,6	68,2	73,9	4
11	15	1572	Kota Sungai Penuh	80,4	77,5	59,7	77,9	70,0	72,7	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	15		Prov. Jambi	58,06	98,98	4,48	2,25	66,21	83,97	7,10	89,25	9,26	35,78	35,58	17,10	22,40	31,89	51,17	75,28	0,321
1	15	1501	Kab. Kerinci	49,01	96,84	2,51	2,13	50,68	66,37	6,93	99,89	8,80	44,38	54,79	16,40	45,20	42,59	66,71	70,74	0,293
2	15	1502	Kab. Merangin	53,30	99,78	4,18	2,13	49,27	82,03	8,40	90,91	8,88	47,74	29,36	9,60	32,00	23,14	62,03	70,13	0,241
3	15	1503	Kab. Sarolangun	61,08	99,87	5,03	2,58	63,64	82,34	8,36	92,14	8,72	13,56	33,54	6,60	33,80	15,10	48,41	72,15	0,286
4	15	1504	Kab. Batang Hari	81,29	99,39	4,49	2,24	68,61	85,37	8,63	90,49	8,81	39,62	31,38	18,40	28,10	22,57	40,47	69,41	0,313
5	15	1505	Kab. Muaro Jambi	45,90	99,61	5,27	2,14	60,44	87,11	3,65	84,05	8,88	36,12	38,36	18,80	17,50	32,18	50,60	78,14	0,295
6	15	1506	Kab. Tanjung Jabung Barat	46,35	96,17	3,20	2,28	70,33	78,32	9,54	83,15	8,77	33,39	43,90	7,00	23,20	23,64	47,76	71,31	0,292
7	15	1507	Kab. Tanjung Jabung Timur	46,05	99,14	2,06	2,35	62,24	74,72	10,14	90,31	8,35	16,34	43,55	23,90	22,80	14,72	41,47	70,26	0,305
8	15	1508	Kab. Bungo	51,97	99,08	4,67	2,16	69,85	86,16	5,06	83,28	9,02	51,84	27,61	20,40	36,00	18,73	49,82	72,85	0,266
9	15	1509	Kab. Tebo	48,03	99,37	2,50	2,38	65,75	85,89	6,12	90,39	8,46	35,67	34,63	24,20	35,10	28,72	50,09	73,45	0,257
10	15	1571	Kota Jambi	80,81	99,14	7,38	2,02	87,41	96,72	7,73	92,40	11,58	20,88	25,67	10,30	7,80	62,47	51,59	88,79	0,395
11	15	1572	Kota Sungai Penuh	74,28	99,75	4,30	2,12	69,64	80,56	2,92	90,25	10,80	34,63	27,52	8,00	21,20	67,75	53,30	78,23	0,305

Provinsi Sumatera Selatan

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	16		Prov. Sumatera Selatan	79,7	72,5	49,0	40,3	67,8	60,0	3
1	16	1601	Kab. Ogan Komering Ulu	70,4	74,5	47,7	39,7	71,4	58,9	2
2	16	1602	Kab. Ogan Komering Ilir	66,3	60,3	51,5	23,3	64,4	49,9	1
3	16	1603	Kab. Muara Enim	88,0	78,8	47,9	43,9	70,5	63,4	3
4	16	1604	Kab. Lahat	86,1	65,0	45,7	45,5	70,6	60,7	3
5	16	1605	Kab. Musi Rawas	80,3	70,5	56,1	34,4	69,7	59,8	2
6	16	1606	Kab. Musi Banyuasin	94,8	73,9	46,9	28,2	67,7	57,5	2
7	16	1607	Kab. Banyu Asin	78,9	58,0	50,7	39,4	62,6	56,4	2
8	16	1608	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	72,2	88,1	52,4	33,0	72,0	60,2	3
9	16	1609	Kab. Ogan Komering Ulu	70,7	58,6	50,5	37,0	70,6	55,9	2
10	16	1610	Kab. Ogan Ilir	92,0	64,0	48,8	38,9	75,0	60,9	3
11	16	1611	Kab. Empat Lawang	73,5	45,5	52,1	13,6	66,2	43,6	1
12	16	1612	Kab. Penukal Abab Lematang	91,5	88,1	48,7	24,7	73,4	59,0	2
13	16	1613	Kab. Musi Rawas Utara	82,5	69,2	45,9	22,4	69,8	52,8	2
14	16	1671	Kota Palembang	77,6	83,7	47,3	75,7	66,7	68,9	3
15	16	1672	Kota Pagar Alam	77,3	53,2	56,8	43,9	75,8	60,0	3
16	16	1673	Kota Lubuklinggau	80,0	84,2	44,7	57,5	69,4	65,5	3
17	16	1674	Kota Prabumulih	79,3	88,0	48,1	60,6	72,9	68,3	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	16		Prov. Sumatera Selatan	71,49	98,38	3,86	2,34	63,21	82,36	10,97	86,31	8,98	25,47	35,51	15,90	29,80	26,41	55,35	74,33	0,333
1	16	1601	Kab. Ogan Komering Ulu	50,20	98,41	4,05	2,20	63,60	82,72	10,68	88,71	9,10	6,47	36,69	22,00	22,00	18,35	56,98	80,35	0,334
2	16	1602	Kab. Ogan Komering Ilir	36,74	98,44	3,38	2,22	52,20	65,54	12,08	98,46	7,70	35,52	35,85	24,30	34,90	18,15	50,50	69,65	0,306
3	16	1603	Kab. Muara Enim	94,13	97,11	4,09	2,17	67,80	86,54	9,79	85,10	8,79	25,65	31,50	20,40	18,60	12,01	57,73	73,73	0,309
4	16	1604	Kab. Lahat	84,07	97,23	3,11	2,24	58,43	69,27	14,14	87,76	8,97	15,10	40,17	12,90	25,00	21,10	60,39	70,75	0,312
5	16	1605	Kab. Musi Rawas	62,99	97,75	1,94	2,16	65,85	70,98	13,44	95,20	7,89	42,29	45,66	19,30	28,00	16,58	59,03	67,07	0,285
6	16	1606	Kab. Musi Banyuasin	97,07	99,56	2,13	2,27	67,34	79,03	12,88	85,69	8,68	21,52	39,08	14,80	43,20	14,04	52,71	74,98	0,314
7	16	1607	Kab. Banyu Asin	65,50	99,03	3,24	2,20	51,05	61,51	9,31	86,29	7,82	17,59	48,11	16,80	28,90	24,16	41,94	71,91	0,267
8	16	1608	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	54,05	95,82	3,45	2,10	82,14	88,91	9,75	99,99	8,35	33,10	31,78	17,40	32,30	19,94	63,99	67,27	0,298
9	16	1609	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	37,49	99,33	1,80	2,19	53,71	59,80	9,86	87,84	8,72	9,01	44,49	16,60	27,70	14,49	66,58	68,27	0,356
10	16	1610	Kab. Ogan Ilir	93,96	98,85	2,65	2,15	48,95	75,12	12,30	87,99	8,50	21,58	42,32	27,40	20,40	22,44	67,11	70,62	0,304
11	16	1611	Kab. Empat Lawang	51,78	97,75	2,84	2,28	48,58	39,84	10,78	94,52	7,96	15,90	50,36	31,90	39,40	16,50	69,56	59,98	0,396
12	16	1612	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	97,84	99,43	3,72	2,21	78,28	95,72	9,82	92,63	8,03	17,97	38,97	20,50	39,60	19,16	69,85	61,73	0,293
13	16	1613	Kab. Musi Rawas Utara	83,63	98,86	4,91	2,21	65,32	69,95	17,38	93,30	8,03	31,54	36,77	22,00	36,70	15,18	55,97	67,19	0,254
14	16	1671	Kota Palembang	83,11	99,03	6,98	2,06	68,51	94,29	9,77	71,25	11,05	34,25	20,61	10,60	12,50	49,06	46,24	87,14	0,354
15	16	1672	Kota Pagar Alam	56,95	98,74	2,34	2,26	50,10	53,94	8,18	83,41	9,69	27,71	46,26	20,00	23,70	26,97	67,43	69,01	0,283

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun	RLS Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
16	16	1673	Kota Lubuk Linggau	78,90	99,65	5,29	2,16	77,73	86,84	11,14	89,32	9,67	13,16	26,79	20,90	17,10	40,67	59,92	74,47	0,353
17	16	1674	Kota Prabumulih	80,53	94,76	4,94	2,14	76,41	95,83	10,13	83,62	10,41	22,86	28,32	11,60	17,80	32,80	58,38	84,35	0,353

Provinsi Bengkulu

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	17		Prov. Bengkulu	81,5	70,3	49,4	47,1	69,2	62,1	3
1	17	1701	Kab. Bengkulu Selatan	86,0	68,3	42,4	43,5	72,3	60,1	3
2	17	1702	Kab. Rejang Lebong	71,6	58,0	48,7	38,4	75,4	56,7	2
3	17	1703	Kab. Bengkulu Utara	80,1	72,7	49,7	41,1	71,3	61,1	3
4	17	1704	Kab. Kaur	80,9	74,8	53,2	36,7	66,8	60,2	3
5	17	1705	Kab. Seluma	87,5	71,8	50,8	29,3	70,1	58,0	2
6	17	1706	Kab. Mukomuko	81,7	70,9	48,9	44,6	67,1	61,0	3
7	17	1707	Kab. Lebong	80,5	47,2	53,1	26,1	65,0	50,9	2
8	17	1708	Kab. Kepahiang	83,6	55,5	48,8	30,1	72,8	54,8	2
9	17	1709	Kab. Bengkulu Tengah	85,8	60,6	49,5	27,9	67,4	54,6	2
10	17	1771	Kota Bengkulu	82,3	91,9	49,7	74,4	71,7	72,5	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	17		Prov. Bengkulu	72,02	98,10	3,11	2,26	56,52	83,01	13,56	88,91	9,40	28,02	36,48	18,80	26,70	37,79	57,74	75,43	0,342
1	17	1701	Kab. Bengkulu Selatan	84,17	97,68	3,25	2,34	52,98	84,42	17,10	90,25	9,37	28,05	25,46	18,30	29,90	36,79	61,98	71,24	0,302
2	17	1702	Kab. Rejang Lebong	50,65	92,31	2,43	2,19	41,21	71,81	14,65	94,73	9,06	20,77	41,16	24,70	30,00	37,65	63,72	72,32	0,278
3	17	1703	Kab. Bengkulu Utara	65,70	99,82	2,89	2,34	60,51	85,53	10,96	86,57	8,91	27,55	35,87	20,70	24,70	24,92	56,21	73,81	0,281
4	17	1704	Kab. Kaur	73,88	98,16	3,71	2,40	64,63	87,01	17,12	99,68	8,84	42,26	40,16	15,90	32,20	24,46	56,42	66,36	0,302
5	17	1705	Kab. Seluma	81,20	99,17	2,38	2,50	59,47	88,75	17,23	94,60	8,45	39,78	39,74	22,60	50,70	31,61	56,69	70,51	0,281
6	17	1706	Kab. Mukomuko	66,73	99,84	2,41	2,29	55,71	85,82	10,76	86,27	8,94	14,91	42,16	22,00	20,90	25,51	45,95	78,60	0,282
7	17	1707	Kab. Lebong	64,75	99,67	2,55	2,40	34,47	59,38	10,45	95,22	9,03	11,30	46,61	22,70	52,20	25,51	54,66	63,48	0,292
8	17	1708	Kab. Kepahiang	72,51	98,49	2,37	2,18	38,06	69,81	12,90	87,20	8,45	25,07	41,49	17,00	34,10	17,52	65,56	68,79	0,313
9	17	1709	Kab. Bengkulu Tengah	79,33	98,12	2,56	2,35	39,43	83,17	10,14	93,52	8,43	30,56	29,26	23,40	34,10	24,02	50,39	71,32	0,268
10	17	1771	Kota Bengkulu	83,92	98,41	5,00	2,07	82,82	96,15	13,76	78,63	11,75	33,38	28,50	16,10	16,30	63,94	59,29	91,68	0,436

Provinsi Lampung

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	18		Prov. Lampung	78,4	76,9	49,1	51,3	70,4	64,0	3
1	18	1801	Kab. Lampung Selatan	78,6	82,0	49,4	55,1	71,6	66,0	3
2	18	1802	Kab. Lampung Tengah	70,3	76,6	49,6	46,1	76,3	62,3	3
3	18	1803	Kab. Lampung Utara	75,4	66,0	45,2	39,0	65,7	56,5	2
4	18	1804	Kab. Lampung Barat	80,1	61,7	59,4	28,1	85,4	58,8	2
5	18	1805	Kab. Tulangbawang	75,3	76,2	50,9	46,9	69,7	62,5	3
6	18	1806	Kab. Tanggamus	93,2	59,0	51,4	37,1	70,1	59,3	2
7	18	1807	Kab. Lampung Timur	75,2	80,5	44,7	42,5	68,2	60,1	3
8	18	1808	Kab. Way Kanan	77,9	68,1	55,1	29,6	71,4	57,3	2
9	18	1809	Kab. Pesawaran	84,8	83,0	47,8	52,1	71,8	66,1	3
10	18	1810	Kab. Pringsewu	80,9	83,8	53,6	50,5	73,9	67,1	3
11	18	1811	Kab. Mesuji	76,1	68,5	49,8	33,6	67,5	56,8	2
12	18	1812	Kab. Tulang Bawang Barat	70,0	66,8	49,0	43,1	67,4	58,1	2
13	18	1813	Kab. Pesisir Barat	83,0	69,8	47,6	33,4	68,9	57,6	2
14	18	1871	Kota Bandar Lampung	80,1	81,8	50,1	69,5	70,4	69,4	4
15	18	1872	Kota Metro	92,1	96,2	54,3	69,5	79,1	76,6	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	18		Prov. Lampung	70,18	98,35	4,19	2,21	65,96	85,44	10,69	87,44	8,80	23,21	37,15	15,90	18,00	22,29	54,58	77,03	0,302
1	18	1801	Kab. Lampung Selatan	72,57	99,93	4,84	2,28	67,21	96,40	12,57	84,17	8,21	32,37	39,34	10,40	19,10	22,90	50,67	78,37	0,253
2	18	1802	Kab. Lampung Tengah	53,76	91,26	3,33	2,17	67,21	82,55	10,37	86,34	8,41	23,97	39,66	15,50	22,70	21,59	60,96	77,28	0,271
3	18	1803	Kab. Lampung Utara	70,68	99,85	5,85	2,27	53,19	77,74	16,92	89,93	8,59	23,90	39,55	20,00	23,25	12,48	50,44	68,51	0,276
4	18	1804	Kab. Lampung Barat	61,14	99,97	2,09	2,47	46,80	80,40	10,68	99,22	9,07	26,56	53,88	20,50	32,70	15,58	74,07	82,47	0,290
5	18	1805	Kab. Tulangbawang	56,38	99,48	3,23	2,22	63,43	86,97	7,88	83,35	8,22	32,41	33,47	18,30	17,51	13,35	50,58	76,56	0,271
6	18	1806	Kab. Tanggamus	98,50	100,00	3,19	2,28	46,13	70,82	10,28	86,43	7,86	39,58	34,27	24,90	21,20	13,48	52,43	69,18	0,228
7	18	1807	Kab. Lampung Timur	56,82	97,70	3,02	2,20	71,88	86,38	13,19	85,19	8,62	17,79	37,55	14,00	25,00	17,05	50,62	74,06	0,278
8	18	1808	Kab. Way Kanan	62,16	99,96	3,27	2,29	54,39	81,38	10,43	92,50	8,00	46,21	34,54	13,90	36,43	8,34	57,90	73,49	0,293
9	18	1809	Kab. Pesawaran	85,26	99,51	4,36	2,24	76,29	87,85	11,86	87,53	8,51	22,01	38,41	15,50	16,22	19,26	54,13	80,52	0,300
10	18	1810	Kab. Pringsewu	75,71	99,95	4,39	2,23	78,61	86,70	8,32	86,55	8,87	21,62	45,06	19,50	15,84	22,00	56,82	76,92	0,266
11	18	1811	Kab. Mesuji	55,57	99,99	2,85	2,29	53,39	83,31	6,31	90,80	7,72	19,96	35,23	11,10	35,00	10,55	50,84	73,04	0,284
12	18	1812	Kab. Tulang Bawang Barat	48,21	99,73	4,12	2,21	50,53	80,85	7,22	93,77	8,10	7,88	34,14	13,40	24,70	13,68	52,05	73,01	0,297
13	18	1813	Kab. Pesisir Barat	73,27	99,99	3,04	2,50	59,81	84,09	12,64	91,98	8,92	10,73	39,52	19,80	28,50	9,13	57,58	66,66	0,281
14	18	1871	Kota Bandar Lampung	90,49	99,99	7,44	2,10	69,41	89,33	7,37	88,23	11,13	18,57	24,77	14,80	12,90	44,86	52,19	86,93	0,351
15	18	1872	Kota Metro	98,72	99,99	3,71	2,05	87,87	99,68	6,78	92,51	11,02	4,82	33,95	14,80	10,80	40,28	58,66	87,59	0,277

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	19		Prov. Kepulauan Bangka Belitung	82,1	66,3	54,5	30,9	73,2	58,2	2
1	19	1901	Kab. Bangka	79,3	65,7	58,0	44,3	75,1	63,2	3
2	19	1902	Kab. Belitung	86,9	86,0	54,7	28,9	72,8	61,2	3
3	19	1903	Kab. Bangka Selatan	73,4	65,4	55,1	19,8	72,1	51,9	2
4	19	1904	Kab. Bangka Tengah	81,4	65,5	52,5	30,2	73,0	57,3	2
5	19	1905	Kab. Bangka Barat	88,9	64,1	48,6	23,8	74,4	54,7	2
6	19	1906	Kab. Belitung Timur	91,4	78,9	53,2	26,2	73,5	59,4	2
7	19	1971	Kota Pangkal Pinang	78,8	66,8	58,9	60,3	77,0	67,8	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santiasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15 + Tahun RLS	Disabilitas Penyandang Mandiri	Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	19		Prov. Kepulauan Bangka Belitung	80,13	99,68	4,63	2,18	30,72	94,16	4,55	88,35	8,78	30,20	31,77	20,10	32,20	20,14	50,57	80,92	0,244
1	19	1901	Kab. Bangka	74,63	99,91	4,91	2,32	16,09	96,23	4,24	82,61	9,03	46,56	29,41	21,20	22,70	27,62	50,26	80,94	0,211
2	19	1902	Kab. Belitung	87,42	99,79	3,88	2,18	74,86	94,17	6,11	92,87	9,33	27,55	32,44	18,10	33,80	9,86	48,60	83,22	0,248
3	19	1903	Kab. Bangka Selatan	60,74	99,92	4,94	2,13	14,70	91,14	3,74	93,96	7,64	27,56	35,71	24,60	38,30	14,69	46,90	77,29	0,187
4	19	1904	Kab. Bangka Tengah	76,10	99,90	4,23	2,28	14,05	94,91	5,94	82,46	7,44	41,06	30,73	21,20	30,60	17,11	50,98	76,99	0,224
5	19	1905	Kab. Bangka Barat	98,96	98,59	4,88	2,28	28,90	91,88	2,59	87,05	7,83	16,26	28,39	19,90	38,60	14,85	52,07	75,50	0,201
6	19	1906	Kab. Belitung Timur	91,24	99,89	2,63	2,07	61,76	91,50	6,36	93,42	9,18	18,38	36,79	17,10	37,10	11,44	53,19	78,90	0,251
7	19	1971	Kota Pangkal Pinang	79,58	99,73	5,98	2,25	27,05	96,96	4,04	90,16	10,93	28,93	31,80	17,30	15,10	35,78	52,73	92,84	0,292

Provinsi Kepulauan Riau

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	21		Prov. Kepulauan Riau	78,7	75,9	51,4	64,0	73,4	67,9	3
1	21	2101	Kab. Bintan	80,8	63,3	44,5	58,6	74,8	63,1	3
2	21	2102	Kab. Karimun	78,3	77,2	47,7	42,5	73,9	61,9	3
3	21	2103	Kab. Natuna	90,0	59,5	62,7	44,2	77,0	64,8	3
4	21	2104	Kab. Lingga	87,4	57,9	50,7	28,3	61,1	53,6	2
5	21	2105	Kab. Kepulauan Anambas	93,6	36,3	57,1	41,1	73,6	56,7	2
6	21	2171	Kota Batam	75,6	82,2	53,5	66,2	73,8	69,5	4
7	21	2172	Kota Tanjung Pinang	84,0	66,0	48,6	75,3	75,7	68,7	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	21		Prov. Kepulauan Riau	81,91	99,45	6,39	2,15	57,19	91,23	5,37	79,69	10,65	30,76	21,33	15,00	11,10	30,48	52,15	93,35	0,349
1	21	2101	Kab. Bintan	79,11	97,21	4,53	2,18	14,65	87,93	5,44	75,60	9,61	11,63	22,45	16,30	14,00	28,46	50,91	90,23	0,290
2	21	2102	Kab. Karimun	77,00	98,72	5,52	2,25	57,76	95,91	5,78	85,64	9,26	25,07	18,78	21,40	19,50	17,53	52,68	85,15	0,286
3	21	2103	Kab. Natuna	95,11	99,68	3,89	2,36	41,28	78,98	5,04	93,45	9,73	46,19	34,00	18,50	26,80	31,83	59,03	83,37	0,285
4	21	2104	Kab. Lingga	86,86	98,78	3,38	2,26	44,82	69,58	9,99	99,10	7,97	33,56	29,49	19,80	34,20	18,87	41,72	74,46	0,309
5	21	2105	Kab. Kepulauan Anambas	95,30	99,81	2,38	2,42	9,02	26,55	6,67	95,37	8,89	40,38	30,36	15,80	29,30	26,58	57,11	79,87	0,296
6	21	2171	Kota Batam	81,22	99,84	7,68	2,14	66,67	94,10	4,85	75,47	11,19	37,70	17,99	14,00	9,70	30,71	51,48	96,68	0,348
7	21	2172	Kota Tanjung Pinang	85,16	99,63	4,69	2,06	31,32	91,51	6,86	89,25	10,73	2,69	22,65	12,90	9,90	46,69	56,96	91,80	0,347

Provinsi DKI Jakarta

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	31		Prov. DKI Jakarta	82,6	68,4	48,7	68,9	67,3	66,2	3
1	31	3101	Kab. Kepulauan Seribu	82,0	64,3	47,0	55,9	82,0	64,7	3
2	31	3171	Kota Adm. Jakarta Pusat	84,2	65,4	48,3	65,5	71,2	65,9	3
3	31	3172	Kota Adm. Jakarta Utara	81,8	65,9	46,4	60,9	65,3	63,0	3
4	31	3173	Kota Adm. Jakarta Barat	83,1	68,8	49,7	66,2	66,3	65,9	3
5	31	3174	Kota Adm. Jakarta Selatan	84,0	72,1	50,4	75,8	68,6	69,2	4
6	31	3175	Kota Adm. Jakarta Timur	81,3	72,3	52,7	74,3	68,4	69,1	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	31		Prov. DKI Jakarta	89,91	99,91	6,21	1,82	39,00	94,01	4,30	71,34	11,49	15,84	24,31	17,60	7,80	41,98	50,24	92,36	0,423
1	31	3101	Kab. Kepulauan Seribu	97,73	100,00	7,93	2,14	16,24	89,10	13,03	89,83	9,75	33,64	22,53	16,90	10,68	16,99	60,42	86,50	0,239
2	31	3171	Kota Adm. Jakarta Pusat	93,93	99,94	6,24	1,62	33,53	90,30	4,63	67,50	11,62	17,43	25,13	20,30	7,80	39,93	50,44	92,06	0,358
3	31	3172	Kota Adm. Jakarta Utara	87,73	99,94	6,18	1,92	24,57	91,39	6,44	75,28	10,89	3,43	23,63	19,70	9,30	29,85	52,34	90,10	0,460
4	31	3173	Kota Adm. Jakarta Barat	90,92	99,88	6,18	1,82	38,90	94,94	3,94	72,01	11,00	12,44	28,30	17,40	6,90	36,33	48,39	92,53	0,422
5	31	3174	Kota Adm. Jakarta Selatan	87,77	99,95	5,22	1,71	47,41	92,61	3,03	69,43	11,96	6,68	24,94	14,90	4,50	51,06	50,47	94,33	0,418
6	31	3175	Kota Adm. Jakarta Timur	90,72	99,89	6,95	1,83	43,70	97,15	4,09	70,51	11,94	32,09	20,30	16,40	5,90	50,64	50,19	92,24	0,404

Provinsi Jawa Barat

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	32		Prov. Jawa Barat	68,2	68,3	49,6	53,1	62,8	59,9	2
1	32	3201	Kab. Bogor	60,3	59,6	48,0	55,0	61,5	56,7	2
2	32	3202	Kab. Sukabumi	66,5	47,1	51,7	40,3	64,5	53,1	2
3	32	3203	Kab. Cianjur	65,8	52,2	45,3	46,1	67,0	54,5	2
4	32	3204	Kab. Bandung	65,1	64,4	54,0	43,1	67,8	58,1	2
5	32	3205	Kab. Garut	55,1	43,3	45,9	39,9	69,9	49,8	1
6	32	3206	Kab. Tasikmalaya	69,6	48,9	54,5	35,4	62,7	52,8	2
7	32	3207	Kab. Ciamis	72,3	74,3	50,6	53,9	69,9	63,4	3
8	32	3208	Kab. Kuningan	71,7	83,3	45,7	50,5	64,5	61,6	3
9	32	3209	Kab. Cirebon	69,5	86,5	41,3	42,9	63,5	58,4	2
10	32	3210	Kab. Majalengka	77,6	82,1	46,8	46,6	64,0	61,6	3
11	32	3211	Kab. Sumedang	70,8	75,9	50,9	41,3	69,5	60,1	3
12	32	3212	Kab. Indramayu	63,0	94,0	40,5	45,8	64,8	59,0	2
13	32	3213	Kab. Subang	65,4	89,4	47,4	32,5	68,1	57,2	2
14	32	3214	Kab. Purwakarta	67,3	75,2	47,4	41,9	60,5	57,1	2
15	32	3215	Kab. Karawang	64,9	81,0	45,2	37,2	58,0	55,2	2
16	32	3216	Kab. Bekasi	70,8	78,8	48,0	62,9	64,3	64,1	3
17	32	3217	Kab. Bandung Barat	64,3	48,7	51,2	32,3	63,2	50,5	2
18	32	3218	Kab. Pangandaran	86,6	78,0	57,1	30,8	78,9	62,3	3
19	32	3271	Kota Bogor	72,4	63,1	48,3	59,5	60,9	60,3	3

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	32	3272	Kota Sukabumi	71,3	43,4	48,8	56,6	61,6	55,5	2
21	32	3273	Kota Bandung	71,1	51,8	60,8	64,3	67,5	62,7	3
22	32	3274	Kota Cirebon	81,0	87,2	54,4	51,4	67,7	66,9	3
23	32	3275	Kota Bekasi	75,7	84,6	57,2	73,3	67,3	71,0	4
24	32	3276	Kota Depok	77,7	76,0	50,5	78,5	67,9	69,2	4
25	32	3277	Kota Cimahi	70,8	68,2	52,0	62,0	69,1	64,0	3
26	32	3278	Kota Tasikmalaya	72,4	51,6	47,6	55,9	69,9	58,7	2
27	32	3279	Kota Banjar	86,9	89,5	52,8	44,3	68,6	66,0	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	32		Prov. Jawa Barat	68,84	89,97	6,75	2,03	56,25	75,10	7,46	84,54	9,24	24,18	30,31	15,90	18,70	27,21	50,59	81,56	0,421
1	32	3201	Kab. Bogor	68,10	76,01	7,34	1,92	46,70	67,18	7,05	79,17	8,89	31,78	24,00	18,90	17,10	32,50	45,57	82,39	0,398
2	32	3202	Kab. Sukabumi	59,92	96,35	7,11	2,04	32,83	51,90	6,87	91,18	7,76	33,99	29,69	20,50	21,70	16,53	53,44	70,80	0,342
3	32	3203	Kab. Cianjur	48,51	99,79	5,99	2,21	38,29	63,30	10,14	90,22	7,91	9,94	34,06	7,20	26,70	10,93	55,61	72,86	0,338
4	32	3204	Kab. Bandung	62,48	86,87	6,36	2,09	54,16	69,12	6,19	89,18	9,46	42,29	20,58	24,10	21,40	27,23	51,25	84,10	0,364
5	32	3205	Kab. Garut	50,40	78,97	6,96	2,35	34,61	49,99	9,68	91,33	8,31	9,55	32,08	14,20	26,90	13,10	56,48	76,36	0,325
6	32	3206	Kab. Tasikmalaya	47,19	97,84	3,74	2,11	37,62	54,68	10,23	90,70	8,32	36,81	39,61	17,00	29,70	18,43	53,26	69,79	0,363
7	32	3207	Kab. Ciamis	65,74	84,64	3,37	2,15	67,22	77,12	7,39	91,37	8,33	9,53	39,21	20,30	18,80	36,27	55,64	77,82	0,326
8	32	3208	Kab. Kuningan	74,03	98,45	7,78	2,14	77,55	84,64	11,88	86,55	8,19	29,69	29,09	22,70	11,20	17,23	50,85	77,93	0,369
9	32	3209	Kab. Cirebon	71,50	90,37	6,74	2,12	80,39	87,92	11,00	80,68	8,07	7,53	30,43	18,00	21,30	16,34	51,86	74,88	0,374
10	32	3210	Kab. Majalengka	67,74	97,99	4,01	2,09	75,36	83,61	10,82	93,80	8,00	9,62	36,69	18,00	18,90	18,55	54,11	70,41	0,354
11	32	3211	Kab. Sumedang	71,24	90,50	6,16	1,99	69,00	77,32	9,10	94,07	8,87	14,14	39,35	17,00	28,40	27,11	54,65	79,59	0,337
12	32	3212	Kab. Indramayu	61,05	83,12	6,25	2,04	85,78	97,27	11,93	88,81	7,45	10,44	28,38	9,80	26,50	19,73	48,21	73,53	0,306
13	32	3213	Kab. Subang	52,02	99,39	6,73	2,04	83,27	90,29	9,49	90,77	7,88	8,12	37,84	12,40	35,00	13,99	55,83	72,51	0,320
14	32	3214	Kab. Purwakarta	72,11	88,02	7,34	2,28	66,51	83,01	8,41	90,26	8,40	14,10	33,25	14,50	25,80	18,52	46,19	79,05	0,398
15	32	3215	Kab. Karawang	70,32	87,93	8,04	2,02	70,98	85,99	7,86	80,34	8,54	14,63	31,63	17,60	27,70	18,47	43,48	74,37	0,376

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	19-23 Tahun	APK PT
16	32	3216	Kab. Bekasi	92,34	84,50	8,82	1,89	63,80	89,16	4,80	72,65	10,19	2,85	29,01	18,20	7,00	31,23	44,34	86,13	0,367
17	32	3217	Kab. Bandung Barat	58,16	91,01	6,70	2,15	38,87	54,02	10,49	90,45	8,57	29,46	36,44	30,80	21,00	15,18	48,84	81,91	0,400
18	32	3218	Kab. Pangandaran	82,52	91,75	1,58	2,14	61,91	90,30	8,75	87,18	8,48	31,26	48,99	17,30	32,70	13,89	69,11	74,02	0,286
19	32	3271	Kota Bogor	78,05	98,05	8,13	1,89	49,53	71,49	6,53	82,49	10,81	16,49	24,73	21,10	9,90	29,44	50,69	89,88	0,515
20	32	3272	Kota Sukabumi	74,58	99,83	8,34	2,17	36,30	45,88	7,20	83,90	10,44	20,72	24,96	19,70	15,20	32,80	45,67	87,71	0,436
21	32	3273	Kota Bandung	77,17	92,12	7,40	1,83	41,97	55,90	3,87	80,85	11,06	53,33	21,86	22,80	9,70	41,73	51,96	92,70	0,440
22	32	3274	Kota Cirebon	90,00	96,46	6,29	1,97	74,31	95,38	9,02	76,12	10,66	49,29	24,39	14,90	18,70	22,28	54,77	87,31	0,424
23	32	3275	Kota Bekasi	82,33	99,82	7,82	1,81	65,82	99,08	4,01	71,46	11,90	38,75	26,19	11,70	5,20	40,75	50,63	93,63	0,435
24	32	3276	Kota Depok	79,49	98,87	6,27	1,96	49,39	98,76	2,34	75,99	11,58	6,24	21,61	12,50	6,70	52,29	46,83	95,82	0,398
25	32	3277	Kota Cimahi	78,84	98,00	8,97	1,98	54,86	76,44	4,39	85,15	11,47	10,83	25,18	22,30	11,80	40,30	49,99	93,85	0,402
26	32	3278	Kota Tasikmalaya	72,41	94,74	6,49	2,14	45,01	53,16	11,10	86,65	9,88	19,03	32,67	19,60	13,20	26,99	54,03	84,46	0,359
27	32	3279	Kota Banjar	95,82	99,96	5,44	2,13	83,51	91,07	5,85	95,29	9,16	18,16	33,87	18,80	19,40	16,20	52,16	78,37	0,318

Provinsi Jawa Tengah

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	33		Prov. Jawa Tengah	77,5	81,8	49,5	57,2	71,7	66,3	3
1	33	3301	Kab. Cilacap	66,4	74,3	52,5	54,9	65,4	62,2	3
2	33	3302	Kab. Banyumas	77,4	77,5	46,0	56,6	65,0	63,3	3
3	33	3303	Kab. Purbalingga	79,7	74,3	44,6	40,9	73,7	60,3	3
4	33	3304	Kab. Banjarnegara	70,5	49,7	46,2	30,2	67,3	50,5	2
5	33	3305	Kab. Kebumen	77,2	85,5	43,2	60,1	78,2	66,9	3
6	33	3306	Kab. Purworejo	79,5	81,0	48,7	58,7	74,4	67,2	3
7	33	3307	Kab. Wonosobo	75,9	59,8	51,3	35,6	71,5	56,8	2
8	33	3308	Kab. Magelang	78,6	79,1	46,5	54,4	75,9	65,4	3
9	33	3309	Kab. Boyolali	81,4	82,9	50,4	48,2	75,6	65,9	3
10	33	3310	Kab. Klaten	83,0	98,7	49,6	57,5	70,4	69,7	4
11	33	3311	Kab. Sukoharjo	82,0	97,2	58,6	65,9	70,5	73,7	4
12	33	3312	Kab. Wonogiri	81,4	95,2	50,3	59,9	72,8	70,2	4
13	33	3313	Kab. Karanganyar	80,7	98,8	48,1	65,9	76,3	71,9	4
14	33	3314	Kab. Sragen	76,4	90,8	58,3	60,6	76,5	71,6	4
15	33	3315	Kab. Grobogan	76,1	76,7	47,6	33,0	73,0	58,2	2
16	33	3316	Kab. Blora	77,1	74,5	50,7	33,2	71,4	58,6	2
17	33	3317	Kab. Rembang	86,4	87,8	49,4	41,1	72,2	64,4	3
18	33	3318	Kab. Pati	79,6	92,0	52,3	53,5	76,5	69,0	4
19	33	3319	Kab. Kudus	84,9	96,3	51,0	64,5	79,8	73,5	4

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	33	3320	Kab. Jepara	76,4	64,5	49,7	51,7	74,2	62,3	3
21	33	3321	Kab. Demak	79,7	90,2	48,1	67,1	71,5	69,8	4
22	33	3322	Kab. Semarang	89,4	83,2	61,3	65,7	80,2	75,2	4
23	33	3323	Kab. Temanggung	78,3	69,0	56,8	35,3	72,5	60,1	3
24	33	3324	Kab. Kendal	75,2	78,7	50,9	54,6	74,1	65,6	3
25	33	3325	Kab. Batang	73,0	63,7	50,4	31,1	75,3	55,9	2
26	33	3326	Kab. Pekalongan	80,5	81,5	51,4	43,9	73,9	64,2	3
27	33	3327	Kab. Pemalang	69,3	77,7	39,5	48,6	71,6	59,4	2
28	33	3328	Kab. Tegal	67,1	84,9	46,1	59,9	73,2	64,9	3
29	33	3329	Kab. Brebes	68,9	82,9	41,2	42,7	68,9	58,6	2
30	33	3371	Kota Magelang	87,4	86,0	50,7	63,8	67,8	69,7	4
31	33	3372	Kota Surakarta	87,0	81,7	49,9	74,7	74,2	72,2	4
32	33	3373	Kota Salatiga	89,3	93,1	53,3	82,6	76,5	77,5	4
33	33	3374	Kota Semarang	81,6	83,9	53,3	81,2	73,3	73,7	4
34	33	3375	Kota Pekalongan	81,4	87,3	54,1	57,9	77,9	70,4	4
35	33	3376	Kota Tegal	81,0	90,9	45,8	66,6	73,0	69,7	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	33		Prov. Jawa Tengah	70,90	98,69	4,78	2,03	71,76	86,72	10,47	86,69	8,47	25,66	37,61	17,10	13,70	26,37	61,82	78,97	0,367
1	33	3301	Kab. Cilacap	61,50	98,45	7,83	2,11	60,70	83,25	10,68	83,85	7,68	49,05	32,64	15,60	14,70	21,56	52,28	76,11	0,355
2	33	3302	Kab. Banyumas	78,34	98,87	6,18	2,11	67,00	83,25	11,95	84,39	8,38	20,71	37,54	19,60	16,40	35,26	50,62	81,68	0,386
3	33	3303	Kab. Purbalingga	78,89	97,24	4,96	2,18	63,31	82,01	14,18	90,30	7,68	25,28	34,85	22,30	19,80	14,70	62,25	75,70	0,314
4	33	3304	Kab. Banjarnegara	57,22	99,98	5,57	2,17	42,77	52,40	14,71	92,16	7,33	21,43	43,85	20,60	30,70	11,83	58,96	71,45	0,357
5	33	3305	Kab. Kebumen	70,65	99,81	5,07	2,16	74,13	93,43	15,71	83,05	8,12	28,31	34,51	18,00	8,50	25,62	66,46	81,76	0,327
6	33	3306	Kab. Purworejo	69,41	99,99	3,89	2,05	72,17	84,64	10,87	80,93	8,99	28,55	35,25	14,90	14,40	27,20	62,87	81,77	0,354
7	33	3307	Kab. Wonosobo	61,63	99,98	4,02	2,19	52,19	63,81	15,28	90,64	7,08	39,63	45,89	23,90	23,30	10,30	61,97	73,65	0,334
8	33	3308	Kab. Magelang	65,75	99,85	3,55	2,03	69,31	83,77	10,83	84,02	8,18	15,94	40,92	19,30	9,90	16,13	67,90	75,35	0,333
9	33	3309	Kab. Boyolali	70,56	99,61	3,16	2,09	72,51	88,26	9,63	84,38	8,57	20,14	43,50	24,50	12,20	17,90	65,85	78,38	0,339
10	33	3310	Kab. Klaten	78,43	99,91	3,97	1,91	94,38	97,86	12,04	89,96	9,53	27,90	32,71	20,80	12,80	31,14	64,00	82,51	0,437
11	33	3311	Kab. Sukoharjo	74,13	99,96	3,65	1,98	92,16	97,08	7,47	84,60	10,20	43,23	33,80	16,80	7,70	34,85	56,92	86,15	0,390
12	33	3312	Kab. Wonogiri	65,85	99,99	2,40	1,87	89,08	96,25	10,71	92,50	8,02	7,76	46,26	15,10	7,10	20,34	67,63	76,81	0,392
13	33	3313	Kab. Karanganyar	70,10	99,88	3,47	1,94	94,06	98,54	9,59	87,83	9,56	11,33	33,62	17,40	7,40	35,90	64,27	83,85	0,353
14	33	3314	Kab. Sragen	60,45	99,68	3,53	1,97	81,04	95,71	12,41	84,87	8,31	51,42	46,15	15,80	10,40	23,74	65,10	77,31	0,309
15	33	3315	Kab. Grobogan	58,09	99,77	3,23	2,17	56,80	93,94	11,43	93,08	7,79	17,56	40,64	25,60	27,10	22,33	63,01	75,91	0,336

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas				Holistik Integratif			Kesetaraan			
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas yang	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
16	33	3316	Kab. Blora	62,60	99,95	3,67	2,00	53,88	90,81	11,42	92,74	7,78	27,41	41,21	21,70	32,30	27,57	61,75	76,60	0,354
17	33	3317	Kab. Rembang	80,93	99,31	2,84	1,98	75,99	94,89	14,02	99,59	8,28	26,06	39,24	15,80	24,60	14,68	61,76	74,69	0,328
18	33	3318	Kab. Pati	70,20	99,37	3,87	1,88	82,88	96,33	9,17	90,56	8,51	24,85	40,45	16,50	14,90	20,79	65,08	80,13	0,330
19	33	3319	Kab. Kudus	78,59	99,99	3,19	2,01	91,60	95,90	7,23	83,90	9,50	25,08	31,94	13,20	11,00	28,33	67,86	82,90	0,324
20	33	3320	Kab. Jepara	61,85	97,26	3,34	2,03	55,53	68,05	6,09	89,50	8,65	11,66	33,44	15,60	19,60	25,93	57,69	78,01	0,277
21	33	3321	Kab. Demak	75,65	99,19	4,75	2,05	80,32	95,13	11,89	87,05	8,79	14,90	42,73	10,00	11,60	29,26	58,56	75,79	0,314
22	33	3322	Kab. Semarang	92,33	99,93	3,73	1,93	75,02	86,32	6,96	80,06	8,80	51,06	42,81	14,50	10,80	32,40	71,67	83,45	0,359
23	33	3323	Kab. Temanggung	58,13	99,93	2,35	2,07	60,86	71,77	8,67	91,39	7,96	32,49	46,90	27,30	21,00	14,37	68,52	73,68	0,383
24	33	3324	Kab. Kendal	65,68	99,76	5,01	2,01	69,11	83,05	9,35	86,19	8,31	28,16	37,91	19,20	14,20	25,88	66,45	79,57	0,378
25	33	3325	Kab. Batang	65,85	97,88	5,67	2,07	55,87	65,92	8,73	86,10	7,54	26,76	40,06	20,70	29,90	16,43	66,81	72,76	0,312
26	33	3326	Kab. Pekalongan	71,65	97,10	3,30	2,17	76,59	82,61	8,95	83,88	7,96	27,94	41,60	19,50	19,30	15,96	65,13	73,80	0,327
27	33	3327	Kab. Pemalang	66,56	94,02	6,63	2,18	67,83	84,32	14,92	82,40	7,14	27,48	28,76	19,10	17,50	21,20	59,09	75,85	0,319
28	33	3328	Kab. Tegal	63,60	96,52	7,53	2,16	78,83	87,09	6,81	83,94	7,79	18,90	31,35	15,90	9,50	21,62	64,47	73,55	0,329
29	33	3329	Kab. Brebes	73,63	95,26	8,35	2,08	74,85	85,85	15,60	90,77	6,87	12,40	39,63	23,10	17,60	14,61	55,38	72,69	0,303
30	33	3371	Kota Magelang	91,39	100,00	4,40	1,77	78,27	88,55	5,94	87,36	11,62	13,78	23,09	15,30	15,80	40,89	57,68	88,72	0,462

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15 + Tahun	Disabilitas yang Penyandang	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
31	33	3372	Kota Surakarta	91,42	99,99	4,61	1,80	73,15	85,07	8,31	82,38	11,35	4,89	30,34	16,20	9,00	50,93	56,45	93,65	0,380
32	33	3373	Kota Salatiga	93,14	99,84	3,86	1,96	85,06	96,28	4,57	81,03	11,69	7,23	30,20	14,00	8,90	62,82	61,65	94,71	0,402
33	33	3374	Kota Semarang	85,57	99,70	5,82	1,76	67,41	95,83	4,03	77,40	11,10	25,72	26,54	11,20	8,50	55,36	60,24	92,55	0,425
34	33	3375	Kota Pekalongan	79,67	99,95	4,91	2,19	82,05	89,38	6,71	83,49	9,62	33,32	31,99	19,30	9,50	23,42	66,48	81,37	0,330
35	33	3376	Kota Tegal	84,56	99,57	5,88	2,17	85,89	92,48	7,64	88,98	9,64	12,41	22,46	18,00	8,60	38,12	55,63	84,63	0,326

Provinsi DI Yogyakarta

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	34		Prov. DI Yogyakarta	87,2	94,2	52,2	85,4	74,0	77,0	4
1	34	3401	Kab. Kulon Progo	90,9	93,6	45,9	72,5	80,3	74,4	4
2	34	3402	Kab. Bantul	86,5	94,8	53,4	84,6	75,7	77,5	4
3	34	3403	Kab. Gunung Kidul	91,2	96,7	48,6	57,5	74,3	71,2	4
4	34	3404	Kab. Sleman	84,5	93,7	51,7	86,1	74,5	76,5	4
5	34	3471	Kota Yogyakarta	84,1	90,7	57,8	88,2	75,1	78,2	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	34		Prov. DI Yogyakarta	85,70	99,97	3,48	1,83	86,68	96,71	10,83	83,52	10,23	24,07	40,42	17,40	9,00	73,90	66,59	86,88	0,435
1	34	3401	Kab. Kulon Progo	86,59	99,96	2,01	1,98	85,19	97,16	15,62	83,69	9,41	4,99	44,10	18,00	7,30	49,66	72,66	84,29	0,373
2	34	3402	Kab. Bantul	84,69	100,00	3,62	1,75	88,24	96,46	11,66	84,04	10,09	35,31	36,51	16,50	7,20	70,85	67,15	87,47	0,417
3	34	3403	Kab. Gunung Kidul	87,99	99,95	2,16	1,89	90,83	97,63	15,18	87,69	7,76	17,69	54,80	19,70	13,50	30,87	67,51	75,30	0,355
4	34	3404	Kab. Sleman	82,92	99,96	4,13	1,80	86,02	96,43	7,46	82,79	11,50	17,70	31,33	17,30	8,60	80,40	63,99	90,97	0,431
5	34	3471	Kota Yogyakarta	91,21	99,98	5,80	1,65	80,31	96,27	6,26	73,61	12,17	39,89	29,08	14,80	9,10	98,91	64,19	94,39	0,449

Provinsi Jawa Timur

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	35		Prov. Jawa Timur	77,6	82,0	50,4	53,6	69,1	65,3	3
1	35	3501	Kab. Pacitan	78,6	76,8	50,8	43,1	82,6	64,2	3
2	35	3502	Kab. Ponorogo	76,8	91,2	50,8	52,0	79,5	68,2	3
3	35	3503	Kab. Trenggalek	73,6	78,7	57,9	54,9	76,5	67,6	3
4	35	3504	Kab. Tulungagung	71,4	88,3	51,6	63,8	77,1	69,3	4
5	35	3505	Kab. Blitar	70,0	86,7	50,7	49,9	71,5	64,3	3
6	35	3506	Kab. Kediri	73,5	93,1	47,8	61,0	70,8	67,6	3
7	35	3507	Kab. Malang	65,8	85,6	50,8	47,6	70,8	62,7	3
8	35	3508	Kab. Lumajang	72,2	81,8	51,5	27,1	61,0	55,0	2
9	35	3509	Kab. Jember	64,0	67,9	47,8	23,7	68,2	50,7	2
10	35	3510	Kab. Banyuwangi	72,9	85,0	52,6	47,4	75,7	65,1	3
11	35	3511	Kab. Bondowoso	86,7	61,1	55,7	34,3	65,2	58,1	2
12	35	3512	Kab. Situbondo	74,2	60,6	49,5	35,7	63,3	55,0	2
13	35	3513	Kab. Probolinggo	85,0	65,2	47,0	22,7	63,1	51,8	2
14	35	3514	Kab. Pasuruan	74,6	84,4	51,7	33,4	70,3	59,8	2
15	35	3515	Kab. Sidoarjo	78,2	95,7	52,4	78,0	74,2	74,3	4
16	35	3516	Kab. Mojokerto	79,4	89,0	50,1	53,7	72,7	67,3	3
17	35	3517	Kab. Jombang	78,1	91,0	49,0	53,8	72,5	67,1	3
18	35	3518	Kab. Nganjuk	80,2	89,6	49,7	53,0	69,6	66,7	3
19	35	3519	Kab. Madiun	86,9	88,9	53,1	64,3	71,7	71,7	4

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	35	3520	Kab. Magetan	77,6	90,9	57,4	69,8	73,1	72,9	4
21	35	3521	Kab. Ngawi	86,1	78,6	50,4	62,5	75,9	69,5	4
22	35	3522	Kab. Bojonegoro	90,3	83,9	50,2	54,2	69,5	67,8	3
23	35	3523	Kab. Tuban	85,3	81,1	53,6	56,6	67,4	67,6	3
24	35	3524	Kab. Lamongan	78,3	85,9	53,5	70,9	73,4	71,5	4
25	35	3525	Kab. Gresik	83,0	89,8	49,3	71,4	73,5	71,9	4
26	35	3526	Kab. Bangkalan	58,4	48,9	39,8	31,0	65,9	47,1	1
27	35	3527	Kab. Sampang	72,3	79,8	34,8	27,0	70,8	52,1	2
28	35	3528	Kab. Pamekasan	87,8	71,7	48,9	37,9	75,4	61,5	3
29	35	3529	Kab. Sumenep	90,8	73,8	43,9	37,8	71,9	60,3	3
30	35	3571	Kota Kediri	88,2	92,1	50,6	65,9	77,5	73,2	4
31	35	3572	Kota Blitar	87,9	95,7	50,6	70,9	75,1	74,3	4
32	35	3573	Kota Malang	79,4	86,6	52,8	76,7	70,5	72,2	4
33	35	3574	Kota Probolinggo	86,0	91,5	53,6	48,4	68,1	67,4	3
34	35	3575	Kota Pasuruan	88,2	92,9	49,9	58,6	76,4	71,2	4
35	35	3576	Kota Mojokerto	89,8	93,3	56,4	69,6	77,3	76,1	4
36	35	3577	Kota Madiun	89,1	94,7	57,7	71,6	72,8	76,0	4
37	35	3578	Kota Surabaya	84,6	78,9	57,7	82,1	74,9	75,0	4
38	35	3579	Kota Batu	90,5	94,6	56,6	56,7	77,5	73,4	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	35		Prov. Jawa Timur	69,66	97,20	4,19	1,98	73,40	85,56	9,79	89,54	8,69	20,44	39,97	14,70	21,30	31,85	60,64	75,43	0,372
1	35	3501	Kab. Pacitan	54,53	99,97	1,56	1,79	67,13	81,26	13,08	94,12	8,08	17,48	50,72	11,70	27,40	19,49	82,93	73,10	0,327
2	35	3502	Kab. Ponorogo	64,79	99,97	4,19	1,89	84,83	92,57	9,11	87,60	8,11	21,69	42,60	13,40	18,30	20,10	70,46	78,98	0,326
3	35	3503	Kab. Trenggalek	55,49	100,00	3,90	1,89	67,68	84,66	10,50	92,93	8,26	41,46	44,35	6,70	20,90	20,17	70,27	75,96	0,350
4	35	3504	Kab. Tulungagung	51,96	99,33	4,12	1,93	83,64	87,76	6,28	85,95	9,02	4,75	39,21	13,60	11,10	27,87	63,29	82,72	0,321
5	35	3505	Kab. Blitar	51,69	99,79	4,77	2,01	81,96	86,16	8,16	85,71	8,24	15,57	44,77	17,80	18,70	24,06	57,41	82,55	0,353
6	35	3506	Kab. Kediri	61,85	99,97	5,10	2,13	86,85	94,94	9,95	87,24	8,60	13,10	38,41	7,90	16,70	25,05	55,76	75,93	0,300
7	35	3507	Kab. Malang	53,43	90,70	5,13	2,05	79,27	86,74	8,98	85,79	8,19	23,05	41,87	23,30	20,40	32,53	58,74	77,81	0,343
8	35	3508	Kab. Lumajang	49,10	99,65	3,28	1,93	75,76	82,45	8,65	94,71	7,78	16,16	44,77	23,40	42,80	28,73	53,91	64,90	0,363
9	35	3509	Kab. Jember	47,23	82,70	3,23	2,02	62,63	67,46	9,01	93,35	7,15	10,64	39,78	30,40	35,70	30,84	59,84	67,58	0,321
10	35	3510	Kab. Banyuwangi	57,22	97,34	4,03	2,02	78,58	86,22	6,54	91,20	8,15	8,69	43,53	17,60	22,20	26,55	62,87	78,95	0,312
11	35	3511	Kab. Bondowoso	87,23	98,34	3,63	2,01	54,37	62,10	12,60	97,20	7,15	37,13	49,33	11,20	45,00	22,46	60,97	60,72	0,333
12	35	3512	Kab. Situbondo	54,49	98,32	3,15	1,98	52,94	62,66	11,51	99,76	7,55	16,71	45,04	10,60	33,50	13,63	64,13	59,37	0,385
13	35	3513	Kab. Probolinggo	79,86	98,06	3,00	2,02	58,27	66,39	16,45	98,55	6,84	31,18	40,95	26,30	52,00	24,90	58,30	60,55	0,339
14	35	3514	Kab. Pasuruan	66,92	97,18	5,02	1,88	77,19	86,36	8,63	95,31	7,94	22,68	39,08	26,10	25,30	20,05	63,27	68,86	0,331
15	35	3515	Kab. Sidoarjo	81,72	98,96	6,49	1,82	88,43	97,95	4,53	89,93	11,34	9,19	24,15	10,60	9,30	48,14	54,23	89,42	0,327

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																	
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan			
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	APK PT 19-23 Tahun	Pemenuhan	TPAK
16	35	3516	Kab. Mojokerto	69,22	99,98	3,87	1,95	81,82	91,14	9,37	92,63	9,43	18,22	34,71	15,20	14,80	18,77	60,88	78,32	0,337	
17	35	3517	Kab. Jombang	70,44	95,31	3,75	2,07	81,10	96,13	8,60	93,04	9,07	20,12	30,28	17,20	15,00	22,81	58,20	76,76	0,302	
18	35	3518	Kab. Nganjuk	73,18	98,13	3,87	2,00	83,04	90,96	10,17	94,88	8,51	20,44	36,70	22,80	12,30	24,58	55,22	72,46	0,289	
19	35	3519	Kab. Madiun	90,85	98,94	4,34	1,99	81,20	91,47	10,63	90,64	8,53	34,25	37,93	12,10	11,10	26,21	59,73	73,96	0,309	
20	35	3520	Kab. Magetan	61,58	99,99	3,28	1,99	86,59	89,99	9,32	89,10	8,97	27,78	50,31	10,30	9,30	31,51	68,12	73,94	0,371	
21	35	3521	Kab. Ngawi	77,17	99,93	2,40	1,83	69,11	82,99	13,81	89,75	8,29	27,42	44,87	11,40	9,20	19,12	65,64	72,55	0,289	
22	35	3522	Kab. Bojonegoro	99,00	99,38	4,42	1,82	67,01	96,43	11,69	94,65	8,10	12,35	46,42	12,00	22,20	30,37	59,53	69,18	0,310	
23	35	3523	Kab. Tuban	88,30	97,54	4,28	1,82	71,93	85,12	14,36	93,84	8,29	40,32	41,74	11,30	15,80	20,16	59,41	68,04	0,335	
24	35	3524	Kab. Lamongan	70,78	98,50	4,34	1,87	71,34	95,88	12,16	99,34	8,89	27,60	41,75	6,90	12,20	32,81	60,78	72,29	0,281	
25	35	3525	Kab. Gresik	91,96	99,98	6,45	1,92	81,47	93,22	10,32	85,06	10,24	8,28	36,81	15,20	8,00	42,94	56,37	84,07	0,322	
26	35	3526	Kab. Bangkalan	35,24	92,27	5,35	2,07	41,41	50,31	18,66	77,16	6,73	20,66	48,22	17,60	32,30	16,07	57,37	62,91	0,301	
27	35	3527	Kab. Sampang	50,46	94,38	2,50	2,30	71,97	87,24	20,83	91,71	5,71	22,97	32,37	18,90	39,30	20,96	60,10	60,80	0,233	
28	35	3528	Kab. Pamekasan	77,78	99,27	1,64	2,13	65,61	72,94	13,41	92,62	7,75	19,40	47,33	22,30	30,20	33,21	71,42	65,18	0,301	
29	35	3529	Kab. Sumenep	84,87	99,53	1,69	2,08	68,63	73,31	17,78	87,12	7,14	21,26	48,47	11,20	33,70	22,01	69,82	60,37	0,308	
30	35	3571	Kota Kediri	90,41	99,99	3,91	1,96	83,94	95,39	6,51	88,04	11,06	16,24	26,35	17,60	9,20	36,14	60,55	89,54	0,337	
31	35	3572	Kota Blitar	96,36	99,98	5,11	1,93	90,43	95,93	6,75	89,07	10,86	15,29	27,24	11,40	17,30	51,46	59,23	88,06	0,353	

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
32	35	3573	Kota Malang	81,48	99,92	6,10	1,81	80,17	87,84	3,91	79,59	11,39	10,56	29,85	22,80	9,80	65,93	55,86	91,73	0,422
33	35	3574	Kota Probolinggo	88,11	99,96	4,44	2,02	86,26	91,59	6,18	89,94	10,11	16,60	36,51	23,10	17,60	27,66	53,09	79,58	0,344
34	35	3575	Kota Pasuruan	94,37	100,00	4,63	2,10	85,25	95,52	6,32	89,66	10,09	24,83	21,00	18,30	13,60	30,83	62,58	84,00	0,334
35	35	3576	Kota Mojokerto	93,59	99,98	3,76	1,85	83,19	98,56	5,57	91,61	11,51	26,78	26,97	11,70	12,80	39,68	61,61	90,50	0,357
36	35	3577	Kota Madiun	94,80	99,93	4,30	1,84	89,15	95,19	4,38	90,82	12,02	29,79	23,40	11,80	6,50	37,63	62,81	89,18	0,435
37	35	3578	Kota Surabaya	87,43	99,96	4,91	1,68	55,91	97,69	3,96	75,26	11,34	37,96	28,45	8,50	5,80	52,52	59,48	91,28	0,381
38	35	3579	Kota Batu	94,64	99,78	3,63	1,94	87,90	96,39	3,06	86,61	9,99	6,36	40,36	24,50	17,40	45,79	59,65	89,29	0,327

Provinsi Banten

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	36		Prov. Banten	71,2	78,8	51,1	56,6	65,5	63,9	3
1	36	3601	Kab. Pandeglang	58,8	51,5	47,5	40,0	64,0	51,7	2
2	36	3602	Kab. Lebak	72,0	56,5	49,4	23,5	67,3	50,2	2
3	36	3603	Kab. Tangerang	69,8	83,5	51,3	58,5	70,3	65,8	3
4	36	3604	Kab. Serang	58,3	82,4	52,2	48,5	68,4	60,8	3
5	36	3671	Kota Tangerang	80,0	79,8	48,8	75,0	72,6	70,1	4
6	36	3672	Kota Cilegon	84,1	93,9	52,2	61,4	66,1	69,9	4
7	36	3673	Kota Serang	70,4	91,1	47,3	53,2	68,5	64,4	3
8	36	3674	Kota Tangerang Selatan	80,9	89,7	53,7	80,9	62,7	72,3	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	36		Prov. Banten	71,86	93,58	6,68	1,98	64,94	87,93	5,84	85,45	9,55	23,10	29,46	21,10	13,90	32,40	48,90	80,59	0,353
1	36	3601	Kab. Pandeglang	51,43	91,98	8,09	2,20	35,65	63,66	9,18	88,14	7,54	18,74	38,81	26,40	17,50	13,79	49,49	61,64	0,245
2	36	3602	Kab. Lebak	67,73	96,79	6,23	2,16	39,13	70,23	8,44	95,17	6,86	35,92	27,45	32,40	27,70	14,67	57,53	59,93	0,257
3	36	3603	Kab. Tangerang	72,23	86,93	6,06	1,84	72,72	89,38	6,55	82,23	9,47	23,18	33,84	23,40	9,50	31,45	46,78	82,77	0,269
4	36	3604	Kab. Serang	56,11	92,29	9,18	2,10	74,31	85,31	4,51	94,89	8,51	24,18	28,01	20,20	18,00	23,83	51,86	71,34	0,267
5	36	3671	Kota Tangerang	85,93	96,31	5,92	1,89	58,41	96,93	5,43	73,59	11,24	20,10	24,05	11,20	8,40	43,19	49,79	91,59	0,325
6	36	3672	Kota Cilegon	94,61	98,08	6,08	2,08	85,79	97,10	3,75	83,03	10,32	15,78	31,04	19,00	9,10	29,72	43,26	90,70	0,360
7	36	3673	Kota Serang	65,44	99,96	7,12	2,03	84,39	92,71	5,65	86,27	8,94	22,99	21,63	22,90	9,70	20,31	53,21	77,60	0,324
8	36	3674	Kota Tangerang Selatan	79,53	99,94	5,09	1,71	75,53	99,34	2,36	83,62	11,45	9,15	26,03	10,50	5,40	53,65	40,01	92,18	0,395

Provinsi Bali

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	51		Prov. Bali	92,0	93,9	58,9	63,4	79,8	76,2	4
1	51	5101	Kab. Jembrana	92,3	95,3	62,4	52,6	83,2	75,2	4
2	51	5102	Kab. Tabanan	91,6	96,7	54,5	68,8	80,1	76,7	4
3	51	5103	Kab. Badung	94,4	99,7	67,0	81,2	87,6	85,2	5
4	51	5104	Kab. Gianyar	95,6	99,6	60,5	82,5	82,8	83,0	5
5	51	5105	Kab. Klungkung	96,4	99,0	58,2	67,4	81,5	78,8	4
6	51	5106	Kab. Bangli	93,3	88,6	57,0	44,0	82,7	70,3	4
7	51	5107	Kab. Karangasem	94,8	87,4	54,3	41,8	84,2	69,2	4
8	51	5108	Kab. Buleleng	88,5	90,3	52,0	54,9	83,1	71,7	4
9	51	5171	Kota Denpasar	88,4	90,0	58,7	75,8	79,6	77,6	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	51		Prov. Bali	88,47	99,48	1,79	2,03	85,99	96,83	4,00	83,89	9,87	35,16	35,65	8,70	20,00	38,15	70,49	84,55	0,361
1	51	5101	Kab. Jembrana	91,58	95,86	1,53	2,09	89,38	96,13	4,51	90,94	9,00	37,66	43,80	7,50	24,60	25,12	73,49	78,06	0,288
2	51	5102	Kab. Tabanan	87,31	99,90	1,85	1,82	92,01	96,25	4,40	83,85	9,76	11,10	40,58	7,50	12,20	29,69	67,59	80,95	0,301
3	51	5103	Kab. Badung	94,08	99,94	1,83	1,45	95,28	99,30	2,23	79,91	11,32	57,18	30,62	7,20	5,60	48,70	68,07	94,41	0,281
4	51	5104	Kab. Gianyar	97,79	99,93	1,98	1,89	94,60	99,52	4,00	87,34	10,18	28,49	41,59	5,40	10,10	48,39	69,46	82,47	0,286
5	51	5105	Kab. Klungkung	97,69	97,81	1,23	2,10	93,79	99,23	5,30	86,14	9,32	1,85	52,66	5,20	12,30	23,39	71,58	79,37	0,307
6	51	5106	Kab. Bangli	85,26	99,89	0,74	2,10	79,79	92,49	5,06	91,56	8,03	29,21	41,76	8,30	28,50	18,03	76,49	74,86	0,302
7	51	5107	Kab. Karangasem	93,81	99,87	1,63	2,26	82,06	91,31	6,52	86,24	7,15	51,12	27,77	13,00	30,90	26,76	80,11	70,81	0,283
8	51	5108	Kab. Buleleng	81,06	100,00	2,06	2,15	82,90	93,79	5,39	83,89	8,16	29,21	33,63	14,80	18,40	28,17	74,78	74,87	0,279
9	51	5171	Kota Denpasar	81,08	99,92	2,11	1,87	76,34	99,01	2,59	74,63	11,61	39,27	26,03	10,4	8,90	43,40	60,50	95,14	0,341

Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	52		Prov. Nusa Tenggara Barat	80,9	76,6	44,4	24,8	71,1	54,6	2
1	52	5201	Kab. Lombok Barat	77,8	69,5	46,6	25,8	69,3	53,8	2
2	52	5202	Kab. Lombok Tengah	76,1	72,8	40,4	25,4	70,7	52,6	2
3	52	5203	Kab. Lombok Timur	78,8	77,9	47,8	20,3	72,9	53,4	2
4	52	5204	Kab. Sumbawa	80,1	78,2	41,6	31,8	70,5	56,7	2
5	52	5205	Kab. Dompu	80,0	72,4	45,3	26,2	77,0	55,6	2
6	52	5206	Kab. Bima	77,6	80,3	45,9	42,3	72,5	61,5	3
7	52	5207	Kab. Sumbawa Barat	92,9	84,7	44,4	36,9	73,7	62,4	3
8	52	5208	Kab. Lombok Utara	92,4	71,4	34,6	15,0	72,9	47,8	1
9	52	5271	Kota Mataram	89,1	85,4	47,6	61,6	72,1	69,4	4
10	52	5272	Kota Bima	90,9	89,1	49,5	44,0	76,2	67,0	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	52		Nusa Tenggara Barat	68,28	98,34	2,73	2,37	67,74	86,80	12,91	90,87	8,50	24,59	27,96	29,80	37,80	34,80	68,04	68,25	0,361
1	52	5201	Kab. Lombok Barat	59,26	99,96	2,75	2,30	58,88	79,62	12,65	88,47	7,65	32,40	32,35	27,30	38,00	32,61	64,47	67,42	0,348
2	52	5202	Kab. Lombok Tengah	55,65	98,41	2,55	2,31	60,30	85,31	12,07	94,39	7,52	4,64	24,77	24,90	54,90	27,80	71,38	60,10	0,342
3	52	5203	Kab. Lombok Timur	60,87	99,45	2,53	2,37	69,12	87,98	14,51	94,95	8,29	39,55	26,96	33,00	48,00	31,35	69,94	63,19	0,313
4	52	5204	Kab. Sumbawa	69,65	94,85	2,67	2,43	69,81	89,40	12,87	82,63	8,97	16,68	29,69	29,80	31,20	35,86	64,46	74,36	0,379
5	52	5205	Kab. Dompu	64,51	99,67	2,70	2,67	68,28	84,63	11,59	90,27	9,37	11,87	30,25	19,80	44,20	20,93	73,96	64,06	0,292
6	52	5206	Kab. Bima	63,78	92,25	2,19	2,50	76,72	87,90	13,88	91,39	9,03	28,67	27,97	23,80	26,50	36,25	69,23	69,40	0,358
7	52	5207	Kab. Sumbawa Barat	97,46	99,76	3,10	2,59	77,97	98,09	12,23	82,68	9,19	5,31	34,43	18,20	30,60	25,27	63,59	81,63	0,372
8	52	5208	Kab. Lombok Utara	90,33	99,01	1,85	2,48	60,93	85,88	23,96	95,14	7,22	20,24	30,48	35,30	51,30	24,87	69,91	58,46	0,278
9	52	5271	Kota Mataram	98,62	99,37	4,85	2,13	76,77	89,72	8,00	86,37	10,03	18,55	25,94	23,50	18,00	54,92	61,41	84,01	0,393
10	52	5272	Kota Bima	94,08	99,49	3,27	2,27	83,56	93,63	8,12	86,93	11,02	19,48	25,42	28,40	25,40	44,80	64,58	87,11	0,380

Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	53		Prov. Nusa Tenggara Timur	74,1	57,7	37,6	34,9	72,3	52,7	2
1	53	5301	Kab. Kupang	73,3	52,6	34,1	36,9	60,2	49,4	1
2	53	5302	Kab. Timor Tengah Selatan	64,3	47,1	37,4	25,8	72,3	46,2	1
3	53	5303	Kab. Timor Tengah Utara	62,7	58,9	42,7	40,5	74,8	54,4	2
4	53	5304	Kab. Belu	77,3	56,4	48,5	28,4	73,1	53,5	2
5	53	5305	Kab. Alor	83,9	66,5	39,6	30,7	75,8	55,2	2
6	53	5306	Kab. Flores Timur	68,2	81,1	36,0	31,7	73,8	54,1	2
7	53	5307	Kab. Sikka	75,4	62,7	40,8	37,4	72,2	55,4	2
8	53	5308	Kab. Ende	85,0	76,9	28,2	49,2	78,3	58,9	2
9	53	5309	Kab. Ngada	69,1	71,3	36,0	46,8	77,1	57,7	2
10	53	5310	Kab. Manggarai	76,7	55,9	36,3	29,1	81,3	51,7	2
11	53	5311	Kab. Sumba Timur	85,9	46,3	30,9	35,1	75,1	50,4	2
12	53	5312	Kab. Sumba Barat	87,1	41,9	33,3	38,1	71,2	50,5	2
13	53	5313	Kab. Lembata	76,8	71,9	33,0	37,0	81,3	55,9	2
14	53	5314	Kab. Rote Ndao	88,0	64,6	34,8	25,0	69,2	50,9	2
15	53	5315	Kab. Manggarai Barat	78,4	62,4	42,9	28,4	71,7	53,2	2
16	53	5316	Kab. Nagekeo	78,6	64,1	39,8	51,5	69,9	59,1	2
17	53	5317	Kab. Sumba Tengah	89,8	35,4	29,4	35,8	65,5	46,6	1
18	53	5318	Kab. Sumba Barat Daya	53,6	33,2	31,7	27,2	65,6	39,8	1
19	53	5319	Kab. Manggarai Timur	75,5	41,5	39,5	28,7	75,2	48,4	1

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	53	5320	Kab. Sabu Raijua	91,0	51,0	33,8	34,4	72,3	52,3	2
21	53	5321	Kab. Malaka	60,9	54,3	50,0	28,3	68,2	50,2	2
22	53	5371	Kota Kupang	71,5	77,0	60,3	75,3	76,6	71,9	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun RLS	Disabilitas Penyandang	Mandiri Lansia	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	53		Prov. Nusa Tenggara Timur	75,24	77,88	3,02	2,71	46,88	77,66	19,48	62,64	8,48	29,05	37,88	37,00	21,50	31,47	70,40	61,69	0,316
1	53	5301	Kab. Kupang	73,87	79,28	3,36	2,79	42,75	73,34	21,37	61,50	8,47	11,80	43,66	39,50	21,50	35,45	55,44	56,77	0,330
2	53	5302	Kab. Timor Tengah Selatan	61,14	67,16	2,63	2,88	31,27	70,72	24,68	65,17	7,76	38,25	38,65	56,80	23,80	18,65	81,81	44,24	0,284
3	53	5303	Kab. Timor Tengah Utara	67,21	53,54	1,82	2,69	45,78	80,84	20,89	54,10	8,44	54,55	39,07	47,30	15,90	30,20	78,52	59,93	0,343
4	53	5304	Kab. Belu	87,36	86,08	5,41	2,69	34,99	85,78	13,86	68,51	7,92	47,50	38,30	44,30	20,40	15,25	70,44	62,23	0,308
5	53	5305	Kab. Alor	81,65	90,05	2,27	2,81	58,78	85,83	19,87	65,97	8,84	39,87	31,45	37,40	19,60	19,18	78,13	57,14	0,303
6	53	5306	Kab. Flores Timur	64,52	77,59	3,58	2,50	69,99	96,98	11,25	42,60	8,36	25,49	31,14	31,30	21,20	15,31	67,42	64,85	0,286
7	53	5307	Kab. Sikka	77,36	75,32	2,33	2,18	37,71	85,35	11,89	54,30	7,52	25,87	41,80	32,30	24,00	35,39	66,47	64,35	0,299
8	53	5308	Kab. Ende	78,00	94,85	2,05	2,13	57,47	92,69	22,57	43,47	8,62	6,74	40,97	30,70	13,50	33,05	72,86	67,59	0,286
9	53	5309	Kab. Ngada	57,80	81,30	2,68	2,53	61,13	86,56	11,87	51,23	8,76	23,30	27,31	28,90	9,50	17,70	83,57	62,88	0,343
10	53	5310	Kab. Manggarai	72,08	77,12	1,17	2,75	54,91	66,26	19,01	78,28	8,65	13,40	33,39	41,00	24,20	26,09	78,04	65,63	0,274
11	53	5311	Kab. Sumba Timur	85,17	97,55	3,46	2,75	33,35	65,88	27,04	65,33	8,29	17,52	35,69	30,90	20,20	20,38	67,17	68,14	0,285
12	53	5312	Kab. Sumba Barat	96,50	88,34	3,21	2,92	27,30	60,76	26,52	66,72	7,98	14,24	43,27	35,20	16,10	24,42	72,69	50,59	0,277
13	53	5313	Kab. Lembata	77,11	77,86	2,18	2,70	64,14	88,61	24,22	54,23	8,42	30,10	37,03	25,70	20,70	16,50	79,08	65,65	0,284
14	53	5314	Kab. Rote Ndao	90,77	91,63	2,42	3,04	60,73	85,16	25,78	62,35	8,25	22,76	43,58	32,40	29,40	23,11	61,14	65,17	0,301
15	53	5315	Kab. Manggarai Barat	86,47	79,45	3,47	2,82	54,41	82,03	16,74	81,55	8,69	24,47	37,11	31,10	24,30	15,40	69,56	62,49	0,324

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																	
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan			
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun ASFR	19-23 Tahun APK PT	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini	
16	53	5316	Kab. Nagekeo	58,73	99,11	2,17	2,41	47,16	83,52	12,30	40,05	8,59	38,50	33,33	25,00	7,40	20,34	67,33	58,61	0,302	
17	53	5317	Kab. Sumba Tengah	97,78	86,29	1,89	3,14	23,20	52,51	30,84	62,56	7,72	21,89	32,62	37,40	17,60	24,83	69,10	50,38	0,334	
18	53	5318	Kab. Sumba Barat Daya	69,98	34,77	2,64	3,34	32,06	52,60	27,20	64,59	7,14	24,76	37,73	47,50	22,30	18,15	70,78	45,64	0,313	
19	53	5319	Kab. Manggarai Timur	57,97	84,23	0,51	2,86	38,97	55,75	24,90	80,01	8,37	26,32	41,99	38,80	22,60	21,72	78,47	53,55	0,291	
20	53	5320	Kab. Sabu Raijua	98,15	99,58	3,99	3,07	36,17	83,51	28,13	51,02	7,41	40,48	37,58	32,20	22,20	25,44	71,68	60,82	0,323	
21	53	5321	Kab. Malaka	75,51	40,66	1,58	2,60	41,48	73,70	13,92	61,39	7,56	41,40	53,15	31,60	25,40	19,47	67,68	58,06	0,330	
22	53	5371	Kota Kupang	82,45	94,30	8,60	2,31	62,57	91,69	8,24	52,08	11,38	80,82	28,25	26,90	12,00	74,35	54,86	88,17	0,284	

Provinsi Kalimantan Barat

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	61		Prov. Kalimantan Barat	72,6	74,9	49,2	26,5	69,2	54,7	2
1	61	6101	Kab. Sambas	69,1	89,0	47,8	21,5	75,7	54,5	2
2	61	6102	Kab. Mempawah	72,8	78,3	44,2	29,1	74,0	55,8	2
3	61	6103	Kab. Sanggau	63,8	68,8	51,8	22,6	69,2	51,3	2
4	61	6104	Kab. Ketapang	67,7	70,8	51,6	25,6	64,5	52,7	2
5	61	6105	Kab. Sintang	68,9	71,0	52,0	15,1	73,5	49,0	1
6	61	6106	Kab. Kapuas Hulu	74,2	61,6	51,5	30,6	75,0	55,8	2
7	61	6107	Kab. Bengkayang	79,8	79,1	44,9	31,1	74,8	58,1	2
8	61	6108	Kab. Landak	81,7	56,0	45,7	19,4	69,3	48,9	1
9	61	6109	Kab. Sekadau	66,2	58,0	59,0	28,5	68,8	53,7	2
10	61	6110	Kab. Melawi	69,7	54,8	44,9	10,8	64,8	41,3	1
11	61	6111	Kab. Kayong Utara	94,1	70,4	52,9	26,5	66,7	57,3	2
12	61	6112	Kab. Kubu Raya	77,3	73,8	57,2	27,3	66,9	56,9	2
13	61	6171	Kota Pontianak	71,2	96,4	48,8	68,6	71,5	69,6	4
14	61	6172	Kota Singkawang	76,2	83,2	40,9	29,9	72,5	56,2	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan
	61		Prov. Kalimantan Barat	65,22	93,56	4,86	2,21	65,70	81,56	6,32	84,45	8,28	25,84	30,14	26,80	33,20	24,99	53,95	76,19	0,310
1	61	6101	Kab. Sambas	54,07	96,68	4,99	2,44	87,10	93,68	6,53	85,85	6,87	28,74	30,43	36,40	32,30	28,76	59,91	74,12	0,248
2	61	6102	Kab. Mempawah	69,37	99,99	6,78	2,22	73,18	80,80	4,83	73,45	7,62	23,97	24,98	28,60	28,20	22,10	56,54	75,98	0,254
3	61	6103	Kab. Sanggau	41,17	90,27	3,71	2,21	61,26	73,57	4,67	86,71	7,93	30,33	29,82	21,30	42,70	12,45	54,67	72,13	0,287
4	61	6104	Kab. Ketapang	60,65	94,45	6,36	2,18	54,75	83,89	8,50	86,93	8,17	37,13	31,04	17,90	40,00	11,44	41,81	72,47	0,239
5	61	6105	Kab. Sintang	57,72	81,78	2,85	2,25	60,30	80,06	8,03	90,56	8,03	23,79	40,27	31,00	40,70	17,88	63,22	75,82	0,329
6	61	6106	Kab. Kapuas Hulu	47,39	100,00	2,18	2,20	46,15	74,44	7,40	99,88	8,72	15,87	36,06	23,60	34,20	29,77	65,25	73,34	0,307
7	61	6107	Kab. Bengkayang	75,02	89,87	2,81	2,21	71,19	84,37	6,00	77,86	8,39	5,68	28,92	23,40	30,20	21,84	56,88	76,37	0,248
8	61	6108	Kab. Landak	67,00	98,63	2,22	2,30	44,95	66,28	8,98	87,34	8,65	10,34	30,73	28,60	36,70	21,62	56,55	65,02	0,252
9	61	6109	Kab. Sekadau	48,12	81,69	2,24	2,30	42,96	72,69	5,66	82,55	7,78	40,92	45,42	14,40	51,20	8,96	61,41	64,97	0,309
10	61	6110	Kab. Melawi	49,25	89,21	2,41	2,24	34,82	71,38	10,62	99,74	8,41	14,87	27,27	35,20	46,30	12,27	60,51	63,74	0,357
11	61	6111	Kab. Kayong Utara	100,00	99,70	3,02	2,28	66,46	73,00	8,84	89,86	7,32	47,78	28,81	23,80	31,60	14,36	55,67	71,07	0,330
12	61	6112	Kab. Kubu Raya	89,89	90,67	6,73	2,33	69,62	77,94	4,08	85,25	7,65	49,98	29,12	30,20	30,70	26,79	43,07	80,77	0,273
13	61	6171	Kota Pontianak	76,36	97,58	8,29	2,01	91,18	96,50	4,20	72,81	10,47	22,29	23,68	22,30	13,10	55,90	50,68	92,83	0,361
14	61	6172	Kota Singkawang	84,68	99,28	7,92	2,34	77,66	89,23	4,53	61,83	8,30	17,56	24,52	21,90	32,00	20,77	50,46	83,99	0,277

Provinsi Kalimantan Tengah

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	62		Prov. Kalimantan Tengah	75,9	69,8	54,3	27,6	68,9	55,9	2
1	62	6201	Kab. Kotawaringin Barat	76,6	81,9	54,1	38,8	72,3	62,5	3
2	62	6202	Kab. Kotawaringin Timur	70,6	69,7	54,4	34,9	63,5	56,8	2
3	62	6203	Kab. Kapuas	72,5	52,6	51,6	30,5	64,6	52,2	2
4	62	6204	Kab. Barito Selatan	76,2	58,1	56,8	22,8	69,9	52,6	2
5	62	6205	Kab. Barito Utara	68,0	65,8	58,7	23,4	74,7	54,0	2
6	62	6206	Kab. Katingan	69,7	63,7	54,0	24,1	70,8	52,8	2
7	62	6207	Kab. Seruyan	85,1	71,6	52,1	15,8	72,5	51,5	2
8	62	6208	Kab. Sukamara	78,9	74,7	50,4	23,8	72,2	55,2	2
9	62	6209	Kab. Lamandau	75,9	68,1	67,9	30,4	72,1	59,9	2
10	62	6210	Kab. Gunung Mas	76,6	69,5	51,4	30,2	71,1	56,7	2
11	62	6211	Kab. Pulang Pisau	76,9	61,2	59,6	17,0	71,7	50,9	2
12	62	6212	Kab. Murung Raya	86,6	65,0	53,7	27,4	60,5	54,9	2
13	62	6213	Kab. Barito Timur	76,9	66,5	60,7	34,1	79,2	60,9	3
14	62	6271	Kota Palangka Raya	80,8	93,9	53,2	61,4	73,9	71,2	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	19-23 Tahun	APK PT
	62		Prov. Kalimantan Tengah	64,53	97,23	4,01	2,26	59,92	78,15	5,17	88,72	9,17	24,79	34,95	22,10	38,40	27,49	49,60	80,16	0,301
1	62	6201	Kab. Kotawaringin Barat	65,96	99,55	4,42	2,23	70,05	92,00	4,11	82,23	9,17	24,68	35,98	16,50	31,00	27,03	47,87	90,64	0,303
2	62	6202	Kab. Kotawaringin Timur	61,35	91,35	4,63	2,16	59,84	75,67	5,66	85,26	8,38	39,76	29,93	21,60	27,30	19,78	40,77	80,49	0,304
3	62	6203	Kab. Kapuas	55,96	95,55	3,61	2,40	43,27	63,31	5,25	90,51	8,39	13,13	37,22	22,50	38,00	33,80	53,90	65,80	0,309
4	62	6204	Kab. Barito Selatan	64,81	98,08	4,12	2,17	48,08	64,30	4,83	93,51	9,54	23,08	37,49	33,30	32,00	25,97	52,58	76,11	0,284
5	62	6205	Kab. Barito Utara	46,97	99,45	4,71	2,22	55,69	73,32	5,67	91,45	8,80	27,41	45,39	20,40	44,20	10,53	55,61	80,68	0,269
6	62	6206	Kab. Katingan	51,85	99,57	4,88	2,41	50,27	79,43	5,26	99,94	9,39	11,82	34,78	19,60	55,20	15,90	47,82	80,39	0,253
7	62	6207	Kab. Seruyan	80,70	99,94	3,47	2,21	61,35	79,33	7,08	90,43	8,51	25,01	35,34	32,20	38,90	21,22	48,06	79,76	0,222
8	62	6208	Kab. Sukamara	77,06	96,97	4,95	2,16	64,52	81,20	4,14	99,66	8,53	5,58	27,07	20,00	40,30	13,25	52,27	82,51	0,289
9	62	6209	Kab. Lamandau	60,35	96,74	3,17	2,24	55,15	79,34	3,25	92,51	9,11	54,20	40,50	18,30	32,30	14,57	53,78	78,62	0,278
10	62	6210	Kab. Gunung Mas	59,69	98,65	3,12	2,31	54,23	84,83	5,68	94,09	9,73	7,79	29,13	14,10	56,00	19,22	47,35	82,11	0,255
11	62	6211	Kab. Pulang Pisau	53,85	98,98	1,99	2,19	51,17	67,87	4,56	95,19	8,88	29,46	41,24	27,90	48,30	14,84	53,13	75,61	0,256
12	62	6212	Kab. Murung Raya	84,66	96,74	2,90	2,39	67,01	63,69	6,58	99,76	8,57	10,75	40,55	15,80	49,70	16,14	37,92	71,30	0,258
13	62	6213	Kab. Barito Timur	61,95	97,92	3,26	2,15	38,56	91,74	6,66	95,57	9,90	41,41	33,92	21,70	26,70	17,13	68,91	76,75	0,299
14	62	6271	Kota Palangka Raya	79,29	99,54	5,02	2,09	90,63	91,96	3,52	78,04	11,66	18,58	28,10	19,10	24,80	61,90	49,37	92,91	0,309

Provinsi Kalimantan Selatan

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	63		Prov. Kalimantan Selatan	78,4	73,0	56,7	41,9	71,8	62,8	3
1	63	6301	Kab. Tanah Laut	83,3	58,8	54,8	36,4	76,0	59,5	2
2	63	6302	Kab. Kota Baru	66,1	54,0	52,9	25,1	67,1	50,2	2
3	63	6303	Kab. Banjar	75,4	71,3	61,0	31,0	72,0	59,3	2
4	63	6304	Kab. Barito Kuala	74,9	47,0	64,7	42,5	72,9	58,9	2
5	63	6305	Kab. Tapin	80,2	75,4	58,6	34,6	71,4	61,4	3
6	63	6306	Kab. Hulu Sungai Selatan	93,4	72,9	57,9	37,9	76,3	64,8	3
7	63	6307	Kab. Hulu Sungai Tengah	91,1	80,9	53,0	35,9	75,9	63,9	3
8	63	6308	Kab. Hulu Sungai Utara	87,7	88,8	51,2	31,6	73,6	62,2	3
9	63	6309	Kab. Tabalong	83,9	84,2	54,6	49,7	75,8	68,0	3
10	63	6310	Kab. Tanah Bumbu	71,7	69,4	54,2	38,6	69,4	59,1	2
11	63	6311	Kab. Balangan	92,7	88,0	56,6	43,3	81,2	69,5	4
12	63	6371	Kota Banjarmasin	69,6	84,1	57,6	55,5	68,6	66,3	3
13	63	6372	Kota Banjar Baru	78,6	81,2	54,7	59,5	74,7	68,9	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Pemempuan	Akses Informasi
	63		Prov. Kalimantan Selatan	70,85	97,98	4,20	2,24	60,60	83,70	4,11	91,76	9,02	24,77	37,88	22,90	23,80	28,06	55,52	78,76	0,302
1	63	6301	Kab. Tanah Laut	76,43	99,71	3,43	2,20	40,90	74,12	3,74	96,76	8,40	17,43	37,94	22,50	23,80	16,80	56,40	80,93	0,258
2	63	6302	Kab. Kota Baru	54,81	94,83	6,05	2,48	38,85	73,12	4,45	89,39	8,03	31,44	29,46	23,20	33,30	15,02	45,25	81,57	0,296
3	63	6303	Kab. Banjar	53,97	99,19	2,71	2,28	58,69	83,18	2,36	90,12	8,24	35,09	41,66	32,30	28,10	31,88	55,45	73,50	0,258
4	63	6304	Kab. Barito Kuala	59,95	96,13	3,41	2,35	35,19	57,71	4,36	91,20	8,41	44,51	46,57	16,50	24,70	20,63	57,66	74,36	0,272
5	63	6305	Kab. Tapin	71,67	99,46	3,86	2,15	65,88	80,86	3,33	99,47	8,66	23,60	40,30	13,20	32,50	15,78	53,03	75,73	0,260
6	63	6306	Kab. Hulu Sungai Selatan	96,55	96,82	2,11	2,30	61,01	84,45	3,38	93,79	8,43	31,36	35,71	19,80	24,40	13,86	64,32	74,95	0,288
7	63	6307	Kab. Hulu Sungai Tengah	93,45	99,98	3,20	2,28	74,08	86,68	5,81	92,41	8,77	13,23	39,26	19,60	26,90	17,69	63,51	70,19	0,251
8	63	6308	Kab. Hulu Sungai Utara	89,36	99,11	3,73	2,39	81,83	97,70	5,75	93,67	8,42	18,40	33,74	27,60	27,90	24,80	63,09	68,95	0,276
9	63	6309	Kab. Tabalong	77,81	99,84	3,44	2,18	72,38	93,13	5,64	93,53	9,38	14,40	39,46	23,10	14,80	24,23	63,08	77,27	0,300
10	63	6310	Kab. Tanah Bumbu	65,16	99,34	6,37	2,40	49,16	92,42	3,41	90,38	8,91	11,06	37,84	21,60	24,50	20,95	46,80	86,26	0,309
11	63	6311	Kab. Balangan	95,07	99,62	2,69	2,31	79,92	96,06	4,87	92,56	8,77	9,54	46,35	16,00	26,70	25,69	66,81	73,02	0,218
12	63	6371	Kota Banjarmasin	66,58	94,22	6,56	2,11	75,68	87,56	4,58	88,08	10,52	26,33	35,00	26,50	18,10	48,34	50,93	83,99	0,347
13	63	6372	Kota Banjar Baru	73,95	99,21	4,93	2,13	68,64	89,54	3,79	90,08	10,82	10,08	30,97	15,40	18,20	37,72	52,65	89,13	0,301

Provinsi Kalimantan Timur

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	64		Prov. Kalimantan Timur	81,6	85,9	49,0	54,8	71,1	66,9	3
1	64	6401	Kab. Paser	84,5	74,9	51,7	36,5	71,3	61,1	3
2	64	6402	Kab. Kutai Kartanegara	81,1	82,2	46,9	48,1	67,6	63,3	3
3	64	6403	Kab. Berau	77,3	83,7	50,4	38,0	67,9	61,0	3
4	64	6407	Kab. Kutai Barat	82,2	89,2	53,4	35,6	74,9	63,7	3
5	64	6408	Kab. Kutai Timur	77,7	81,7	43,8	41,4	69,4	60,3	3
6	64	6409	Kab. Penajam Paser Utara	93,9	78,5	55,3	36,8	78,7	65,2	3
7	64	6411	Kab. Mahakam Hulu	92,4	56,6	50,8	39,0	74,2	59,9	2
8	64	6471	Kota Balikpapan	82,0	90,7	53,4	60,5	75,0	71,0	4
9	64	6472	Kota Samarinda	79,8	93,5	50,1	76,4	73,1	73,1	4
10	64	6474	Kota Bontang	82,2	90,1	52,3	60,0	72,9	70,1	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																	
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan			
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15 + Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	15-19 Tahun	ASFR	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi
	64		Prov. Kalimantan Timur	82,88	98,61	5,14	2,17	76,77	91,65	5,78	77,30	10,22	14,12	30,92	22,20	18,20	40,03	49,07	88,75	0,321	
1	64	6401	Kab. Paser	86,32	98,86	4,53	2,21	61,52	85,95	8,63	80,72	9,10	27,49	38,49	23,40	24,60	20,19	46,22	86,20	0,271	
2	64	6402	Kab. Kutai Kartanegara	76,71	98,00	4,11	2,20	72,55	89,24	7,28	80,24	9,40	5,67	30,70	14,30	25,80	30,24	44,86	84,65	0,307	
3	64	6403	Kab. Berau	71,46	99,70	5,15	2,20	74,80	90,04	5,08	72,69	9,67	4,11	38,44	23,40	27,20	28,69	46,32	84,66	0,317	
4	64	6407	Kab. Kutai Barat	86,04	99,44	5,58	2,14	80,23	94,28	9,56	80,56	9,20	45,37	30,44	27,60	27,60	31,98	55,10	81,43	0,266	
5	64	6408	Kab. Kutai Timur	75,81	99,61	5,76	2,09	69,00	89,51	8,81	73,29	9,59	14,37	29,36	26,90	18,30	21,81	43,71	86,93	0,284	
6	64	6409	Kab. Penajam Paser Utara	93,93	99,91	2,05	2,25	66,90	88,69	6,69	83,71	8,95	33,46	37,86	32,00	18,40	21,54	56,79	86,65	0,259	
7	64	6411	Kab. Mahakam Hulu	93,86	99,03	2,51	2,26	34,68	75,80	10,75	63,61	8,85	45,27	38,01	23,20	23,20	21,71	57,98	78,70	0,285	
8	64	6471	Kota Balikpapan	88,52	99,97	6,22	2,19	82,37	96,28	2,23	81,57	11,03	8,66	28,19	24,80	14,50	47,47	52,71	92,82	0,324	
9	64	6472	Kota Samarinda	84,57	96,07	5,75	1,95	87,17	94,80	4,30	71,71	11,49	16,58	27,72	20,30	11,50	64,32	49,70	93,46	0,330	
10	64	6474	Kota Bontang	93,64	99,89	7,06	2,10	84,54	90,47	3,74	76,09	10,92	21,55	28,37	20,70	11,90	33,88	50,72	91,72	0,330	

Provinsi Kalimantan Utara

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	65		Prov. Kalimantan Utara	86,3	78,0	51,4	43,8	73,7	64,5	3
1	65	6501	Kab. Bulungan	86,5	81,1	47,9	34,4	74,6	61,2	3
2	65	6502	Kab. Malinau	88,7	76,1	56,3	39,0	73,1	64,1	3
3	65	6503	Kab. Nunukan	86,6	72,2	57,7	38,3	75,4	63,6	3
4	65	6504	Kab. Tana Tidung	91,0	87,8	56,5	43,0	77,0	68,3	3
5	65	6571	Kota Tarakan	84,2	81,6	45,6	61,7	72,3	67,5	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPak	Akses Informasi	Rasio Gini
	65		Prov. Kalimantan Utara	87,46	98,54	3,90	2,27	69,65	85,17	6,32	78,65	9,58	26,29	32,78	17,60	26,10	27,98	52,14	82,53	0,264
1	65	6501	Kab. Bulungan	89,32	99,39	4,33	2,22	65,55	94,91	8,76	73,73	9,44	21,37	36,29	15,90	35,40	26,94	53,51	84,18	0,274
2	65	6502	Kab. Malinau	91,64	95,81	3,10	2,24	61,50	89,29	6,94	67,69	9,92	40,48	40,41	26,00	21,00	21,62	57,83	76,10	0,283
3	65	6503	Kab. Nunukan	82,80	97,48	2,71	2,27	66,49	76,42	5,73	99,64	8,73	28,38	38,91	21,70	22,90	17,05	58,03	79,14	0,270
4	65	6504	Kab. Tana Tidung	96,10	99,68	3,67	2,67	87,58	96,03	4,47	87,14	9,49	35,10	30,24	7,40	30,60	19,12	58,41	83,56	0,280
5	65	6571	Kota Tarakan	87,80	99,64	5,11	2,16	74,70	84,64	5,56	79,55	10,23	14,44	18,48	12,60	18,00	36,97	44,00	86,20	0,232

Provinsi Sulawesi Utara

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	71		Prov. Sulawesi Utara	80,3	83,3	48,2	32,4	63,5	58,1	2
1	71	7101	Kab. Bolaang Mongondow	77,3	74,4	48,2	26,6	61,4	53,9	2
2	71	7102	Kab. Minahasa	79,5	84,3	49,6	43,3	66,4	62,5	3
3	71	7103	Kab. Kepulauan Sangihe	90,8	77,5	45,1	27,0	56,2	54,5	2
4	71	7104	Kab. Kepulauan Talaud	75,5	88,6	50,7	52,7	64,5	64,9	3
5	71	7105	Kab. Minahasa Selatan	79,2	87,5	47,4	23,2	64,9	54,8	2
6	71	7106	Kab. Minahasa Utara	80,4	84,6	48,3	33,8	62,4	58,6	2
7	71	7107	Kab. Minahasa Tenggara	86,9	87,2	54,4	31,4	68,3	61,6	3
8	71	7108	Kab. Bolaang Mongondow	82,4	64,9	48,0	18,4	56,0	48,4	1
9	71	7109	Kab. Siau Tagulandang Biaro	85,2	95,8	54,4	36,7	59,8	62,8	3
10	71	7110	Kab. Bolaang Mongondow	79,1	71,6	55,5	24,8	54,7	53,2	2
11	71	7111	Kab. Bolaang Mongondow	88,6	65,7	44,0	20,7	59,9	50,1	2
12	71	7171	Kota Manado	75,8	88,8	48,5	41,8	67,9	62,1	3
13	71	7172	Kota Bitung	80,4	87,5	46,8	26,8	66,4	56,7	2
14	71	7173	Kota Tomohon	79,9	85,5	47,4	62,3	71,4	67,9	3
15	71	7174	Kota Kotamobagu	80,8	74,3	50,5	34,0	68,2	58,8	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPH	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	15+ Tahun	RLS	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PH 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi
	71		Prov. Sulawesi Utara	84,41	98,01	5,85	2,06	74,21	87,31	7,25	83,04	10,02	11,86	29,65	20,80	38,80	34,75	49,59	76,12	0,360
1	71	7101	Kab. Bolaang Mongondow	70,47	97,19	4,48	2,12	64,95	79,01	7,74	90,31	8,66	19,19	30,43	19,30	50,10	20,95	48,52	67,53	0,320
2	71	7102	Kab. Minahasa	88,62	99,29	7,22	1,97	74,28	89,37	6,53	82,04	10,41	11,29	30,37	19,40	34,80	48,78	49,54	80,15	0,341
3	71	7103	Kab. Kepulauan Sangihe	89,09	99,85	2,50	2,02	67,30	82,68	10,84	90,79	8,94	4,51	29,64	24,20	35,40	26,37	45,18	60,43	0,321
4	71	7104	Kab. Kepulauan Talaud	73,45	83,07	3,06	2,19	81,13	93,11	8,17	91,40	10,16	17,18	31,81	11,60	23,50	29,76	57,74	57,64	0,289
5	71	7105	Kab. Minahasa Selatan	81,07	93,23	4,79	2,05	79,76	90,25	8,97	87,93	9,67	17,70	28,97	28,10	49,60	28,97	48,62	75,63	0,324
6	71	7106	Kab. Minahasa Utara	87,68	99,79	6,73	1,99	77,33	86,72	6,95	85,13	10,50	13,69	25,58	18,90	40,00	34,25	43,66	78,74	0,338
7	71	7107	Kab. Minahasa Tenggara	81,25	99,86	2,76	2,27	80,25	93,12	11,72	81,95	9,17	43,81	38,08	21,90	51,40	34,50	57,93	67,75	0,302
8	71	7108	Kab. Bolaang Mongondow Utara	77,63	99,90	4,10	2,17	54,10	72,10	7,88	90,89	8,36	6,36	33,58	26,30	52,60	14,38	49,42	61,56	0,374
9	71	7109	Kab. Siau Tagulandang Biaro	73,85	98,74	1,94	2,07	90,05	96,56	8,32	98,97	9,67	25,68	33,68	19,90	25,40	8,60	55,19	59,43	0,354
10	71	7110	Kab. Bolaang Mongondow Timur	83,08	93,90	5,35	2,11	63,85	74,08	5,87	92,49	8,64	28,59	36,82	18,80	53,90	14,24	37,76	68,98	0,335
11	71	7111	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	84,74	99,01	2,51	2,29	57,17	73,31	11,33	85,18	8,62	16,93	32,37	23,60	45,30	13,73	44,36	66,55	0,296
12	71	7171	Kota Manado	87,68	99,61	8,73	1,97	79,97	92,74	5,43	72,61	11,33	11,83	26,30	18,80	36,00	47,54	50,09	88,55	0,383

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
13	71	7172	Kota Bitung	93,29	98,54	7,51	2,07	78,35	91,73	6,27	75,82	10,11	8,96	27,61	25,10	35,30	27,28	52,39	80,88	0,374
14	71	7173	Kota Tomohon	92,74	99,33	7,79	2,00	70,54	95,89	5,38	68,78	11,13	8,53	26,69	10,80	24,60	49,48	50,92	88,79	0,336
15	71	7174	Kota Kotamobagu	83,81	98,95	5,72	2,06	68,96	74,15	5,12	81,93	10,34	16,71	29,94	23,10	34,20	35,48	55,52	78,14	0,357

Provinsi Sulawesi Tengah

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	72		Prov. Sulawesi Tengah	83,5	70,8	48,0	30,8	67,1	56,7	2
1	72	7201	Kab. Banggai	81,1	77,1	54,5	29,1	66,5	58,0	2
2	72	7202	Kab. Poso	88,3	88,2	43,8	45,2	71,2	64,3	3
3	72	7203	Kab. Donggala	76,3	59,2	41,8	20,9	63,7	47,9	1
4	72	7204	Kab. Toli-Toli	82,5	54,7	48,1	37,6	65,2	55,6	2
5	72	7205	Kab. Buol	86,0	64,3	43,3	13,9	68,8	47,0	1
6	72	7206	Kab. Morowali	85,8	68,9	47,0	26,3	57,7	53,1	2
7	72	7207	Kab. Banggai Kepulauan	88,3	72,4	54,6	24,9	65,6	56,4	2
8	72	7208	Kab. Parigi Moutong	83,6	63,0	47,2	23,7	70,7	52,9	2
9	72	7209	Kab. Tojo Una-Una	91,4	68,9	40,9	31,9	69,8	56,4	2
10	72	7210	Kab. Sigi	84,5	63,6	49,3	25,2	73,9	54,8	2
11	72	7211	Kab. Banggai Laut	77,3	60,1	44,5	24,7	63,7	50,4	2
12	72	7212	Kab. Morowali Utara	89,0	78,8	45,5	27,2	70,8	57,2	2
13	72	7271	Kota Palu	80,9	87,7	51,2	56,1	74,1	68,5	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	72		Prov. Sulawesi Tengah	77,39	96,80	2,94	2,26	62,59	77,40	11,77	80,81	9,28	29,15	33,39	26,10	38,80	40,38	55,47	68,16	0,301
1	72	7201	Kab. Banggai	76,27	93,14	3,11	2,22	68,57	83,18	6,56	86,56	9,07	27,03	38,38	28,70	33,90	34,64	56,41	67,64	0,316
2	72	7202	Kab. Poso	84,06	95,27	1,77	2,15	80,53	92,08	14,23	81,72	9,72	11,35	35,38	21,10	25,70	35,70	54,34	71,62	0,247
3	72	7203	Kab. Donggala	61,78	94,36	2,79	2,23	50,68	65,14	15,30	65,64	8,25	31,61	36,92	29,60	34,50	21,57	50,77	60,23	0,251
4	72	7204	Kab. Toli-Toli	77,31	95,36	3,11	2,31	41,65	67,40	12,45	77,41	9,17	40,31	28,85	26,90	30,10	40,03	49,58	68,70	0,277
5	72	7205	Kab. Buol	86,72	94,62	3,13	2,48	55,76	76,52	13,08	85,12	9,29	21,95	27,22	36,90	43,20	24,03	54,36	68,71	0,266
6	72	7206	Kab. Morowali	82,80	96,33	2,84	2,24	60,64	75,16	11,55	92,91	9,40	15,98	32,79	22,60	35,50	22,51	30,82	77,10	0,275
7	72	7207	Kab. Banggai Kepulauan	81,80	96,28	1,55	2,30	64,70	79,52	12,32	83,96	8,94	44,80	39,15	28,40	41,90	32,66	61,84	52,56	0,276
8	72	7208	Kab. Parigi Moutong	70,19	99,34	2,10	2,32	56,36	69,14	14,20	84,94	8,23	28,55	39,62	22,30	42,80	20,22	59,79	63,40	0,250
9	72	7209	Kab. Tojo Una-Una	90,13	99,97	2,47	2,18	63,12	71,02	16,36	84,99	8,86	11,25	34,57	16,50	39,60	26,49	60,41	59,91	0,244
10	72	7210	Kab. Sigi	77,35	96,93	2,55	2,31	54,61	72,20	12,06	81,34	9,16	39,87	29,18	33,00	42,50	40,89	64,43	63,67	0,246
11	72	7211	Kab. Banggai Laut	62,89	99,81	3,60	2,33	51,42	68,78	13,78	80,14	8,87	30,20	30,31	26,60	42,50	29,32	52,51	53,65	0,221
12	72	7212	Kab. Morowali Utara	86,37	97,83	2,38	2,28	66,96	89,92	11,95	77,77	9,51	26,19	30,53	20,40	39,80	23,86	54,50	70,15	0,245
13	72	7271	Kota Palu	82,89	99,53	5,63	2,08	80,77	89,49	5,94	72,66	11,48	33,41	19,41	25,60	30,60	88,47	57,72	85,69	0,337

Provinsi Sulawesi Selatan

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	73		Prov. Sulawesi Selatan	84,2	84,6	47,2	45,9	65,2	63,2	3
1	73	7301	Kab. Kepulauan Selayar	93,0	81,3	46,1	45,9	63,6	63,3	3
2	73	7302	Kab. Bulukumba	85,1	80,9	49,7	41,4	69,8	63,0	3
3	73	7303	Kab. Bantaeng	93,2	74,5	54,9	26,0	79,5	60,1	3
4	73	7304	Kab. Jeneponto	80,8	63,7	44,9	27,1	61,4	52,1	2
5	73	7305	Kab. Takalar	83,1	85,1	47,0	26,0	55,2	54,4	2
6	73	7306	Kab. Gowa	82,0	89,9	52,7	46,5	71,0	66,3	3
7	73	7307	Kab. Sinjai	96,3	81,7	49,4	37,9	71,0	63,7	3
8	73	7308	Kab. Bone	88,6	93,3	44,9	42,5	57,1	61,8	3
9	73	7309	Kab. Maros	80,9	80,6	45,4	45,0	61,9	60,7	3
10	73	7310	Kab. Pangkajene Dan	84,8	75,4	43,4	36,3	70,8	59,0	2
11	73	7311	Kab. Barru	82,8	85,7	44,2	45,4	60,8	61,3	3
12	73	7312	Kab. Soppeng	84,2	82,4	46,4	45,0	56,6	60,6	3
13	73	7313	Kab. Wajo	87,2	90,5	43,4	43,6	63,7	62,5	3
14	73	7314	Kab. Sidenreng Rappang	80,1	91,4	48,1	28,7	59,7	57,0	2
15	73	7315	Kab. Pinrang	83,7	81,0	49,1	39,8	67,2	61,6	3
16	73	7316	Kab. Enrekang	93,1	83,8	46,1	41,6	75,1	64,6	3
17	73	7317	Kab. Luwu	86,3	81,9	39,4	41,2	68,6	60,2	3
18	73	7318	Kab. Tana Toraja	87,7	70,4	46,3	55,9	75,0	65,4	3
19	73	7322	Kab. Luwu Utara	88,1	90,8	49,5	39,2	68,1	63,8	3

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
20	73	7324	Kab. Luwu Timur	89,5	83,1	55,5	45,7	67,8	66,3	3
21	73	7326	Kab. Toraja Utara	88,4	68,8	52,5	35,9	74,1	61,1	3
22	73	7371	Kota Makassar	73,6	88,5	49,7	66,7	67,3	68,0	3
23	73	7372	Kota Parepare	86,9	83,1	58,0	45,5	73,4	67,5	3
24	73	7373	Kota Palopo	81,8	92,7	56,5	55,3	72,3	70,3	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	73		Prov. Sulawesi Selatan	83,55	98,98	4,19	2,15	71,86	93,83	8,06	82,54	9,22	19,34	30,43	23,30	26,20	41,83	52,68	76,29	0,363
1	73	7301	Kab. Kepulauan Selayar	94,42	97,58	2,05	2,12	68,76	89,39	10,79	81,31	8,84	17,23	37,79	25,70	22,70	38,10	55,25	64,46	0,329
2	73	7302	Kab. Bulukumba	74,46	99,29	2,23	2,09	68,37	88,66	6,71	82,39	8,87	8,27	38,18	25,20	28,30	40,80	60,79	70,74	0,329
3	73	7303	Kab. Bantaeng	95,28	99,86	2,57	2,04	65,85	77,94	8,26	90,61	8,01	44,24	31,91	24,30	41,40	27,95	69,11	70,40	0,249
4	73	7304	Kab. Jeneponto	74,34	91,01	2,47	2,12	31,70	87,20	11,82	89,51	7,49	7,39	39,08	37,00	24,30	22,32	50,51	62,62	0,304
5	73	7305	Kab. Takalar	77,98	99,85	3,84	2,23	72,38	96,25	7,75	93,04	8,25	22,66	25,03	24,00	35,70	24,76	44,93	67,29	0,385
6	73	7306	Kab. Gowa	75,78	99,89	3,91	2,19	78,86	98,42	6,85	79,27	8,95	38,95	29,61	17,00	29,60	39,82	59,50	74,83	0,326
7	73	7307	Kab. Sinjai	96,79	99,98	1,52	2,20	74,35	86,14	7,82	77,87	8,28	31,79	33,07	28,60	21,60	25,09	61,79	66,41	0,287
8	73	7308	Kab. Bone	82,62	99,85	2,28	2,07	84,25	97,54	9,58	80,15	7,95	8,41	37,38	26,00	21,70	29,94	47,12	68,69	0,386
9	73	7309	Kab. Maros	75,54	99,75	4,34	2,26	65,77	94,68	9,32	76,16	8,50	32,76	24,89	22,40	24,80	35,50	43,88	78,84	0,349
10	73	7310	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	83,01	99,82	3,99	2,14	53,07	94,51	12,41	81,03	8,92	19,74	32,01	25,20	26,80	27,55	58,16	74,98	0,317
11	73	7311	Kab. Barru	91,68	99,78	6,42	2,12	71,01	96,21	8,31	81,21	9,24	17,17	25,57	26,90	20,10	33,62	41,26	74,54	0,310
12	73	7312	Kab. Soppeng	78,16	99,44	3,33	2,07	64,89	95,44	6,90	79,96	8,83	7,74	31,66	26,60	20,90	34,05	45,23	69,41	0,381
13	73	7313	Kab. Wajo	79,60	99,67	2,31	2,04	80,31	95,93	6,47	86,87	7,85	11,49	23,30	20,50	31,10	43,24	52,19	74,25	0,369
14	73	7314	Kab. Sidenreng Rappang	67,20	99,00	3,02	2,07	79,71	98,32	5,02	79,95	8,54	12,15	33,26	20,30	37,00	26,72	39,21	76,23	0,319

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
15	73	7315	Kab. Pinrang	75,51	99,77	3,12	2,22	67,31	92,74	8,55	85,93	9,19	33,63	23,07	22,20	27,30	30,37	46,53	80,42	0,299
16	73	7316	Kab. Enrekang	90,01	99,15	1,51	2,46	74,60	96,63	11,25	81,27	9,35	16,06	36,99	34,30	16,60	30,93	65,17	78,49	0,342
17	73	7317	Kab. Luwu	90,33	97,18	4,14	2,33	71,53	92,91	11,70	79,41	9,25	17,16	21,59	23,60	29,40	40,11	54,78	75,03	0,319
18	73	7318	Kab. Tana Toraja	90,77	98,90	3,98	2,44	53,43	90,74	10,79	75,61	9,06	14,14	41,13	27,50	18,00	50,43	71,72	66,27	0,320
19	73	7322	Kab. Luwu Utara	82,09	99,70	2,39	2,19	81,64	97,14	11,24	84,52	8,74	31,15	34,97	23,60	21,70	19,45	53,34	69,40	0,272
20	73	7324	Kab. Luwu Timur	98,23	99,18	4,58	2,24	74,86	89,65	6,55	86,81	9,08	34,04	35,18	21,80	23,10	32,24	53,55	79,18	0,350
21	73	7326	Kab. Toraja Utara	87,89	95,37	2,44	2,74	55,10	92,86	10,73	78,18	8,97	36,02	40,58	27,60	29,30	36,10	66,07	71,58	0,316
22	73	7371	Kota Makassar	87,62	99,74	9,71	1,95	78,27	93,92	4,97	82,33	11,48	18,81	19,76	22,90	17,80	63,55	47,06	89,74	0,372
23	73	7372	Kota Pare Pare	94,62	99,91	5,23	2,34	70,51	96,70	5,27	82,70	11,02	49,05	18,27	26,10	26,50	46,25	58,30	88,81	0,376
24	73	7373	Kota Palopo	96,22	99,50	7,64	2,18	85,73	96,57	7,35	88,45	11,22	31,70	30,40	22,70	21,00	47,83	52,02	88,91	0,333

Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	74		Prov. Sulawesi Tenggara	84,8	81,8	48,9	38,6	69,7	61,9	3
1	74	7401	Kab. Kolaka	83,0	86,9	53,0	54,5	85,9	70,9	4
2	74	7402	Kab. Konawe	83,1	80,1	42,6	22,2	67,5	53,2	2
3	74	7403	Kab. Muna	86,8	75,1	40,6	49,7	64,1	61,0	3
4	74	7404	Kab. Buton	85,3	67,6	53,2	39,6	65,1	60,2	3
5	74	7405	Kab. Konawe Selatan	81,6	86,8	48,8	27,0	65,2	57,1	2
6	74	7406	Kab. Bombana	89,1	79,2	47,0	22,8	68,0	55,2	2
7	74	7407	Kab. Wakatobi	91,9	71,3	49,7	28,9	69,3	57,9	2
8	74	7408	Kab. Kolaka Utara	88,8	85,8	53,0	24,7	79,9	60,3	3
9	74	7409	Kab. Konawe Utara	90,4	70,5	47,1	21,9	73,1	54,5	2
10	74	7410	Kab. Buton Utara	87,8	59,2	43,1	38,1	79,6	58,4	2
11	74	7411	Kab. Kolaka Timur	85,3	91,6	43,7	25,9	69,5	57,2	2
12	74	7412	Kab. Konawe Kepulauan	93,6	61,9	57,1	20,8	79,5	55,9	2
13	74	7413	Kab. Muna Barat	89,7	66,6	44,3	22,4	69,9	52,9	2
14	74	7414	Kab. Buton Tengah	82,7	71,8	36,9	42,6	65,4	57,2	2
15	74	7415	Kab. Buton Selatan	86,1	68,7	44,8	42,2	79,1	61,5	3
16	74	7471	Kota Kendari	77,7	95,5	58,8	72,2	74,5	74,8	4
17	74	7472	Kota Baubau	87,1	91,1	50,2	63,0	66,1	69,8	4

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Pemukim PPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	74		Prov. Sulawesi Tenggara	80,39	97,57	3,09	2,48	76,67	90,62	11,21	77,10	9,74	28,68	35,14	26,10	31,20	42,95	60,30	76,86	0,370
1	74	7401	Kab. Kolaka	71,41	99,44	2,59	2,27	78,76	94,03	11,67	80,46	9,73	37,04	38,09	23,80	13,10	31,01	74,58	80,58	0,272
2	74	7402	Kab. Konawe	73,96	99,11	2,95	2,45	72,72	90,70	13,25	77,90	9,93	12,84	31,43	29,70	42,90	29,70	50,13	76,48	0,302
3	74	7403	Kab. Muna	92,45	94,41	3,78	2,65	72,48	85,32	13,78	59,10	8,93	20,18	40,32	25,00	20,40	39,44	62,68	63,66	0,389
4	74	7404	Kab. Buton	78,60	99,71	2,95	2,60	60,52	81,22	13,99	79,70	9,51	39,49	43,03	25,00	28,40	37,00	57,19	65,09	0,328
5	74	7405	Kab. Konawe Selatan	69,36	98,93	2,76	2,45	83,15	93,45	11,20	82,26	9,33	26,31	35,58	21,30	42,00	25,00	51,12	72,49	0,320
6	74	7406	Kab. Bombana	80,07	99,06	1,43	2,54	75,93	87,47	10,54	85,65	8,47	20,81	35,97	24,70	43,70	22,40	56,64	74,57	0,344
7	74	7407	Kab. Wakatobi	94,95	99,57	3,02	2,58	61,90	87,04	14,36	100,00	8,86	14,23	45,67	24,10	34,00	26,81	61,69	70,52	0,344
8	74	7408	Kab. Kolaka Utara	79,82	99,65	1,64	2,44	82,04	92,38	13,51	82,48	9,17	35,75	44,56	23,60	36,90	24,18	71,07	84,29	0,364
9	74	7409	Kab. Konawe Utara	87,79	99,68	2,40	2,66	64,27	84,58	13,17	79,03	9,52	31,64	32,17	27,00	55,90	24,61	67,75	75,30	0,376
10	74	7410	Kab. Buton Utara	87,11	92,94	2,13	2,50	49,61	72,91	14,09	78,07	9,48	16,80	36,43	30,50	24,00	33,85	76,31	70,64	0,320
11	74	7411	Kab. Kolaka Timur	74,25	99,65	2,15	2,30	87,96	94,72	13,71	78,37	8,76	14,98	40,51	22,00	47,80	24,02	57,02	70,27	0,292
12	74	7412	Kab. Konawe Kepulauan	92,51	97,79	1,51	2,56	54,73	74,55	15,54	90,43	9,58	55,74	36,80	26,50	50,50	21,49	72,73	70,20	0,284
13	74	7413	Kab. Muna Barat	94,97	89,67	2,06	2,63	65,31	74,60	13,38	75,04	8,72	24,89	36,71	28,40	33,30	19,79	63,43	64,54	0,308
14	74	7414	Kab. Buton Tengah	71,70	99,65	2,84	2,72	65,31	87,71	14,40	72,64	7,63	7,44	33,22	31,80	13,70	22,33	56,57	62,61	0,300

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan	TPAK Informasi	Akses Gini
15	74	7415	Kab. Buton Selatan	84,19	98,90	3,48	2,72	62,38	84,32	14,28	80,42	8,28	27,03	37,16	38,90	19,30	40,87	75,99	66,26	0,294
16	74	7471	Kota Kendari	83,34	92,25	5,67	2,09	87,77	98,32	4,23	64,95	12,05	55,78	16,87	24,40	17,00	78,45	55,49	93,74	0,367
17	74	7472	Kota Baubau	88,60	99,82	3,99	2,22	83,70	96,43	7,40	87,77	11,18	17,36	26,02	29,80	16,70	65,43	58,12	82,16	0,446

Provinsi Gorontalo

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	75		Prov. Gorontalo	88,8	78,6	46,1	30,3	60,7	56,8	2
1	75	7501	Kab. Boalemo	88,0	75,9	46,2	25,2	61,0	54,3	2
2	75	7502	Kab. Gorontalo	87,2	67,0	38,9	36,7	57,2	54,4	2
3	75	7503	Kab. Pohuwato	88,1	77,1	43,5	39,1	60,1	58,6	2
4	75	7504	Kab. Bone Bolango	88,9	79,7	42,7	30,3	60,8	56,2	2
5	75	7505	Kab. Gorontalo Utara	93,7	76,6	50,9	22,7	59,5	54,8	2
6	75	7571	Kota Gorontalo	89,0	91,1	50,6	52,3	67,5	67,9	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	75		Prov. Gorontalo	87,74	99,91	3,13	2,23	72,04	82,99	14,57	88,53	8,64	34,79	28,67	23,80	38,10	35,68	55,23	69,56	0,414
1	75	7501	Kab. Boalemo	83,07	99,95	2,64	2,31	69,06	82,32	16,43	89,91	8,29	32,52	35,39	28,30	43,00	33,14	56,83	64,52	0,388
2	75	7502	Kab. Gorontalo	83,60	99,79	3,06	2,26	59,23	73,11	17,83	92,27	7,47	30,88	23,31	8,00	44,60	21,74	54,18	61,08	0,400
3	75	7503	Kab. Pohuwato	89,68	99,77	3,76	2,25	72,20	79,99	14,80	82,33	8,88	35,13	24,51	23,00	33,30	43,37	52,56	71,61	0,413
4	75	7504	Kab. Bone Bolango	87,93	99,93	3,12	2,33	77,23	82,04	17,11	90,69	8,20	31,61	28,69	18,00	51,10	25,99	56,23	66,38	0,400
5	75	7505	Kab. Gorontalo Utara	97,56	99,99	2,79	2,41	71,12	84,07	16,86	91,02	8,03	52,38	33,39	25,60	43,80	23,74	56,14	68,39	0,435
6	75	7571	Kota Gorontalo	92,36	99,99	3,89	2,10	83,31	93,89	5,74	83,51	10,52	27,32	21,19	31,20	20,10	54,20	53,75	85,29	0,403

Provinsi Sulawesi Barat

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	76		Kab. Sulawesi Barat	89,3	69,1	47,7	17,7	65,2	50,9	2
1	76	7601	Kab. Pasang Kayu	85,3	73,3	51,8	10,0	68,9	46,7	1
2	76	7602	Kab. Mamuju	91,5	71,0	53,0	14,9	65,9	50,8	2
3	76	7603	Kab. Mamasa	78,8	49,7	49,0	32,8	70,3	53,6	2
4	76	7604	Kab. Polewali Mandar	93,5	74,0	43,2	25,3	67,9	55,2	2
5	76	7605	Kab. Majene	86,1	75,3	40,3	26,9	61,7	53,4	2
6	76	7606	Kab. Mamuju Tengah	90,8	69,6	47,2	13,9	59,8	47,8	1

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	76		Prov. Sulawesi Barat	89,53	97,11	2,68	2,50	59,95	82,52	11,21	75,63	8,56	36,77	31,82	35,40	39,10	30,41	56,46	69,82	0,354
1	76	7601	Kab. Pasang Kayu	74,14	94,68	1,20	2,49	66,93	83,63	5,21	79,55	8,33	26,27	36,83	36,70	43,30	13,81	54,11	73,63	0,298
2	76	7602	Kab. Mamuju	92,60	99,64	2,77	2,47	63,90	81,46	7,15	71,29	8,81	51,20	26,71	38,70	43,10	26,04	61,92	73,57	0,425
3	76	7603	Kab. Mamasa	78,70	82,59	2,50	2,52	21,50	67,57	14,20	90,93	8,38	33,20	36,39	35,70	21,30	26,19	63,75	64,64	0,306
4	76	7604	Kab. Polewali Mandar	99,50	99,25	3,10	2,47	63,94	87,73	15,66	67,89	8,10	40,23	33,81	31,50	39,20	38,62	57,47	67,44	0,303
5	76	7605	Kab. Majene	89,05	98,19	4,19	2,55	71,20	84,52	13,64	75,79	9,74	22,57	23,67	37,50	38,20	49,51	47,42	71,57	0,335
6	76	7606	Kab. Mamuju Tengah	85,15	99,47	1,70	2,59	62,50	82,89	7,72	82,15	8,53	12,94	35,43	31,50	39,00	15,58	47,53	67,49	0,337

Provinsi Maluku

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	81		Prov. Maluku	67,5	72,2	42,8	48,8	69,0	58,8	2
1	81	8101	Kab. Maluku Tengah	61,7	76,3	42,8	62,8	70,5	61,7	3
2	81	8102	Kab. Maluku Tenggara	76,6	68,9	48,5	45,3	70,6	60,7	3
3	81	8103	Kab. Kepulauan Tanimbar	77,3	74,0	44,6	30,2	58,4	53,8	2
4	81	8104	Kab. Buru	62,2	71,8	55,3	41,2	71,4	59,2	2
5	81	8105	Kab. Seram Bagian Timur	69,4	63,1	31,3	31,6	65,9	49,1	1
6	81	8106	Kab. Seram Bagian Barat	65,6	59,2	35,8	33,6	69,1	50,3	2
7	81	8107	Kab. Kepulauan Aru	71,8	34,5	31,0	25,9	50,6	39,8	1
8	81	8108	Kab. Maluku Barat Daya	87,2	67,4	28,4	40,1	71,8	54,5	2
9	81	8109	Kab. Buru Selatan	73,9	54,8	40,2	26,9	69,4	49,7	1
10	81	8171	Kota Ambon	59,9	87,2	50,0	70,6	79,3	68,1	3
11	81	8172	Kota Tual	75,7	73,8	39,5	44,4	65,7	57,8	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	81		Prov. Maluku	61,75	91,72	6,11	2,42	66,13	80,51	16,05	57,72	10,44	33,22	34,34	28,40	22,50	47,91	56,25	68,80	0,282
1	81	8101	Kab. Maluku Tengah	46,46	95,11	6,50	2,22	68,50	81,60	17,67	55,20	10,02	37,95	37,33	27,00	15,70	58,09	57,48	66,85	0,255
2	81	8102	Kab. Maluku Tenggara	84,44	88,83	5,68	2,25	59,64	76,42	21,22	99,87	10,04	29,13	41,85	28,10	17,10	28,97	62,98	58,74	0,248
3	81	8103	Kab. Kepulauan Tanimbar	67,08	99,08	4,24	2,49	63,10	89,21	23,66	60,76	9,90	36,08	51,47	29,50	26,80	22,86	51,95	46,73	0,253
4	81	8104	Kab. Buru	54,83	78,86	4,66	2,22	66,19	74,60	16,08	99,12	9,32	47,57	36,85	25,40	26,30	36,31	58,34	67,46	0,253
5	81	8105	Kab. Seram Bagian Timur	55,90	86,56	3,24	2,63	57,19	76,11	21,03	47,48	9,28	25,77	32,64	35,00	22,50	25,44	50,33	58,88	0,201
6	81	8106	Kab. Seram Bagian Barat	46,14	94,00	4,52	2,86	57,39	73,18	22,31	51,77	9,94	26,57	40,96	33,80	26,30	35,41	60,95	58,60	0,252
7	81	8107	Kab. Kepulauan Aru	60,72	80,31	1,83	2,79	27,29	42,01	23,39	26,61	9,31	37,00	38,59	37,60	24,70	20,85	40,89	49,69	0,292
8	81	8108	Kab. Maluku Barat Daya	84,77	95,19	2,36	3,01	64,22	86,63	27,95	25,57	9,37	26,22	40,88	23,80	23,40	25,20	59,96	58,81	0,177
9	81	8109	Kab. Buru Selatan	57,67	85,28	1,35	2,79	54,14	65,84	14,91	61,63	8,77	28,93	34,13	39,70	24,70	22,83	66,41	48,03	0,225
10	81	8171	Kota Ambon	69,52	95,01	11,44	2,11	78,61	91,01	5,13	63,66	12,12	28,81	21,47	19,70	17,00	64,01	56,95	88,59	0,263
11	81	8172	Kota Tual	87,47	99,45	8,68	2,33	67,79	79,81	20,01	56,03	10,59	31,21	36,23	25,20	22,90	34,91	44,42	67,61	0,209

Provinsi Maluku Utara

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	82		Prov. Maluku Utara	77,0	74,0	52,5	34,2	63,9	58,0	2
1	82	8201	Kab. Halmahera Barat	76,9	77,2	48,8	28,3	64,2	55,5	2
2	82	8202	Kab. Halmahera Tengah	83,7	71,0	55,2	32,4	63,6	58,3	2
3	82	8203	Kab. Halmahera Utara	60,9	64,5	53,1	38,0	65,0	55,3	2
4	82	8204	Kab. Halmahera Selatan	91,9	64,1	57,4	20,9	69,0	54,7	2
5	82	8205	Kab. Kepulauan Sula	69,0	75,7	49,9	45,6	57,9	58,6	2
6	82	8206	Kab. Halmahera Timur	81,1	67,2	56,5	27,9	61,7	55,6	2
7	82	8207	Kab. Pulau Morotai	87,1	55,1	47,8	32,3	59,1	53,5	2
8	82	8208	Kab. Pulau Taliabu	58,5	58,1	51,8	25,6	64,6	49,3	1
9	82	8271	Kota Ternate	74,7	97,8	54,9	71,8	73,2	73,2	4
10	82	8272	Kota Tidore Kepulauan	78,3	90,5	55,9	57,5	68,4	68,9	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	82		Prov. Maluku Utara	69,58	94,98	4,03	2,43	68,05	82,32	6,32	79,60	9,70	29,28	32,09	23,20	37,50	42,22	54,98	63,66	0,316
1	82	8201	Kab. Halmahera Barat	68,67	93,16	3,53	2,14	69,37	80,66	8,75	76,31	8,98	33,59	29,52	22,10	37,10	28,85	56,71	49,57	0,225
2	82	8202	Kab. Halmahera Tengah	81,04	96,29	3,43	2,68	67,49	82,69	10,71	76,96	9,54	57,47	28,33	19,70	56,70	32,81	49,51	69,65	0,310
3	82	8203	Kab. Halmahera Utara	45,92	92,21	6,20	2,33	58,54	70,19	4,71	80,06	8,98	28,82	33,49	21,80	31,80	36,07	59,19	56,58	0,287
4	82	8204	Kab. Halmahera Selatan	94,12	95,01	2,00	2,62	57,65	77,43	5,63	91,32	8,90	28,66	40,65	32,30	47,50	31,48	63,33	54,08	0,245
5	82	8205	Kab. Kepulauan Sula	37,29	99,66	2,57	2,31	67,53	83,72	7,96	75,61	9,68	40,44	22,39	22,50	20,70	27,99	46,46	53,52	0,255
6	82	8206	Kab. Halmahera Timur	86,19	90,09	4,32	2,45	55,35	82,26	11,91	71,09	9,44	64,28	32,81	24,30	37,30	31,75	50,93	62,84	0,305
7	82	8207	Kab. Pulau Morotai	91,26	98,47	4,21	2,75	49,91	70,06	5,11	80,06	8,33	19,32	31,34	17,70	51,30	29,32	51,33	51,14	0,266
8	82	8208	Kab. Pulau Taliabu	22,75	86,43	2,86	2,28	47,89	67,09	7,13	81,24	8,64	41,86	25,98	24,90	36,10	26,31	48,02	58,92	0,200
9	82	8271	Kota Ternate	73,93	98,03	6,42	2,09	92,06	98,53	3,14	79,29	11,72	11,95	32,34	16,60	21,80	71,51	51,59	88,48	0,310
10	82	8272	Kota Tidore Kepulauan	67,97	96,62	3,49	2,08	83,83	92,16	6,56	68,22	10,35	49,75	28,68	16,60	19,70	39,08	53,14	68,82	0,261

Provinsi Papua

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	91		Prov. Papua	68,9	67,2	40,6	29,6	64,1	51,3	2
1	91	9103	Kab. Jayapura	65,6	59,5	41,6	32,8	62,9	50,7	2
2	91	9105	Kab. Kepulauan Yapen	63,3	42,2	22,6	14,2	55,7	34,3	1
3	91	9106	Kab. Biak Numfor	59,6	71,3	39,8	33,9	65,6	51,9	2
4	91	9110	Kab. Sarmi	83,6	76,7	56,8	17,7	50,7	50,4	2
5	91	9111	Kab. Keerom	78,0	62,9	60,4	21,5	63,5	52,6	2
6	91	9115	Kab. Waropen	73,3	62,1	30,0	29,5	72,0	49,2	1
7	91	9119	Kab. Supiori	68,1	40,2	33,9	12,5	47,9	35,4	1
8	91	9120	Kab. Mamberamo Raya	79,0	27,4	41,0	12,0	31,2	31,9	1
9	91	9171	Kota Jayapura	73,6	81,3	39,6	35,1	75,5	57,5	2

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPt	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Pemukim PPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	91		Prov. Papua	81,04	78,65	6,48	2,68	62,15	80,57	17,26	52,80	10,70	31,09	34,63	24,70	47,00	35,63	56,45	68,38	0,362
1	91	9103	Kab. Jayapura	75,68	76,00	6,39	2,75	57,88	70,53	11,60	30,74	10,69	29,22	39,61	22,50	52,50	38,39	51,68	72,19	0,362
2	91	9105	Kab. Kepulauan Yapen	74,81	64,28	5,00	3,19	46,57	57,14	25,69	35,20	9,66	9,58	26,32	33,50	53,50	20,28	54,83	50,66	0,355
3	91	9106	Kab. Biak Numfor	84,21	56,86	6,86	3,13	67,89	93,89	23,46	51,02	10,45	40,83	38,56	20,60	36,90	37,14	67,13	59,00	0,374
4	91	9110	Kab. Sarmi	83,27	93,83	3,41	2,47	68,56	88,45	14,05	48,46	9,55	78,98	42,64	31,60	47,40	23,93	47,53	59,64	0,430
5	91	9111	Kab. Keerom	87,18	74,92	2,91	2,60	50,55	81,99	15,84	71,01	8,51	56,66	62,10	24,40	49,60	19,35	67,15	59,68	0,414
6	91	9115	Kab. Waropen	69,17	82,94	3,21	3,16	64,92	78,31	29,85	33,31	8,98	32,63	37,04	22,30	31,20	18,87	71,19	63,05	0,340
7	91	9119	Kab. Supiori	90,68	63,28	5,60	3,92	38,67	79,06	37,72	52,58	8,98	27,78	39,52	37,50	74,80	21,43	56,34	34,86	0,382
8	91	9120	Kab. Mamberamo Raya	90,23	64,80	1,05	3,45	14,28	43,19	30,29	95,08	8,27	26,84	36,99	33,80	41,90	9,63	35,33	10,64	0,394
9	91	9171	Kota Jayapura	82,13	97,73	8,29	2,25	73,02	88,12	10,72	39,57	12,16	20,54	27,19	24,10	43,10	45,43	55,29	86,27	0,293

Provinsi Papua Barat

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	92		Prov. Papua Barat	72,4	64,2	41,0	32,6	64,3	52,5	2
1	92	9202	Kab. Manokwari	72,0	72,6	54,8	47,8	65,3	61,7	3
2	92	9203	Kab. Fakfak	70,8	66,9	36,1	57,5	65,0	57,7	2
3	92	9206	Kab. Teluk Bintuni	80,6	68,7	43,1	33,2	60,8	54,5	2
4	92	9207	Kab. Teluk Wondama	70,5	32,0	38,5	18,3	60,3	39,5	1
5	92	9208	Kab. Kaimana	58,0	65,6	41,4	46,0	58,9	53,2	2
6	92	9211	Kab. Manokwari Selatan	75,5	77,6	37,3	33,0	71,1	55,2	2
7	92	9212	Kab. Pegunungan Arfak	74,2	44,2	45,7	10,0	73,0	40,5	1

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	92		Prov. Papua Barat	72,41	82,53	4,13	2,70	58,22	79,00	21,66	48,90	9,87	43,83	41,14	24,60	30,60	27,52	59,80	67,97	0,389
1	92	9202	Kab. Manokwari	67,41	92,59	5,34	2,23	66,94	75,77	18,45	72,93	10,06	56,93	44,30	23,50	21,50	35,71	58,51	70,96	0,382
2	92	9203	Kab. Fakfak	76,93	85,75	6,28	2,50	62,51	75,07	20,86	60,01	10,74	19,91	35,21	21,00	18,40	43,70	49,00	76,90	0,336
3	92	9206	Kab. Teluk Bintuni	82,41	86,57	3,16	2,38	62,68	75,77	26,99	66,05	10,06	50,26	32,41	22,30	28,00	19,26	52,88	71,36	0,402
4	92	9207	Kab. Teluk Wondama	79,20	62,95	2,39	3,80	14,60	61,17	28,47	31,30	9,10	45,64	49,30	29,20	34,80	9,45	64,84	55,88	0,416
5	92	9208	Kab. Kaimana	64,24	62,19	4,96	2,76	60,77	80,64	14,41	34,67	9,80	33,39	43,57	20,20	16,80	10,86	53,94	67,76	0,417
6	92	9211	Kab. Manokwari Selatan	82,11	72,23	2,54	2,45	66,75	91,74	26,83	45,82	9,13	43,85	38,81	26,40	28,70	27,13	74,15	62,84	0,383
7	92	9212	Kab. Pegunungan Arfak	68,52	71,53	0,31	2,27	28,85	49,90	31,76	45,92	8,07	100,00	40,80	39,30	52,70	13,67	89,75	43,39	0,268

Provinsi Papua Selatan

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	93		Prov. Papua Selatan	76,4	45,6	34,2	23,3	57,4	43,7	1
1	93	9301	Kab. Merauke	79,6	65,6	44,6	34,9	72,8	56,8	2
2	93	9302	Kab. Boven Digoel	74,1	48,7	37,0	15,1	65,1	42,1	1
3	93	9303	Kab. Mappi	75,8	22,5	28,8	15,3	34,2	30,3	1
4	93	9304	Kab. Asmat	73,2	19,0	22,1	16,7	52,4	30,6	1

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Mandiri Lansia	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	93		Prov. Papua Selatan	90,11	74,48	4,05	2,68	38,34	60,85	17,44	50,43	8,99	23,19	34,09	25,70	47,00	25,07	59,70	54,62	0,404
1	93	9301	Kab. Merauke	87,39	89,67	5,07	2,64	56,63	82,05	10,19	72,48	9,99	18,11	31,75	18,50	50,50	35,81	61,17	74,82	0,312
2	93	9302	Kab. Boven Digoel	86,43	68,69	3,26	3,38	48,39	73,45	19,24	45,28	9,70	31,59	38,35	30,20	64,80	16,71	61,59	62,71	0,355
3	93	9303	Kab. Mappi	93,90	69,86	4,10	3,71	11,34	39,08	25,70	42,42	8,01	30,62	34,73	29,90	70,90	15,48	45,54	26,19	0,446
4	93	9304	Kab. Asmat	95,03	52,36	2,05	3,93	11,89	20,32	24,50	9,92	6,70	20,23	45,90	28,30	75,20	13,11	70,14	25,60	0,391

Provinsi Papua Tengah

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	94		Prov. Papua Tengah	70,0	35,4	39,2	13,1	47,0	35,9	1
1	94	9401	Kab. Nabire	66,1	66,8	54,2	30,0	68,6	54,7	2
2	94	9402	Kab. Puncak Jaya	79,2	66,6	19,5	10,2	53,2	35,4	1
3	94	9403	Kab. Paniai	57,3	34,0	59,3	15,6	47,5	38,6	1
4	94	9404	Kab. Mimika	66,6	76,8	40,5	38,7	61,8	54,8	2
5	94	9405	Kab. Puncak	62,7	34,8	37,7	10,0	67,1	35,4	1
6	94	9406	Kab. Dogiyai	41,5	27,2	37,6	10,0	60,2	30,3	1
7	94	9407	Kab. Intan Jaya	52,2	32,4	42,2	10,0	48,1	32,2	1
8	94	9408	Kab. Deiyai	55,1	27,0	28,0	14,7	43,2	30,5	1

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Keseimbangan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfied	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	94		Prov. Papua Tengah	67,34	74,65	2,75	2,68	26,79	41,44	29,76	48,30	6,17	49,64	51,72	32,50	47,00	15,45	59,32	28,62	0,381
1	94	9401	Kab. Nabire	58,65	81,06	4,10	3,82	75,03	93,23	24,00	63,20	10,55	83,02	40,79	21,70	36,60	30,58	57,71	74,74	0,346
2	94	9402	Kab. Puncak Jaya	86,34	66,12	0,43	2,40	6,50	9,64	35,94	0,51	5,35	1,98	44,86	36,30	45,80	16,90	63,37	21,18	0,311
3	94	9403	Kab. Paniai	71,67	37,85	1,92	2,62	1,15	31,71	37,07	76,89	3,65	96,92	71,08	29,60	50,00	5,73	48,63	3,33	0,258
4	94	9404	Kab. Mimika	54,41	99,69	6,70	2,35	68,05	86,27	14,18	48,65	10,97	23,68	34,81	28,40	22,10	27,34	47,38	70,41	0,324
5	94	9405	Kab. Puncak	94,91	27,25	2,75	2,74	26,79	41,44	37,49	13,80	2,11	54,71	61,75	42,50	52,50	1,90	83,77	0,18	0,247
6	94	9406	Kab. Dogiyai	46,95	32,25	3,27	3,21	12,02	17,89	30,03	13,88	4,50	50,96	64,39	55,80	61,30	16,32	92,75	3,19	0,362
7	94	9407	Kab. Intan Jaya	67,88	26,88	2,40	2,76	5,87	23,54	41,42	8,45	3,19	62,70	70,08	48,40	52,70	8,94	55,03	4,52	0,312
8	94	9408	Kab. Deiyai	63,76	38,98	1,66	3,23	6,35	26,48	39,01	4,40	2,90	5,87	71,02	30,60	61,60	1,63	41,31	2,35	0,255

Provinsi Papua Pegunungan

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	95		Prov. Papua Pegunungan	71,1	33,3	52,5	10,0	61,5	37,7	1
1	95	9501	Kab. Jayawijaya	65,8	37,7	48,5	14,0	62,3	40,2	1
2	95	9502	Kab. Pegunungan Bintang	65,4	29,4	37,5	10,0	64,2	34,1	1
3	95	9503	Kab. Yahukimo	70,2	35,5	63,7	10,0	67,3	40,3	1
4	95	9504	Kab. Tolikara	74,4	32,8	40,9	10,0	70,0	37,0	1
5	95	9505	Kab. Mamberamo Tengah	79,0	25,5	50,1	10,0	66,1	36,7	1
6	95	9506	Kab. Yalimo	81,3	32,8	46,9	10,9	63,6	38,7	1
7	95	9507	Kab. Lanny Jaya	71,4	34,0	58,5	10,6	67,2	39,9	1
8	95	9508	Kab. Nduga	71,2	35,3	32,9	10,1	64,8	35,2	1

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPt	TFR	Hunian Layak	Sanitasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15 + Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	TPAK Perempuan	Akses Informasi	Rasio Gini
	95		Prov. Papua Pegunungan	97,28	41,84	1,32	2,68	4,44	12,61	32,97	47,00	5,10	81,30	67,74	40,00	47,00	12,23	85,71	7,64	0,340
1	95	9501	Kab. Jayawijaya	87,58	46,40	2,74	2,30	14,13	33,50	32,28	41,42	6,10	66,16	80,88	41,30	43,80	24,24	83,77	24,53	0,327
2	95	9502	Kab. Pegunungan Bintang	99,88	27,26	2,46	3,02	8,48	12,38	28,95	9,37	4,57	70,23	48,83	41,40	57,70	15,16	85,10	18,09	0,295
3	95	9503	Kab. Yahukimo	99,99	40,85	2,04	2,49	1,96	7,36	33,82	100,00	4,55	88,05	66,18	37,70	47,60	3,59	80,21	2,88	0,244
4	95	9504	Kab. Tolikara	99,76	42,63	0,50	2,73	0,55	2,08	31,22	23,85	3,27	100,00	50,69	46,40	78,10	7,03	85,85	2,97	0,199
5	95	9505	Kab. Mamberamo Tengah	99,78	53,20	0,54	3,36	0,25	4,23	35,27	36,62	5,09	100,00	76,34	42,00	64,10	15,54	88,97	1,79	0,265
6	95	9506	Kab. Yalimo	99,96	57,96	0,43	2,73	6,14	31,40	30,02	20,65	7,51	95,64	61,68	35,10	52,20	10,99	84,36	5,28	0,306
7	95	9507	Kab. Lanny Jaya	98,76	36,70	0,25	2,62	0,31	3,07	34,12	73,44	5,63	94,69	80,27	35,40	50,00	14,79	93,41	1,65	0,246
8	95	9508	Kab. Nduga	99,52	35,75	0,07	2,51	0,75	5,09	36,28	21,90	4,61	48,12	52,56	36,00	47,90	9,32	95,08	0,07	0,285

Provinsi Papua Barat Daya

No.	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Dimensi					IPBK	Status PBK
				Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan		
	96		Prov. Papua Barat Daya	70,7	63,7	41,3	32,3	65,9	52,4	2
1	96	9601	Kab. Sorong	74,1	75,0	43,3	36,8	60,9	55,8	2
2	96	9602	Kab. Sorong Selatan	79,0	31,0	45,4	19,0	47,7	39,9	1
3	96	9603	Kab. Raja Ampat	76,8	42,5	31,2	16,3	52,1	38,7	1
4	96	9604	Kab. Tambrau	71,6	48,4	50,3	15,9	67,5	45,1	1
5	96	9605	Kab. Maybrat	70,3	39,7	46,0	20,6	77,4	46,0	1
6	96	9671	Kota Sorong	66,8	76,8	38,0	56,6	71,8	60,2	3

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2025

No	ID1	ID2	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Indikator																
				Partisipasi			Keberlanjutan			Inklusivitas					Holistik Integratif			Kesetaraan		
				JKN	Akta Lahir Balita	TPT	TFR	Hunian Layak	Santiasi Layak	Tingkat Kemiskinan	Demand Satisfed	RLS 15+ Tahun	Penyandang Disabilitas	Lansia Mandiri	Stunting	ASFR 15-19 Tahun	APK PT 19-23 Tahun	Perempuan TPAK	Akses Informasi	Rasio Gini
	96		Prov. Papua Barat Daya	81,37	82,47	6,48	2,70	58,25	77,84	18,13	50,15	10,48	43,06	31,17	30,50	30,60	36,71	54,72	72,61	0,346
1	96	9601	Kab. Sorong	82,51	77,11	4,15	2,43	66,28	86,48	25,71	72,88	9,61	39,79	39,41	25,10	31,40	38,23	53,71	67,40	0,379
2	96	9602	Kab. Sorong Selatan	95,09	69,39	2,81	3,14	25,05	43,19	17,83	43,98	8,51	48,17	50,16	31,30	43,30	26,11	59,46	40,79	0,460
3	96	9603	Kab. Raja Ampat	82,07	84,75	4,39	3,63	49,32	65,37	15,83	29,41	9,09	16,45	40,14	37,40	31,30	13,91	45,15	57,10	0,363
4	96	9604	Kab. Tambrauw	79,24	60,88	1,52	3,81	46,17	85,56	29,88	59,50	9,05	63,50	49,33	37,90	44,60	27,99	71,13	55,18	0,355
5	96	9605	Kab. Maybrat	95,00	53,66	3,56	3,38	36,13	67,29	29,18	39,58	10,06	58,23	49,28	30,70	33,60	20,88	78,51	64,94	0,338
6	96	9671	Kota Sorong	76,46	95,75	9,85	2,17	66,43	83,69	13,67	31,27	11,45	42,49	17,31	29,30	12,70	43,42	50,71	83,84	0,291

Lampiran 4

Catatan Teknis: Langkah-langkah Penghitungan IPBK 2025

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penghitungan IPBK tahun 2025 dengan mengambil contoh Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

1. Menyediakan Data Indikator

Data 17 indikator IPBK Kabupaten Badung dikumpulkan dari data sekunder, baik publikasi maupun hasil olahan, yang bersumber dari Susenas 2024 Maret KOR, Sakernas 2024 Agustus, Survei Status Gizi Indonesia 2024, Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAC) semester II 2024. Tabel di bawah ini memuat data 17 indikator IPBK Kabupaten Badung tersebut.

Dimensi	Indikator	Data
1. Dimensi Partisipasi	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	94,08
	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	99,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,83
2. Dimensi Keberlanjutan	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,45
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	95,28
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	99,30
3. Dimensi Inklusivitas	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	2,23
	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	79,91
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	11,32
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	57,18
	Persentase Lansia Mandiri	30,62
4. Dimensi Holistik	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	7,20
	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	5,60

Dimensi	Indikator	Data
Integratif	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	48,70
5. Dimensi Kesenjangan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	68,07
	Persentase Akses Informasi	94,41
	Rasio Gini	0,281

Keterangan:

1. Data indikator dalam bilangan desimal 2 angka di belakang koma kecuali Rasio Gini (3 angka di belakang koma);
2. Seluruh indikator menggunakan satuan % kecuali TFR, ASFR 15-19 Tahun, dan Rasio Gini.

2. Melakukan Standardisasi Nilai Indikator

Setelah data indikator IPBK Kabupaten Badung tersedia, dilakukan standardisasi nilai indikator dengan menggunakan nilai minimal dan nilai maksimal yang telah dibakukan pada setiap indikator. Rumus standardisasi nilai indikator yang digunakan disesuaikan dengan arah indikator (positif atau negatif):

$$X_i^{std} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \text{ jika arahnya positif}$$

dan

$$X_i^{std} = \frac{X_{max} - X_i}{X_{max} - X_{min}} \text{ jika arahnya negatif}$$

Selanjutnya, untuk meningkatkan penulisan dalam rumus standardisasi nilai indikator, dimensi dan indikator ditulis dengan menggunakan kode dan simbol. Nilai minimal dan nilai maksimal yang dibakukan, kode dan simbol indikator, serta arah pada setiap indikator adalah sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Dimensi	Kode	Indikator					
		Nama		Simbol/ Kode	Arah	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
1. Dimensi Partisipasi	D1	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	X_{1a}^{std}	(+)	20	100
		2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	X_{1b}^{std}	(+)	25	100
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	X_{1c}^{std}	(-)	0,5	15
2. Dimensi Keberlanjutan	D2	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	X_{2a}^{std}	(-)	2,1	5
		2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	X_{2b}^{std}	(+)	30	95
		3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar atau Layak	X_{2c}^{std}	(+)	30	100
3. Dimensi Inklusivitas	D3	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	X_{3a}^{std}	(-)	1	25
		2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	X_{3b}^{std}	(+)	10	97,5
		3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	X_{3c}^{std}	(+)	5	16
		4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	X_{3d}^{std}	(+)	10	75
		5	Persentase Lansia Mandiri	X_{3e}^{std}	(+)	15	67
4. Dimensi Holistik Integratif	D4	1	Prevalensi Tengkes/ <i>Stunting</i> pada Balita	X_{4a}^{std}	(-)	1	40
		2	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	X_{4b}^{std}	(-)	10	40
		3	Angka Partispasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	X_{4c}^{std}	(+)	10	75
5. Dimensi Kesenjangan	D5	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	X_{5a}^{std}	(+)	25	80
		2	Persentase Akses Informasi	X_{5b}^{std}	(+)	20	95
		3	Rasio Gini	X_{5c}^{std}	(-)	0,20	0,75

Kemudian, dilakukan standardisasi nilai pada seluruh 17 indikator IPBK tahun 2025 Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

- b. Standardisasi nilai indikator pada Dimensi Partisipasi

$$X_{1a}^{std} = \frac{94,08 - 20}{100 - 20} * 100 = 92,61$$

$$X_{1b}^{std} = \frac{99,94 - 25}{100 - 25} * 100 = 99,92$$

$$X_{1c}^{std} = \frac{15 - 1,83}{15 - 0,5} * 100 = 90,80$$

- b. Standardisasi nilai indikator pada Dimensi Keberlanjutan

$$X_{2a}^{std} = \frac{5 - 1,45}{5 - 2,1} * 100 = 100,00$$

$$X_{2b}^{std} = \frac{95,28 - 1}{95 - 30} * 100 = 100,00$$

$$X_{2c}^{std} = \frac{98,19 - 30}{100 - 30} * 100 = 99,00$$

- c. Standardisasi nilai indikator pada Dimensi Inklusivitas

$$X_{3a}^{std} = \frac{25 - 2,23}{25 - 1} * 100 = 94,88$$

$$X_{3b}^{std} = \frac{79,91 - 10}{97,5 - 10} * 100 = 79,90$$

$$X_{3c}^{std} = \frac{11,32 - 5}{16 - 5} * 100 = 57,41$$

$$X_{3d}^{std} = \frac{57,18 - 10}{75 - 10} * 100 = 72,59$$

$$X_{3e}^{std} = \frac{30,62 - 15}{67 - 15} * 100 = 30,05$$

- d. Standardisasi nilai indikator pada Dimensi Holistik Integratif

$$X_{4a}^{std} = \frac{40 - 7,20}{40 - 1} * 100 = 84,10$$

$$X_{4b}^{std} = \frac{40 - 5,60}{40 - 10} * 100 = 100,00$$

$$X_{4c}^{std} = \frac{48,70 - 10}{75 - 10} * 100 = 59,55$$

e. Standardisasi nilai indikator pada Dimensi Kesenjangan

$$X_{5a}^{std} = \frac{68,07 - 25}{80 - 25} * 100 = 78,31$$

$$X_{5b}^{std} = \frac{94,41 - 20}{95 - 20} * 100 = 99,22$$

$$X_{5c}^{std} = \frac{0,75 - 0,281}{0,75 - 0,20} * 100 = 85,31$$

Hasil standardisasi nilai 17 indikator IPBK Kabupaten Badung tahun 2025 dapat dihipunkan dalam tabel di bawah ini.

Dimensi	Indikator		Data
1. Dimensi Partisipasi	1	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92,61
	2	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	99,92
	3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	90,80
2. Dimensi Keberlanjutan	1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	100,00
	2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	100,00
	3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak	99,00
3. Dimensi Inklusivitas	1	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	94,88
	2	Proporsi Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	79,90
	3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk 15 Tahun ke Atas	57,41
	4	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja	72,59
	5	Persentase Lansia Mandiri	30,05
4. Dimensi Holistik Integratif	1	Prevalensi Tengkes/Stunting pada Balita	84,10
	2	<i>Age-Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15-19 Tahun	100,00
	3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	59,55
5. Dimensi Kesenjangan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	78,31
	2	Persentase Akses Informasi	99,22
	3	Rasio Gini	85,31

Keterangan:

Hasil standardisasi nilai indikator menggunakan bilangan desimal dua angka di belakang koma.

3. Menghitung Indeks Komposit Setiap Dimensi

Setelah nilai indikator distandardisasi, tahap selanjutnya adalah melakukan penghitungan nilai indeks komposit dimensi dengan menggunakan rata-rata aritmetika.

a. Menghitung Indeks Partisipasi

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Partisipasi } (D_1) = X_{1a}^{std} + X_{1b}^{std} + X_{1c}^{std} / 3$$

sehingga didapatkan nilai Indeks Partisipasi

$$\text{Partisipasi } (D_1) = (92,61 + 99,92 + 90,80/3) = 94,4$$

b. Menghitung Indeks Keberlanjutan

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Keberlanjutan } (D_2) = X_{2a}^{std} + X_{2b}^{std} + X_{2c}^{std} / 3$$

sehingga didapatkan nilai Indeks Keberlanjutan

$$\text{Keberlanjutan } (D_2) = (100 + 100 + 99,00/3) = 99,7$$

c. Menghitung Indeks Inklusivitas

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Inklusivitas } (D_3) = X_{3a}^{std} + X_{3b}^{std} + X_{3c}^{std} + X_{3d}^{std} + X_{3e}^{std} / 5$$

sehingga didapatkan nilai Indeks Inklusivitas

$$\text{Inklusivitas } (D_3) = (94,88 + 79,90 + 57,41 + 72,59 + 30,05) = 67,0$$

d. Menghitung Indeks Holistik Integratif

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Holistik Integratif } (D_4) = X_{4a}^{std} + X_{4b}^{std} + X_{4c}^{std} / 3$$

sehingga didapatkan nilai Indeks Holistik Integratif

$$\text{Holistik Integratif } (D_4) = (84,10 + 100 + 59,55/3) = 81,2$$

e. Menghitung Indeks Kesetaraan

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kesetaraan } (D_5) = X_{5a}^{std} + X_{5b}^{std} + X_{5c}^{std} / 3$$

sehingga didapatkan nilai Indeks Kesetaraan

$$\text{Kesetaraan } (D_5) = (78,31 + 99,22 + 85,31/3) = 87,6$$

Hasil penghitungan nilai indeks kelima dimensi IPBK Kabupaten Badung di atas dapat dituliskan dalam tabel di bawah ini.

ID1	ID2	Kabupaten/ Kota	Indeks Dimensi				
			Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan
51	5103	Kabupaten Badung	94,4	99,7	67,0	81,2	87,6

4. Menghitung Indeks Komposit IPBK

Nilai IPBK merupakan komposit dari nilai indeks kelima dimensi penyusun IPBK yang telah dihitung pada tahap sebelumnya. Karena itu, setelah nilai indeks masing – masing dari kelima dimensi pembentuk IPBK diketahui, dilakukan penghitungan indeks komposit IPBK dengan menggunakan rata-rata geometrik.

Rumus yang digunakan adalah

$$IPBK = \sqrt[5]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5}$$

atau rumus menggunakan Microsoft Excel

$$IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5) ^ {(\frac{1}{5})}$$

sehingga didapatkan nilai IPBK

$$IPBK = (94,4 * 99,7 * 67,0 * 81,2 * 87,6) ^ {(\frac{1}{5})} = 85,2$$

Dengan demikian, hasil penghitungan nilai indeks komposit IPBK Kabupaten Badung tahun 2025 adalah 85,2. Nilai IPBK Kabupaten Badung ini termasuk ke dalam rentang nilai IPBK >80 sehingga mendapatkan status PBK Sangat Tinggi (petunjuk angka 5, petunjuk warna Biru).

Lampiran 5

Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Metadata Peraturan		
Tipe Dokumen	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Judul	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 242/KEP/D2/2025 tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Jenis	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Nomor	:	242/KEP/D2/2025
Tahun	:	2025
Subjek	:	PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
Singkatan Jenis	:	KEPMEN
Tanggal Penetapan	:	27 Oktober 2025
Tanggal Pengundangan	:	10 November 2025
T.E.U Badan	:	Indonesia, BKKBN
Sumber	:	

Tempat Terbit	:	Jakarta
Bidang Hukum	:	Hukum Administrasi
Bahasa	:	Indonesia
Lokasi	:	BIHUKOR
Urusan Pemerintahan	:	
Penandatanganan	:	Bonivasius Prasetya Ichtiarto
Pemrakarsa	:	Ditjakduk
Peraturan Terkait	:	Dokumen Terkait
Tautan Unduh	:	https://jdih.kemendukbangga.go.id/detail-peraturan/970
Status	:	Berlaku

Abstrak

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4), serta Pasal 13 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, diperlukan indikator sebagai komponen penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, serta tata cara penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan penentuan status Pembangunan Berwawasan Kependudukan sehingga perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
- Dasar hukum Kepmen ini adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025.

- Kepmen ini menetapkan mengenai penyusunan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmen ini. Penyusunan IPBK dimaksud terdiri atas 1) Komponen Penyusun IPBK; 2) Tata Cara Penyusunan IPBK; dan 3) Klasifikasi Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Hasil penghitungan IPBK dan Status PBK dituangkan dalam Berita Acara. Hasil penghitungan IPBK dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Lampiran 6

Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025

Metadata Peraturan		
Tipe Dokumen	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Judul	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 267/KEP/D2/2025 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025
Jenis	:	Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
Nomor	:	267/KEP/D2/2025
Tahun	:	2025
Subjek	:	PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN PENENTUAN STATUS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025
Singkatan Jenis	:	KEPMEN
Tanggal Penetapan	:	28 November 2025

Tanggal Pengundangan	:	28 November 2025
T.E.U Badan	:	Indonesia, KEMENDUKBANGGA/BKKBN
Sumber	:	
Tempat Terbit	:	Jakarta
Bidang Hukum	:	Hukum Administrasi
Bahasa	:	Indonesia
Lokasi	:	BIHUKOR
Urusan Pemerintahan	:	
Penandatanganan	:	Wihaji
Pemrakarsa	:	Ditjakduk
Peraturan Terkait	:	Dokumen Terkait
Tautan Unduh	:	https://jdih.kemendukbangga.go.id/detail-peraturan/979
Status	:	Berlaku

Abstrak

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Berita Acara Nomor 1331/PD.01/D2/2025 tanggal 29 Oktober 2025, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2025.
- Dasar hukum Kepmen ini adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025.

- Kepmen ini menetapkan mengenai hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan penentuan Status Pembangunan Berwawasan Kependudukan (status PBK) tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepmen ini. IPBK tahun 2025 dimaksud terdiri atas IPBK nasional, IPBK 38 provinsi, dan IPBK 514 kabupaten/kota.



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

2025